



**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40.3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) PERUBAHAN
TAHUN 2013**



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40.3 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 29);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 78);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
3. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II

Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD

Bab IV : Penutup

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013.

- (3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013.
- (4) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2013 dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2013 maka digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2013.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juli 2013

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013
NOMOR 40.3

DAFTAR ISI

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor	Tahun 2013	
Daftar Isi.....		i
Bab I	Pendahuluan	
	1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	1
	1.2. Dasar Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	6
Bab II	Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II.....	7
	2.1. Analisis Hasil RKPD pada Misi 1 RPJMD	7
	2.2. Analisis Hasil RKPD pada Misi 2 RPJMD	23
	2.3. Analisis Hasil RKPD pada Misi 3 RPJMD	32
	2.4. Analisis Hasil RKPD pada Misi 4 RPJMD	51
Bab III	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD	
	3.1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal RKPD 2013.....	60
	3.2. Perubahan Program dan kegiatan RKPD 2013.....	62
Bab IV	Penutup	173

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Aspek penting yang perlu mendapat perhatian kita semua dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut maka pada tanggal 31 Maret 2010 telah dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010 dan Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Di dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama 3 Menteri tersebut dinyatakan bahwa bagi provinsi, kabupaten dan kota yang telah menetapkan RPJMD sebelum ditetapkannya RPJMN 2010-2014, penyelarasan RPJMD masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan RKP mulai tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMN 2010-2014.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD DIY Tahun Anggaran 2013, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2013.

Perubahan RKPD Tahun 2013 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2013 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2013 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2013 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2013.
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2013.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD DIY Tahun 2014 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);

15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS Tahun 2013.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II.

Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD.

Bab IV : Penutup.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Analisis Hasil RKPD pada Misi 1 RPJMD “Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan”

Pada RPJMD tahun 2012-2017 disebutkan bahwa misi 1 adalah Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mencapai misi 1 tersebut, maka terdapat urusan-urusan yang mendukung pelaksanaannya. Urusan yang termasuk pada misi 1 ini adalah urusan pendidikan, urusan perpustakaan, urusan kesehatan, urusan keluarga berencana, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan ketenagakerjaan, dan urusan kebudayaan. Di bawah ini akan dijelaskan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing urusan yang diampu oleh SKPD sampai triwulan II yaitu bulan Juni 2013.

1. Urusan Pendidikan

Salah satu hal penting dalam aspek kesejahteraan untuk fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah bidang pendidikan. Seperti hasil penelitian Ginandjar Kartasasmita dalam buku, *“Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan (1996)*, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurangnya empat penyebab. *Pertama*, rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja untuk saat ini serendah-rendahnya diperlukan ijazah SMA, sedangkan kebanyakan rumah tangga miskin adalah lulusan SD atau SMP.

Kedua, rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa. *Ketiga*, terbatasnya lapangan kerja. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan. *Keempat*, kondisi keterisolasian, banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit

atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Maka tidak salah kemudian ketika urusan pendidikan merupakan bagian dari misi I dari RPJMD. Pendidikan merupakan modal dasar untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas sebagai pelaku pembangunan. Selain itu, pentingnya pembangunan pendidikan juga melegitimasi ciri khas DIY sebagai kota pendidikan. Hal ini terkait dengan visi pembangunan DIY sesuai dengan RPJPD 2005-2025 (Perda No. 2 Tahun 2009) adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan di bidang pendidikan maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Berdasar perda tersebut visi pembangunan pendidikan DIY adalah “DIY pada tahun 2025 menjadi Pusat Pendidikan Berbasis Budaya Terkemuka di Asia Tenggara” dengan misi: a) Mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua nondiskriminasi, b) Mewujudkan pendidikan karakter berbasis budaya, c) Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan secara nasional, d) Mewujudkan sinergitas pembangunan pendidikan dengan pembangunan daerah dan nasional, e) Mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik.

Hingga pelaksanaan kegiatan hingga triwulan kedua, capaian untuk urusan pendidikan masih relatif rendah. Dari sepuluh program wajib dalam urusan pendidikan, sembilan program memiliki kegiatan yang realisasinya nol (0). Hanya terdapat satu program yang kegiatan di dalamnya telah ada realisasinya, meskipun capaiannya kurang dari 25 persen, yaitu Program Peningkatan Pelayanan pada BLUD. Program Peningkatan Pelayanan pada BLUD diampu oleh Balai Latihan Pendidikan.

Program PAUD bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan pendidikan bentuk lain yang sederajat. Peningkatan akses tersebut dimaksudkan agar kelompok sasaran program dapat memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai tahap perkembangan pada usia mereka dan merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Di mana

kelompok sasaran program ini adalah semua anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan.

Kemudian untuk pelaksanaan pengadaan perlengkapan gedung kantor permasalahan yang dihadapi adalah harga barang yang digunakan sebagai patokan dalam DPA lebih rendah daripada harga pasar. Oleh karenanya sedang dilaksanakan revisi anggaran yang dilakukan bersama dengan perubahan APBD 2013.

Realisasi beberapa pelaksanaan program/kegiatan belum mencapai 100% karena memang tenggang waktu kontrak pelaksanaan hingga akhir tahun (31 Desember 2013). Diantaranya adalah program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

2. Urusan Perpustakaan

UU Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan menjelaskan fungsi strategis perpustakaan. UU tersebut mengatakan bahwa perpustakaan berperan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari budaya di masyarakat. Dalam konteks ini Pemerintah DIY berusaha mendukung fungsi strategis perpustakaan dengan menambah jumlah koleksi dan lebih mendekatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah DIY juga memperbaiki kinerja pelayanan administrative dengan berhasil memperoleh ISO 9001:2008.

Ada sejumlah program dan kegiatan inovatif yang dilakukan Pemerintah DIY dalam upaya meningkatkan manfaat perpustakaan bagi masyarakat. Pemerintah DIY sedang membangun perpustakaan terpadu di JEC yang diperkirakan selesai pada tahun 2013. Selain itu, penataan koleksi dilakukan berdasarkan tema tertentu, seperti perpustakaan yang berisi mengenai segala sesuatu mengenai Jepang ditata pada *Kyoto Corner*. Selain itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, Pemerintah DIY sudah menjalin kerjasama dengan perpustakaan berbagai universitas di Yogyakarta. Terakhir, Pemerintah DIY juga berupaya untuk mengadakan pustaka keliling yang dengannya diharapkan dapat lebih mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat.

Berdasarkan Indikator RPJMD 2012-2017, capaian Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan diukur dengan melihat persentase peningkatan jumlah perpustakaan desa. Dalam Indikator RPJMD 2012-2017, target capaian Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan adalah 60. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan salah satu kegiatan yang realisasinya telah mencapai target adalah kegiatan Kerjasama Perpustakaan Dengan Lembaga Pemerintah / Non Pemerintah. Untuk pelaksanaan kegiatan Layanan Perpustakaan, dari 7 indikator 3 indikator telah mencapai target yang telah ditentukan sementara 4 indikator lainnya telah ada realisasinya namun belum memenuhi target.

Dari sisi penyerapan anggaran, permasalahan lain yang terjadi adalah penyerapan dana yang rendah yang salah satunya adalah SPPD yang tidak terserap habis karena ada kebijakan at cost. Oleh karenanya sisa dana yang melebihi anggaran tersebut kemudian dikembalikan kembali ke kas daerah. Hal ini juga terjadi sehingga rendahnya penyerapan anggaran dalam kegiatan pengembangan center of excellent budaya jawa.

Kendala administratif juga dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan bahan pustaka. Realisasi kegiatan baru berjalan 80%. Hal ini disebabkan oleh kendala administrasi dalam proses pencairan anggaran. Kendala administrasi yang berbentuk hambatan dalam realisasi pencairan anggaran juga dialami dalam pelaksanaan kegiatan “konsolidasi pengembangan perpustakaan”.

Sedangkan untuk kegiatan pengadaan bahan pustaka, pengembangan koleksi bahan pustaka dan bahan pustaka nusantara, dan kegiatan pengembangan koleksi Jogjasiana, masalah yang dihadapi adalah persoalan kendala survey dan seleksi bahan pustaka di lapangan. Sulit untuk mengumpulkan data sebagai sumber kegiatan pengadaan bahan pustaka. Solusi yang diberikan kepada SKPD adalah untuk perencanaan pada periode berikutnya, survey dilaksanakan pada akhir tahun. Selain itu SKPD harus melakukan koordinasi dengan para penerbit.

Tingkat capaian ketersediaan Gedung Induk Perpustakaan hanya 80%. Ini disebabkan oleh belum adanya kesepakatan antara Pemerintah DIY dengan kontraktor dalam menilai fakta progres pembangunan GIP. Pihak pemerintah menilai pembangunan baru mencapai 80%, sedangkan pihak kontraktor menilai

sudah 90% dan bisa mulai digunakan. Untuk itu, hendaknya Pemerintah DIY dan kontraktor duduk bersama dalam menyelesaikan perbedaan penilaian ini.

Persolan kedua adalah tingkat capaian ketersediaan Jogja Study Centre yang hanya 50% dari target semula. Hal ini merupakan implikasi dari penggunaan teknik prioritas pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintahn DIY. Karena ketersediaan dana terbatas sedangkan program yang akan dilaksanakan banyak, maka ada beberapa program yang didahulukan, sedangkan program liannya ditunda sementara. Dalam hal ini, Pemerintah DIY sedang menggalakan perpustakaan desa dan pembangunan Museum Sandi. Oleh karena itu, dana yang semula diperuntukan bagi pembangunan Jogja Study Centre dialihkan untuk pengadaan perpustakaan desa dan pembangunan Museum Sandi. Implikasinya, tingkat ketercapaian kinerja hanya 50% dari yang ditargetkan semula.

3. Urusan Kesehatan

Nomenklatur kesehatan sangat berkaitan erat dengan aspek kesejahteraan. Elemen utama dari analisis mengenai Aspek Kesejahteraan Masyarakat adalah pembahasan tentang sejauh mana pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan angka PDRB atau PDRB perkapita bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga secara merata di seluruh teritori Provinsi. Sehingga mempunyai efek kolateral terhadap akses di sektor kesehatan, terutama bagaimana masyarakat punya kemudahan untuk menikmati fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah.

Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang dijamin Undang-undang. Bahkan kesehatan merupakan fondasi dasar bagi setiap warga negara, sebab jika ada warga negara yang terkendala kesehatannya niscaya tidak akan bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai warga negara. Terutama aktivitas kesehariannya menjalankan roda perekonomian rakyat. Dalam konteks ini sektor kesehatan yang pokok meliputi dua sektor paling fundamental dan penting, yakni unsur natalitas (kelahiran), mortalitas (kematian). Dua kontinum “hulu” dan “hilir” yang amat terkait dengan kesehatan.

Secara umum elemen-elemen penting dalam dunia kesehatan meliputi infrastruktur kesehatan yang menjadi fondasi dari terlaksananya program-program kesehatan yang dicanangkan pemerintah. Infrastruktur yang dimaksud adalah sarana-sarana kesehatan publik yang dapat diakses oleh masyarakat

umum. Kewajiban pemerintah dalam menjamin kesehatan penduduk dapat diukur dari ketersediaan puskesmas, poliklinik, maupun rumah sakit. Namun tidak hanya faktor ketersediaan dan kesiapsediaan saja yang penting, melainkan juga bagaimana masyarakat luas dapat mengaksesnya. Sebab mudahnya mengakses sarana kesehatan berkorelasi dengan bagaimana penduduk menjaga kesehatan.

Sebagai contoh, kehadiran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) bagi bayi, anak di bawah tiga tahun (batita), maupun di bawah lima tahun (balita), sangat membantu untuk menjaga kesehatan bayi dan anak-anak. Selain itu Posyandu merupakan sentra tempat para orang tua untuk berkonsultasi tentang kesehatan dan kecukupan gizi bayi dan anak-anak. Jika jumlah Posyandu kian rendah, maka perhatian terhadap balita akan menurun dan secara kolateral bisa berimplikasi pada kenaikan kasus gizi buruk bagi balita.

Institusi kesehatan publik yang juga berada di daerah-daerah selevel Kecamatan adalah Puskesmas. Tugas pokok Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi. Dengan demikian Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang lebih kecil dari rumah sakit dan mempunyai rasio penyebaran yang bisa menjangkau daerah-daerah pelosok.

Mengingat sumber penyakit yang pada umumnya berada pada kantong-kantong masyarakat yang relatif belum melek atau sadar dengan pentingnya kesehatan harus didekati oleh pemerintah dengan membangun sebanyak mungkin unit kesehatan hingga level pedesaan. Maka dari itu kehadiran Pustu dengan tingkat penyebaran yang merata akan sangat membantu pembangunan manusia seutuhnya di bidang kesehatan.

Dalam konteks sumber daya manusia medis, yang juga penting adalah tenaga medis selain dokter. Tenaga medis menjadi penting peran dan fungsinya dalam pelayanan kesehatan karena tenaga medis adalah ujung tombak dalam hal penanganan pasien atau penduduk yang sedang sakit. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan jumlah dan kualitas ideal tenaga medis di DI Yogyakarta.

Selain elemen infrastruktur dan sarana di bidang kesehatan, yang juga tidak kalah penting adalah perhatian terhadap ancaman kesehatan berupa macam-macam jenis penyakit. Penyakit merupakan sumber utama dari

gangguan kesehatan. Seseorang dianggap sakit jika yang bersangkutan terserang penyakit. Oleh karena itu sikap preventif terhadap penyakit dan proses identifikasi terhadap epidemi atau potensi bibit-bibit penyakit menjadi urgen untuk diperhatikan pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewajiban menjaga kualitas kesehatan warga masyarakatnya.

Kondisi masyarakat yang sehat merupakan prasyarat utama untuk melakukan pembangunan. Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (*input*) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Kesehatan adalah salah satu faktor awal yang menentukan kualitas suatu bangsa. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat melalui angka realisasi/capaian dalam pelaksanaan program/kegiatan. Urusan Kesehatan diampu oleh

Pelaksanaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, permasalahan yang terjadi dalam kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana posyandu balita/ posyandu lansia mengalami gagal lelang. Solusi yang ditawarkan adalah dengan mengulang tahapan gagal lelang.

Untuk pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, pada kegiatan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi, meskipun data monev APBD menunjukkan bahwa realisasi telah mencapai 100%, namun secara faktual belum ada dokumen fisik Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi. Hal ini disebabkan karena pembuatan peta rawan gizi masih dalam tahapan naik ke percetakan. Sedangkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Gizi realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena pendanaan untuk transportasi dan akomodasi narasumber dari Pemerintah Pusat bersifat *at cost* sehingga tidak sama dengan yang dianggarkan sebelumnya.

Hambatan administratif juga terjadi pada pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Mitra Penyehatan Lingkungan. Karena terdapat kesalahan teknis di bagian keuangan, dana penyelenggaraan program tersebut belum dapat dicairkan. Solusi yang dilakukan terhadap kendala tersebut adalah dengan menggunakan dana GU 2013.

Untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, beberapa kegiatan sampai dengan triwulan kedua realisasinya masih 0. Salah satunya adalah pada kegiatan Pengadaan Larvasida. Realisasi yang masih 0 ini disebabkan karena kegiatan tersebut direncanakan akan direalisasikan pada bulan Oktober 2013. Sehingga hingga triwulan kedua belum ada realisasi kegiatan. Demikian pula dengan kegiatan Pengadaan Obat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Hingga triwulan kedua, realisasi baik realisasi fisik maupun keuangan masih 0, karena kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan November 2013.

4. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terkontrol adalah salah satu kunci keberhasilan program pembangunan. Korelasi komposisi demografis terhadap pembangunan terletak pada perimbangan jumlah penduduk yang mempengaruhi postur PDRB per kapita maupun penentuan sasaran program pembangunan yang hendak dituju pemerintah.

Oleh karena itu penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang ditandai oleh rata-rata jumlah anak per keluarga. Dengan mengetahui rata-rata jumlah anak per keluarga, bisa dilakukan *forecasting* tentang prioritas kebijakan yang hendak menuju target terciptanya keluarga sejahtera. Mustahil tergapai visi menciptakan keluarga sejahtera tanpa mengontrol perkembangan rasio demografis yang diimplemetasikan dalam wujud kebijakan KB. Makin terkontrol rata-rata jumlah anak per keluarga bisa dikatakan program KB menemukan hasil positif. Sebaliknya makin banyak rata-rata jumlah anak, bisa dikatakan program KB kurang menyentuh sasaran.

Sampai saat ini di Indonesia cakupan peserta KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) mencapai 61,4% (SDKI 2007) dan angka ini merupakan pencapaian yang cukup tinggi diantara negara-negara ASEAN. Namun demikian metode yang dipakai lebih banyak menggunakan metode jangka pendek seperti pil dan suntik. Menurut data SDKI 2007 akseptor KB yang menggunakan suntik sebesar 31,6%, pil 13,2 %, AKDR 4,8%, susuk 2,8%, tubektomi 3,1%, vasektomi 0,2% dan kondom 1,3%. Hal ini terkait dengan tingginya angka putus pemakaian (DO) pada metode jangka pendek sehingga perlu pemantauan yang terus menerus.

Selain mencari rata-rata jumlah anak per keluarga, salah satu cara untuk mengukur dan menilai keberhasilan program KB di suatu daerah adalah dengan menghitung rasio akseptor KB jika dihitung per 1.000 PUS (pasangan usia subur). Dengan mengetahui gambaran mengenai data rasio tersebut, akan nampak ke mana arah program KB itu berjalan. Sebab akseptor KB bermakna Peserta KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi. Dalam konteks ini yang akan dihitung adalah rasio akseptor KB (per 1.000 PUS).

Angka rata-rata jumlah anak per keluarga yang dipadukan dengan rasio akseptor KB berujung pada konsep fertilitas. Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) menjadi kunci untuk mengukur keberhasilan program KB. Namun selain angka fertilitas, yang juga perlu dihitung adalah cakupan peserta KB aktif. Hal ini penting mengingat data rasio akseptor KB saja belum cukup untuk benar-benar mengetahui tentang problem fertilitas di suatu daerah.

Seperti dijelaskan sebelumnya, indikator RPJMD 2012-2017 untuk mengukur kinerja Program Keluarga Berencana adalah persentase cakupan peserta KB aktif. Program Keluarga Berencana terdiri atas delapan kegiatan. Dari delapan kegiatan tersebut, tiga diantaranya telah mencapai nilai realisasi 100 persen yaitu kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (HIR), Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Sebab selama ini masih adanya warga yang enggan ber-KB atau menggunakan kontrasepsi tertentu disebabkan sosialisasi yang masih kurang. Kebanyakan selama ini pemerintah hanya mengandalkan kader PPKBD (pembantu penyuluh keluarga berencana desa). Padahal tidak selalu cara semacam itu berhasil. Dengan demikian dapat disimpulkan program Keluarga Berencana (KB) dinilai belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat miskin untuk mengikuti program KB masih minim. Tidak sedikit warga yang berpenghasilan rendah atau yang masuk dalam kategori miskin, jumlah anaknya lebih dari dua bahkan mencapai lima sampai delapan. Ini tentunya sangat tidak seimbang antara penghasilan yang didapat dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

5. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada era reformasi saat ini peran, fungsi dan kedudukan perempuan untuk mengisi sector public (jabatan politik) mendapat peluang yang sangat besar setelah hadirnya undang-undang no 12 tahun 23 tentang partai politik, dalam pasal 65 ayat 1 partai politik di anjurkan untuk mencalonkan 30% kaum perempuan dalam politik praktis, kemudian undang-undang (UU) nomor 10/2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang partai politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat, pasal 8 butir d UU nomor 10/2008 misalnya, menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah-satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, pasal 53 UU pemilu Legislatif juga menyatakan daftar bakal calon juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dan dalam setiap 3 (tiga) nama calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) calon perempuan (pasal 53 dan 55).

Lebih lanjut, dalam pasal 66 ayat 2 UU nomor 10/2008 juga menyebutkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional. Sementara di pasal 2 ayat 3 UU Parpol disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan dan pada pasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%.

Lahirnya undang–undang, yang sudah mengakui peran perempuan dalam jabatan politik merupakan sebuah legitimasi politik Negara yang harus di manfaatkan sebagai momentum untuk mengangkat harta dan martabat perempuan sehingga perempuan Indonesia tidak di anggap sebelah mata, dan menunjukkan bahwa perempuan sebagai makhluk ciptaan tuhan yang memiliki potensi yang sama dengan laki-laki mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa dan menjadi pemimpin.

Data menunjukkan, meskipun model *affirmative action* yang mensyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam parlemen gagal diterapkan, tren jumlah politisi perempuan yang duduk di DPR selalu naik dari satu Pemilu ke Pemilu berikutnya. Dikutip dari situs resmi *Centre of Electoral Reform* (Cetro),

jika hasil Pemilu 2004 jumlah perempuan yang duduk di parlemen 11,8 persen dari total anggota DPR, maka Pemilu 2009 menghasilkan jumlah anggota DPR perempuan sebesar 18 persen dari keseluruhan anggota dewan. Sementara untuk DPD, jumlah anggota perempuan naik dari 22,5 persen di periode 2004-2009 menjadi 26,5 persen di periode 2009-2014.

Untuk komposisi kepegawaian di berbagai instansi, jumlah perempuan juga mengalami lonjakan signifikan. Jika di akhir 2005 persentase perempuan yang menjabat sebagai Eselon I dan II, hanya 13,3 persen dari total jumlah PNS di Indonesia, maka belakangan ini rasionya sudah meningkat menjadi 21,5 persen dari keseluruhan pegawai negeri (Latfiah, 2011). Jika di lembaga-lembaga “plat merah” kiprah perempuan kian menonjol, bagaimana dengan kehadiran perempuan di instansi-instansi swasta? Meski tidak ada data yang presisi, namun penulis berasumsi trennya juga meningkat. Indikasinya bisa dilihat dari kian banyaknya perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai perusahaan/lembaga swasta.

Permasalahan yang terjadi pada urusan pemberdayaan antara lain adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak. Selain itu jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat.

Dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan ini diidentifikasi bahwa implementasi PUG (Pengarusutamaan Gender) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender belum optimal. Dalam Program Pengarus Utamaan Gender, Bappeda telah melakukan upaya dengan memberikan surat edaran ke setiap SKPD untuk mengikuti pelatihan PPRG, dan hasilnya untuk ditindaklanjuti di masing-masing SKPD. Dalam pelatihan PPRG tersebut dihimbau kepada setiap SKPD untuk mengirimkan satu analisis kegiatan dengan paradigma Pengarus Utamaan Gender pada satu kegiatannya. Namun banyak SKPD yang tidak mengirimkan hasil analisis Pengarus Utamaan Gender tersebut. Vocal point gender tidak mengumpulkan hasil analisisnya, padahal analisis tersebut mudah untuk dilakukan. Hanya berbasiskan pada kegiatan yang sudah ada, didekati dengan paradigma kesetaraan gender, tidak mengadakan kegiatan baru.

Terkait dengan data pilah berbasis gender dan anak di BPPM, permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman aparat pemerintahan tentang penyelenggaraan data pilah gender. SKPD belum terbiasa

untuk menyusun data pilah, baik itu data pilah anak maupun data pilah gender untuk penyusunan perencanaan gender. Sedangkan kesulitan SKPD seperti apa, sampai saat ini belum ditemukan permasalahannya.

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Meskipun sudah ada one stop service pengaduan kekerasan, namun program/kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan baik. Masyarakat sendiri masih kurang pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu urusan di misi pertama DIY. Desa, sebuah entitas sosial-politik yang memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan negara Republik Indonesia, masih terus berjuang menemukan 'muara' dalam perwujudan kesejahteraan dan kemandirian perekonomiannya dalam arus pembangunan yang bias perkotaan.

Sementara itu, suplai dana pembangunan desa dari pemerintah kabupaten maupun pusat juga seringkali tidak memadai bagi kepentingan pembangunan desa maupun belanja pemerintah desa. Suplai dana yang berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi hasil pajak daerah itu tidak mampu mencukupi kebutuhan desa dalam menjalankan pembangunan di segala sektor, karena kebanyakan suplai dana itu hanya 'sisa-sisa' penyerapan anggaran yang sebagian besar telah digunakan pihak kabupaten maupun kota.

Salah satu dampak dari ketidakmandirian tersebut adalah kemiskinan. Permasalahan kemiskinan meliputi ketidakmampuan secara ekonomi, kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat, terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, terbatasnya modal dan kurang keterampilan maupun pengetahuan.

Terbatasnya akses dan belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat (termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan

pembangunan) dapat berpengaruh pada pemberdayaan ekonomis produktif masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat untuk mandiri.

Indikator pencapaian Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan, Peningkatan Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa serta Peningkatan kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Oleh karena itu, salah satu dari tiga permasalahan dasar kebijakan ekonomi pembangunan adalah adanya pemerataan distribusi pendapatan, selain kemiskinan dan pengangguran. Disparitas distribusi pendapatan tersebut semakin nyata terlihat apabila kita membandingkan tingkat konsumsi dan akses lapangan kerja masyarakat di pedesaan dan perkotaan, hal tersebut disebabkan masih terpusatnya pembangunan daerah di kawasan perkotaan, sehingga masyarakat perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumberdaya ekonomi dan cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya,

7. Urusan Ketenagakerjaan

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan adalah merupakan bagian penting bagi suatu perekonomian karena menyangkut eksistensi suatu perusahaan dalam dunia industri. Lingkup ketenagakerjaan meliputi fungsi pekerja dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Adapun untuk *selama masa kerja*, perlu dibangun suasana harmonis. Diciptakan suasana hubungan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan tenaga kerja. Pengusaha dapat untung dan karyawan sejahtera. Pemerintah (daerah) diharapkan dapat menangani secara adil dan bijak terhadap konflik-konflik yang terjadi antara pengusaha dan tenaga kerja.

Makin kondusif iklim ketenagakerjaan, akan berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Disadari bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah

penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; 4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Adapun program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari : 1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; 2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; 3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; 4) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

8. Urusan Kebudayaan

Korelasinya dengan pembangunan, kebudayaan adalah fondasi yang penting bagi pembangunan, terutama indeks pembangunan manusia atau *human development index* (HDI). Hal ini dikarenakan kebudayaan merupakan *landscape* yang menentukan corak berpikir (kerangka pengetahuan) maupun daya nalar imajinatif masing-masing manusia atau satu gugus kebudayaan yang berbasis daerah atau wilayah tertentu. Kebudayaan menghasilkan sistem pengetahuan yang mempunyai relevansi dengan kreativitas dengan struktur imajinatif sebagai pemandu utamanya.

Kreativitas, meskipun terletak di level abstrak-imajinatif, tapi tidak bisa dibantah menjadi elemen mendasar dari segala denyut nadi pembangunan. Tidak mungkin pembangunan bisa terlaksana tanpa didahului dengan

berkecambahnya kreatifitas. Dan dalam konteks ini kreativitas hanya bisa terpupuk dengan jalan merawat kebudayaan. Dengan demikian bisa disimpulkan tidak ada kreativitas tanpa kebudayaan. Sementara itu tidak ada pembangunan tanpa kreativitas.

Sesungguhnya fakta tersebut ironis. Mengingat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah mengamanatkan bahwa arah kebijakan pembangunan kebudayaan antara lain adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermoral, beretika dan berbudaya, ditandai oleh (a) terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek; dan (b) makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Di samping itu, pembangunan kebudayaan di Indonesia harus mampu menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan antara lain (1) Pertumbuhan ekonomi, (2) Pertumbuhan diri, (3) Solidaritas bangsa, (4) Pemerataan, (5) Partisipasi masyarakat, (6) Otonomi, (7) Keadilan sosial, (8) Keamanan, dan (9) Keseimbangan lingkungan.

Terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 mengajarkan kepada kita bahwa pembangunan Indonesia yang bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi saja ternyata keliru. Kejayaan ekonomi Indonesia mengalami kehancuran terkena krisis akibat lemahnya pondasi yang menyangga perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia yang dibangun dengan semangat KKN tidak kuat menerima terpaan krisis yang berawal dari krisis mata uang Thailand. Model pembangunan ala Pemerintah Orde Baru yang terlihat kuat di luar tetapi rapuh di dalam memberikan pelajaran berharga bagi pengambil kebijakan ke depan agar tidak mengabaikan perhatiannya terhadap pembangunan sektor lainnya, khususnya sektor kebudayaan.

Pembangunan kebudayaan salah satu sektor penting yang musti dilaksanakan untuk kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu ke depannya seluruh stakeholder kebijakan (Pemerintah Pusat dan Daerah) perlu memperhatikan aspek kebudayaan untuk dijadikan landasan kebijakan dalam melaksanakan programnya masing-masing. Di samping itu pula peranan masyarakat dituntut aktif dalam pembangunan kebudayaan karena tanpa

partisipasi masyarakat pelaksanaan pembangunan kebudayaan tidak dapat berhasil dengan sukses.

Terkait penjelasan di atas, salah satu wujud dari kebudayaan adalah kesenian. Seni merupakan suatu karya yang dibuat atau diciptakan dengan kecakapan yang luar biasa sehingga merupakan sesuatu yang elok atau indah. Dengan demikian salah satu bentuk pembangunan kebudayaan adalah kesenian. Kesenian adalah salah satu manifestasi dari kebudayaan yang paling riil dan bisa dengan mudah diakses maupun diresapi oleh konstruksi mental-batin rakyat. Dengan demikian posisi kesenian menjadi strategis dalam konteks pembangunan dan mempertahankan kedaulatan bangsa.

Kebutuhan akan seni budaya merupakan kebutuhan manusia yang lebih tinggi diantara urutan kebutuhan lainnya. Seni budaya berkaitan langsung dengan kesejahteraan, keindahan, kebijaksanaan, ketentraman, dan pada puncaknya merupakan proses evolusi manusia untuk makin dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seni budaya akan berkembang apabila masyarakat makmur dan sejahtera.

Karena itu menjadi urgen untuk segera diformulasikan bentuk-bentuk pertahanan negara dari segi kebudayaan, sehingga bukan hanya dari segi luarnya saja (jalur fisik-militer) kita mempertahankan kedaulatan negara-bangsa Indonesia tetapi juga dari aspek kedaulatan kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, seni budaya akan berkembang apabila masyarakat makmur dan sejahtera. Sebab indikasi kemajuan ekonomi seringkali berdampingan dengan kelestarian adat seni budaya

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya terdapat pada pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Dewan Kebudayaan. Meskipun telah terdapat serapan dari target sebesar 25% dan realisasi 20%, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yaitu karena kesibukan masing-masing anggota Dewan Kebudayaan, pelaksanaan kegiatan belum maksimal. Solusi yang dilakukan sementara ini adalah dengan melakukan koordinasi ulang pelaksanaan kegiatan.

Untuk pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, salah satu hambatan yang dihadapi pada kegiatan Pengembangan Museum Internasional. Dalam kegiatan Pengembangan Museum Internasional, sistem pengadaan jasa konsultasi tidak menjamin kualitas yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kesibukan para anggota Tim. Selama ini Tim Pendamping belum mendampingi

MSB secara langsung. Untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Permuseuman, hambatan yang dihadapi adalah tidak ada pendaftar saat lelang, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur. Solusi yang dilakukan adalah lelang ulang.

2.2. Analisis Hasil RKPD pada Misi 2 RPJMD “Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif, dan kreatif”

Pada RPJMD tahun 2012-2017 disebutkan bahwa misi 2 adalah Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif, dan kreatif. Untuk mencapai misi 2 tersebut, maka terdapat urusan-urusan yang mendukung pelaksanaannya. Urusan yang termasuk pada misi 2 ini adalah urusan pariwisata, urusan penanaman modal, urusan ketahanan pangan, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan kelautan dan perikanan, dan urusan industri. Di bawah ini akan dijelaskan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing urusan yang diampu oleh SKPD sampai triwulan II yaitu bulan Juni 2013.

1. Urusan Pariwisata

Pada tahun 2013 ini Dinas Pariwisata memiliki 3 program yang akan digunakan untuk membantu pelaksanaan urusan Pariwisata. Ketiga program tersebut adalah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan Program Pengembangan Kemitraan. Dari ketiga program tersebut, menurut Laporan Indikator Dinas Pariwisata sampai bulan Juni 2013, hampir 99,9% realisasi indikator sudah mencapai angka 100%. Namun, ketika melihat dari laporan Monev APBD Dinas Pariwisata, terdapat beberapa keterangan tentang realisasi program yang belum terlaksana.

Dari program pertama yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdapat 10 kegiatan untuk mendukung program tersebut. Dari 10 kegiatan tersebut, menurut Laporan Indikator Dinas Pariwisata sampai bulan Juni 2013 sudah terlaksana semua. Namun pada penjelasan realisasi Monev APBD Dinas Pariwisata triwulan II, terdapat beberapa kegiatan yang dilaporkan belum dilaksanakan, seperti, pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata, promosi pariwisata di 5 negara yang baru terlaksana di 4 negara, pelatihan

pemandu wisata yang belum terlaksana, penyusunan dan penerbitan tabloid pariwisata yang belum dilaksanakan karena masih menunggu perubahan APBD, dan beberapa kegiatan yang masih dalam progress pelaksanaan. Jika dilihat dari anggaran yang disediakan dan realisasinya, untuk program Pengembangan Pemasaran Pariwisata penggunaan anggaran masih termasuk dalam kategori wajar. Jika kegiatan belum dilaksanakan, maka laporan realisasi juga masih 0 Rupiah. Tidak berbeda dengan beberapa kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian, anggaran yang digunakan tidak terlalu berlebihan dan tidak juga terlalu sedikit.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata mengampu 4 kegiatan untuk mendukung program tersebut. Dari 4 kegiatan tersebut, menurut Laporan Indikator Dinas Pariwisata sampai bulan Juni 2013 sudah terlaksana semua. Namun pada penjelasan realisasi Monev APBD Dinas Pariwisata triwulan II, terdapat beberapa kegiatan yang dilaporkan belum dilaksanakan, seperti, pengembangan objek pariwisata unggulan dengan melaksanakan lomba penataan display PKL Kerajinan di Malioboro dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata di beberapa destinasi wisata yang prosesnya masih berjalan 50%. Jika dilihat dari anggaran yang disediakan dan realisasinya, untuk program Pengembangan Pemasaran Pariwisata penggunaan anggaran masih termasuk dalam kategori wajar. Jika kegiatan belum dilaksanakan, maka laporan realisasi juga masih 0 Rupiah. Tidak berbeda dengan beberapa kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian, anggaran yang digunakan tidak terlalu berlebihan dan tidak juga terlalu sedikit.

Program Pengembangan Kemitraan mengampu 6 kegiatan untuk mendukung program tersebut. Dari 6 kegiatan tersebut, menurut Laporan Indikator Dinas Pariwisata sampai bulan Juni 2013 sudah terlaksana semua. Namun pada penjelasan realisasi Monev APBD Dinas Pariwisata triwulan II, terdapat beberapa kegiatan yang dilaporkan belum dilaksanakan, seperti, Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, fasilitas penyelenggaraan event kepariwisataan, dan penyelenggaraan event yang menurut laporan masih banyak event yang belum terlaksana. Jika dilihat dari anggaran yang disediakan dan realisasinya, untuk program Pengembangan Pemasaran Pariwisata penggunaan anggaran masih termasuk dalam kategori wajar. Jika kegiatan belum dilaksanakan, maka laporan

realisasi juga masih 0 Rupiah. Tidak berbeda dengan beberapa kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian, anggaran yang digunakan tidak terlalu berlebihan dan tidak juga terlalu sedikit.

2. Urusan Penanaman Modal

Pada tahun 2013 urusan penanaman modal dikelola oleh 2 SKPD yaitu Badan Kerjasama dan Penanaman Modal dan Kantor Perwakilan Daerah. Kedua SKPD ini memiliki program-program dan kegiatan yang akan mendukung pelaksanaan dalam urusan penanaman modal tersebut. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal memiliki 4 program yang mendukung pelaksanaan urusan penanaman modal, yaitu, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, dan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Kantor Perwakilan Dewan terdapat satu program yang mendukung pelaksanaan urusan penanaman modal, yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

a. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

Program pertama dari Badan Kerjasama dan Penanaman Modal adalah Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi terdapat 3 kegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut Laporan Indikator Badan Kerjasama dan Penanaman Modal sampai bulan Juni 2013, 50% indikator sudah mencapai target yang ditentukan. Namun terdapat satu kegiatan yang kesemua indikatornya belum mencapai target 100% yaitu kegiatan penyelenggaraan pameran dan investasi. Dari kegiatan tersebut terdapat dua indikator yaitu pameran investasi dan pameran GPID, yang belum tercapai sama sekali dan satu indikator yaitu *Business Meeting* yang sudah terlaksana 25%. Belum tercapainya indikator-indikator tersebut dikarenakan dalam penyelenggaraan pameran tersebut masih terdapat kekurangan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian untuk indikator lain masih dalam proses pelaksanaan dan masih dikatakan wajar jika masih berlangsung karena target yang diterapkan adalah target tahunan (batas waktu 31 Desember 2013).

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi terdapat 8 kegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut Laporan

Realisasi Indikator Badan Kerjasama dan Penanaman Modal sampai bulan Juni 2013, terdapat 86% (26 indikator dari 30 indikator) belum mencapai target yang ditentukan. Dari data tersebut, indikator yang belum memenuhi target tersebut bukan semata-mata karena memang belum dilaksanakan, tetapi ada yang sudah terlaksana namun masih dalam proses atau setengah perjalanan. Contohnya adalah pada kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, target dari pemantauan laporan pelaksanaan penanaman modal adalah 52 perusahaan, dan pada laporan realisasi indikator, sampai pada bulan Juni 2013 ini sudah terlaksana sebanyak 26 perusahaan. Selain itu juga pada indikator peninjauan lapangan PMDN/PMA dalam rangka pembinaan dan pengawasan dengan target 50 perusahaan, hingga Juni 2013 ini sudah terlaksana sebanyak 15 perusahaan.

Program ketiga adalah Penyiapan potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah yang memiliki 2 kegiatan guna mendukung pelaksanaan program tersebut, yaitu, koordinasi dan konsolidasi perencanaan pengembangan penanaman modal dan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah (RUPMD). Dari dua kegiatan tersebut terdapat 5 indikator dan yang sudah tercapai 100% ada satu indikator yaitu FGD pembahasan draft pergub RUPMD DIY yang ditargetkan berjalan 2 kali dengan peserta 35 orang. Menurut laporan bulan Juni 2013, kegiatan tersebut sudah berjalan 1 kali tetapi sudah mencukupi peserta 35 orang, sehingga dianggap sudah 100% terlaksana. Untuk 4 indikator yang lain, sejauh ini masih dalam proses pelaksanaan seperti koordinasi dengan instansi terkait, konsultasi, dan penggalan data.

b. Kantor Perwakilan Daerah

Pada SKPD Kantor Perwakilan Daerah, terdapat satu program guna mendukung pelaksanaan, yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan satu kegiatan yaitu penyebaran informasi pembangunan daerah. Kegiatan tersebut memiliki 2 indikator yaitu pameran pada Pekan Raya Jakarta 2013 yang ditargetkan dilaksanakan satu kali dan pameran di luar Anjungan DIY-TMII yang juga ditargetkan dilakukan sebanyak satu kali. Namun hingga bulan Juni 2013 ini belum terdapat realisasi. Padahal kontrak atau waktu pelaksanaan adalah 1 Juni 2013 hingga 31 Juli 2013. Serapan anggaran pun sudah menunjukkan angka 2,57% dari yang ditargetkan yaitu 3,55%, namun tidak ada penjelasan sampai sejauh mana realisasi kegiatan tersebut berjalan.

3. Urusan Ketahanan Pangan

Pada tahun 2013 ini, Badan Ketahanan Pangan memiliki 2 program guna mendukung pelaksanaan urusan pertanian. Program-program tersebut adalah program pemberdayaan penyuluh pertanian dan program pemberdayaan dan pengembangan ketahanan pangan. Untuk urusan ketahanan pangan ini, belum diperoleh laporan realisasi indikator sampai bulan Juni 2013 ini, sehingga tidak bisa mencocokkan data antara laporan Monev APBD Badan Ketahanan Pangan sampai Juni tahun 2013 dengan Laporan Realisasi Indikator Badan Ketahanan Pangan sampai Juni 2013 ini.

4. Urusan Pertanian

Pada tahun 2013 ini, Dinas Pertanian memiliki 8 program guna mendukung pelaksanaan urusan pertanian. Program-program tersebut adalah Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dan Program Peningkatan Kualitas SDM Kelembagaan Petani.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani memiliki 6 kegiatan guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Dari 6 kegiatan tersebut, menurut laporan realisasi indikator hingga bulan Juni 2013 sudah 27, 78% indikator yang terlaksana 100%. Sedangkan indikator yang belum tercapai disebabkan memang belum dilaksanakan dan tidak ditargetkan untuk selesai dalam triwulan II ini. Kontrak atau waktu pelaksanaan beberapa kegiatan sampai pada 31 Desember 2013, sehingga wajar apabila terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana sama sekali atau masih dalam proses pelaksanaan. Namun ternyata terdapat beberapa kegiatan yang dalam proses pelaksanaannya mendapat hambatan. Seperti pada kegiatan peningkatan pendapatan petani melalui agribisnis tanaman pangan yang isi kegiatannya adalah memberikan bantuan hibah kepada petani yang dananya ada di PPKD, namun yang menjadi hambatan adalah belum semua proposal masuk dan masih dilakukannya pencarian kelompok penerima bantuan sesuai dengan SK Gubernur. Kemudian untuk

kegiatan peningkatan pendapatan petani melalui agribisnis tanaman hortikultura yang juga memberikan bantuan kepada petani, saat ini Dinas Pertanian telah melaksanakan verifikasi lapangan berdasarkan proposal yang sudah diterima dan saat ini sedang dalam proses penyusunan rekomendasi untuk pencairan bantuan hibah. Namun tetap saja terdapat hambatan yaitu semua proposal sudah masuk tetapi terdapat beberapa proposal yang tidak sesuai dengan kegiatan Dinas Pertanian. Selanjutnya proposal tersebut dikembalikan kepada tim agar dapat diperbaiki. Untuk serapan anggaran, belum banyak biaya yang dikeluarkan karena masih dalam tahap pembuatan dan penyerahan proposal dengan serapan anggaran 10,83% dari anggaran yang ditargetkan yaitu 52,43%.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) memiliki 7 kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dari 7 kegiatan tersebut, baru 2 dari 27 indikator yang sudah tercapai targetnya 100%. Indikator lain yang belum tercapai dikarenakan masih dalam proses penyelesaian. Namun masih banyak juga kegiatan yang sampai bulan Juni 2013 ini belum berjalan sama sekali. Untuk beberapa kegiatan tersebut perlu dipertanyakan karena beberapa kegiatan seperti penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan, peningkatan mutu hasil pertanian standard nasional Indonesia (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan), dan penerapan GMP olahan hasil pertanian yang sampai bulan Juni 2013 ini belum ada realisasi sama sekali namun sudah mengeluarkan biaya dan tidak ada keterangan untuk apa biaya tersebut digunakan.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan memiliki 2 kegiatan yaitu promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dan penyebarluasan informasi perbenihan. Menurut laporan realisasi indikator sampai bulan Juni 2013 ini belum ada indikator yang tercapai. Namun serapan anggaran yang digunakan sudah sebesar 4,8% dari target 11,75%, tanpa penjelasan dipergunakan untuk apa biaya tersebut.

5. Urusan Kehutanan

Pada tahun 2013 ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan memiliki 5 program untuk mendukung pelaksanaan urusan kehutanan. Program-program tersebut adalah Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan

Lahan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.

Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan memiliki 20 kegiatan guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Indikator yang sudah tercapai kurang lebih sebanyak 40%. Untuk Indikator yang dalam laporan realisasi indikator tercatat belum tercapai tersebut beberapa ada yang sudah tercapai hanya saja SPJ tidak bisa diperhitungkan bulan Juni. Kemudian terdapat beberapa masalah seperti pada kegiatan peramalan, pengamatan, analisa dan rekomendasi pengendalian OPT perkebunan yang pencairan anggaran di bawah target karena terdapat sisa anggaran dari belanja perjalanan dinas ke luar daerah yang bersifat *at cost*. Selain itu untuk kegiatan rehabilitasi tanaman perkebunan juga mengalami masalah yaitu pada pencairan anggaran untuk hibah bagi kelompok tani belum bisa dicairkan karena masih harus menunggu musim tanam yaitu pada bulan Oktober.

Program kedua adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang memiliki 8 kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut laporan realisasi indikator sampai bulan Juni 2013, sebanyak 2 indikator atau 16,67% dari 12 indikator yang sudah capaian realisasinya sudah sebesar 100%. Beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan ada kegiatan yang belum ada aliran kas pada bulan Juni tersebut. Sedangkan indikator lain yang belum tercapai karena masih dalam proses pelaksanaan seperti konsultasi pengelolaan hutan AB. Namun ternyata, kegiatan tersebut mengalami penundaan karena kondisi lapangan yang semakin berat akibat hujan yang belum berhenti pada saat itu.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang memiliki 10 kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut laporan realisasi indikator sampai bulan Juni 2013 ini terdapat 5 indikator yang sudah mencapai angka 100%. Untuk indikator yang lain masih dalam proses pelaksanaan dan ada beberapa hambatan seperti anggaran yang tidak terserap sesuai target karena terdapat anggaran sisa pengadaan pupuk kandang dan pada pekerjaan pengadaan sumur dalam yang masih tertunda karena curah hujan yang masih tinggi sehingga penentuan lokasi terhalang lahan yang basah. Serapan anggaran pun masih digunakan secara wajar, jika memang belum melaksanakan kegiatan untuk mendukung program tersebut maka serapan anggaran masih 0 Rupiah.

6. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan diampu oleh dua SKPD yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dan Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan. Kedua SKPD ini memiliki program-program dan kegiatan yang akan mendukung pelaksanaan dalam urusan kelautan dan perikanan tersebut. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 10 program dan Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan memiliki 2 program.

a. Dinas Kelautan dan Perikanan

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang memiliki satu kegiatan yaitu pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir. Dari kegiatan tersebut, terdapat dua indikator yang belum terlaksana yaitu sosialisasi Perda no. 16 tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dengan target 30 orang x 30 kabupaten x 3 lokasi dan sosialisasi Pergub 38 Tahun 2011 dengan target 30 orang x 3 kabupaten x 1 lokasi. Untuk serapan anggaran, realisasinya sebesar 30,06% dengan target yang ditetapkan yaitu 30,1%. Padahal masih ada dua kegiatan yang belum terlaksana dan tentunya masih membutuhkan dana.

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan yang memiliki satu kegiatan yaitu optimalisasi dan pengembangan siswasmas. Kegiatan ini sudah terlaksana 100% dan serapan anggarannya mencapai 99,93%.

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan yang memiliki 7 kegiatan guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut laporan realisasi indikator, dari tujuh kegiatan tersebut, terdapat satu kegiatan yang pelaksanaannya sudah mencapai 100% yaitu kegiatan optimalisasi pemasaran produk perikanan. Untuk kegiatan lain yang belum mencapai target, masih dalam proses pelaksanaan, seperti misalnya untuk gerakan memasyarakatkan makan ikan yang ditargetkan sebanyak 180 paket dan baru berjalan 90 paket.

b. Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan

Program pengembangan budidaya perikanan yang memiliki 5 kegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut laporan realisasi

indikator, belum terdapat indikator yang tercapai hingga 100%. Indikator-indikator tersebut masih dalam proses pelaksanaan, seperti misalnya produksi benih ikan bandeng yang ditargetkan sebanyak 1.750.000 sampai bulan Juni 2013 ini sudah tercapai 44.000. Kemudian pada kegiatan peningkatan Induk, Bibit Unggul budidaya air payau yang mendapat hambatan karena proses lelang yang terlambat, dan segera dilakukan percepatan penyelesaian lelang agar indikator tersebut dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air memiliki 3 kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut laporan realisasi indikator sampai bulan Juni 2013, semua indikator dari kegiatan tersebut belum terlaksana (masih nol). Namun menurut Monev APBD Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan sudah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti uji coba pembesaran kakap putih dan bandeng, pengembangan varietas nila merah, ikan mas, lele, gurameh, dan pembesaran vanamae dengan pakan berbeda, yang sudah menyerap anggaran 44,15% dengan target awal 58,97%.

7. Urusan Industri

Pada tahun 2013 ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi memiliki 6 kegiatan yang mendukung pelaksanaan urusan Industri ini yaitu, Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Program Penataan Struktur Industri, Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif.

Program Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi yang memiliki 3 kegiatan guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut laporan realisasi indikator sampai bulan Juni 2013 terdapat satu indikator yang sudah tercapai 100%. Sedangkan kegiatan lain masih berjalan bahkan belum ada realisasinya. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan laporan Monev APBD Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sampai Juni 2013 sudah terjadi serapan anggaran namun indikator belum tercapai. Seperti pada kegiatan bimbingan teknis IKM pangan olahan serapan anggaran sudah 98,47% dengan target yang ditetapkan 100%. Kemudian untuk kegiatan fasilitas peningkatan

kualitas dan diversifikasi produk IKM Logam Ferro kegiatan ini baru akan dilaksanakan pada bulan Juli dan pengadaan mesin sedang dalam proses.

Program Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang memiliki 16 kegiatan untuk melaksanakan program tersebut. Menurut laporan Monev APBD terdapat beberapa kegiatan yang serapan anggaran yang digunakan sudah banyak tetapi dalam laporan realisasi indikator masih belum ada realisasinya (masih nol). Seperti contohnya pada kegiatan penerapan GKM IKM bamboo dan kayu yang serapan anggarannya adalah 98,9%, kemudian pengembangan usaha industri kecil OVOP yang serapan anggarannya adalah 85,99%, forum temu usaha antara IKM dengan pengguna (Buyer) di DIY yang serapan anggarannya adalah 99,68%, dan beberapa kegiatan lain. Serapan anggaran tersebut belum diseretai dengan penjelasan realisasi, bahkan pada laporan indikator masih tercatat 0.

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial yang memiliki satu kegiatan kemitraan IKM Jamu yang sudah terlaksana 100% sampai bulan Juni 2012 ini. Serapan anggarannya adalah 66,19% dari anggaran yang ditargetkan 81,95%.

Program pembinaan dan pengembangan industri kreatif yang memiliki 3 kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut laporan realisasi indikator sampai bulan Juni 2103 belum ada indikator yang sudah terpenuhi 100%. Hal tersebut dikarenakan beberapa kegiatan sudah terlaksana namun SPJ belum masuk ke bendahara, sehingga tidak bisa dilaporkan pada bulan Juni 2013.

2.3. Analisis Hasil RKPD pada Misi 3 RPJMD “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”

Pada RPJMD tahun 2012-2017 disebutkan bahwa misi 3 adalah Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mencapai misi 3 tersebut, maka terdapat urusan-urusan yang mendukung pelaksanaannya. Urusan yang termasuk pada misi 3 ini adalah urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Di bawah ini akan dijelaskan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing urusan yang diampu oleh SKPD sampai triwulan II yaitu bulan Juni 2013.

A. Biro Tata Pemerintahan

1. Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah Daerah

Pada program ini ada 7 kegiatan yang dilaksanakan, namun dari 7 kegiatan tersebut realisasi atau capaian kinerja yang telah mencapai 100% hanya 2 kegiatan yaitu

1) Pemeliharaan dan Penggantian Pilar Btas Antara DIY dan Jateng

Pada tabel yang dipaparkan, realisasi kegiatan pemeliharaan dan penggantian pilar batas antara DIY dan Jateng mencapai 100% dengan pemasangan pilar batas di 20 titik. Pemasangan pilar tersebut menyerap anggaran sebanyak 49.753.000 atau 82.9% dari pagu yang ditetapkan.

2) Fasilitas Penamaan Unsur Geografis.

Kegiatan ini mencapai 100% karena telah teralisasi pada tanggal 29-30 April 2013 di Hotel Grage dengan peserta 20 orang dengan peserta terdiri dari 5 bagian tata pemerintahan Kab/Kota dan 3 perwakilan aparat kecamatan dari masing-masing kabupaten/kota.

2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Pada program ini ada 6 kegiatan yang dilaksanakan, namun dari 6 kegiatan tersebut realisasi atau capaian kinerja yang telah mencapai 100% ada 4 kegiatan yaitu

1) Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi daerah dengan indikator memperingati hari Otonomi daerah,

Hari otonomi daerah telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2013 di lapangan halaman bangsal kepatihan danurejan.

2) fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan

Pada kegiatan ini telah mencapai 8 kesepakatan untuk kebijakan penerapan urusan pemerintahan daerah DIY dan Kab/kota. Kegiatan-kegiatan menyerap anggaran sebesar 41.279.000 sedangkan target keuangan dari kegiatan ini 45.489.000 jadi biaya untuk kegiatan tersebut lebih rendah dari rencana awal.

3) fasilitas dan koordinasi penyelesaian permasalahan P3D

Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tanggal 29 April 2013 dan 29 Juni 2013 dengan menyerap anggaran sebesar 18.800.000 sedangkan kontrak kegiatan ini berakhir pada akhir tahun 2013.

4) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan

Target dari kegiatan ini yaitu 1 draf kesepakatan dan kebijakan dan telah dilaksanakan konsultasi kepada kemendagri pada tanggal 16-17 Mei 2013 yang kemudian telah dilakukan proses pengiriman final draft rapergub "Pedoman Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria" ke Biro Hukum Setda DIY. Anggaran yang terserap untuk kegiatan ini sebesar 15.073.000.

5) Fasilitas penerapan NSPK.

Kegiatan ini telah dilaksanakan konsultasi dengan kemendagri pada tanggal 7-8 Maret 2013, dari hasil konsultasi tersebut ada hambatan yang terjadi yaitu masih kurangnya sosialisasi NSPK, baik pengertian NSPK maupun jumlah NSPK yang dikeluarkan oleh kementerian teknis. Sehingga harus tetap ada sosialisasi terus menerus mengenai NSPK.

3. Program Fasilitas dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Pada program ini ada 3 kegiatan yang dilaksanakan, dari 3 kegiatan salah satunya telah terealisasi 100%, 1 kegiatan telah terealisasi namun tidak mencapai 100% dan 1 kegiatan belum terealisasi. Dibawah ini akan dipaparkan 1 kegiatan yang belum mencapai 100% dan 1 kegiatan yang belum terealisasi.

1) Sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kegiatan ini telah terealisasi pada bulan April-Juni, namun belum sesuai target yang diharapkan. Target dari kegiatan ini yaitu 1850 orang tetapi capaian target hingga triwulan II sebesar 1114 orang. Sehingga tingkat realisasi kegiatan ini sebesar 60,22%, walaupun masih di bawah 100% waktu pelaksanaan atau masa kontrak dari kegiatan ini berakhir hingga akhir tahun 2013. Sehingga masih ada waktu untuk mencapai target yang ingin diharapkan.

2) Penyusunan Laporan penyelenggaraan pemda DIY

Target dari kegiatan ini yaitu 1 laporan penyelenggaraan pemerintah daerah DIY tahun 2012. Namun hingga triwulan II target tersebut belum dapat tercapai, karena proses yang telah dilakukan hingga triwulan II sebatas rapat dalam rangka konsultasi, melakukan perjalanan dinas untuk koordinasi dan pengumpulan data LPPD 2012.

B. Biro Organisasi

1. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Daerah

Pada program ini ada sekitar 26 kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang telah tercapai hingga 100% yaitu ada 9 kegiatan seperti berikut :

1) Asistensi Penyusunan LAKIP

kegiatan ini sudah terealisasi 100% dan telah menyerap anggaran sebesar 124.823.400 lebih sedikit dari target keuangan awalnya yaitu 126.794.800.

2) Bimtek Analisis jabatan

Kegiatan ini sudah terealisasi 100%, 40 orang telah mengikuti bimbingan teknis analisis jabatan dan telah menyerap anggaran sebesar 89.128.000 hampir sesuai dengan target keuangan awalnya yaitu 89.130.000.

3) Penyusunan Standar Belanja, indikator pendampingan penerapan standart belanja

Kegiatan ini sudah terealisasi dan telah menyerap anggaran sebesar 145.982.400 untuk pendampingan penerapan standart belanja.

4) Penyusunan SHBJ, indikator pemahaman penggunaan standarisasi harga barang dan jasa

Kegiatan ini sudah terealisasi dan telah menyerap anggaran sebesar 41.212.000 untuk penyusunan rapergub tentang standarisasi harga barang dan jasa serta sosialisasi penggunaan standarisasi harga barang dan jasa kepada 85 orang.

5) Rapat kerja pendayagunaan Aparatur Negara Daerah

Kegiatan ini sudah terealisasi dan telah menyerap anggaran sebesar 26.983.000 untuk raker Pendayagunaan Aparatur Negara.

6) Penyusunan Raperda Kelembagaan Perangkat daerah

Apabila melihat data monev 2013 target yang terealisasi sebesar 93.43% ada ketidaksesuaian data pada tabel dengan Monev 2013, kegiatan ini telah menyerap anggaran sebanyak 186.859.340.

7) Penilaian UKPP bidang pertanian

Apabila melihat data monev 2013 target yang terealisasi sebesar 95.00%, disini ada ketidaksesuaian data pada tabel dengan Monev 2013, kegiatan ini telah menyerap anggaran sebanyak 32.947.900.

8) Bimtek penyusunan SOP

Apabila melihat data monev 2013 target yang terealisasi sebesar 95.00%, disini ada ketidaksesuaian data pada tabel dengan Monev 2013, kegiatan ini telah menyerap anggaran sebanyak 107.817.600 untuk pelaksanaan Bimtek dan penyusunan SOP.

9) Pengelolaan website

Apabila melihat data monev 2013 target yang terealisasi sebesar 48.13% dr target 49.75%, sedangkan di tabel evaluasi RKPD tertulis 100%, disini ada ketidaksesuaian data pada tabel dengan Monev 2013, kegiatan ini telah menyerap anggaran sebanyak 10.831.000 untuk penyajian data dan informasi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen aparatur secara online.

C. Biro Hukum

1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pada program ini ada 14 kegiatan yang dilaksanakan, dari kegiatan tersebut realisasi atau capaian kinerja yang telah mencapai 100% berjumlah 7 Kegiatan, yaitu :

1) Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator Penyampaian Raperda ke DPRD, Publikasi Raperda di Media Massa, Masukan dari Masyarakat untuk Penyempurnaan

Ketiga indikator tersebut sudah terealisasi 100% dengan menyerap anggaran sebesar 310.948.800 yang digunakan untuk Rapat koordinasi dengan instansi terkait, penyusunan/harmonisasi draf rancangan peraturan daerah, memberikan pemaparan terkait substansi rancangan peraturan daerah.

2) Penyusunan Pedoman Naskah Akademik

Pada kegiatan ini target telah terealisasi 100% dan anggaran yang terserap sebesar 25.749.250 sesuai dengan target awal keuangan.

3) Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum

Pada kegiatan ini telah terlaksanakan rapat koordinasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang dilaksanakan di Hotel Ina Garuda Yogyakarta pada tanggal 28 maret 2013 yang dihadiri oleh 50 Peserta terdiri dari PNS di lingkungan pemda DIY, kabupaten/kota sekitar pemda DIY dan Lingkungan Akademisi (Perguruan tinggi) di Yogyakarta. Dana anggaran yang terserap untuk kegiatan ini sebesar 28.298.400.

4) Rencana Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) dengan indikator Draf Kepgub ttg Penetapan Pergub 2013

Kegiatan ini telah terealisasi dan mencapai target yang diharapkan yaitu pelaksanaan rapat kerja dengan hasil Draf SK Gubernur tentang Penetapan Peraturan Gubernur tahun 2013, anggaran yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar 19.578.600 sesuai dengan target keuangan yang dirancang diawal.

5) Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum

Kegiatan ini telah terealisasi dan mencapai target yang diharapkan pelaksanaan bimbingan teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada tanggal 25-27 April 2013 di Balai Latian Pendidikan Teknis diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari unsur kabupaten/kota se DIY, unsur dari Provinsi DIY dan perguruan tinggi, anggaran yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar 30.563.640 mendekati target keuangan yang dirancang diawal sebesar 30.592.200.

6) Legislasi Rapergub dan Produk Hukum Lainnya dengan indikator Rancangan Instruksi Gubernur, Rancangan Surat Edaran Gubernur, Rancangan Surat Keputusan Wakil Gubernur dan Rancangan Surat Keputusan Sekda.

Pada kegiatan ini target yang direalisasikan dari ketiga indikator tersebut banyak sekali, seperti Instruksi gubernur tentang pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga melalui pemutakhiran data keluarga, berbagai macam SK gubernur, SE gubernur, rancangan SK Wagub, rancangan SK Sekda yang telah dikeluarkan. Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar 101.138.600 lebih rendah dari target keuangan yang ditargetkan sebesar 103.518.600.

7) Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Kegiatan yang telah terealisasikan pada kegiatan ini adalah Upgrading website, data base dan perpustakaan hukum dengan menyerap anggaran sebesar 28.922.000.

Kegiatan yang sudah terealisasi tetapi belum mencapai 100% yaitu berjumlah 7 kegiatan, seperti berikut:

1) Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator pembahasan raperda di DPRD

Target dari kegiatan ini adalah 12 Buah raperda disampaikan ke DPRD, namun hingga triwulan II bulan juni target yang telah terealisasikan berjumlah 7 buah raperda dengan menyerap anggaran sebesar 310.948.800. Capaian target kegiatan ini belum maksimal 100% tetapi kemungkinan dapat maksimal di triwulan II-IV karena massa kontrak kegiatan ini sampai akhir tahun 2013.

2) Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Pada kegiatan ini ada 2 indikator kegiatan yang digunakan yaitu pencetakkan lembaran daerah dan berita daerah (buku) dan Penyusunan buku informasi peraturan perundang-undangan (Buku). Masing-masing indikator tersebut memiliki target 2800 buku namun sampai triwulan II buku yang dicetak sebanyak 1400 buku untuk masing-masing indikator. Pada bulan juni ini pada realisasi yang telah dilaksanakan yakni melakukan

penggandaan dan penjilidan lembaran daerah dan berita daerah termin I, kegiatan tersebut sudah menyerap anggaran sebesar 73.752.000.

3) Kajian peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan

Target yang telah teralisasiikan pada kegiatan ini yaitu 2 rekomendasi dari target awal 5 rekomendasi mengenai kajian undang-undang No.23 th 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Capaian kegiatan ini memang belum 100% namun anggaran yang terserap untuk 2 rekomendasi sudah mencapai 20.905.530, sedangkan target keuangan pada awalnya untuk 5 rekomendasi hingga akhir kontrak sebesar 20.905.750. Ini berarti penyerapan anggaran untuk 2 rekomendasi lebih besar dari rencana awal.

4) Pengelolaan dan Pengembangan JDI Hukum

Pada kegiatan ini ada 2 indikator kegiatan yang digunakan yaitu Pengelolaan JDI Hukum dan pembinaan anggota jaringan dokumen dan informasi hukum. Masing-masing indikator tersebut memiliki target 3 dokumen JDI Hukum dan 5 Kab/kota, namun sampai triwulan II capaian untuk pengelolaan JDI hukum mencapai 1 dokumen dan untuk pembinaan anggota jaringan dokumen dan informasi hukum target yang telah tercapai sebanyak 4 kab/kota, kegiatan tersebut sudah menyerap anggaran sebesar 31.464.330 atau sebesar 31.63% dari pagu yang ditentukan.

5) Fasilitasi dan Koordinasi Konsultasi Hukum

Target yang telah dicapai dari kegiatan ini yaitu 1 buah rekomendasi penyusunan raperda, target tersebut masih dibawah target yang ditentukan sebanyak 3 buah rekomendasi penyusunan raperda. Namun anggaran yang sudah terserap untuk 1 buah rekomendasi yaitu 13.842.200, sedangkan target keuangan untuk 3 buah rekomendasi sebesar 13.842.200, ini berarti serapan untuk 1 buah rekomendasi begitu besar karena target keuangan untuk 3 rekomendasi sudah terserap semua untuk 1 buah rekomendasi.

6) Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum

Pada kegiatan ini target yang telah terelisasikan sampai triwulan II sebesar 12 produk hukum, sedangkan target awal dari kegiatan ini yaitu 20 produk hukum. Kemungkinan untuk mencapai 20 produk hukum dapat

dicapai di Triwulan III dan IV karena kontrak kegiatan ini hingga akhir tahun. Anggaran yang telah terserap untuk 12 Produk Hukum sebesar 11.753.000 atau 46.96 dari pagu yang ditentukan.

7) Legislasi Rapergub dan Produk Hukum Lainnya

Pada kegiatan ini sebenarnya ada 7 indikator yang digunakan, namun 3 indikator yang belum tercapai 100% yaitu rancangan peraturan gubernur, rancangan surat keputusan gubernur dan perjanjian. Namun dari 3 indikator yang sudah terealisasi tersebut walau belum mencapai 100% sudah menyerap anggaran 101.138.600, anggaran tersebut untuk 30 rancangan peraturan gubernur, 137 rancangan surat keputusan gubernur dan 2 perjanjian.

2. Program Fasilitas bantuan dan Layanan Hukum

Pada program ini ada 9 kegiatan yang dilaksanakan, namun dari 9 kegiatan tersebut realisasi atau capaian kinerja yang mencapai 100% ada 3 kegiatan yaitu

1) Koordinasi Penngkatan Supremasi Hukum

Pada kegiatan ini realisasi target yang sudah dilaksanakan yaitu rapat koordinasi pada hari senin 3 Juni, 2013 membahas surat dari paguyuban warga tionghoa Bhakti Putera Yogyakarta perihal masukan UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Rapat Koordinasi pada hari Jumat 7 Juni 2013 membahas persiapan FGD Koordinasi Penegakan Supremasi Hukum bidang pertanahan berkaitan dengan Instruksi Kepala daerah Istimewa Yogyakarta dan FGD Koordinasi Penegakan Supremasi Hukum tentang kebijakan Alternatif bidang pertanahan di daerah istimewa Yogyakarta pada hari senin, 24 Juni 2013 di Dalem Ageng, Kompleks Kepatihan, danurejan, Yogyakarta.

2) Penyelesaian permasalahan hukum

Target yang terealisasi pada kegiatan ini yaitu rapat koordinasi penyelesaian permasalahan Hukum dan sidang perkara PTUN Nomor 13/G/2012/PTUN YK berkaitan dengan putusan DPRD Nomor 44/K/DPRD/2012 tentang penetapan Hamengku Buwono X sebagai gubernur DIY dan Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur DIY Masa Bakti 2012/2017 dengan agenda memberikan kesimpulan terhadap perkara Nomor

13/G/2012/PTUN YK. Anggaran yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar 96.628.100 lebih rendah dari target keuangan awal.

3) Fasilitas Penegakan HAKI

Pada kegiatan ini kegiatan yang sudah terealisasi yaitu kegiatan FGD yang telah dilaksanakan di Triwulan I, dana yang terserap hingga juni mencapai 33.605.360.

Kegiatan yang sudah terealisasi tetapi belum mencapai 100% adalah

1) Fasilitas layanan Hukum Masyarakat dengan 3 indikator kegiatan yaitu Rekomendasi Layanan Hukum, Rekomendasi untuk Perbaikan Tata Kelola Usaha Beretika di DIY dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Publik di DIY

Pada kegiatan ini 3 indikator yang digunakan yaitu rekomendasi layanan hukum, rekomendasi untuk perbaikan tata kelola usaha beretika di DIY dan Rekomendasi perbaikan pelayanan publik DIY.

3. Program Pengawasan Produk Hukum

Pada program ini dilaksanakan 6 kegiatan, dari 6 kegiatan tersebut ada 1 kegiatan telah terealisasi 100% yaitu Koordinasi Teknis Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sedangkan 5 lainnya belum terealisasi 100%. Kegiatan yang belum terealisasi 100% yaitu

1) Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Produk Hukum Kab/ Kota

Target yang telah teralisasi pada kegiatan ini yaitu 1 dokumen rekomendasi penyelesaian masalah dari target awal 2 dokumen rekomendasi. Capaian kegiatan ini memang belum 100% namun anggaran yang terserap untuk 1 laporan rekomendasi sudah mencapai 6.462.400 atau target keuangan untuk 2 laporan rekomendasi ternyata terserap semua untuk 1 laporan rekomendasi.

2) Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota

Target yang telah teralisasi pada kegiatan ini yaitu 31 rekomendasi keputusan Gubernur tentang Hasil Klarifikasi Perda Kab/Kota dari target awal 40 rekomendasi. Capaian kegiatan ini memang belum 100% namun anggaran yang terserap untuk 31 rekomendasi sudah mencapai 118.954.350 sedangkan target keuangan untuk 40

rekomendasi sebesar 122.004.350. Jadi anggaran yang terserap untuk 31 rekomendasi sudah lumayan banyak.

3) Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

Target yang telah teralisasi pada kegiatan ini yaitu 31 laporan monitoring dan evaluasi dari target awal 40 rekomendasi. Capaian kegiatan ini memang belum 100% namun anggaran yang terserap untuk laporan monitoring dan evaluasi sudah mencapai 3.330.000 sedangkan target keuangan untuk 40 laporan sebesar 3.420.000.

4) Koordinasi Raperda Pajak Retribusi di Depkeu

Target yang telah teralisasi pada kegiatan ini yaitu 4 Rekomendasi hasil Evaluasi dari Kementrian Keuangan dari target awal 6 rekomendasi. Capaian kegiatan ini memang belum 100% namun anggaran yang terserap untuk 4 rekomendasi sudah mencapai 47.267.870. sedangkan target keuangan untuk 6 rekomendasi sebesar 49.442.000 dan massa kontrak sampai akhir tahun 2013.

5) Evaluasi dan Konsultasi Rancangan Produk Hukum Kab/ Kota

Pada kegiatan ini ada 2 indikator yang digunakan, yaitu surat pemerintah provinsi DIY perihal hasil konsultasi raperda Kab/kota dan keputusan gubernur tentang hasil evaluasi raperda Kab/kota. Untuk indikator pertama target yang terealisasi sebanyak 24 surat Pemda DIY, sedangkan untuk indikator ke 2 target yang terealisasi yaitu 4 rekomendasi dari 6 target pada awal. Anggaran yang terserap untuk 4 rekomendasi sebesar 99.659.100 dari target keuangan 102.428.500.

D. INSPEKTORAT

1. Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pada Program ini dilaksanakan 8 kegiatan, 3 diantara telah mencapai 100%, 3 belum terealisasi 100% dan 5 kegiatan belum terealisasi. 3 kegiatan yang telah terealisasi 100% yaitu

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

Berdasarkan data yang disajikan kegiatan ini mencapai 100% namun apabila melihat di data monev 2013 kegiatan ini mencapai 56% dr target 60% disini ada ketidaksesuaian antara data evaluasi dengan monev 2013, namun realisasi kegiatan yang sudah terlaksana hingga bulan juni berupa honorarium untuk tim review laporan keuangan pemerintah daerah DIY tahun 2013, tim review laporan keuangan SKPD DIY th 2013, Tim Pencermatan DPA-SKPD th 2013, Tim kinerja evaluasi laporan kinerja Instansi Pemerintah th 2012, Biaya alat tulis, biaya makan dan minum rapat, penggandaan, biaya perjalanan dinas.

2) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pada kegiatan ini terjadi kejanggalan pada tabel evaluasi RKPD dengan data monev 2013, pada tabel evaluasi RKPD realisasi kegiatan ini mencapai 100% namun pada data monev 2013 realisasi target baru 8% dari 55% target yang direncanakan.

3) Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan Indikator Informasi dan tindak lanjut pengawasan

Pada kegiatan ini realisasi yang telah terlaksana hingga bulan juni yaitu Honorarium, Alat Tulis Kantor, Biaya Penggandaan, Biaya makan minum rapat dan perjalanan dinas, kegiatan tersebut menyerap biaya sebesar 30.452.600.

Kegiatan yang sudah terealisasi tetapi belum 100% yaitu

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dengan indikator Laporan hasil pemeriksaan reguler, Review laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah DIY, Pencermatan DPA SKPD DIY Tahun 2012

Pada kegiatan ini ketiga indikator tersebut telah terealisasi namun belum mencapai 100%, kemungkinan target akan terealisasi 100% pada triwulan III atau IV karena massa kontrak dari kegiatan ini berakhir sampai akhir tahun 2013.

2) Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindaklanjuti Hasil Temuan Pengawasan

Pada kegiatan ini ketiga indikator tersebut telah terealisasi namun belum mencapai 100%, kemungkinan target akan terealisasi 100% pada triwulan III atau IV karena masa kontrak dari kegiatan ini berakhir sampai akhir tahun 2013.

3) Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan dengan indikator Informasi dan tindak lanjut Pengawasan (LHP Reguler)

Pada kegiatan ini ketiga indikator tersebut telah terealisasi namun belum mencapai 100%, kemungkinan target akan terealisasi 100% pada triwulan III atau IV karena masa kontrak dari kegiatan ini berakhir sampai akhir tahun 2013.

2. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pada Program ini dilaksanakan 3 kegiatan, 2 diantara telah mencapai 100%, 1 belum terealisasi 100%. 2 kegiatan yang telah terealisasi 100% yaitu Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur dan Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi. Sedangkan Kegiatan yang sudah terealisasi tetapi belum 100% yaitu Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis Jabatan Fungsional Auditor.

E. Biro Administrasi Pembangunan

1. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Pada Program ini dilaksanakan 1 kegiatan dan sudah terealisasi 100%, yaitu Pengelolaan Sim Layanan Ijin Penelitian Online, menyerap dana sebesar 17.215.000 sesuai dengan anggaran yang ditargetkan.

2. Program Analisis kebijakan pembangunan

Pada Program ini ada 17 kegiatan yang dilaksanakan, dari 17 kegiatan ada 14 kegiatan yang telah terealisasi 100% dan 3 kegiatan yang belum terealisasi.

3. Program penelitian dan pengembangan

Pada program ini dilaksanakan 10 kegiatan, kegiatan yang telah terealisasi 100% sebanyak 9 kegiatan dan 1 kegiatan belum terealisasi 100%. 9 kegiatan yang telah terealisasi yaitu Fasilitasi Dewan Riset Daerah, Inventarisasi Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengembangan, Monitoring Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan, Pelaksanaan Penelitian, Layanan Pemberian Ijin/rekomendasi Penelitian dan Pengembangan, Sosialisasi Kebijakan Nasional Bidang Penelitian dan Pengembangan, Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional dan Fasilitasi Raker FKPPD Regional Tengah.

F. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

1. Program analisis kebijakan pembangunan

Pada program ini dilaksanakan 36 kegiatan, tetapi seluruh kegiatan belum terealisasi. Rata-rata dari kegiatan pada program ini memang belum terealisasi sama sekali. Ada beberapa kegiatan yang memang dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

2. Program pengembangan kehidupan beragama

Pada program ini dilaksanakan 5 kegiatan, kegiatan yang telah terealisasi 100% sebanyak 2 kegiatan yaitu Fasilitasi Penyelenggaraan STQ DIY Dan Pengiriman Kafilah STQ tk. Nasional DIY dengan indikator penyelenggaraan STQ. T DIY dan Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani Agama dengan indikator Penyelenggaraan pembinaan Mental Rohani PNS/TNI/Polri 5 agama., untuk 2 kegiatan belum terealisasi 100% yaitu Penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar 5 Agama di DIY dan Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani Agama dengan indikator Bantuan Pembangunan/renovasi Tempat Ibadah/Kegiatan Keagamaan..

G. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Program analisis kebijakan pembangunan

Pada program ini dilaksanakan 37 kegiatan, kegiatan yang telah terealisasi 100% sebanyak 8 kegiatan, 1 kegiatan belum terealisasi 100% dan 32 kegiatan yang belum terealisasi. Namun, apabila melihat data money SKPD 2013 kegiatan-kegiatan yang belum tercapai rata-rata sudah menyerap anggaran yang cukup banyak, akan tetapi target tidak terealisasi.

H. Biro Umum, Humas dan Protokol

1. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Pada program ini hanya 1 kegiatan dengan 7 indikator kegiatan. dari 7 kegiatan tersebut realisasi target masih dibawah 100%, karena target awal dari seluruh indikator tidak terealisasi sesuai target awal, tidak tercapainya realisasi target sesuai rencana awal karena adanya hambatan yaitu tergantung dengan tamu yang datang pada saat acara.

2. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Pada program ini dilaksanakan 3 kegiatan, kegiatan yang telah terealisasi 100% sebanyak 2 kegiatan dengan beberapa indikator, 1 kegiatan belum terealisasi 100% dan 2 kegiatan dengan beberapa indikator yang belum terealisasi. Kegiatan yang telah terealisasi 100% yaitu Pengelolaan naskah dinas dengan beberapa indikator seperti Terwujudnya petugas kearsipan aktif dan inaktif Biro terampil, terwujudnya sarana jaringan kearsipan berbasis TI, Termanfaatkannya aplikasi pengurus naskah dinas TI, Termanfaatkannya aplikasi pengurusan naskah dinas TI dan naskah dinas berbasis TI lebih efektif dan cepat dan kelancaran administrasi naskah dinas aktif dan inaktif, seluruh target keuangan telah terserap untuk kegiatan tersebut dan kegiatan yang belum mencapai 100%.

I. Sekretariat DPRD

1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Pada program ini dilaksanakan 25 kegiatan, sudah banyak kegiatan dengan beberapa indikator yang sudah terealisasi namun belum mencapai 100%. Ada juga kegiatan yang beberapa indikatornya belum terealisasi. Pada kegiatan ini ada 4 kegiatan dengan salah satu indikatornya sudah terealisasi 100% yaitu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan indikator Raperda Pertanggungjawaban APBD DIY Tahun 2012, Rapat-rapat Paripurna dengan indikator Penyerahan Kepwan tentang Rekomendasi LKPJ Gubernur DIY, Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD DIY keluar Daerah dengan indikator Konsultasi Balegda dan Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD dengan indikator Media cetak/advertorial, Press Tour dan Olah raga.

J. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Apabila menurut pada tabel misi 3 program ini dilaksanakan 28 kegiatan, namun belum terealisasi seluruhnya. Namun setelah melihat data monev banyak data yang tidak sesuai, hingga triwulan II sudah banyak realisasi dari masing-masing kegiatan dan sudah menyerap banyak anggaran. Ada beberapa kegiatan yang sudah membayar honorarium untuk tenaga ahli atau tim pelaksana kegiatan, seharusnya apabila sudah membayar honorarium tim pelaksana target dari kegiatan tersebut sudah terealisasi.

2. Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Pada program ini ada 3 kegiatan dengan beberapa indikator yang dilaksanakan. Kegiatan yang telah tercapai 100% dalam program ini yaitu 1 kegiatan dengan 2 indikator. Kegiatan tersebut yaitu orum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota dengan Indikator Raker pengelolaan keuangan kab/kota & Raker pengelolaan keuangan kab/kota dengan menyerap anggaran sebesar 43.301.200. Sedangkan 2 kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang A P B D Kabupaten/ Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang A P B D Kabupaten/ Kota

3. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Pada program ini ada 3 kegiatan dengan beberapa indikator yang dilaksanakan. Apabila melihat dari tabel evaluasi tersebut ketiga kegiatan tersebut belum terealisasi. Namun apabila melihat data monev ada ketidaksesuaian karena berdasarkan data monev, ketiga kegiatan tersebut sudah membayar honorarium tim pelaksana, seharusnya target kegiatan ketiganya telah terealisasi, tetapi di tabel evaluasi realisasi kegiatan tetap 0.

4. Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi

Pada program ini ada 1 kegiatan dengan beberapa indikator yang dilaksanakan. Apabila melihat dari tabel evaluasi tersebut ketiga kegiatan tersebut belum terealisasi. Namun apabila melihat data monev hingga bulan juni sudah ada anggaran yang terserap sebesar 3.060.000 tetapi digunakan untuk belanja alat tulis dan makanan.

5. Penataan peraturan perundang-undangan

Pada program ini ada 1 kegiatan yaitu Penyusunan Rapergub Tata Kelola Pendapatan dan Jasa Layanan. Kegiatan ini belum terealisasi dan tidak ada penyerapan anggaran hingga bulan juni 2013.

6. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah

Pada program ini ada 1 kegiatan yaitu Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun apabila melihat data monev ada ketidaksesuaian karena berdasarkan data monev kegiatan tersebut sudah menyerap anggaran sebesar 243.346.800 untuk membayar honorarium tim pelaksana dan macam-macam belanja kebutuhan pegawai, seharusnya target kegiatan telah terealisasikan, tetapi di tabel evaluasi realisasi kegiatan menunjukkan angka 0.

7. Pengembangan investasi dan aset daerah

Pada program ini ada 2 kegiatan yaitu Peningkatan Status Atas Hak Tanah, Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah. Namun apabila melihat data monev ada ketidaksesuaian karena berdasarkan data monev kegiatan Peningkatan Status Atas Hak Tanah sudah menyerap anggaran sebesar 11.410.100 untuk belanja kebutuhan pegawai kemungkinan kegiatan ini terealisasi pada triwulan III atau IV..

8. Pengembangan dan pembinaan badan usaha milik daerah dan lembaga keuangan mikro

Pada program ini ada 3 kegiatan yaitu Peningkatan Dan Pengembangan manajemen BUMD Dan BUKP, Pembinaan BUKP, Peningkatan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro. Namun apabila melihat data monev ada ketidaksesuaian karena berdasarkan data monev kegiatan Peningkatan Dan Pengembangan manajemen BUMD Dan BUKP sudah menyerap anggaran sebesar 68.423.446 untuk membayar honorarium tim pelaksana dan macam-macam belanja kebutuhan pegawai seharusnya target kegiatan telah terealisasikan, tetapi di tabel evaluasi realisasi kegiatan menunjukkan angka 0.

K. Badan Kepegawaian Daerah

1. Program Peningkatan disiplin aparatur

Pada program ini terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan, dari 5 kegiatan tersebut 1 kegiatan telah tercapai 100% yaitu Pembuatan Kartu Identitas (ID CARD) PNS dan PTT dengan menyerap dana sebesar 64.000.000 lebih rendah dari target keuangan awal yaitu 67.125.000. Sedangkan 3 kegiatan terealisasi tetapi dibawah 100% yaitu Penyelesaian Pembuatan Karpeg, Karis dan Karsu bagi PNS Provinsi DIY, Pemeliharaan Mesin Presensi Elektronik dan Fasilitas Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik.

2. Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS

Pada program ini dilaksanakan 2 kegiatan yaitu Pemulangan Pegawai Yang Pensiun dan Pemindahan Tugas PNS. Kedua kegiatan tersebut belum mencapai 100%, namun hingga bulan juni sudah terealisasi, untuk Pemulangan Pegawai Yang Pensiun sudah terealisasi sebanyak 205 Sk dengan serapan dana sebesar 41.454.500, sedangkan untuk Pemindahan Tugas PNS target yang telah terealisasi sebanyak 154 PNS dengan serapan anggaran sebesar 23.317.170. Kedua kegiatan tersebut massa kontrak berlangsung hingga akhir tahun, kemungkinan target yang ingin dicapai dapat tercapai pada triwulan III atau IV.

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pada program ini dilaksanakan 3 kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Fasilitas Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional dan Pengembangan ISO. Kegiatan yang terealisasi 100% yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan menyerap dana anggaran sebesar 22.782.000.

4. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi

Pada program ini dilaksanakan 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi. Kegiatan tersebut telah terealisasi 100% namun dana yang terserap 9.610.000 lebih rendah dari target keuangan yang direncanakan.

5. Program penataan peraturan perundang-undangan

Pada program ini dilaksanakan 1 kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Namun target dari kegiatan ini

belum terealisasi, kegiatan yang terealisasi sampai bulan juni yaitu pengumpulan bahan untuk pembahasan rancangan peraturan.

6. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Pada program ini dilaksanakan 29 Kegiatan dengan 41 indikator. 17 Indikator terealisasi tetapi belum 100%, 10 indikator tercapai 100% dan 14 indikator belum terealisasi.

7. Program perbaikan sistem Administrasi kearsipan

Pada program ini dilaksanakan 1 kegiatan namun ada 4 indikator yang digunakan, 3 indikator telah terealisasi walaupun belum 100% dan 1 indikator belum terealisasi. Ketiga indikator yang telah terealisasi telah menyerap anggaran sebesar 38.456.500 sesuai dengan apa yang menjadi keluaran.

L. Badan Pendidikan dan Pelatihan

1. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Pada program ini dilaksanakan 2 kegiatan yaitu Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Dan Pengembangan Teknologi Informasi. Kedua kegiatan tersebut telah terealisasi hingga 100% dengan dana 12.826.500.

2. Program penelitian dan pengembangan

Pada program ini dilaksanakan 6 Kegiatan, 4 kegiatan telah terealisasi 100%, 2 sudah terealisasi tetapi belum 100% dan 1 belum terealisasi. Kegiatan yang telah terealisasi 100% yaitu Pelaksanaan Penelitian dengan menyerap dana sebesar 20.368.500 yang digunakan untuk seminar hasil penelitian, hambatan yang terjadi yaitu pengunduran jadwal seminar menjadi bulan Juli 2013. Kegiatan kedua yaitu Pengembangan Kurikulum Dan Silabus Diklat dengan menyerap anggaran 32.541.700, namun mengalami selisih anggaran karena efisiensi honor narasumber dan perjalanan dinas.

3. Program pendidikan kedinasan

Pada program ini dilaksanakan 17 Kegiatan, 4 kegiatan telah terlaksana 100% dan 2 kegiatan telah terealisasi tetapi tidak mencapai 100%. Kegiatan yang belum tercapai 11 kegiatan namun setelah melihat data monev 2013

kegiatan yang ditabel evaluasi RKPD triwulan II ini ternyata ada 6 kegiatan yang sudah terlaksana di triwulan I sehingga di triwulan II tidak terlaksana lagi.

4. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Pada program ini dilaksanakan 4 Kegiatan. 1 kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan 1 yaitu Ujian Sertifikasi Keahlian P B J dan 1 kegiatan telah terealisasi tetapi belum 100% yaitu Peningkatan Ketrampilan Dan Profesionalisme dan 2 kegiatan sudah terealisasi 100% yaitu Pengembangan Modul Diklat yang modulnya masih dalam proses penyempurnaan dan Pengembangan ISO Diklat.

5. Program peningkatan kerjasama kediklatan antar daerah

Pada program ini dilaksanakan 2 kegiatan namun masing-masing memiliki 2 indikator. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan memiliki indikator Monitoring pelaksanaan fasilitasi kabupaten/kota yang belum terealisasi 100% dan Koordinasi penyelenggaraan diklat kemitraan yang belum terealisasikan karena adanya perubahan jadwal dari Sekber MPU yang seharusnya Juni menjadi Oktober 2013.

2.4. Analisis Hasil RKPD pada Misi 4 RPJMD “Memantapkan prasarana dan sarana daerah”

Pada RPJMD tahun 2012-2017 disebutkan bahwa misi 4 adalah Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mencapai misi 4 tersebut, maka terdapat urusan-urusan yang mendukung pelaksanaannya. Urusan yang termasuk pada misi 4 ini adalah urusan perhubungan, urusan tata ruang, urusan energi dan sumberdaya mineral, urusan lingkungan hidup, urusan pekerjaan umum, dan urusan perumahan. Di bawah ini akan dijelaskan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing urusan yang diampu oleh SKPD sampai triwulan II yaitu bulan Juni 2013.

1. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Dari 16 program urusan pekerjaan umum, hanya 4 program yang telah memiliki realisasi. Sementara itu masih terdapat 12 program yang masih memiliki realisasi nol atau angka indikator program kegiatan masih nol.

Program-program yang tidak memiliki realisasi adalah:

a) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pada IPK (Indikator Program Kegiatan) masih menunjukkan angka nol, hal ini terkait dengan tahapan yang harus dilakukan. Program ini memang baru mencapai 28,05% menurut kinerja keuangannya. Serta sebesar 30,73% berdasarkan kinerja fisiknya yang menghasilkan dokumen perencanaan 3 paket. Sedangkan kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong baru mencapai 29,29% berdasarkan kinerja fisik. Pengembangan saluran drainase lingkungan masih tahap proses pemilihan penyedia jasa

b) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini belum memiliki realisasi, pada indikator program dan kegiatannya masih nol. Meskipun angka ini menunjukkan angka nol, tetapi sebenarnya realisasi fisik telah melebihi angka targetnya. Artinya telah ada realisasi dari setiap kegiatannya sampai dengan triwulan kedua ini. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah penghamparan blok pekerjaan, pemasangan batu, talud, pengadaan aspal. Secara keseluruhan hingga bulan Juni telah ada serapan berdasarkan keuangan sebesar 23,71%.

c) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Terdapat 2 kejanggalan dalam program ini, yaitu mengenai argumen program inspeksi kondisi jalan yang tidak dimasukkan seklain sebagai tahapan kegiatan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Kedua, mestinya program ini telah selesai awal tahun, akan tetapi hingga pertengahan tahun program ini belum menunjukkan realisasi.

d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Mestinya program ini telah selesai awal tahun, akan tetapi hingga pertengahan tahun program ini belum menunjukkan realisasi. Karena kegiatan untuk program ini adalah penyusunan kebijakan kebinamargaan yang hendaknya merupakan acuan tahun berjalan.

e) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Meskipun indikator program dan kegiatan (IPK) menyatakan nol, akan tetapi sebenarnya telah ada realisasi dari beberapa kegiatan diantaranya: telah ada tahapan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di beberapa lokasi. Realisasi kegiatan fisik rata-rata juga telah menghasilkan lebih dari 50%. Demikian juga program ini telah memiliki serapan untuk program ini telah mencapai 23, 96% atau Rp. 5.143.387.270.

f) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program ini hanya memiliki satu kegiatan yaitu rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang telah memiliki nilai dari indikator kinerjanya. Berdasarkan serapan anggarannya telah mencapai 25,61 % atau senilai Rp. 307.269.560. Yang digunakan untuk jaringan irigasi pompa pampang.

g) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

Program ini telah mencapai targetnya, yang menghasilkan pembangunan embung di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo. Meskipun jika dinilai dari serapan anggarannya tidak terlalu besar yaitu 18%.

h) Program Pengendalian Banjir

Program ini hanya memiliki satu kegiatan yaitu rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai. Adapun output dari kegiatan tersebut adalah Terbangunnya Perkuatan Tebing di Sungai Winongo. Pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar 1 milyar, namun anggaran yang terserap hanya sebesar 26,92%.

i) Program Pengelolaan Persampahan

Program pengelolaan persampahan hanya terdiri dari dua macam kegiatan tetapi keduanya belum memunculkan kinerja. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh SKPD yang mengampu program persampahan masih bersifat kegiatan reguler saja.

j) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Program ini belum memberikan kinerja karena adanya hambatan yang berupa gagalnya proses seleksi

k) Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan

Program ini masih memiliki IPK nol yang ditunjukkan melalui realisasi kinerja fisik maupun keuangan yang rendah pula

l) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Meskipun IPK program ini masih nol tetapi realisasi kegiatan telah ada. Di Kabupaten Bantul kegiatan peningkatan jalantelah menghasilkan kegiatan mobilisasi proyek, pemeriksaan lapangan dan pembuatan rekayasa lapangan dengan serapan anggaran 16,67%. Sedangkan di Kabupaten Sleman, kegiatan peningkatan jembatan baru sampai tahap mobilisasi proyek, pemeriksaan lapangan dan pembuatan rekayasa lapangan.

m) Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur

Program ini hanya melibatkan satu kegiatan yaitu pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan. Meskipun kegiatan tersebut hasilnya baru sebatas proses pengajuan

2. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral memiliki program kerja sebagaimana terurai di bawah ini:

a) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan

Program ini merupakan program yang penting dan strategis dalam urusan energi dan sumberdaya mineral. Program ini mengampu 8 kegiatan, akan tetapi baru terealisasi 2, yaitu: pembangunan pembangkit listrik dan peningkatan kinerja pengelola bidang energi dan ketenagalistrikan.

b) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar

Dari 7 kegiatan yang ada pada program ini, baru satu yang terealisasi, yaitu pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola energi yang masih kegiatan yang bersifat sosialisasi.

Meskipun program ini lebih bersifat pembinaan namun program ini tergolong lambat dalam implementasinya. Hal ini ditunjukkan pada IPK fisik maupun keuangannya. Kinerja fisik yang dihasilkan oleh program ini baru sekitar 23%, sedangkan serapan keuangannya baru sebesar 5,4% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.226.834.000

c) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Dari program ini, kegiatan yang telah terealisasi adalah Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan Lintas Propinsi. Kegiatan ini menghasilkan output: terlaksananya Workshop pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan lintas batas kabupaten/provinsi, terlaksananya perencanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan lintas provinsi, terlaksananya pengadaan mesin pemotong batu.

d) Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi

Program ini belum menunjukkan IPK angka nol, sementara itu seharusnya program ini sudah berjalan hingga triwulan kedua ini. Argumen yang membuat pentingnya program ini telah berjalan adalah karena program ini bersifat konservasi. Yang terdiri dari kegiatan-kegiatan: pembangunan sarana pemantauan air tanah, pembinaan dan pengendalian pengambilan air tanah, pendayagunaan air tanah, serta pemantauan dan evaluasi air tanah

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Badan Lingkungan Hidup memiliki 6 program. Dari keenam program tersebut, baru satu program yang realisasinya hingga triwulan kedua ini telah mencapai 100%, yaitu: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Sedangkan program yang realisasi

kegiatannya baru sebagian adalah: Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

4. URUSAN PERHUBUNGAN

Urusan perhubungan diampu oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Urusan ini didukung oleh program-program:

a) Program Pembangunan Prasaran dan Fasilitas Perhubungan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara
- Pemantauan Keselamatan Penerbangan

b) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- Rehabilitas/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang
- Rehabilitas/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP
- Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Kereta Api

c) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
- Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum di Jalan Raya
- Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
- Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan
- Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang
- Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan
- Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan AKDP

d) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

- Program ini memiliki kegiatan-kegiatan:

- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (L P J), Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Keselamatan Pelayaran,
- Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL),
- Penjagaan Pintu Perlintasan Kereta Api, Pengadaan dan Pemasangan Rambu rambu Lalu Lintas

e) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:

- Pelaksanaan registrasi uji tipe rancang bangun dan penilaian fisik penghapusan kendaraan bermotor.
- Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

Kedua kegiatan tersebut telah melampaui targetnya.

f) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas terdiri dari kegiatan-kegiatan: Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan, Penetapan dan Pengaturan Manajemen Lalu Lintas, Pengoperasian ATCS di Perkotaan Yogyakarta

Program ini telah berjalan meskipun capaiannya belum 100%, hal yang bisa dihasilkan antara lain survey lalu lintas. Kegiatan penataan lalu lintas pada ruas Jati Kencana simpang Godean sedang dalam tahap persiapan. Sedang disusun SPK tenaga ahli

5. URUSAN PERUMAHAN

Urusan Perumahan yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral terdiri dari program-program:

a) Program Pengembangan Perumahan

Program ini memiliki kinerja fisik sebesar 45% dan serapan keuangan sebesar 1,8%, dalam dua kegiatan sebagai berikut:

- Penetapan Kebijakan, Strategi Dan Program Perumahan
- Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Dan Manual (NSPM)

Kedua kegiatan tersebut baru dalam tahap kajian kawasan di beberapa lokasi, antara lain Sentolo dan Piyungan

b) Program Lingkungan Sehat Perumahan

Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan

Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan Pedesaan

c) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan

d) Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh

Penataan Kawasan Kumuh

Secara keseluruhan urusan perumahan telah merealisasikan 50% dari kegiatannya. Kegiatan-kegiatan yang telah terealisasi berasal dari program-program:

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh

6. URUSAN TATA RUANG

Urusan Penataan Ruang terdiri dari program-program :

- a. Program Perencanaan Tata Ruang
- b. Program Pemanfaatan Ruang
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a) Program Perencanaan Tata Ruang

Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
- Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR

Keempat kegiatan tersebut seharusnya telah diselesaikan pada awal tahun karena merupakan kegiatan persiapan. Akan tetapi hingga triwulan kedua ini realisasinya masih sangat rendah yaitu 36% dengan IPK yang masih nol.

b) Program Pemanfaatan Ruang

Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- Penyusunan Norma, Standar, Dan Kriteria Pemanfaatan Ruang
- Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang
- Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pemanfaatan Ruang
- Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang

Keempat kegiatan tersebut masih menunjukkan IPK nol dengan serapan anggaran 14% dan realisasi output sebatas penyediaan ATK dan rapat.

c) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Demikian pula pada kegiatan-kegiatan program pengendalian pemanfaatan ruang juga masih memiliki IPK nol.

Secara keseluruhan urusan penataan ruang belum menunjukkan kinerjanya, hal ini dapat dilihat bahwa dari ketiga program belum menunjukkan kinerja berdasarkan IPKnya.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

3.1 Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal RKPD 2013

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2013, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, diantaranya:

Kebijakan ekonomi makro DIY Tahun 2013 diarahkan untuk:

1. Penguatan daya saing (competitiveness) daerah dimaknai sebagai upaya mengatasi perubahan dan persaingan global dan nasional, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding daerah lain, membentuk/menawarkan lingkungan yang lebih produktif bagi bisnis, menarik talented people, investasi, dan mobile factors lain, serta peningkatan kinerja berkelanjutan;
2. Penguatan daya tahan (resillience) ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan perekonomian yang tidak mudah terombang ambing oleh gejolak yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. Penguatan daya tahan juga dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat untuk menjaga momentum dan stabilitas ekonomi pada suatu wilayah dari perubahan ekonomi global (seperti kenaikan bahan bakar minyak); dan
3. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dari aspek materi maupun spritual. Pengembangan potensi masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang lebih luas dan berkeadilan.

Dengan kebijakan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah, maka asumsi kondisi regional DIY yang digunakan dalam RAPBD Perubahan DIY Tahun 2013 adalah:

No	Indikator Makro	RKPD 2013	Perubahan RKPD 2013
1	2	3	4
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,85%–6,50%	5,1%-5,3%
2	Inflasi (%)	5,20%	5,10%- 5,60%
3	Pertumbuhan Investasi	4.53 %	2,59% - 4,36%
4	ICOR	5,00	4,80 – 5,00

Sedangkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan adalah:

NO	URAIAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.014.089.544.450,00	1.148.331.844.963,50	134.242.300.513,50	13,24
1.1.1	Pajak Daerah	885.217.610.000,00	1.021.820.720.000,00	136.603.110.000,00	15,43
1.1.2	Retribusi Daerah	41.436.702.950,00	35.660.784.348,00	(5.775.918.602,00)	13,94
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.328.245.281,00	40.411.499.191,50	4.083.253.910,50	11,24
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	51.106.986.219,00	50.438.841.424,00	(668.144.795,00)	-1,31
1.2	Dana Perimbangan	961.190.992.745,00	964.396.534.022,00	3.205.541.277,00	0,33
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	98.360.324.745,00	101.565.866.022,00	3.205.541.277,00	3,26
1.2.2	Dana Alokasi Umum	828.334.768.000,00	828.334.768.000,00	-	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	34.495.900.000,00	34.495.900.000,00	-	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	311.574.558.250,00	295.244.768.250,00	(16.329.790.000,00)	-5,24
1.3.1	Hibah	8.815.476.250,00	8.815.476.250,00	-	0,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	302.759.082.000,00	286.429.292.000,00	(16.329.790.000,00)	-5,39
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	2.286.855.095.445,00	2.407.973.147.235,50	121.118.051.790,50	5,30

3.1 Perubahan Program dan kegiatan RKPD 2013

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2013, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2013 adalah sebagai berikut.

RINCIAN TGPECP C'RGTWDCJ CP'RTQI TCO'FCP'MGI KCVCP TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 7.719.032.185			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.01	Pendidikan						
01.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga						
01.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 2.833.880.000		Rp. 3.679.157.190	Rp. 845.277.190	
01.01.01.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	19 unit kerja	Rp. 2.100.000.000	19 unit kerja	Rp. 2.719.000.000	Rp. 619.000.000	'- Karena adanya penambahan daya listrik serta penambahan kapasitas internet - Penambahan daya listrik dari 11.000 VA menjadi 22.000 VA di BPO
01.01.01.01.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	Rp. 155.300.000	12 bulan	Rp. 155.100.000	- Rp. 200.000	efisiensi
01.01.01.01.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Rp. 299.880.000	12 bulan	Rp. 479.842.704	Rp. 179.962.704	Kekurangan pembayaran tenaga kebersihan dengan adanya penambahan jumlah tenaga kebersihan sebesar 199.934.460. Efisiensi sebesar 19.971.756
01.01.01.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	Rp. 61.200.000	12 bulan	Rp. 20.499.900	- Rp. 40.700.100	efisiensi
01.01.01.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	Rp. 17.500.000	12 bulan	Rp. 8.500.000	- Rp. 9.000.000	efisiensi
01.01.01.01.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	12 bulan	Rp. 200.000.000	12 bulan	Rp. 296.214.586	Rp. 96.214.586	kekurangan pembayaran jasa keamanan sebesar 96.651.000; efisiensi 436.414
01.01.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 2.393.203.200		Rp. 3.196.528.010	Rp. 803.324.810	
01.01.01.01.01.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	5 unit	Rp. 1.200.000.000	5 unit	Rp. 1.182.333.560	- Rp. 17.666.440	efisiensi
01.01.01.01.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 .	Rp. 0	2 unit	Rp. 390.000.000	Rp. 390.000.000	sebagai tindak lanjut pengusulan penghapusan mobil sebanyak 9 unit,dilakukan pengadaan 2 mobil @ Rp. 195.000.000,00
01.01.01.01.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8 jenis	Rp. 363.203.200	9 jenis	Rp. 737.018.200	Rp. 373.815.000	'- penambahan anggaran untuk brangkas, penambahan barang vacumm clearner,penambahan AC floor standing untuk mengganti ruang sasan krida(auditorium) - Pengadaan Telepon (PABX) dan Soundsystem youth centre
01.01.01.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	Rp. 80.000.000	12 bulan	Rp. 107.000.000	Rp. 27.000.000	Pengadaan Gordyn untuk Grha Wanabhaktiyasa

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 7.719.032.185			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.01.01.01.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	4 jenis	Rp. 200.000.000	5 jenis	Rp. 231.326.250	Rp. 31.326.250	'- Penambahan belanja modal meja kursi tamu ruang Ka Dinas - Pengadaan rak arsip untuk BPO dan meja-kursi untuk pondok pemuda
01.01.01.01.01.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	2 unit kerja	Rp. 550.000.000	2 unit kerja	Rp. 548.850.000	- Rp. 1.150.000	efisiensi
01.01.01.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Rp. 5.126.687.750		Rp. 4.891.283.550	Rp. -235.404.200	
01.01.01.01.01.16.088	Pengembangan SMP bertaraf internasional	12 Sekolah	Rp. 250.000.000	-0 -	Rp. 0	- Rp. 250.000.000	Menghapus kegiatan karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI
01.01.01.01.01.16.092	Pengembangan dan peningkatan mutu SMPN 1 Galur Kulon Progo	1 Sekolah	Rp. 550.000.000	1 Sekolah	Rp. 575.600.000	Rp. 25.600.000	Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya assesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 128 siswa sebesar Rp. 25.600.000,-
01.01.01.01.01.16.093	Pengembangan dan peningkatan mutu SMPN 1 Wates Kulon Progo	1 Sekolah	Rp. 550.000.000	1 Sekolah	Rp. 607.780.000	Rp. 57.780.000	'- Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - Kewajiban yang belum dibayar kepada pihak ketiga tahun 2012 berupa belanja modal pengaaan almari (SPK no. 027/6628 tanggal 14-06-2012 dan BA penerimaan hasil pekerjaan no. 05/PPHP/VI/2012 tgl 29-06-2012 - biaya assesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 180 siswa sebesar Rp. 36.000.000,-
01.01.01.01.01.16.094	Pengembangan dan peningkatan mutu SMPN 1 Karangmojo Gunungkidul	1 Sekolah	Rp. 550.000.000	1 Sekolah	Rp. 578.800.000	Rp. 28.800.000	Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya asesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 144 siswa sebesar Rp. 28.800.000 ,-
01.01.01.01.01.16.095	Pengembangan dan peningkatan mutu SMPN 1 Wonosari Gunungkidul	1 Sekolah	Rp. 550.000.000	1 Sekolah	Rp. 583.600.000	Rp. 33.600.000	Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya asesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 168 siswa sebesar Rp. 33.600.000,-
01.01.01.01.01.16.097	Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD	12 cabang lomba	Rp. 693.309.000	12 cabang lomba	Rp. 655.709.000	- Rp. 37.600.000	efisiensi
01.01.01.01.01.16.098	Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	2 Bidang lomba	Rp. 277.067.000	2 Bidang lomba	Rp. 186.522.000	- Rp. 90.545.000	efisiensi
01.01.01.01.01.16.100	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Seni TK/SD	8 cabang lomba	Rp. 175.000.000	8 cabang lomba	Rp. 174.895.000	- Rp. 105.000	efisiensi
01.01.01.01.01.16.102	Pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMP	10 cabang lomba	Rp. 375.000.000	10 cabang lomba	Rp. 374.720.000	- Rp. 280.000	efisiensi
01.01.01.01.01.16.107	Pembinaan Sekolah Sehat dan Dokter Kecil	5 Sekolah	Rp. 265.000.000	5 Sekolah	Rp. 264.650.000	- Rp. 350.000	efisiensi
01.01.01.01.01.16.108	Pengembangan bank soal SD/MI (DID)	5 mapel	Rp. 200.000.000	5 mapel	Rp. 199.895.800	- Rp. 104.200	efisiensi
01.01.01.01.01.16.116	Penyediaan beasiswa kembali ke sekolah	249 anak	Rp. 571.311.750	249 anak	Rp. 569.211.750	- Rp. 2.100.000	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 7.719.032.185			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.01.01.01.01.16.118	Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman Olimpiade Ilmu IPS	100 siswa, 50 siswa, 20 siswa	Rp. 120.000.000	100 siswa, 50 siswa, 20 siswa	Rp. 119.900.000	- Rp. 100.000	efisiensi
01.01.01.01.01.17	Program Pendidikan Menengah		Rp. 6.116.467.000		Rp. 8.942.194.885	Rp. 2.825.727.885	
01.01.01.01.01.17.077	Pengembangan kurikulum SMA	200 Orang	Rp. 275.000.000	200 Orang	Rp. 272.444.000	- Rp. 2.556.000	efisiensi
01.01.01.01.01.17.078	Pengembangan kurikulum SMK	4 kegiatan	Rp. 275.000.000	4 kegiatan	Rp. 274.500.000	- Rp. 500.000	efisiensi
01.01.01.01.01.17.080	Pengembangan SMA bertaraf internasional	15 Sekolah	Rp. 199.620.000	-0 -	Rp. 0	- Rp. 199.620.000	Menghapus kegiatan karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI
01.01.01.01.01.17.082	Pengembangan SMK bertaraf internasional	11 Sekolah	Rp. 200.000.000	-0 -	Rp. 0	- Rp. 200.000.000	Menghapus kegiatan karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI
01.01.01.01.01.17.086	Pengembangan dan peningkatan mutu SMAN 2 Wates Kulon Progo	1 Sekolah	Rp. 800.000.000	1 Sekolah	Rp. 1.098.951.885	Rp. 298.951.885	'- penyelesaian konstruksi yang belum selesai pada tahun 2012 (Rp 200.000.000) - Kewajiban yang belum dibayar kepada pihak ketiga pada tahun 2012 berupa belanja modal pengadaan konstruksi perpustakaan sebesar RP 66.951.885 (SPK no 027/10314 tgl 24 sept 2012 dan SPMK no 027/10363 tgl 24 sept 2012) - Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya asesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 160 siswa sebesar Rp. 32.000.000 , -
01.01.01.01.01.17.087	Pengembangan dan peningkatan mutu SMAN 1 Wonosari Gunungkidul	1 Sekolah	Rp. 1.300.000.000	1 Sekolah	Rp. 1.321.280.000	Rp. 21.280.000	'- efisiensi karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI sebesar Rp. 21.920.000 , - biaya asesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 216 siswa sebesar Rp. 43.200.000 , - Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI
01.01.01.01.01.17.088	Pengembangan dan peningkatan mutu SMKN 2 Pengasih Kulon Progo	1 Sekolah	Rp. 1.000.000.000	1 Sekolah	Rp. 1.196.732.000	Rp. 196.732.000	'- penyelesaian konstruksi yang belum selesai pada tahun 2012 (Rp 65.000.000) - Kewajiban yang belum dibayar kepada pihak ketiga pada tahun 2012 berupa : a) pengadaan jasa konsultan/perencanaan rehabilitasi ruang laboratorium sebesar RP 13.437.000 (SPK no 027/1186 tgl 3 Juli 2012 dan BA serah terima pekerjaan no 17/BA.ST /PRC/REH-LAB/SMKN2/XII/12 tgl 27 Desember 2012 b) belanja jasa perencanaan teknis pembangunan 3 RKB sebesar RP 15.895.000 (SPK no 027/1169 tgl 2 Juli 2012 dan BA serah terima pekerjaan no 8/BA.ST/PRC/VII/2012 tgl 31 juli 2012 - Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya asesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 512 siswa sebesar Rp. 102.400.000 , -
01.01.01.01.01.17.089	Pengembangan dan peningkatan mutu SMKN 2 Wonosari Gunungkidul	1 Sekolah	Rp. 1.000.000.000	1 Sekolah	Rp. 949.500.000	- Rp. 50.500.000	- efisiensi karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI (Rp. 140.100.000) - Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya asesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 448 siswa sebesar Rp. 89.600.000 , -
01.01.01.01.01.17.090	Penerbitan Jurnal Karya Ilmiah SMA	3000 eksemplar	Rp. 110.000.000	3000 eksemplar	Rp. 109.440.000	- Rp. 560.000	efisiensi
01.01.01.01.01.17.095	Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	8 Bidang lomba	Rp. 900.000.000	1 event	Rp. 3.663.250.000	Rp. 2.763.250.000	Penyelenggaraan Olimpiade Fisika Internasional (DIY sebagai tuan rumah)

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 7.719.032.185			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.01.01.01.01.17.097	Pembinaan dan pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMA	7 Bidang lomba	Rp. 16.800.000	7 Bidang lomba	Rp. 16.800.000	Rp. 0	Pergeseran kode rekening belanja
01.01.01.01.01.17.106	Seleksi dan pengiriman peserta Anugerah Konstitusi bagi guru Sekolah Menengah	15 Orang	Rp. 40.047.000	15 Orang	Rp. 39.297.000	- Rp. 750.000	efisiensi
01.01.01.01.01.18	Program Pendidikan Nonformal dan Informal		Rp. 1.100.000.000		Rp. 1.094.320.000	Rp. -5.680.000	
01.01.01.01.01.18.031	Jambore PTK PNF (Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi)	1 kegiatan	Rp. 450.000.000	1 kegiatan	Rp. 527.145.000	Rp. 77.145.000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ticket Peserta Jambore di Batam semula dianggarkan pusat, menjadi dianggarkan APBD
01.01.01.01.01.18.032	Penyelenggaraan MTQ Pelajar tingkat Provinsi	310 siswa	Rp. 350.000.000	310 siswa	Rp. 350.000.000	Rp. 0	Pergeseran kode rekening belanja
01.01.01.01.01.18.051	Pengembangan kurikulum pendidikan keaksaraan (DID)	3 kontingen	Rp. 300.000.000	3	Rp. 217.175.000	- Rp. 82.825.000	Pengurangan jumlah cabang lomba yang diikuti, semula 3 cabang lomba menjadi 1 cabang lomba LKP berprestasi
01.01.01.01.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa		Rp. 5.779.731.000		Rp. 5.786.257.700	Rp. 6.526.700	
01.01.01.01.01.19.061	Bantuan operasional sekolah	1826 siswa; 483 siswa; 474 siswa; 88 siswa	Rp. 3.087.736.000	1826 siswa; 483 siswa; 474 siswa; 88 siswa	Rp. 3.085.636.000	- Rp. 2.100.000	efisiensi
01.01.01.01.01.19.065	Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS)	3853 siswa	Rp. 1.866.995.000	3853 siswa	Rp. 1.866.255.000	- Rp. 740.000	efisiensi
01.01.01.01.01.19.090	Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN 2 Bantul	1 Sekolah	Rp. 225.000.000	1 Sekolah	Rp. 234.366.700	Rp. 9.366.700	Kewajiban yang belum dibayar kepada pihak ketiga pada tahun 2012 berupa pengadaan jasa konsultan/pengawasan pembangunan ruang kelas bertingkat (SPK no 027/245/PLBD/XII/2012 tgl 21 Desember 2012)
01.01.01.01.01.19.091	Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN 1 Sleman	1 Sekolah	Rp. 225.000.000	1 Sekolah	Rp. 225.000.000	Rp. 0	Pergeseran antar belanja barang jasa dan belanja modal
01.01.01.01.01.19.092	Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN 1 Gunungkidul	1 Sekolah	Rp. 375.000.000	1 Sekolah	Rp. 375.000.000	Rp. 0	Pergeseran antar belanja barang jasa dan belanja modal
01.01.01.01.01.20	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan		Rp. 1.310.000.000		Rp. 1.484.000.000	Rp. 174.000.000	
01.01.01.01.01.20.018	Pengembangan kompetensi pendidik TK	80 Orang	Rp. 150.000.000	80 Orang	Rp. 148.800.000	- Rp. 1.200.000	efisiensi
01.01.01.01.01.20.033	Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata	120 Orang	Rp. 125.000.000	120 Orang	Rp. 121.400.000	- Rp. 3.600.000	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 7.719.032.185			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	Pelajaran (MGMP)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA						
01.01.01.01.01.20.037	Bimbingan teknis penyelenggaraan ujian	60 Orang	Rp. 85.000.000	60 Orang	Rp. 84.700.000	- Rp. 300.000	efisiensi
01.01.01.01.01.20.039	Pengembangan kompetensi pendidik nonformal	100 Orang	Rp. 200.000.000	290 Orang	Rp. 385.000.000	Rp. 185.000.000	Penyelenggaraan kegiatan Kursus Manajemen Rumah Tangga (PKK)
01.01.01.01.01.20.044	Peningkatan kompetensi guru SLB	320 Orang	Rp. 500.000.000	320 Orang	Rp. 499.050.000	- Rp. 950.000	efisiensi
01.01.01.01.01.20.052	Pemberian jaminan pendidikan bagi siswa miskin	1 tahun	Rp. 250.000.000	1 tahun	Rp. 245.050.000	- Rp. 4.950.000	efisiensi
01.01.01.01.01.22	Program manajemen layanan pendidikan		Rp. 10.862.210.000		Rp. 12.532.237.800	Rp. 1.670.027.800	
01.01.01.01.01.22.012	Penyelenggaraan ujian SD/MI	51000 Orang	Rp. 1.250.000.000	51000 Orang	Rp. 1.246.075.000	- Rp. 3.925.000	efisiensi
01.01.01.01.01.22.018	Publikasi dan Pameran Pendidikan	1 kegiatan	Rp. 400.000.000	1 kegiatan	Rp. 387.625.000	- Rp. 12.375.000	efisiensi
01.01.01.01.01.22.021	Pembinaan dan penyelenggaraan Duta Seni Pelajar se Jawa Bali dan Lampung	1 kontingen	Rp. 447.950.000	1 kontingen	Rp. 421.850.000	- Rp. 26.100.000	efisiensi
01.01.01.01.01.22.027	Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah	300 sekolah/madrasah	Rp. 1.150.000.000	300 sekolah/madrasah	Rp. 1.145.300.000	- Rp. 4.700.000	efisiensi
01.01.01.01.01.22.038	Fasilitasi KONI	1 lembaga	Rp. 7.500.000.000	1 lembaga	Rp. 9.000.000.000	Rp. 1.500.000.000	Penyelenggaraan POMNAS 2014 berdasar surat dari Universitas Negeri Yogyakarta nomor 148/UN34/KM/2013 tanggal 13 Maret 2013 di Yogyakarta
01.01.01.01.01.22.043	Pembinaan akreditasi jenjang SMA	40 Sekolah	Rp. 84.490.000	40 Sekolah	Rp. 83.290.000	- Rp. 1.200.000	efisiensi
01.01.01.01.01.22.045	Evaluasi penyelenggaraan RSBI	1 dokumen	Rp. 29.770.000	-0 -	Rp. 0	- Rp. 29.770.000	Menghapus kegiatan karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI
01.01.01.01.01.22.072	Fasilitasi Jumpa Bhakti Gembira (Jumbara) PMR DIY	-0 -	Rp. 0	1 kegiatan	Rp. 248.097.800	Rp. 248.097.800	Fasilitasi PMI
01.01.01.01.01.23	Program Pendidikan Tinggi		Rp. 2.763.808.000		Rp. 3.198.958.000	Rp. 435.150.000	
01.01.01.01.01.23.005	Pemberian bantuan biaya pendidikan mahasiswa/beasiswa	599 mahasiswa	Rp. 2.224.500.000	749 mahasiswa	Rp. 2.661.250.000	Rp. 436.750.000	penambahan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 7.719.032.185			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.01.01.01.01.23.006	Pemberdayaan ikatan keluarga pelajar dan mahasiswa provinsi se Indonesia di Yogyakarta	33 IKPM	Rp. 350.000.000	33 IKPM	Rp. 349.750.000	- Rp. 250.000	efisiensi
01.01.01.01.01.23.012	Pembinaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS bagi siswa, mahasiswa dan pendidik	3 kelompok	Rp. 149.308.000	3 kelompok	Rp. 148.758.000	- Rp. 550.000	efisiensi
01.01.01.01.01.23.015	Penerbitan data dan informasi perguruan tinggi DIY	131 PT	Rp. 40.000.000	131 PT	Rp. 39.200.000	- Rp. 800.000	efisiensi
01.01.01.01.01.24	Program akselerasi pengembangan pendidikan terkemuka		Rp. 124.000.000		Rp. 313.840.000	Rp. 189.840.000	
01.01.01.01.01.24.021	Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Berbasis Kearifan dan Keunggulan Lokal	7 lokasi	Rp. 124.000.000	7 lokasi; 7.710 eksemplar	Rp. 313.840.000	Rp. 189.840.000	cetak buku pelajaran sejarah DIY sebanyak 7.710 eksemplar
01.01.01.01.01.26	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN PADA B L U D		Rp. 9.939.960.000		Rp. 10.097.460.000	Rp. 157.500.000	
01.01.01.01.01.26.001	Pelayanan Pendidikan Pada BLUD	90 %	Rp. 2.661.504.000	90 %	Rp. 2.561.504.000	- Rp. 100.000.000	Pengurangan bahan reguler dari dana layanan
01.01.01.01.01.26.002	Pendukung Pelayanan Pendidikan Pada BLUD	100 %	Rp. 7.278.456.000	100 %	Rp. 7.535.956.000	Rp. 257.500.000	'- kekurangan honor non PNS (penyesuaian dengan UMK) - kekurangan lembur UPJ - kekurangan iuran Jamsostek - peningkatan sarana asrama
01.18	Kepemudaan dan Olah Raga						
01.18.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga						
01.18.01.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN		Rp. 550.000.000		Rp. 605.942.000	Rp. 55.942.000	
01.18.01.01.01.16.008	Pameran prestasi hasil karya pemuda	5 stand	Rp. 100.000.000	5 stand	Rp. 97.025.000	- Rp. 2.975.000	efisiensi
01.18.01.01.01.16.010	Peningkatan kemandirian dan kepeloporan pemuda	5 bidang	Rp. 100.000.000	5 bidang	Rp. 160.000.000	Rp. 60.000.000	penghargaan bagi pemuda pemenang lomba kepeloporan
01.18.01.01.01.16.011	Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda	2 sentra	Rp. 100.000.000	2 sentra	Rp. 98.925.000	- Rp. 1.075.000	efisiensi
01.18.01.01.01.16.012	Pemberdayaan peran serta pemuda untuk	15 Orang	Rp. 250.000.000	15 Orang	Rp. 249.992.000	- Rp. 8.000	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 7.719.032.185			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	pembangunan pedesaan						
01.18.01.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA		Rp. 920.000.000		Rp. 1.666.800.000	Rp. 746.800.000	
01.18.01.01.01.17.002	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	100 kelompok	Rp. 920.000.000	100 kelompok	Rp. 1.666.800.000	Rp. 746.800.000	pengadaan bantuan modal pelatihan sebesar Rp750.000.000,00; efisiensi sebesar 3,200,000
01.18.01.01.01.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA		Rp. 0		Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	
01.18.01.01.01.21.012	Pengkajian Bumi Perkemahan Babarsari	-0 -	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Review terhadap DED Bumi Perkemahan Babarsari

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.613.958.730			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.02	Kesehatan						
01.02.01	Dinas Kesehatan						
01.02.01.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 4.209.535.695		Rp. 4.450.678.025	Rp. 241.142.330	
01.02.01.01.02.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	Rp. 14.875.000	12 bulan	Rp. 13.150.000	- Rp. 1.725.000	Efisiensi (Labkes)
01.02.01.01.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp. 1.199.999.900	12 bulan	Rp. 1.233.028.575	Rp. 33.028.675	1) Tambahan untuk belanja listrik di Bapelkes dikarenakan kenaikan kunjungan pendidikan dan pelatihan (Bapelkes); 2) Efisiensi DPA Rp. 6.184.800,- (Dinas Induk)
01.02.01.01.02.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	Rp. 114.240.000	12 bulan	Rp. 117.840.000	Rp. 3.600.000	1. Tambahan honor untuk 1 orang pengelola kepegawaian (1 orang x 12 bulan x Rp. 125.000,- = Rp. 1.500.000,-); Tambahan honor untuk 2 orang pengadministrasi kepegawaian (2 org x 12 bln x 100.000,- = 2.400.000,-) (Dinas Induk). 2) Tambahan kekurangan honor Penyimpan Barang dan Pengurus Barang (BAPELKES)
01.02.01.01.02.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	Rp. 414.344.300	12 bulan	Rp. 420.584.540	Rp. 6.240.240	1) Tambahan untuk kekurangan honor pencuci alat 2 bulan karena UMK naik (Labkes); 2) Efisiensi DPA Rp. 155.760,- (Labkes)
01.02.01.01.02.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	Rp. 49.942.800	12 bulan	Rp. 42.842.800	- Rp. 7.100.000	1) Efisiensi DPA Rp. 2.600.000,- (Dinas Induk); 2) Efisiensi DPA Rp. 4.500.000,- (Bapelkes)
01.02.01.01.02.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	100 %	Rp. 129.999.800	100 %	Rp. 134.999.800	Rp. 5.000.000	Tambahan untuk belanja alat tulis kantor (kertas dan toner) karena kenaikan jumlah pasien (Labkes)
01.02.01.01.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Rp. 150.499.815	100 %	Rp. 140.269.290	- Rp. 10.230.525	Efisiensi
01.02.01.01.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	12 bulan	Rp. 30.310.000	12 bulan	Rp. 25.438.000	- Rp. 4.872.000	Efisiensi DPA (Bapelkes)
01.02.01.01.02.01.016	Penyediaan bahan logistik	12 bulan	Rp. 88.877.900	12 bulan	Rp. 91.259.000	Rp. 2.381.100	Tambahan untuk penyesuaian harga BBM sebesar Rp. 2.291.100,- (Labkes) dan Rp. 90.000,- (Respira)
01.02.01.01.02.01.022	Penyediaan jasa keamanan	12 bulan	Rp. 552.791.680	12 bulan	Rp. 569.797.420	Rp. 17.005.740	1) Tambahan untuk kekurangan honor petugas jaga malam sebesar Rp. 3.198.000,- (Dinas Induk) 2) Tambahan untuk kekurangan pembayaran petugas jaga selama 3 bulan dikarenakan kenaikan UMK sebesar Rp. 16.800.000,- (Labkes); 3) Efisiensi DPA Rp. 944.580,- (Dinas Induk) 4) Efisiensi DPA Rp. 2.047.680,- (Labkes)
01.02.01.01.02.01.024	Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	12 bulan	Rp. 1.463.654.500	12 bulan	Rp. 1.661.468.600	Rp. 197.814.100	1) Kenaikan jasa pelayanan rumah sakit Rp. 167.925.000,- dikarenakan target PAD naik Rp. 559.750.000 (Labkes); 2) Pengembalian PAD 3% dari target

Nama SKPD : Dinas Kesehatan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.613.958.730			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
							retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 10.118.100,- (Bapelkes); 3) Tambahan untuk kekurangan honor juru masak dan supir sebesar Rp. 19.771.000,- (Respira)
01.02.01.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 1.818.766.100		Rp. 4.329.948.350	Rp. 2.511.182.250	
01.02.01.01.02.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-0 unit	Rp. 0	6 unit	Rp. 2.250.000.000	Rp. 2.250.000.000	1) Pengadaan 1 unit ambulan untuk PMI sebesar Rp. 250.000.000,-; 2) Pengadaan 5 Unit ambulan untuk RSUD Kab/Kota sebesar @ 400.000.000,-
01.02.01.01.02.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	Rp. 778.400.000	100 %	Rp. 773.549.850	- Rp. 4.850.150	Efisiensi (Bapelkes)
01.02.01.01.02.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	Rp. 167.850.000	100 %	Rp. 139.666.000	- Rp. 28.184.000	Efisiensi belanja modal alat-alat studio (Dinas Induk)
01.02.01.01.02.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %	Rp. 359.989.700	100 %	Rp. 638.874.700	Rp. 278.885.000	1) Pengecatan gedung kantor 600m2, slot pintu 10 buah, kran air 4 buah, perbaikan atap (Dinas Induk)Rp. 36.039.000,-; 2) Perbaikan tempat parkir kendaraan pasien yang rusak karena terkena angin kencang (Labkes)Rp. 49.400.000,- ; 3) Penyelesaian Rehab Gedung LPTP KIA bapelkes di Godean meliputi rehab dapur, paving conblok, penambahan tembok, pembuatan jalan tembus, pemindahan dan perbaikan pintu ruang cuci klinik, pemindahan dan perbaikan pintu kamar mandi, perbaikan kamar mandi. Pemeliharaan Gedung di Kalasan; penggabungan ruangan untuk perpustakaan Rp.193.446.000,-(Bapelkes)
01.02.01.01.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	Rp. 415.526.600	12 bulan	Rp. 422.427.800	Rp. 6.901.200	Penambahan volume BBM dari 3306 liter menjadi 4800 liter dikarenakan frekuensi operasional kendaraan dinas terutama ambulan (Respira)
01.02.01.01.02.02.026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	Rp. 96.999.800	12 bulan	Rp. 105.430.000	Rp. 8.430.200	1) Perbaikan Blower Incenerator sebesar RP. 1.500.000,- (Labkes); 2) Kenaikan harga Film Badge sebesar Rp. 7.100.000,- (Respira); 3) Efisiensi DPA Rp. 169.800,- (Dinas Induk)
01.02.01.01.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 0		Rp. 18.040.000	Rp. 18.040.000	
01.02.01.01.02.05.033	Pengembangan ISO	-0 -	Rp. 0	1 Paket	Rp. 18.040.000	Rp. 18.040.000	Sertifikasi ISO (Respira)
01.02.01.01.02.19	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 1.065.000.000		Rp. 1.063.255.000	Rp. -1.745.000	
01.02.01.01.02.19.009	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	10 dokumen, 1 paket kegiatan	Rp. 1.065.000.000	10 dokumen, 1 paket kegiatan	Rp. 1.063.255.000	- Rp. 1.745.000	1) Efisiensi DPA 2)Perubahan nama-nama Posyandu penerima hibah barang/jasa
01.02.01.01.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Rp. 25.848.000		Rp. 25.398.000	Rp. -450.000	
01.02.01.01.02.20.008	Sosialisasi Penanggulangan Masalah Gizi	3 Kali	Rp. 25.848.000	3 Kali	Rp. 25.398.000	- Rp. 450.000	Efisiensi DPA

Nama SKPD : Dinas Kesehatan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.613.958.730			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.02.01.01.02.21	Pengembangan Lingkungan Sehat		Rp. 521.522.650		Rp. 476.104.050	Rp. -45.418.600	
01.02.01.01.02.21.004	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 dokumen	Rp. 27.881.150	1 dokumen	Rp. 20.271.150	- Rp. 7.610.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.005	Pengembangan Kab/ Kota Sehat	2 dokumen, 3 kali ekspose	Rp. 59.608.800	2 dokumen, 3 kali ekspose	Rp. 54.758.800	- Rp. 4.850.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.007	Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	3 dokumen	Rp. 139.971.900	3 dokumen	Rp. 137.721.900	- Rp. 2.250.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.010	Kajian Kualitas Udara Indoor	2 dokumen	Rp. 39.867.900	2 dokumen	Rp. 38.384.900	- Rp. 1.483.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.013	Kajian Rumah Sehat	1 Dokumen, 1 kali Sosialisasi	Rp. 29.679.600	1 Dokumen, 1 kali Sosialisasi	Rp. 29.182.000	- Rp. 497.600	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.015	Pengembangan jejaring kualitas air minum	1 dokumen	Rp. 19.658.250	1 dokumen	Rp. 19.558.250	- Rp. 100.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.016	Peningkatan kapasitas petugas Penyehatan Lingkungan	4 hari, 25 orang	Rp. 9.468.400	4 hari, 25 orang	Rp. 8.668.400	- Rp. 800.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.017	Peningkatan Kapasitas Mitra Penyehatan Lingkungan	2 hari, 30 orang	Rp. 19.297.600	2 hari, 30 orang	Rp. 18.497.600	- Rp. 800.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.018	Validasi data surveilans kesling di kab/ kota	1 dokumen	Rp. 10.249.900	1 dokumen	Rp. 10.149.900	- Rp. 100.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.019	Penyelenggaraan surveilans kesling di kab/ kota	1 dokumen	Rp. 25.710.000	1 dokumen	Rp. 25.010.000	- Rp. 700.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.020	Monev STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	1 dokumen, 3 kali pertemuan	Rp. 33.096.600	1 dokumen, 3 kali pertemuan	Rp. 28.646.600	- Rp. 4.450.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.021	Monev Pasar Sehat	1 dokumen, 5 kali pertemuan	Rp. 36.887.750	1 dokumen, 5 kali pertemuan	Rp. 32.899.750	- Rp. 3.988.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.022	Inventarisasi Kesehatan Lingkungan TTU	2 dokumen, 25 RS, 1 kali pertemuan	Rp. 40.059.000	2 dokumen, 25 RS, 1 kali pertemuan	Rp. 30.409.000	- Rp. 9.650.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.21.023	Monitoring dan Evaluasi TPM	2 dokumen, 1 kali pertemuan	Rp. 30.085.800	2 dokumen, 1 kali pertemuan	Rp. 21.945.800	- Rp. 8.140.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.22	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular)		Rp. 29.999.910		Rp. 0	Rp. -29.999.910	

Nama SKPD : Dinas Kesehatan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.613.958.730			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.02.01.01.02.22.029	Penguatan Kelembagaan Pokjanal DBD Regional Jawa	1 dokumen	Rp. 19.999.950	1 , 125 warkah	Rp. 0	- Rp. 19.999.950	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.22.049	Pertemuan Lintas Batas Malaria	1 dokumen	Rp. 9.999.960	1 dokumen	Rp. 0	- Rp. 9.999.960	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-pa		Rp. 1.645.339.000		Rp. 1.943.239.000	Rp. 297.900.000	
01.02.01.01.02.26.022	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)	19 jenis	Rp. 100.000.000	19 jenis	Rp. 117.550.000	Rp. 17.550.000	Pembelian 3 unit AC untuk gedung baru (Respira)
01.02.01.01.02.26.032	Pengadaan Reagen/Bahan Kimia	1 Paket	Rp. 995.339.000	1 Paket	Rp. 1.145.339.000	Rp. 150.000.000	Tambahan belanja reagen dikarenakan jumlah pasien meningkat sehingga kebutuhan reagen juga meningkat (Labkes)
01.02.01.01.02.26.033	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	1 Paket	Rp. 550.000.000	1 Paket	Rp. 680.350.000	Rp. 130.350.000	Untuk pembelian MAS (Microbacterium Air Sample) karena hanya punya 1 alat dan pemakaian terlalu sering (sampel banyak)sehingga meminimalisir kerusakan alat (Labkes)
01.02.01.01.02.27	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah S		Rp. 194.996.800		Rp. 233.996.800	Rp. 39.000.000	
01.02.01.01.02.27.001	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	12 bulan	Rp. 99.996.800	12 bulan	Rp. 123.996.800	Rp. 24.000.000	Perbaikan MAS (Microbacterium Air Sample) yang rusak (Labkes)
01.02.01.01.02.27.017	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	12 bulan	Rp. 50.000.000	12 bulan	Rp. 60.000.000	Rp. 10.000.000	Pemasangan Rontgen di gedung baru (Respira)
01.02.01.01.02.27.020	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	12 bulan	Rp. 45.000.000	12 bulan	Rp. 50.000.000	Rp. 5.000.000	Pemasangan AC lama di gedung baru
01.02.01.01.02.33	Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan		Rp. 80.000.000		Rp. 86.272.660	Rp. 6.272.660	
01.02.01.01.02.33.003	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekes	12 bulan	Rp. 80.000.000	12 bulan	Rp. 86.272.660	Rp. 6.272.660	1) Tambahan kekurangan honor petugas instalasi farmasi disesuaikan dengan kenaikan UMK Kota Yogyakarta Rp. 7.598.500,-; 2) Efisiensi DPA RP. 1.325.840,-
01.02.01.01.02.34	Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin		Rp. 82.998.000		Rp. 65.683.000	Rp. -17.315.000	

Nama SKPD : Dinas Kesehatan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.613.958.730			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.02.01.01.02.34.001	Pengembangan Jaminan Pelayanan Kesehatan	2 dokumen	Rp. 37.999.000	2 dokumen	Rp. 35.939.000	- Rp. 2.060.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.34.007	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jamkesta	64 %	Rp. 44.999.000	64 %	Rp. 29.744.000	- Rp. 15.255.000	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Tim Teknis pelaksanaan Jamkes yang semula dibayarkan 12 bulan disesuaikan dengan SBU mejadi 3 bulan
01.02.01.01.02.36	Program Pelayanan Kesehatan		Rp. 615.216.800		Rp. 1.093.386.800	Rp. 478.170.000	
01.02.01.01.02.36.003	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	6 Paket	Rp. 357.337.200	9 Paket	Rp. 697.154.200	Rp. 339.817.000	Tambahan untuk pengiriman pelatihan GELS mendukung sistem rujukan dan sosialisasi sistem rujukan sebesar Rp. 344.617.000,-; 2) Efisiensi DPA Rp. 4.800.000
01.02.01.01.02.36.005	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	3 dokumen, 6 kali bimtek	Rp. 244.297.600	3 dokumen, 6 kali bimtek	Rp. 217.297.600	- Rp. 27.000.000	Efisiensi DPA
01.02.01.01.02.36.011	Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan Dasar	30 %, 30 %, 25%, 75%	Rp. 13.582.000	30 %, 30%, 25%, 75%, 35%, 25%, 16%	Rp. 178.935.000	Rp. 165.353.000	Tambah untuk pengiriman peserta pelatihan PPGD (Penanggulangan Gawat Darurat bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas sejumlah 20 orang, Pengiriman Peserta pelatihan PPGD bagi awam sejumlah 20 orang dan Pengiriman peserta pelatihan GELS (Genereal Emergencvy Life Support) bagi dokter Puskesmas sejumlah 20 orang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga Puskesmas dalam memberikan pelayanan
01.02.01.01.02.38	Program Sistem Informasi Kesehatan		Rp. 3.041.000.000		Rp. 3.051.200.000	Rp. 10.200.000	
01.02.01.01.02.38.004	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	100 %	Rp. 3.041.000.000	100 %	Rp. 3.051.200.000	Rp. 10.200.000	Tambahan untuk pendukung pengadaan jasa pelayanan manajemen jamkesta DIY berbasis teknologi
01.02.01.01.02.39	Program Pendidikan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan		Rp. 433.463.500		Rp. 408.243.500	Rp. -25.220.000	
01.02.01.01.02.39.002	Pendidikan dan Pelatihan Formal Kesehatan	84 Orang	Rp. 223.659.500	80 Orang	Rp. 178.639.500	- Rp. 45.020.000	1) Tambahan untuk honor narasumber nasional dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebesar Rp. 14.980.000,- (Dinas Induk); 2) Efisiensi sebesar Rp. 60.000.000,- dikarenakan pengurangan target pengiriman peserta diklat kesehatan dari 39 orang menjadi 35 orang (Respira)
01.02.01.01.02.39.004	Pelatihan Kesehatan Masyarakat	2 kali pelatihan, pengiriman diklat 2 orang	Rp. 60.000.000	2 kali pelatihan, pengiriman diklat 2 orang	Rp. 59.300.000	- Rp. 700.000	Efisiensi DPA (Bapelkes)
01.02.01.01.02.39.005	Perijinan dan Pembinaan Tenaga dan Sarana Kesehatan	99 %	Rp. 149.804.000	99 %	Rp. 170.304.000	Rp. 20.500.000	Penerbitan 16 jenis Surat Izin Tenaga Kesehatan
01.02.01.01.02.41	Program Pengembangan Manajemen Kesehatan		Rp. 315.167.320		Rp. 439.867.320	Rp. 124.700.000	
01.02.01.01.02.41.005	Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan	1 Paket	Rp. 315.167.320	1 Paket	Rp. 439.867.320	Rp. 124.700.000	1) Tambahan untuk Belanja Sertifikasi sebesar Rp. 100.000,-; Tambahan Rp. 100.000.000,- untuk pengembangan mutu manajemen pelayanan kesehatan sesuai Kebijakan Gubernur bahwa tahun 2014 semua Unit Pelayanan harus sudah tersertifikasi ISO pada sub kegiatan Belanja Sertifikasi UPT BP-4 dan Bapel Jamkessos; 2) Tambahan untuk biaya akreditasi ISO 9001-2008 dan Pemantauan Mutu Eksternal (Labkes)

Nama SKPD : Dinas Kesehatan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.613.958.730			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.02.01.01.02.42	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D		Rp. 6.347.231.000		Rp. 6.354.731.000	Rp. 7.500.000	
01.02.01.01.02.42.004	Pendukung Pelayanan Jaminan Kesehatan pada BLUD	12 bulan	Rp. 6.347.231.000	12 bulan	Rp. 6.354.731.000	Rp. 7.500.000	Tambahan untuk kekurangan honor pengelola keuangan untuk 2 bulan sebesar Rp. 4.800.000,- dan kekurangan pembayaran internet sebesar Rp. 2.700.000,- (Bapeljamkesos)

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Rumah Sakit Grhasia				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 277.001.800			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.02	Kesehatan						
01.02.02	Rumah Sakit Grhasia						
01.02.02.01.02.42	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D		Rp. 18.124.387.371		Rp. 18.401.389.171	Rp. 277.001.800	
01.02.02.01.02.42.001	Pelayanan Kesehatan	1 tahun	Rp. 1.100.270.487	1 tahun	Rp. 1.343.184.487	Rp. 242.914.000	Tambahan untuk pelayanan pendidikan
01.02.02.01.02.42.002	Pendukung Pelayanan Kesehatan	1 tahun	Rp. 17.024.116.884	1 tahun	Rp. 17.058.204.684	Rp. 34.087.800	Tambahan untuk pendukung pelayanan sarana aparatur dan peningkatan manajemen pelayanan RS

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 87.287.395.231			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.03	Pekerjaan Umum						
01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral						
01.03.01.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 255.000.000		Rp. 315.000.000	Rp. 60.000.000	
01.03.01.01.03.01.002	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp. 255.000.000	12 bulan	Rp. 315.000.000	Rp. 60.000.000	adanya kenaikan TDL, serta penambahan jaringan perpipaan dan tangki tinja yang membuat kebutuhan listrik untuk operasional IPAL meningkat
01.03.01.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 3.174.984.300		Rp. 7.532.663.943	Rp. 4.357.679.643	
01.03.01.01.03.02.003	Pembangunan gedung kantor	2	Rp. 2.500.000.000	5	Rp. 2.959.715.030	Rp. 459.715.030	efisiensi dan tambahan pembangunan 3 unit ruangan di IPAL Sewon untuk menerima kunjungan tamu dan gudang
01.03.01.01.03.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3	Rp. 142.768.200	3	Rp. 382.861.810	Rp. 240.093.610	Tambahan meubelair untuk Aula baru, lampu, AC, dan komputer Balai IPAL Sewon
01.03.01.01.03.02.009	pengadaan peralatan gedung kantor	5 unit	Rp. 232.216.100	21 unit	Rp. 3.890.347.103	Rp. 3.658.131.003	Pembelian BOD Trac Digital (4 unit), all in one hand heldmeter (1 unit) dan pembelian automatic titrator (1unit). Uji COD dan DO tidak bisa dilakukan jika alat ini rusak, demikian pula dengan dasar perhitungan lama kerja aerator. Pembelian I C P (Inductively Coupled Plasma Spectrometer) + Reagents, Water Purifier for ICP Spectrometer, Microwave Reaction System, model MARS 6, GPS type Geodetic, Real Time Kinematic, Submersible Pump 5,5 KVA, Alat Penggaruk Sampah, Motor listrik 3 phase untuk lift Pump, motor listrik 3 phase untuk aerator, Tangki Oksigen Selam, (Crearance Import)Transport Huber, Alat Pengolah Lumpur
01.03.01.01.03.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	-0	Rp. 300.000.000	-0	Rp. 299.740.000	- Rp. 260.000	efisiensi
01.03.01.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 72.597.980		Rp. 72.597.900	Rp. -80	
01.03.01.01.03.06.017	Penyusunan Laporan keuangan SKPD	-0	Rp. 72.597.980	-0	Rp. 72.597.900	- Rp. 80	efisiensi
01.03.01.01.03.16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG		Rp. 3.350.000.000		Rp. 3.345.310.000	Rp. -4.690.000	

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 87.287.395.231			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.03.01.01.03.16.001	Perencanaan dan Pengembangan saluran Drainase Lingkungan	-0	Rp. 350.000.000	-0	Rp. 347.660.000	- Rp. 2.340.000	efisiensi
01.03.01.01.03.16.003	Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong	-0	Rp. 3.000.000.000	-0	Rp. 2.997.650.000	- Rp. 2.350.000	efisiensi efisiensi
01.03.01.01.03.18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN		Rp. 29.421.812.000		Rp. 90.921.959.377	Rp. 61.500.147.377	
01.03.01.01.03.18.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	11	Rp. 17.768.400.000	40	Rp. 77.768.400.000	Rp. 60.000.000.000	Tambahan untuk rehabilitasi/pemeliharaan : - Ruas Sayegan-Balangan Kebonagung 2 : 10,25 Km - Ruas Sentolo-Kalibawang-Klangon : 14,37 Km - Ruas Sambipitu-Nglipar-Semin : 7,00 Km - Ruas Bantul-Srandakan dan Sedayu-Pandak: 8,38 Km
01.03.01.01.03.18.008	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (DAK)	2 km	Rp. 4.309.582.000	3 km	Rp. 5.243.441.387	Rp. 933.859.387	Optimalisasi sisa DAK Bidang Jalan 2011 & 2012 sebesar Rp. 814.614.830 ditambah biaya pendamping konstruksi penunjang Rp. 81.461.483
01.03.01.01.03.18.010	Pemeliharaan Rutin Jalan	52 ruas jalan	Rp. 7.343.830.000	54 ruas jalan	Rp. 7.910.117.990	Rp. 566.287.990	Penambahan ruas pemeliharaan rutin jalan Sentolo-Dekso-Klangon
01.03.01.01.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya		Rp. 4.691.307.900		Rp. 4.690.917.900	Rp. -390.000	
01.03.01.01.03.24.024	Pemeliharaan Jaringan irigasi	-0	Rp. 4.691.307.900	-0	Rp. 4.690.917.900	- Rp. 390.000	efisiensi
01.03.01.01.03.32	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN		Rp. 195.000.000		Rp. 194.750.000	Rp. -250.000	
01.03.01.01.03.32.002	Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian	-0 tetap	Rp. 195.000.000	-0 tetap	Rp. 194.750.000	- Rp. 250.000	efisiensi
01.03.01.01.03.33	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI		Rp. 260.000.000		Rp. 249.637.110	Rp. -10.362.890	
01.03.01.01.03.33.001	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perUndang-Undangan	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 99.700.000	- Rp. 300.000	efisiensi
01.03.01.01.03.33.002	Sistem Database Jasa Konstruksi	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 92.687.110	- Rp. 7.312.890	efisiensi
01.03.01.01.03.33.003	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	-0	Rp. 60.000.000	-0	Rp. 57.250.000	- Rp. 2.750.000	efisiensi
01.03.01.01.03.34	PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI		Rp. 275.000.000		Rp. 256.850.000	Rp. -18.150.000	
01.03.01.01.03.34.001	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi	-0	Rp. 125.000.000	-0	Rp. 110.150.000	- Rp. 14.850.000	efisiensi
01.03.01.01.03.34.002	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 99.100.000	- Rp. 900.000	efisiensi
01.03.01.01.03.34.003	Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Daerah	-0	Rp. 50.000.000	-0	Rp. 47.600.000	- Rp. 2.400.000	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 87.287.395.231			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.03.01.01.03.35	PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI		Rp. 450.000.000		Rp. 445.355.000	Rp. -4.645.000	
01.03.01.01.03.35.001	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 97.610.000	- Rp. 2.390.000	efisiensi
01.03.01.01.03.35.002	Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-0	Rp. 50.000.000	-0	Rp. 48.800.000	- Rp. 1.200.000	efisiensi efisiensi
01.03.01.01.03.35.003	Pengawasan Terhadap Perijinan Jasa Konstruksi	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 99.610.000	- Rp. 390.000	efisiensi
01.03.01.01.03.35.004	Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan Jasa Konstruksi	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 99.825.000	- Rp. 175.000	efisiensi
01.03.01.01.03.35.005	Pengawasan Terhadap K3	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 99.510.000	- Rp. 490.000	efisiensi
01.03.01.01.03.36	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Rp. 75.000.000		Rp. 73.830.000	Rp. -1.170.000	
01.03.01.01.03.36.003	Penyusunan NSPK Persampahan	-0	Rp. 75.000.000	-0	Rp. 73.830.000	- Rp. 1.170.000	efisiensi
01.03.01.01.03.37	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN		Rp. 1.099.950.000		Rp. 1.549.950.000	Rp. 450.000.000	
01.03.01.01.03.37.002	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan	4 kawasan	Rp. 1.099.950.000	6 kawasan	Rp. 1.549.950.000	Rp. 450.000.000	1. Perenc. Teknis penataan kawasan S. code (gemawang) 150 jt 2. Identifikasi & inventarisasi penataan kawasan Tegal Panggung 50 jt. Identifikasi & perencanaan penataan kawasan Parkir Ngabean 150 jt
01.03.01.01.03.38	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN		Rp. 18.900.000.000		Rp. 18.946.610.000	Rp. 46.610.000	
01.03.01.01.03.38.002	Pengembangan desa pusat pertumbuhan	-0	Rp. 1.600.000.000	-0	Rp. 1.597.030.000	- Rp. 2.970.000	efisiensi
01.03.01.01.03.38.003	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	173 lokasi	Rp. 17.300.000.000	173 lokasi & 1 DED	Rp. 17.349.580.000	Rp. 49.580.000	173 lokasi + 1 DED Joggingtrack di Kawasan Nglanggeran G. Kidul (efisiensi)
01.03.01.01.03.39	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN		Rp. 99.987.000		Rp. 98.817.000	Rp. -1.170.000	
01.03.01.01.03.39.003	Inventarisasi Pengelolaan gedung Pemerintah	-0	Rp. 99.987.000	-0	Rp. 98.817.000	- Rp. 1.170.000	efisiensi
01.03.01.01.03.40	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN		Rp. 62.778.691.525		Rp. 63.559.671.525	Rp. 780.980.000	
01.03.01.01.03.40.001	perencanaan peningkatan jalan	0 DED	Rp. 0	6 DED	Rp. 596.000.000	Rp. 596.000.000	6 DED Peningkatan Jalan Ruas (Siluk-Kretek, Nagung-Cicikan, Klepu-Siluwo, Semin-Bulu, Karangmojo-Ponjong, Karangmojo-Semin)
01.03.01.01.03.40.002	Peningkatan Jalan	-0	Rp. 34.334.691.525	-0	Rp. 34.322.851.525	- Rp. 11.840.000	efisiensi
01.03.01.01.03.40.003	Perencanaan Peningkatan Jembatan	1 laporan	Rp. 240.000.000	2 laporan	Rp. 444.000.000	Rp. 204.000.000	1 DED Jembatan Buntung panjang 80 m di ruas jalan Selokan mataram

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 87.287.395.231			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.03.01.01.03.40.004	Peningkatan Jembatan	-0	Rp. 28.204.000.000	-0	Rp. 28.196.820.000	- Rp. 7.180.000	efisiensi
01.03.01.01.03.41	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN LABORATORIUM		Rp. 425.000.000		Rp. 424.120.000	Rp. -880.000	
01.03.01.01.03.41.002	Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian	-0	Rp. 425.000.000	-0	Rp. 424.120.000	- Rp. 880.000	efisiensi
01.03.01.01.03.42	PROGRAM PENGKAJI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIDANG PEKERJAAN UMUM		Rp. 593.955.800		Rp. 593.865.800	Rp. -90.000	
01.03.01.01.03.42.004	Informasi Teknologi Bidang PU	-0	Rp. 593.955.800	-0	Rp. 593.865.800	- Rp. 90.000	efisiensi
01.03.01.01.03.43	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR		Rp. 12.000.000.000		Rp. 27.346.800.000	Rp. 15.346.800.000	
01.03.01.01.03.43.001	Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan	50000 m2	Rp. 12.000.000.000	55000 m2	Rp. 27.346.800.000	Rp. 15.346.800.000	Untuk pembayaran tanah di selokan mataram yg sdh harganya sepakat sebesar Rp. 12,5 M dan pembayaran JJLS Rp. 3 M
01.03.01.01.03.44	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM		Rp. 1.574.270.000		Rp. 4.373.100.000	Rp. 2.798.830.000	
01.03.01.01.03.44.002	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	15 kelompok	Rp. 1.499.270.000	15 , + 1 DED, + pengadaan tanah	Rp. 4.299.270.000	Rp. 2.800.000.000	Penyusunan DED Air minum Kartamantul & Penyusunan UKL-UPL Kartamantul + pengadaan tanah utk fasilitas air minum 2,4 M
01.03.01.01.03.44.004	Penyusunan NSPK Air Minum	-0	Rp. 75.000.000	-0	Rp. 73.830.000	- Rp. 1.170.000	efisiensi
01.03.01.01.03.45	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH		Rp. 2.794.677.200		Rp. 2.845.350.831	Rp. 50.673.631	
01.03.01.01.03.45.001	Penyediaan Sarana Prasarana Air Limbah	-0	Rp. 2.475.000.000	-0	Rp. 2.473.200.000	- Rp. 1.800.000	efisiensi
01.03.01.01.03.45.002	fasilitasi teknik pengelolaan air limbah	-0	Rp. 75.000.000	-0	Rp. 73.830.000	- Rp. 1.170.000	efisiensi
01.03.01.01.03.45.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah	13 OB	Rp. 11.604.580	13 OB	Rp. 13.848.211	Rp. 2.243.631	Penyesuaian gaji PTT berdasarkan UMK 2013
01.03.01.01.03.45.006	Pemantauan Kualitas dan lingkungan sistem Jaringan Limbah	200 Kali	Rp. 233.072.620	200 Kali	Rp. 284.472.620	Rp. 51.400.000	Pembelian reagen untuk BOD Digital
01.04	Perumahan						
01.04.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral						
01.04.01.01.03.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Rp. 10.712.500.000		Rp. 10.708.600.000	Rp. -3.900.000	
01.04.01.01.03.15.006	Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	-0	Rp. 10.712.500.000	-0	Rp. 10.708.600.000	- Rp. 3.900.000	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 87.287.395.231			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.04.01.01.03.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN		Rp. 150.000.000		Rp. 148.650.000	Rp. -1.350.000	
01.04.01.01.03.16.001	Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan	-0	Rp. 150.000.000	-0	Rp. 148.650.000	- Rp. 1.350.000	efisiensi
01.04.01.01.03.17	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN		Rp. 4.100.000.000		Rp. 4.098.407.800	Rp. -1.592.200	
01.04.01.01.03.17.002	Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	-0	Rp. 3.600.000.000	-0	Rp. 3.598.997.800	- Rp. 1.002.200	efisiensi
01.04.01.01.03.17.003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan	-0	Rp. 500.000.000	-0	Rp. 499.410.000	- Rp. 590.000	efisiensi
01.04.01.01.03.21	PROGRAM PENATAAN KAWASAN PADAT PENDUDUK DAN KUMUH		Rp. 4.000.000.000		Rp. 3.999.040.000	Rp. -960.000	
01.04.01.01.03.21.001	Penataan kawasan kumuh	-0	Rp. 4.000.000.000	-0	Rp. 3.999.040.000	- Rp. 960.000	efisiensi
01.05	Penataan Ruang						
01.05.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral						
01.05.01.01.03.15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG		Rp. 994.357.000		Rp. 992.534.800	Rp. -1.822.200	
01.05.01.01.03.15.003	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 99.999.000	- Rp. 1.000	efisiensi
01.05.01.01.03.15.005	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	-0	Rp. 700.000.000	-0	Rp. 699.996.000	- Rp. 4.000	efisiensi
01.05.01.01.03.15.012	Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang	-0	Rp. 94.399.000	-0	Rp. 93.558.800	- Rp. 840.200	efisiensi
01.05.01.01.03.15.018	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR	-0	Rp. 99.958.000	-0	Rp. 98.981.000	- Rp. 977.000	efisiensi
01.05.01.01.03.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG		Rp. 1.024.600.000		Rp. 1.012.909.450	Rp. -11.690.550	
01.05.01.01.03.16.002	Penyusunan Norma, Standar, Dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	2 dokumen	Rp. 700.000.000	3 dokumen	Rp. 747.500.000	Rp. 47.500.000	Amanat Perda 2 Tahun 2010 (Penyusunan Pergub. Ttg Ketinggian Bangunan umum di atas permukaan tanah s.d batas ketinggian 145 meter)
01.05.01.01.03.16.006	Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 99.140.000	- Rp. 860.000	efisiensi
01.05.01.01.03.16.007	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pemanfaatan Ruang	-0	Rp. 150.000.000	-0	Rp. 92.820.000	- Rp. 57.180.000	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 87.287.395.231			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.05.01.01.03.16.009	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang	-0	Rp. 74.600.000	-0	Rp. 73.449.450	- Rp. 1.150.550	efisiensi
01.05.01.01.03.17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		Rp. 847.360.000		Rp. 835.162.500	Rp. -12.197.500	
01.05.01.01.03.17.001	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 dokumen	Rp. 496.452.000	2 dokumen	Rp. 535.982.000	Rp. 39.530.000	Amanat Perda 2 Tahun 2010 (penyusunan Pergub ttg tata cara pengenaan sanksi administratif)
01.05.01.01.03.17.004	Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-0	Rp. 83.040.000	-0	Rp. 68.636.000	- Rp. 14.404.000	efisiensi
01.05.01.01.03.17.005	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	-0	Rp. 173.514.000	-0	Rp. 163.717.000	- Rp. 9.797.000	efisiensi
01.05.01.01.03.17.007	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-0	Rp. 94.354.000	-0	Rp. 66.827.500	- Rp. 27.526.500	efisiensi
02	Pilihan						
02.03	ESDM						
02.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral						
02.03.01.01.03.18	PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH BERWAWASAN KONSERVASI		Rp. 350.000.000		Rp. 374.600.000	Rp. 24.600.000	
02.03.01.01.03.18.003	Pembinaan dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah	1 dokumen	Rp. 350.000.000	1 Dokumen, 1 Laporan, 9 draft Rapergub dan 1 draft R	Rp. 374.600.000	Rp. 24.600.000	1 Dokumen, 1 Laporan, 9 draft Rapergub dan 1 draft Rakepgub, 500 eks dan 500 eks, 1 dokumen + Tambahan FGD untuk penyelesaian 9 draft Rapergub
02.03.01.01.03.20	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI		Rp. 400.000.000		Rp. 398.960.000	Rp. -1.040.000	
02.03.01.01.03.20.002	Pengembangan Biogas Untuk Masyarakat Pedesaan	-0	Rp. 400.000.000	-0	Rp. 398.960.000	- Rp. 1.040.000	efisiensi
02.03.01.01.03.21	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR		Rp. 100.000.000		Rp. 98.425.000	Rp. -1.575.000	
02.03.01.01.03.21.003	Pengawasan Bahan Bakar Bersubsidi	-0	Rp. 100.000.000	-0	Rp. 98.425.000	- Rp. 1.575.000	efisiensi
02.03.01.01.03.23	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN		Rp. 3.004.000.000		Rp. 4.953.000.000	Rp. 1.949.000.000	
02.03.01.01.03.23.003	Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan	8 dusun, 493 rumah, 4 dokumen, 4 kali	Rp. 2.644.000.000	9 dusun, 593 rumah, 6 dok, 4 kali, 1 paket, 10 paket	Rp. 3.904.000.000	Rp. 1.260.000.000	Tambahan kinerja : tambahan jaringan listrik pedesaan 1 dusun, dan pemasangan instalasi listrik 100 rumah di Kulonprogo, dan penambahan paket pekerjaan peningkatan jaringan dari 1 phase ke 3 phase di Bantul, tambahan 10 paket lokasi LAMDA(@lokasi 20 rumah)

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 87.287.395.231			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.03.01.01.03.23.007	Penyusunan Desain Detail Jaringan Listrik Pedesaan	1 dokumen	Rp. 360.000.000	3 dokumen	Rp. 1.049.000.000	Rp. 689.000.000	Penyusunan DED untuk pekerjaan fisik 2014

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.150.072.630			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.06	Perencanaan Pembangunan						
01.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
01.06.01.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 7.700.000		Rp. 10.386.000	Rp. 2.686.000	
01.06.01.01.06.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	Rp. 7.700.000	100 %	Rp. 10.386.000	Rp. 2.686.000	Tambahan pembayaran pajak kendaraan dinas
01.06.01.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 1.122.000.000		Rp. 1.259.245.000	Rp. 137.245.000	
01.06.01.01.06.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 jenis	Rp. 360.000.000	3 Jenis, 1 Paket	Rp. 470.000.000	Rp. 110.000.000	Pemasangan automatic genset dan instalasi
01.06.01.01.06.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	Rp. 325.000.000	5 Jenis, 1 Paket Peralatan Studi	Rp. 516.090.000	Rp. 191.090.000	Pengadaan 1 unit smartboard dan 4 unit laptop untuk kebutuhan studio, Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 6.910.000,-
01.06.01.01.06.02.011	DED Pembangunan Gedung Kantor	0 dokumen	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 45.900.000	Rp. 45.900.000	Penyusunan DED Gedung Radyo Suyoso
01.06.01.01.06.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2000 m2	Rp. 100.000.000	2000 m2	Rp. 0	- Rp. 100.000.000	Disetor kembali
01.06.01.01.06.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Unit Roda 4 dan 17 Unit Roda 2	Rp. 337.000.000	12 Unit Roda 4 dan 17 Unit Roda 2	Rp. 227.255.000	- Rp. 109.745.000	Efisiensi BBM Karena Kelebihan Alokasi Anggaran dan Minimalis Penggunaan BBM
01.06.01.01.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 0		Rp. 32.174.600	Rp. 32.174.600	
01.06.01.01.06.05.056	Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu	0 %	Rp. 0	1 Paket	Rp. 32.174.600	Rp. 32.174.600	Fasilitasi untuk pejabat fungsional peneliti dan perencana
01.06.01.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 137.999.000		Rp. 90.149.000	Rp. -47.850.000	
01.06.01.01.06.06.017	Penyusunan laporan keuangan SKPD	5 dokumen	Rp. 50.000.000	5 dokumen	Rp. 15.200.000	- Rp. 34.800.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 34.800.000,-
01.06.01.01.06.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7 dokumen	Rp. 87.999.000	7 dokumen	Rp. 74.949.000	- Rp. 13.050.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 13.050.000,-
01.06.01.01.06.15	Program Pengembangan Data/Informasi		Rp. 731.759.300		Rp. 771.239.300	Rp. 39.480.000	
01.06.01.01.06.15.007	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 sistem	Rp. 224.580.400	1 sistem	Rp. 224.120.400	- Rp. 460.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 460.000,-

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.150.072.630			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.06.01.01.06.15.013	Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Paket	Rp. 154.071.400	2 Paket	Rp. 204.461.400	Rp. 50.390.000	Penyusunan Sistem Aplikasi ROPK serta pelatihan Aplikasi ROPK untuk SKPD, Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 660.000,-
01.06.01.01.06.15.029	Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah	1 Sistem, 1 Dokumen	Rp. 304.004.000	1 Sistem, 1 Dokumen	Rp. 294.004.000	- Rp. 10.000.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 10.000.000,-
01.06.01.01.06.15.030	Penyusunan Profil Bappeda	1 dokumen	Rp. 49.103.500	1 dokumen	Rp. 48.653.500	- Rp. 450.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 450.000,-
01.06.01.01.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp. 357.734.750		Rp. 745.822.450	Rp. 388.087.700	
01.06.01.01.06.21.033	Sinkronisasi Dan Koordinasi Program Pembangunan	2 dokumen	Rp. 180.050.000	2 dokumen	Rp. 175.599.800	- Rp. 4.450.200	Efisiensi dari DPA Sebesar 4.450.200,-
01.06.01.01.06.21.063	Evaluasi Musrenbang Regional Jawa-Bali	1 Kali	Rp. 177.684.750	1 Kali	Rp. 159.089.750	- Rp. 18.595.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 18.595.000,-
01.06.01.01.06.21.064	Sosialisasi RPJMD	0 dokumen	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 123.880.500	Rp. 123.880.500	Pencetakan dan sosialisasi Dokumen RPJMD 2012-2017
01.06.01.01.06.21.065	Pelatihan Aplikasi Jogjaplan bagi SKPD	0 Kali	Rp. 0	1 Kali	Rp. 59.458.000	Rp. 59.458.000	Penyesuaian aplikasi jogjaplan dengan ketentuan baru Permendagri 23/2013 tentang perubahan RKPD dan pengenalan menu baru dalam aplikasi jogjaplan
01.06.01.01.06.21.066	Review Proses Perencanaan Pembangunan	0 dokumen	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 150.106.400	Rp. 150.106.400	Review proses perencanaan pembangunan untuk tahun 2015, penyusunan meta indikator RPJMD 2012-2017, Aplikasi cloud sistem perencanaan meta indikator RPJMD
01.06.01.01.06.21.067	Penyusunan Pedoman Tatacara Koordinasi Antar Kabupaten/Kota di dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	0 dokumen	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 77.688.000	Rp. 77.688.000	Penyusunan Pergub Pedoman Tatacara Koordinasi Antar Kabupaten/Kota
01.06.01.01.06.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Rp. 148.769.400		Rp. 398.769.400	Rp. 250.000.000	
01.06.01.01.06.22.062	Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha	1 dokumen	Rp. 148.769.400	1 dokumen	Rp. 398.769.400	Rp. 250.000.000	Penyelenggaraan kegiatan "Kongres Ekonomi Jogja 2025"
01.06.01.01.06.23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		Rp. 935.562.700		Rp. 1.083.133.250	Rp. 147.570.550	
01.06.01.01.06.23.015	Koordinasi Pencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	3 dokumen	Rp. 188.047.750	3 dokumen	Rp. 179.852.750	- Rp. 8.195.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 8.195.000,-
01.06.01.01.06.23.041	Perencanaan Pembangunan Sub bidang Pengembangan SDM	1 dokumen	Rp. 336.933.850	1 dokumen	Rp. 331.317.850	- Rp. 5.616.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 5.616.000,-
01.06.01.01.06.23.042	Perencanaan Pembangunan Sub bidang Pengembangan Kesra	1 dokumen	Rp. 322.178.350	1 dokumen	Rp. 321.303.350	- Rp. 875.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 875.000,-
01.06.01.01.06.23.043	Penyusunan Grand Design Revitalisasi Keluarga dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak	-0 -	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 172.500.000	Rp. 172.500.000	Penyusunan Grand Design Revitalisasi Keluarga dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak
01.06.01.01.06.23.046	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGs	1 dokumen	Rp. 88.402.750	1 dokumen	Rp. 78.159.300	- Rp. 10.243.450	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 10.243.450,-
01.06.01.01.06.26	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana		Rp. 553.261.840		Rp. 568.679.340	Rp. 15.417.500	

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.150.072.630			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.06.01.01.06.26.002	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	Rp. 296.910.000	1 Dokumen, 1 Paket	Rp. 315.810.000	Rp. 18.900.000	Penambahan untuk honor tim Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di DIY
01.06.01.01.06.26.008	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan	2 DI	Rp. 147.961.840	2 DI	Rp. 145.239.340	- Rp. 2.722.500	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 2.722.500,-
01.06.01.01.06.26.009	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD	4 dokumen	Rp. 108.390.000	4 dokumen	Rp. 107.630.000	- Rp. 760.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 760.000,-
01.06.01.01.06.27	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan		Rp. 710.335.650		Rp. 617.630.950	Rp. -92.704.700	
01.06.01.01.06.27.002	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan	1 dokumen	Rp. 295.880.650	1 dokumen	Rp. 295.160.650	- Rp. 720.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 720.000,-
01.06.01.01.06.27.005	Fasilitasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia dan Laboratorium Ketahanan Nasional (labkurtannas) di Provinsi DIY	1 dokumen	Rp. 99.982.000	1 dokumen	Rp. 97.586.800	- Rp. 2.395.200	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 2.395.200,-
01.06.01.01.06.27.006	Perencanaan Penanganan Bencana	1 dokumen	Rp. 98.500.000	1 dokumen	Rp. 43.424.500	- Rp. 55.075.500	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 55.075.500,-
01.06.01.01.06.27.007	Fasilitasi Pemberantasan Korupsi	1 dokumen	Rp. 215.973.000	1 dokumen	Rp. 181.459.000	- Rp. 34.514.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 34.514.000,-
01.06.01.01.06.28	Program Pengendalian Pembangunan Daerah		Rp. 960.906.695		Rp. 1.241.795.295	Rp. 280.888.600	
01.06.01.01.06.28.002	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	5 dokumen	Rp. 334.984.920	5 dokumen	Rp. 334.264.920	- Rp. 720.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 720.000,-
01.06.01.01.06.28.003	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah	6 dokumen	Rp. 299.723.100	7 dokumen	Rp. 361.178.100	Rp. 61.455.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah, Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 1.275.000,-
01.06.01.01.06.28.005	Pengendalian dan Koordinasi Program Strategis di DIY	3 dokumen	Rp. 197.323.075	3 dokumen	Rp. 192.723.075	- Rp. 4.600.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 4.600.000,-
01.06.01.01.06.28.010	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Masyarakat	4 dokumen	Rp. 128.875.600	5 dokumen	Rp. 296.175.600	Rp. 167.300.000	Penyusunan Laporan Monev Pengentasan Kemiskinan
01.06.01.01.06.28.011	Monitoring dan Evaluasi Inpres 3 Tahun 2010 dan TEPPA Lingkup Pemda DIY dan Kabupaten/Kota	0 dokumen	Rp. 0	2 dokumen	Rp. 57.453.600	Rp. 57.453.600	Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan UKP4 dan TEPPA
01.23	Statistik						
01.23.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
01.23.01.01.06.16	Program Pengembangan Statistik Daerah		Rp. 1.429.100.000		Rp. 1.426.177.380	Rp. -2.922.620	
01.23.01.01.06.16.001	Pengolahan, Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Data Statistik Daerah	5 Dokumen, 1 Sistem	Rp. 974.382.000	5 Dokumen, 1 Sistem	Rp. 971.459.500	- Rp. 2.922.500	Perubahan keluaran Buku Analisis PDRB DIY 2013 menjadi Buku Analisis PDRB DIY 2008-2012, Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 2.922.500,- Perubahan TUK ICOR semula 2013 menjadi 2008-2012

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.150.072.630			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.23.01.01.06.16.003	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik daerah	1 Dokumen, 1 Visual Data, 1 Sistem	Rp. 454.718.000	1 Dokumen, 1 Visual Data, 1 Sistem	Rp. 454.717.880	- Rp. 120	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 120,-

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 5.950.437.504			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.07	Perhubungan						
01.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika						
01.07.01.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 1.747.417.540		Rp. 1.648.209.466	Rp. -99.208.074	
01.07.01.01.07.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Rp. 589.400.000	12 bulan	Rp. 529.160.000	- Rp. 60.240.000	Pengurangan Pembayaran jasa listrik dan bandwidth akibat
01.07.01.01.07.01.007	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	Rp. 103.500.000	12 bulan	Rp. 101.700.000	- Rp. 1.800.000	Penyesuaian dengan SHBJ
01.07.01.01.07.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	69 jenis	Rp. 114.709.540	69 jenis	Rp. 94.891.340	- Rp. 19.818.200	Efisiensi Belanja barang Jasa
01.07.01.01.07.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	Rp. 91.040.000	2 jenis	Rp. 73.999.915	- Rp. 17.040.085	Efisiensi Belanja Barang Jasa
01.07.01.01.07.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 jenis	Rp. 15.819.000	16 jenis	Rp. 12.110.000	- Rp. 3.709.000	Efisiensi Belanja Barang Jasa
01.07.01.01.07.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19 jenis	Rp. 11.500.000	19 jenis	Rp. 10.390.000	- Rp. 1.110.000	Efisiensi Belanja Barang Jasa
01.07.01.01.07.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 jenis	Rp. 117.246.000	3 jenis	Rp. 93.966.000	- Rp. 23.280.000	Efisiensi Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal
01.07.01.01.07.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	Rp. 627.194.000	12 bulan	Rp. 652.744.000	Rp. 25.550.000	Tambahan untuk Forum Admin LPSE se-Indonesia
01.07.01.01.07.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan	6 Orang	Rp. 77.009.000	6 Orang	Rp. 79.248.211	Rp. 2.239.211	Penyesuaian UMR DIY
01.07.01.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 2.275.796.100		Rp. 2.523.534.750	Rp. 247.738.650	
01.07.01.01.07.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	23 jenis	Rp. 435.675.100	25 jenis	Rp. 553.355.450	Rp. 117.680.350	Dinas: 4) Filling Cabinet (2 buah) untuk Sekretariat dan LPSE 5) AC (3 unit) untuk LPSE 6) PC (2 unit) untuk LPSE 7) Notebook (2 unit) untuk Bid. Angkutan dan Sekretaris 24) Rak Arsip (2 unit) untuk LPSE 25) Gordyn Vitrage Ruang Rapat (1 paket) untuk Sekretariat. Trans Jogja: 4) AC 1 PK (1 buah) 5) Almari buku (3 buah) filing kabinet (1 unit) 6) Antivirus (2 buah) 7) PC (1 unit) 8) Printer (2 buah) 9) OS dan Office Original (6 buah) Efisiensi Belanja Modal
01.07.01.01.07.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	12 bulan	Rp. 940.877.000	12 bulan	Rp. 1.010.207.000	Rp. 69.330.000	1) Pemeliharaan Kantor Poswaskespele 2) Pengecatan Kantor Pos

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 5.950.437.504			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.07.01.01.07.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas /operasional	3 jenis	Rp. 804.644.000	4 jenis	Rp. 864.122.300	Rp. 59.478.300	Dinas: 1) Service Hidrolis Teleskopis 2) Penambahan Anggaran Rp. 69.783.300,00 3) Pengembalian Anggaran Rp. 22.305.000,00 Trans Jogja: Pemeliharaan 4 Kendaraan dan 20 bus
01.07.01.01.07.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	Rp. 94.600.000	12 bulan	Rp. 95.850.000	Rp. 1.250.000	Trans Jogja: 1) Komputer (PC, Monitor, Printer Scanner) (7 unit) 2) AC (3 unit) 3) AC (5 unit)
01.07.01.01.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 170.776.000		Rp. 155.034.800	Rp. -15.741.200	
01.07.01.01.07.06.018	Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program dan Pengembangan Data Informasi	3 dokumen	Rp. 151.380.000	3 dokumen	Rp. 135.938.800	- Rp. 15.441.200	Efisiensi Belanja pegawai dan Barang Jasa
01.07.01.01.07.06.019	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	12 bulan	Rp. 19.396.000	12 bulan	Rp. 19.096.000	- Rp. 300.000	Efisiensi Belanja Pegawai
01.07.01.01.07.15	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan		Rp. 1.500.189.466		Rp. 1.625.054.966	Rp. 124.865.500	
01.07.01.01.07.15.010	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara	2 Jenis Kegiatan	Rp. 299.942.000	2 Jenis Kegiatan	Rp. 299.013.500	- Rp. 928.500	1) Saving honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2) Efisiensi Belanja Modal
01.07.01.01.07.15.018	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bus Trans Jogja	5 jenis	Rp. 1.185.365.466	9 jenis	Rp. 1.311.700.466	Rp. 126.335.000	6) Personal Komputer (1 unit) 7) Rambu Prioritas Angkutan Umum (40 unit) 8) Monitor Tracking Bus (1 unit) 9) Pemindahan Halte (1 lokasi)
01.07.01.01.07.15.019	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara	4 Jenis Kegiatan	Rp. 14.882.000	4 Jenis Kegiatan	Rp. 14.341.000	- Rp. 541.000	Efisiensi Belanja Modal
01.07.01.01.07.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Rp. 2.218.228.552		Rp. 2.137.536.752	Rp. -80.691.800	
01.07.01.01.07.16.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Jembatan Timbang	6 Jenis Kegiatan	Rp. 694.193.800	6 Jenis Kegiatan	Rp. 691.564.800	- Rp. 2.629.000	Efisiensi Belanja Barang Jasa
01.07.01.01.07.16.005	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Laut Dan A S D P	6 jenis	Rp. 179.055.000	7 jenis	Rp. 250.590.200	Rp. 71.535.200	1) Rehabilitasi Garasi Apung di pantai Sadeng akibat bencana alam Badai Nari dari Aaustalia 2) Efisiensi Belanja Barang Jasa
01.07.01.01.07.16.006	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	12 bulan	Rp. 399.992.500	12 bulan	Rp. 250.590.200	- Rp. 149.402.300	Rehab Traffic Light 3 unit Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.07.01.01.07.16.007	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy The Service	12 bulan	Rp. 929.649.852	12 bulan	Rp. 929.649.202	- Rp. 650	Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.07.01.01.07.16.010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Kereta Api Kab. Sleman	12 bulan	Rp. 15.337.400	12 bulan	Rp. 15.142.350	- Rp. 195.050	Efisiensi Belanja Barang dan Jasa

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 5.950.437.504			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.07.01.01.07.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Rp. 52.407.361.800		Rp. 45.353.425.770	Rp. -7.053.936.030	
01.07.01.01.07.17.005	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum Di Jalan Raya	2 Jenis Kegiatan	Rp. 148.010.000	3 Jenis Kegiatan	Rp. 455.320.000	Rp. 307.310.000	Penambahan Alat Uji Emisi
01.07.01.01.07.17.013	Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	3 jenis	Rp. 63.247.700	3 jenis	Rp. 63.047.500	- Rp. 200.200	Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.07.01.01.07.17.018	Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang	3 Jenis Kegiatan	Rp. 937.645.800	3 Jenis Kegiatan	Rp. 937.618.800	- Rp. 27.000	Efisiensi Belanja Modal
01.07.01.01.07.17.020	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service	12 bulan	Rp. 50.950.000.000	12 bulan	Rp. 43.390.749.250	- Rp. 7.559.250.750	1) outsourcing 2014 Rp.50.162.850 2) Audit Kinerja Rp.101.703.000 3) Olah Data Rp.25.635.840 4) Sosialisasi Rp.89.358.900 5) BOK -Rp.7.840.024.135 6) STNK Rp.25.000.000 7) SPPD dalam daerah -Rp.61.200.000 8) Appraisal Rp.50.450.000 Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.07.01.01.07.17.021	Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan	2 Jenis Kegiatan	Rp. 112.485.000	4 Jenis Kegiatan	Rp. 310.719.300	Rp. 198.234.300	3) Kajian Review Penyediaan Angkutan Perkotaan dan Feeder (1 paket) 4) Pengadaan Hardware Alat Insidentil (1 paket)
01.07.01.01.07.17.022	Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum AKDP	1 dokumen	Rp. 195.973.300	1 dokumen	Rp. 195.970.920	- Rp. 2.380	Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.07.01.01.07.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas		Rp. 4.052.587.000		Rp. 4.706.094.450	Rp. 653.507.450	
01.07.01.01.07.19.006	Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	2 Jenis Kegiatan	Rp. 359.995.000	3 Jenis Kegiatan	Rp. 412.745.000	Rp. 52.750.000	3) Peralatan Posko (1 paket)
01.07.01.01.07.19.010	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (A P I L L)	2	Rp. 894.941.450	2 Paket	Rp. 894.731.450	- Rp. 210.000	Efisiensi Penyesuaian SHBJ
01.07.01.01.07.19.019	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	5 jenis	Rp. 443.481.400	6 jenis	Rp. 1.050.281.400	Rp. 606.800.000	Penambahan 1) Rambu Lalu Lintas (220 unit) 2) Warning Light Tenaga Surya (6 unit) 4) Cermin Tikungan 90cm (20 unit) 6) RPPJ (16 unit)
01.07.01.01.07.19.020	Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan	20000 m	Rp. 380.586.000	20000 m	Rp. 380.446.000	- Rp. 140.000	Efisiensi Belanja Modal
01.07.01.01.07.19.022	Fasilitasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan (DAK)	4 jenis	Rp. 1.973.583.150	4 jenis	Rp. 1.967.890.600	- Rp. 5.692.550	Efisiensi Belanja Modal
01.07.01.01.07.20	Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor		Rp. 61.458.000		Rp. 58.458.000	Rp. -3.000.000	
01.07.01.01.07.20.004	Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun Dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor	265 kendaraan	Rp. 31.040.000	265 kendaraan	Rp. 28.940.000	- Rp. 2.100.000	Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.07.01.01.07.20.005	Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (P K B)	5 UPT PKB	Rp. 30.418.000	5 UPT PKB	Rp. 29.518.000	- Rp. 900.000	Efisiensi Belanja Pegawai

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 5.950.437.504			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.07.01.01.07.21	Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas		Rp. 282.914.700		Rp. 441.749.500	Rp. 158.834.800	
01.07.01.01.07.21.001	Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan	1 Jenis Kegiatan	Rp. 146.239.750	2 Jenis Kegiatan	Rp. 194.212.250	Rp. 47.972.500	2) Perencanaan ATCS (1 dokumen)
01.07.01.01.07.21.003	Evaluasi Kinerja Trans Jogja	0 -	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 122.164.300	Rp. 122.164.300	1) Laporan Evaluasi Kinerja Trans Jogja (1 dokumen)
01.07.01.01.07.21.005	Pengoperasian ATCS di Perkotaan Yogyakarta	1 tahun	Rp. 136.674.950	1 tahun	Rp. 125.372.950	- Rp. 11.302.000	Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.25	Komunikasi dan Informatika						
01.25.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika						
01.25.01.01.07.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Rp. 8.022.248.200		Rp. 8.140.941.400	Rp. 118.693.200	
01.25.01.01.07.15.006	Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi	10 Jenis Kegiatan	Rp. 555.770.000	12 Jenis Kegiatan	Rp. 664.879.000	Rp. 109.109.000	11) Peralatan pendukung SIMJT online (1 paket) 12) Website KIP (1 paket) Efisiensi Belanja Pegawai
01.25.01.01.07.15.007	Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi	4 Jenis Kegiatan	Rp. 39.207.000	4 Jenis Kegiatan	Rp. 37.985.000	- Rp. 1.222.000	Efisiensi belanja pegawai
01.25.01.01.07.15.008	Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	6 Jenis Kegiatan	Rp. 144.296.000	7 Jenis Kegiatan	Rp. 139.618.000	- Rp. 4.678.000	7) Pengadaan buku untuk hibah ke KIP Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.25.01.01.07.15.009	Peningkatan Kualitas SDM Teknologi Informasi	0 -	Rp. 0	60 Orang	Rp. 33.137.000	Rp. 33.137.000	Bintek LPSE 60 orang
01.25.01.01.07.15.013	Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Provinsi DIY	5 Jenis Kegiatan	Rp. 6.971.485.600	6 Jenis Kegiatan	Rp. 7.170.639.800	Rp. 199.154.200	6)Peralatan pendukung jaringan (1 paket) efisiensi belanja pegawai
01.25.01.01.07.15.014	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 bulan	Rp. 311.489.600	12 bulan	Rp. 94.682.600	- Rp. 216.807.000	Efisiensi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal
01.25.01.01.07.18	Kerjasama Informasi dengan Mass Media		Rp. 199.119.000		Rp. 197.619.000	Rp. -1.500.000	
01.25.01.01.07.18.001	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	8 Jenis Kegiatan	Rp. 199.119.000	8 Jenis Kegiatan	Rp. 197.619.000	- Rp. 1.500.000	Efisiensi Perhitungan

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 520.045.300			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.08	Lingkungan Hidup						
01.08.01	Badan Lingkungan Hidup						
01.08.01.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 85.017.400		Rp. 88.562.200	Rp. 3.544.800	
01.08.01.01.08.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100 %	Rp. 25.200.000	100 %	Rp. 28.800.000	Rp. 3.600.000	Penyesuaian dengan standar honor yang berlaku (Penyesuaian dengan SHBJ)
01.08.01.01.08.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	72 jenis	Rp. 24.927.400	72 jenis	Rp. 24.914.400	- Rp. 13.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp 13.000,-
01.08.01.01.08.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15 Jenis, 75.000 Lembar	Rp. 19.760.000	15 Jenis, 75.000 Lembar	Rp. 19.759.800	- Rp. 200	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 200,-
01.08.01.01.08.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18 Jenis/12 Bulan	Rp. 8.500.000	18 Jenis/12 Bulan	Rp. 8.499.200	- Rp. 800	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 800,-
01.08.01.01.08.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37 Jenis/12 Bulan	Rp. 6.630.000	37 Jenis/12 Bulan	Rp. 6.588.800	- Rp. 41.200	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp 41.200,-
01.08.01.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 468.093.610		Rp. 894.256.610	Rp. 426.163.000	
01.08.01.01.08.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10 jenis	Rp. 76.093.610	13 jenis	Rp. 340.068.610	Rp. 263.975.000	Pembelian genset 1 unit, sound system 1 set dan printer 2 unit, Pemanfaatan Kembali untuk Perubahan Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 325.000,-
01.08.01.01.08.02.010	Pengadaan Mebeleur	4 jenis	Rp. 50.000.000	6 jenis	Rp. 90.000.000	Rp. 40.000.000	Pembelian meja kursi tamu 2 set, Kursi tunggu 1 bh dan kursi rapat 10 buah
01.08.01.01.08.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8 jenis	Rp. 81.000.000	11 jenis	Rp. 111.000.000	Rp. 30.000.000	Instalasi Genzet, Listrik, dan Internet
01.08.01.01.08.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7 Unit Roda 4, 8 Unit Roda 2	Rp. 66.000.000	7 Unit Roda 4, 8 Unit Roda 2	Rp. 54.098.000	- Rp. 11.902.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 11.902.000,-
01.08.01.01.08.02.042	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Paket	Rp. 195.000.000	1 Paket	Rp. 299.090.000	Rp. 104.090.000	Penambahan canopy, perbaikan kamar mandi, penataan instalasi internet, listrik, dan sekat
01.08.01.01.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 113.944.000		Rp. 104.918.000	Rp. -9.026.000	

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 520.045.300			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.08.01.01.08.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4 dokumen	Rp. 15.944.000	4 4 embung (Seloharjo-Pundong,Bogasari-semanu,Sepe	Rp. 15.425.000	- Rp. 519.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 519.000,-
01.08.01.01.08.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 dokumen	Rp. 35.000.000	2 dokumen	Rp. 33.643.000	- Rp. 1.357.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 1.357.000,-
01.08.01.01.08.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	3 dokumen	Rp. 63.000.000	3 dokumen	Rp. 55.850.000	- Rp. 7.150.000	Penyesuaian anggaran dengan Standar Belanja Umum (SBU), Penggunaan Kembali Efisiensi DPA untuk Perubahan APBD Sebesar Rp. 400.000,-
01.08.01.01.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Rp. 279.564.000		Rp. 279.253.875	Rp. -310.125	
01.08.01.01.08.15.005	Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan	300 Unit, 15 Unit, 15 Unit	Rp. 279.564.000	300 Unit, 15 Unit, 15 Unit	Rp. 279.253.875	- Rp. 310.125	Efisiensi DPA Sebesar Rp. 320.125,-
01.08.01.01.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Rp. 932.028.800		Rp. 1.137.659.025	Rp. 205.630.225	
01.08.01.01.08.16.002	Koordinasi Penilaian langit Biru	80 Orang, 30 Orang, 40 Orang	Rp. 99.980.000	80 Orang, 30 Orang, 40 Orang	Rp. 99.945.000	- Rp. 35.000	Efisiensi DPA Sebesar Rp. 35.000,-
01.08.01.01.08.16.004	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang lingkungan Hidup	100 perusahaan	Rp. 79.875.000	100 perusahaan	Rp. 77.495.000	- Rp. 2.380.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 2.380.000,-
01.08.01.01.08.16.018	Ekspose Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup	80 Orang, 2 Kali	Rp. 50.000.000	80 Orang, 2 Kali	Rp. 49.814.225	- Rp. 185.775	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 185.775,-
01.08.01.01.08.16.021	Pemantapan Program Adiwiyata	1 Kali/3 Kategori	Rp. 99.838.000	1 Kali/3 Kategori	Rp. 90.838.000	- Rp. 9.000.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 9.000.000,-
01.08.01.01.08.16.022	Pemantauan Kualitas Air	3 Periode	Rp. 229.330.800	3 Periode	Rp. 223.820.800	- Rp. 5.510.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 5.510.000,-
01.08.01.01.08.16.028	Pengembangan Kelembagaan pengelolaan Lingkungan Hidup kawasan Sungai	5 Kali/30 Orang	Rp. 55.000.000	5 Kali/30 Orang	Rp. 54.441.000	- Rp. 559.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 559.000,-
01.08.01.01.08.16.031	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Lingkungan	60 Orang	Rp. 75.000.000	20 Orang	Rp. 75.000.000	Rp. 0	Penyesuaian dengan Anggaran DKA khusus pada Bimbingan Teknis Pengelolaan Laboratorium (1 kali /60 orang) menjadi Bimbingan Teknis Pengelolaan Laboratorium (1/20 orang)
01.08.01.01.08.16.037	Peringatan hari Penting terkait LH	5 Kali	Rp. 200.000.000	5 Kali	Rp. 193.100.000	- Rp. 6.900.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 6.900.000,-
01.08.01.01.08.16.053	Pengendalian B3 dan Limbah B3	5 kab/kota	Rp. 43.005.000	5 kab/kota	Rp. 22.105.000	- Rp. 20.900.000	Penyesuaian dengan SBU, Saving Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah, Pelaksanaan DPA dari Inventarisasi Usaha dan Inventarisasiatau Kegiatan Penghasil Limbah B3 di 5 Kabupaten/Kota di anggaran perubahan dihilangkan, karena tidak terakomodasi di DPA, Penggunaan Kembali Efisiensi dari DPA untuk Perubahan Sebesar Rp. 7.000.000,-

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 520.045.300			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.08.01.01.08.16.060	Penyusunan Peraturan Pengelolaan Limbah B3	0 dokumen	Rp. 0	2 dokumen	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000	1. Penyusunan Rapergub Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3; 2. Penyusunan Perizinan dan Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3.
01.08.01.01.08.16.061	Festival Sungai Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup	0 Kali	Rp. 0	1 Kali	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Terselenggaranya Festival Sungai Winongo
01.08.01.01.08.16.062	Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	0 kab/kota	Rp. 0	5 kab/kota	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tentang PPSP dan SK Gubernur
01.08.01.01.08.16.063	Penyusunan Peraturan Pengendalian Pencemaran Udara	0 -	Rp. 0	3 kegiatan	Rp. 101.100.000	Rp. 101.100.000	Kajian Akademis Rumusan Peraturan Gubernur Kriteria Jenis Usaha yang Haru Dilengkapi dengan Cerobong, FGD Pembahasan Rapergub, dan Penyusunan Rapergub Cerobong
01.08.01.01.08.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Rp. 966.830.000		Rp. 887.070.000	Rp. -79.760.000	
01.08.01.01.08.17.001	Konservasi Sumberdaya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	350 buah	Rp. 659.785.000	350 buah	Rp. 633.075.000	- Rp. 26.710.000	Pengurangan perjalanan dinas dalam daerah dan anggaran yang dibintang karena tidak sesuai SBK, Penyesuaian Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 11.410.000,-
01.08.01.01.08.17.010	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	1 Paket	Rp. 168.995.000	1 Paket	Rp. 115.945.000	- Rp. 53.050.000	Pembuatan film karst dan biaya pendukung dihilangkan karena tidak terdapat dalam SBK sesuai saran dari Inpektorat, Penyesuaian Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 2.800.000,-
01.08.01.01.08.17.014	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	4 Kali	Rp. 138.050.000	2 Kali	Rp. 138.050.000	Rp. 0	Penyesuaian dengan kondisi Riil, yaitu Terlaksananya Seleksi Kehati Award (4 kategori menjadi 2 kategori)
01.08.01.01.08.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Rp. 406.123.900		Rp. 386.023.900	Rp. -20.100.000	
01.08.01.01.08.19.007	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	1 Dokumen/35 Set	Rp. 67.064.900	1 Dokumen/35 Set	Rp. 52.064.900	- Rp. 15.000.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 15.000.000,-
01.08.01.01.08.19.016	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Karst Provinsi DIY	1 dokumen	Rp. 339.059.000	1 dokumen	Rp. 333.959.000	- Rp. 5.100.000	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 5.100.000,-
01.08.01.01.08.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Rp. 174.437.600		Rp. 168.341.000	Rp. -6.096.600	
01.08.01.01.08.24.005	Penataan Ruang Terbuka Hijau	800 batang	Rp. 174.437.600	800 batang	Rp. 168.341.000	- Rp. 6.096.600	Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 6.096.600,-

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 679.022.800			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
01.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat						
01.11.01.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 31.000.000		Rp. 103.310.000	Rp. 72.310.000	
01.11.01.01.11.01.022	Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung/tempat kerja	200 piket	Rp. 31.000.000	9 orang petugas keamanan (outsourcing)	Rp. 103.310.000	Rp. 72.310.000	menambah Jasa Petugas Keamanan dari Outsourcing sebanyak 9 orang disebabkan petugas keamanan yang lama menjadi CPNS. efisiensi Rp 22.690.000
01.11.01.01.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 254.000.000		Rp. 576.255.000	Rp. 322.255.000	
01.11.01.01.11.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-0 unit	Rp. 0	4 unit	Rp. 63.000.000	Rp. 63.000.000	4 Unit Roda 2
01.11.01.01.11.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 set	Rp. 154.000.000	8 set	Rp. 214.000.000	Rp. 60.000.000	Bertambah untuk AC Ruang RAPAT, Counter Desk Pimpinan, CCTV
01.11.01.01.11.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	Rp. 100.000.000	1 tahun	Rp. 299.255.000	Rp. 199.255.000	pengecatan gedung dan pagar & ganti keramik
01.11.01.01.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 70.000.000		Rp. 65.280.000	Rp. -4.720.000	
01.11.01.01.11.05.043	Penyusunan Kebijakan dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan keluarga Berencana Provinsi, Kabupaten/ Kota	1 tahun	Rp. 70.000.000	1 tahun	Rp. 65.280.000	- Rp. 4.720.000	Efisiensi
01.11.01.01.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 82.500.000		Rp. 79.833.800	Rp. -2.666.200	
01.11.01.01.11.06.016	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 tahun	Rp. 8.500.000	1 tahun	Rp. 7.940.000	- Rp. 560.000	Efisiensi
01.11.01.01.11.06.018	Penyusunan Program/Kegiatan SKPD	1 tahun	Rp. 61.500.000	1 tahun	Rp. 59.408.000	- Rp. 2.092.000	Efisiensi
01.11.01.01.11.06.019	Monitoring dan Evaluasi Program/Teknis	1 tahun	Rp. 12.500.000	1 tahun	Rp. 12.485.800	- Rp. 14.200	Efisiensi
01.11.01.01.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Rp. 615.122.000		Rp. 615.072.000	Rp. -50.000	
01.11.01.01.11.16.030	Fasilitasi Sekretariat Forum Anak Daerah	1 tahun	Rp. 615.122.000	1 tahun	Rp. 615.072.000	- Rp. 50.000	Efisiensi
01.11.01.01.11.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Rp. 240.978.000		Rp. 335.378.000	Rp. 94.400.000	

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 679.022.800			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.11.01.01.11.17.008	Fasilitasi Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	4 Paket	Rp. 100.000.000	6 Paket	Rp. 198.000.000	Rp. 98.000.000	Bantuan Rp 100.000.000 (2 P2TPA @ 50.000.000,-) Efisiensi 2.000.000,-
01.11.01.01.11.17.019	Fasilitasi peningkatan Kualitas hidup bagi perempuan Pasca pendampingan	1 tahun	Rp. 140.978.000	1 tahun	Rp. 137.378.000	- Rp. 3.600.000	Efisiensi
01.12	Keluarga Berencana						
01.12.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat						
01.12.01.01.11.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA		Rp. 125.000.000		Rp. 124.994.000	Rp. -6.000	
01.12.01.01.11.15.008	Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	1 tahun	Rp. 125.000.000	1 tahun	Rp. 124.994.000	- Rp. 6.000	Efisiensi
01.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
01.22.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat						
01.22.01.01.11.15	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan		Rp. 2.871.000.000		Rp. 3.068.500.000	Rp. 197.500.000	
01.22.01.01.11.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat pedesaan	2 paket, 74 pokmas	Rp. 2.671.000.000	2 paket, 91 pokmas	Rp. 2.823.500.000	Rp. 152.500.000	17 kelompok masyarakat yang mengajukan bantuan hibah melalui BPPM DIY (proposal ada di BPPM DIY)
01.22.01.01.11.15.011	Fasilitasi dan Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan	1 Paket	Rp. 200.000.000	1 Paket	Rp. 245.000.000	Rp. 45.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi PNPM

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Sosial				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 16.966.498.215			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.13	Sosial						
01.13.01	Dinas Sosial						
01.13.01.01.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 9.276.015.630		Rp. 9.473.975.778	Rp. 197.960.148	
01.13.01.01.13.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1 tahun	Rp. 1.032.921.600	1 tahun	Rp. 1.031.097.600	- Rp. 1.824.000	1. Untuk membayar internet spedy 1 th di PSKW 2. Ada pengembalian pada belanja air (27.000.000) dan penambahan pada belanja listrik 22.500.000 sehingga masih ada sisa pengembalian di PSAA
01.13.01.01.13.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10 bulan	Rp. 526.246.320	12 bulan	Rp. 597.554.184	Rp. 71.307.864	(BRTPD) penambahan honor Pramu kantor 2 org x 2 bln= 4 ob cleaning servis 9 org x 2 bln = 18 ob; Tukang Kebun 6 org x 2 bln= 12 ob (PSKW)Menambah honor tenaga Kebersihan Kantor Tenaga kebersihan kantor 2 org x 2 bln x 1.065.247= 4.260.988,- (PSBK) Menambah honor pramu kantor 2 org x 2 bln x 1.065.247= 4.260.988,- (PSBR) "Menambah honor pramu kantor = 2 org x 2 bln x 1.065.247= 4.260.988,- dan pramu kebun = 1 org x 2 bln x 1.065.247,- = 2.130.494 total = 4.260.988 + 2.130.494 = 6.391.482,- " (PSAA) Penambahan honor pramu kebun/ psuruh = 4 org x 2 bln x 1.065.247,- (PSTW) ada pengembalian karena ada pramu kantor dan pramu kebun yang diangkat CPNS (4.736.588) "pramu kantor yang diangkat menjadi cpns ada 2 org, masih 2 orang yang belum diangkat dan 4 orang pramu kebun yang belum diangkat. Usulan tambahan utk yang belum diangkat 6 org x 2 bln x 1.065.247,- = 12.782.964,- Mengembalikan untuk yang diangkat 2 org x 8 bln x 1.065.247,- = (17.043.952,-) Total diselisihkan " (PSPP) "Menambah honor tukang kebun = 2 org x 2 bln x 1.065.247= 4.260.988,- dan pramu kantor = 1 org x 2 bln x 1.065.247,- = 2.130.494 total = 4.260.988 + 2.130.494 = 6.391.482,- ; Efisiensi Rp 2.437.450,-
01.13.01.01.13.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	Rp. 21.748.000	12 bulan	Rp. 21.988.000	Rp. 240.000	Kekuarangan pembayaran bahan bacaan sebesar 20.000 selama 12 bulan di PSBK
01.13.01.01.13.01.016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 bulan	Rp. 6.599.016.558	12 bulan	Rp. 6.640.749.936	Rp. 41.733.378	Penambahan honor untuk juru masak 14.913.458 di BRTPD,- dan pembelian peralatan makan 11.179.825 Penambahan honor juru masak dan penata boga di PSKW, Penambahan honor juru masak di PSBK Penambahan untuk honor 6 org juru masak di PSAA Sisa Honor Juru Masak, Petugas Cuci 3 org diangkat CPNS di PSTW Penambahan honor petugas dapur di PSPP ; Efisiensi Rp1.670.363,- penyesuaian kenaikan BBM Rp 2.397.000
01.13.01.01.13.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	1 tahun	Rp. 116.427.000	1 tahun	Rp. 122.727.000	Rp. 6.300.000	menaikkan volume rapat dinas dari 4.430 os menjadi 5.130 os karena jumlah yang ada belum mencukupi (700 os x 9.000,-)
01.13.01.01.13.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	10 bulan	Rp. 486.907.832	12 bulan	Rp. 567.714.944	Rp. 80.807.112	(PSKW)Penambahan honor untuk penjaga malam (4 org) dan pengemudi (1 org) = 5 org x 2 bln x 1.065.247,- (PSBK)Honor untuk penjaga malam = 4 org x 2 bln x 1.065.247,- ; (PSBR)Penambahan honor penjaga keamanan = 2 org x 2 bln x 1.065.247,- (PSAA) Penambahan honor bagi penjaga malam (1 org x 1 bln x

Nama SKPD : Dinas Sosial				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 16.966.498.215			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
							1.065.247,-) dan satpam (7 org x 2 bln x 1.065.247,-) (PSPP) Penambahan honor penjaga keamanan = 3 org x 2 bln x 1.065.247,- EFISIENSI : Rp2.746.682,-
01.13.01.01.13.01.023	Penyediaan Jasa Para Medis	10 bulan	Rp. 492.748.320	12 bulan	Rp. 492.144.114	- Rp. 604.206	1. (BRTPD) Penambahan honor untuk jasa paramedis , perawat 4 org, fisioteraphist 2 org, pramurukti 5 org, rekam medik 1 org = totalnya = 12 org x 2 bln x 1.065.247,- 2. (PSBK)Penambahan honor pramurukti psikotik = 2 org x 2 bln x 1.065.247,- 3.(PSTW) penambahan honor untuk pramurukti 23 x 2 bln x 1.065.247,- = 49.001.362,- pengembalian untuk pramurukti yang diangkat CPNS= 9 org x 8 bln x 1.065.247,- = (76.697.784,-) EFISIENSI : Rp2.734.700
01.13.01.01.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 4.722.400.300		Rp. 7.464.473.533	Rp. 2.742.073.233	
01.13.01.01.13.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket	Rp. 1.577.998.840	1 Paket	Rp. 1.619.144.003	Rp. 41.145.163	penunjang belanja modal pengadaan konstruksi di BRTPD
01.13.01.01.13.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 unit	Rp. 0	21 unit	Rp. 1.813.700.000	Rp. 1.813.700.000	1) Pengadaan 3 unit trail dan 3 unit kendaraan roda 3 sebesar Rp. 169.500.000,- (Dinas Induk); 2) Pengadaan 1 unit Avanza, 1 unit kendaraan roda 3, 2 unit sepeda, 1 unit microbus sebesar Rp. 595.700.000,- (BRTPD); 3) Pengadaan 1 unit Avanza sebesar Rp. 195.000.000,-(PSKW); 4)Pengadaan 1 unit Avanza sebesar Rp. 195.000.000,- (PSTW); 5) Pengadaan 1 unit Avanza, 5 unit kendaraan roda 2 sebesar Rp. 273.500.000,-; 6) Pengadaan 1 unit ambulance sebesar Rp.192.500.000,- (PSBR); 7) Pengadaan 1 unit ambulance sebesar Rp.192.500.000,- (PSPP)
01.13.01.01.13.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 tahun	Rp. 589.194.775	1 tahun	Rp. 846.322.475	Rp. 257.127.700	(1) Pembelian 1 paket tower posko induk, tower wilayah, repeter wilayah, dan ring posko induk, (2) Pengadaan Brankas, AC, Komputer, Printer, LCD, elektrik screen Notebook (3) Pembelian White board thnk ruang rapat, 3 unit AC untuk R.Rapat dan Ruang Kantor, Tangga Aluminium, vacuum cleaner dan wastafel (4) Pengajuan pemasangan jaringan air bersih / PDAM (5)Rekomendasi Inspektorat DIY untuk memenuhi sarana prasarana gedung isolasi
01.13.01.01.13.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	Rp. 303.520.075	1 tahun	Rp. 705.539.245	Rp. 402.019.170	(1) Pembelian 2 unit LCD TV untuk Ruang pertemuan dan pembelian gergaji mesin sedang dan besar dan gerobag serta 6 unit komputer untuk penanganan bencana di induk (2)Pengadaan 4 unit Sepeda Gunung dan 6 unit Handy Talky di BRTPD (3)Pembelian Gordyn untuk ruang kantor dan aula PSKW (4)Pengadaan Komputer PC, Laptop, LCD Proyektor, Keyboard untuk pembelajaran klien PSBR (5)Pembelian 2 unit laptop di PSAA (6)Rekomendasi Inspektorat DIY untuk memenuhi sarana prasarana gedung isolasi di PSTW
01.13.01.01.13.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 tahun	Rp. 552.104.160	1 tahun	Rp. 618.007.760	Rp. 65.903.600	Untuk menambah daya listrik di Induk
01.13.01.01.13.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	Rp. 991.424.850	1 tahun	Rp. 992.924.850	Rp. 1.500.000	Penyesuaian harga BBM
01.13.01.01.13.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 tahun	Rp. 57.063.500	1 tahun	Rp. 63.719.500	Rp. 6.656.000	Pembelian Accu 12 volt 100 amp untuk genset sebanyak 2 unit di BRTPD Penyesuaian harga BBM : Rp 3.000.000,-
01.13.01.01.13.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	Rp. 88.114.000	1 tahun	Rp. 93.114.000	Rp. 5.000.000	Pemeliharaan untuk perangkat gamelan (sudah rusak dan perlu dilaras) di PSBR
01.13.01.01.13.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 tahun	Rp. 562.980.100	1 tahun	Rp. 712.001.700	Rp. 149.021.600	Membangun pagar pemisah asrama putra dan putri di PSBR

Nama SKPD : Dinas Sosial				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 16.966.498.215			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.13.01.01.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 55.494.870		Rp. 60.494.870	Rp. 5.000.000	
01.13.01.01.13.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1 dokumen	Rp. 55.494.870	1 dokumen	Rp. 60.494.870	Rp. 5.000.000	Honor konsultan pembimbing penyusunan renstra: 1 org x 5 bln x 1.000.000,-
01.13.01.01.13.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (K A T) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN		Rp. 4.702.000.000		Rp. 6.872.643.660	Rp. 2.170.643.660	
01.13.01.01.13.15.002	Penumbuhan USEP Keluarga Miskin (KM)	1 tahun	Rp. 125.000.000	1 tahun	Rp. 124.999.710	- Rp. 290	EFISIENSI
01.13.01.01.13.15.006	Pemulangan/Meneruskan Perjalanan Orang Terlantar	12 bulan	Rp. 40.000.000	12 bulan	Rp. 60.000.000	Rp. 20.000.000	Karena tinggi permintaan untuk pemulangan orang terlantar, sampai dengan TW.II anggaran hanya tersisa 10 jt saja, padahal setiap minggu selalu ada permintaan pemulangan (-+ 1jt rupiah / minggu)
01.13.01.01.13.15.011	Bimbingan Pemantapan Dan Pengembangan K U B E	209 KUBE	Rp. 4.487.000.000	274 KUBE	Rp. 5.873.849.700	Rp. 1.386.849.700	Penambahan Kube pengembangan dari 209 menjadi 274 (bertambah 65 kelompok) dengan besarnya bantuan sosial (posgub) 65 x @20.000.000= 1.300.000.000,-
01.13.01.01.13.15.015	Pembinaan Dan Pemantauan Pelaksanaan P K H Oleh Tim	100 Orang	Rp. 50.000.000	769 Orang	Rp. 813.794.250	Rp. 763.794.250	menambah sasaran kegiatan sebanyak 669 orang untuk bantuan akses pelayanan dasar anak RTSM PKH (ada Posgub = 736.197.500) EFISIENSI : Rp 1.205.750
01.13.01.01.13.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Rp. 1.297.497.360		Rp. 11.926.816.688	Rp. 10.629.319.328	
01.13.01.01.13.16.005	Pelayanan Psikososial Bagi P M K S Di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	30 anak	Rp. 227.500.000	30 anak	Rp. 282.371.264	Rp. 54.871.264	Menambah honor petugas keamanan dan pramu sosial selama 2 bln dan bahan makanan dari Oktober s.d Desember ; EFISIENSI : Rp 511.700
01.13.01.01.13.16.013	Pemulangan Dan Pemakaman Jenazah Terlantar	16 Orang	Rp. 10.000.000	36 Orang	Rp. 22.000.000	Rp. 12.000.000	Penambahan target untuk pemakaman jenazah terlantar sejumlah 20 org x 600.000,-
01.13.01.01.13.16.014	Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar	200 Orang	Rp. 250.000.000	380 Orang	Rp. 409.590.000	Rp. 159.590.000	menambah sasaran kegiatan sebanyak 180 orang Menambah sasaran kegiatan 22.080 oh x 7.000,- dan penunjangnya (panitia pengadaan, honor pendamping, dan perjalanan dinas untuk penyerahan bantuan tambahan
01.13.01.01.13.16.016	Penyuluhan Sosial Desa	5 Kali Penyuluhan	Rp. 88.750.000	5 Kali Penyuluhan, 5 Baliho	Rp. 188.750.000	Rp. 100.000.000	Penambahan untuk pemasangan baliho penyuluhan sosial di 5 titik @ Rp. 20.000.000,-
01.13.01.01.13.16.018	Pengasramaan Murid S L B	12 bulan	Rp. 445.047.520	12 bulan	Rp. 532.973.784	Rp. 87.926.264	penambahan honor yang baru teranggarkan 10 bln sejumlah 12.782.964 dan penambahan biaya makan bulan okt-des (76 hr) sejumlah 76.000.000 ; EFISIENSI : Rp468.250,-

Nama SKPD : Dinas Sosial				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 16.966.498.215			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.13.01.01.13.16.020	Penyegaran T A G A N A Dalam Rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1 kegiatan	Rp. 221.200.000	1 kegiatan	Rp. 227.931.800	Rp. 6.731.800	Pengadaan Kartu Anggota TAGANA
01.13.01.01.13.16.024	Penyuluhan Sosial Melalui Kesenian Tradisional	5 lokasi	Rp. 54.999.840	25 lokasi	Rp. 263.199.840	Rp. 208.200.000	Penambahan lokasi kegiatan dari 5 lokasi menjadi 25 lokasi
01.13.01.01.13.16.037	Perlindungan bagi RTSM melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)	-0 -	Rp. 0	5 kab/kota	Rp. 10.000.000.000	Rp. 10.000.000.000	BLSM
01.13.01.01.13.17	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR		Rp. 250.000.000		Rp. 303.584.220	Rp. 53.584.220	
01.13.01.01.13.17.009	Bimbingan Sosial Dan Pendampingan A B H	5 anak	Rp. 30.000.000	15 anak	Rp. 45.000.000	Rp. 15.000.000	bantuan sosial ABH : 15 anak x Rp 1.000.000 (posgub)
01.13.01.01.13.17.011	Rumah Perlindungan Sosial Bagi PMKS	1 tahun	Rp. 220.000.000	1 tahun	Rp. 258.584.220	Rp. 38.584.220	Penambahan honor petugas keamanan, pramu sosial dan petugas administrasi untuk 2 bln dan tambahan belanj bahan makanan dari okt-des EFISIENSI : Rp 468.250.-
01.13.01.01.13.18	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA		Rp. 259.279.800		Rp. 210.029.640	Rp. -49.250.160	
01.13.01.01.13.18.007	Pengembangan Usaha Mandiri Penyandang Cacat	1 tahun	Rp. 99.279.800	1 tahun	Rp. 50.029.770	- Rp. 49.250.030	Honorarium Komite penyandang disabilitas tidak dicairkan karena pergub pendukung belum ada EFISIENSI : Rp.30
01.13.01.01.13.18.009	Revitalisasi Paca	1 tahun	Rp. 60.000.000	1 tahun	Rp. 59.999.900	- Rp. 100	EFISIENSI
01.13.01.01.13.18.011	Asistensi Keluarga Penyandang Cacat	1 tahun	Rp. 100.000.000	1 tahun	Rp. 99.999.970	- Rp. 30	EFISIENSI
01.13.01.01.13.19	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO		Rp. 5.391.500.000		Rp. 5.412.468.016	Rp. 20.968.016	
01.13.01.01.13.19.004	Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo	1 tahun	Rp. 5.391.500.000	1 tahun	Rp. 5.412.468.016	Rp. 20.968.016	Honorarium tenaga tehnisi gedung dari 50 ob menjadi 48 ob sehingga berkurang (2.130.494) dan honor untuk pendamping psikolog dari 10 ob naik menjadi 12 ob sehingga bertambah 2.130.494,- dan penambahan Belanja Bahan Percontohan untuk ADL 2.555.400, sewa bis 9.800.000 dan makan tenaga7.700.000,- (di BRTPD). Untuk menambah jenis ketrampilan, yaitu Batik : untuk pembelian bahan percontohan membatik = 9.602.500,- dan untuk membeli peralatan membatik = 14.784.000,- dan menambah membeli sepatu olahraga 500.000,- dan menambah biaya relaksaasi = 1.000.000,- di PSKW Penambahan belanja untuk Bahan percontohan pada ketrampilan Montir, Tata Rias, Las, Pertukangan Kayu dan Belanja Alat tulis peserta, dan alat perlengkapan di PSBR Ada pengembalian pada belanja beasiswa wajib belajar 9th dan menengah di PSAA penambahan honor pendamping dan konselor adiksi 8.521.976 di PSPP; EFISIENSI : Rp 1.486.250 Penyesuaian harga BBM: Rp7.826.980
01.13.01.01.13.20	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK,		Rp. 0		Rp. 175.120.600	Rp. 175.120.600	

Nama SKPD : Dinas Sosial				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 16.966.498.215			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL L						
01.13.01.01.13.20.014	Penyusunan Draft Raperda dan Draft Pergub tentang Penanganan Gepeng dan/atau Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta	0 kegiatan	Rp. 0	1 kegiatan	Rp. 116.842.900	Rp. 116.842.900	perlu perda dan pegub tentang Penanganan Gepeng dan/atau Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta
01.13.01.01.13.20.015	Orientasi dan Bimbingan Teknis Petugas Pelaksana Camp Assessment	0 kegiatan	Rp. 0	1 kegiatan	Rp. 58.277.700	Rp. 58.277.700	untuk Mendukung adanya camp Gepeng
01.13.01.01.13.21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		Rp. 481.168.650		Rp. 1.351.877.600	Rp. 870.708.950	
01.13.01.01.13.21.008	Pelatihan Dan Penataran P S M	78 Orang	Rp. 142.774.950	1300 Orang	Rp. 487.774.950	Rp. 345.000.000	Pengadaan Jas PSM dan Cocard PSM
01.13.01.01.13.21.012	Bimbingan Manajemen Karang Taruna	30 Organisasi	Rp. 207.396.800	1300 Organisasi	Rp. 402.396.800	Rp. 195.000.000	Pengadaan Baju Seragam Karang Taruna
01.13.01.01.13.21.020	Fasilitasi Kelembagaan WKSMB	30 Orang	Rp. 5.927.900	1170 Orang	Rp. 181.427.900	Rp. 175.500.000	perlunya menambah belanja pakaian pengurus WKSMB
01.13.01.01.13.21.023	Temu Karya Daerah Karang Taruna	200 Orang	Rp. 125.069.000	400 Orang	Rp. 206.534.000	Rp. 81.465.000	Penambahan sasaran sebanyak 200 orang
01.13.01.01.13.21.024	Pertemuan NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah	0 Orang	Rp. 0	20 Orang	Rp. 6.375.250	Rp. 6.375.250	Kegiatan baru untuk mengakomodir pertemuan dengan NGO asing
01.13.01.01.13.21.025	Bimbingan Teknologi Dasar Pekerjaan Sosial Bagi Pengurus Panti Sosial	0 Orsos	Rp. 0	30 Orsos	Rp. 67.368.700	Rp. 67.368.700	Keg. Baru untuk peningkatan kapasitas pengurus panti sosial
01.13.01.01.13.22	PROGRAM PEMBINAAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K 3)		Rp. 161.559.600		Rp. 311.929.820	Rp. 150.370.220	
01.13.01.01.13.22.010	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional	6 kegiatan	Rp. 47.000.000	6 kegiatan	Rp. 101.015.000	Rp. 54.015.000	Menambah perjalanan dinas luar daerah untuk acara HKSN yang direncanakan diselenggarakan di Makasar dan sewa stand expo
01.13.01.01.13.22.014	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN	4 TMP, 1 MPP, 10 Tetenger	Rp. 114.559.600	4 TMP, 1 MPP, 10 Tetenger	Rp. 210.914.820	Rp. 96.355.220	menambah kekurangan honor pegawai honorer 10.652.470 dan Honor petugas pemelihara TMPN/TMPdirasa kurang memenuhi standar UMP sehingga dinaikkan dengan total penambahan 36.000.000,- dan untuk pengecatan MPP 50.000.000,- EFISIENSI : Rp 297.250,-

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.349.541.340			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.14	Ketenagakerjaan						
01.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
01.14.01.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 1.350.245.000		Rp. 1.391.979.990	Rp. 41.734.990	
01.14.01.01.14.01.002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12 bulan	Rp. 727.710.000	12 bulan	Rp. 765.971.490	Rp. 38.261.490	Tambahan listrik BLKPP: Rp. 9.000.000 dan Hiperkes: Rp. 29.261.490
01.14.01.01.14.01.010	Penyediaan Jasa Alat Kantor (ATK)	12 bulan	Rp. 90.000.000	12 bulan	Rp. 76.665.000	- Rp. 13.335.000	Efisiensi DPA Rp. 12.000.000 (Induk); Efisiensi DPA Rp. 1.335.000 (Hiperkes)
01.14.01.01.14.01.011	Penyediaan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	Rp. 59.998.000	12 bulan	Rp. 53.786.000	- Rp. 6.212.000	Efisiensi DPA Rp. 6.212.000 (Induk)
01.14.01.01.14.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	46 jenis	Rp. 24.850.000	46 jenis	Rp. 17.500.000	- Rp. 7.350.000	Efisiensi DPA Rp. 7.350.000 (Induk)
01.14.01.01.14.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	156 expl, 1 paket	Rp. 17.496.000	156 expl, 1 paket	Rp. 11.664.000	- Rp. 5.832.000	Efisiensi DPA Rp. 5.832.000 (Induk)
01.14.01.01.14.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan	12 bulan	Rp. 430.191.000	12 bulan	Rp. 466.393.500	Rp. 36.202.500	Efisiensi Induk: Rp. 78.000, Tambahan Hiperkes: Rp. 15.436.500 dan BLKPP: Rp. 20.844.000 (sebelumnya baru menganggarkan 8 bulan karena kenaikan UMK)
01.14.01.01.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 950.199.000		Rp. 1.569.760.850	Rp. 619.561.850	
01.14.01.01.14.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 unit	Rp. 0	2 unit	Rp. 390.000.000	Rp. 390.000.000	Pengganti 2 unit mobil avanza @Rp. 195.000.000,00
01.14.01.01.14.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14 Buah Induk; BLKPP: 4 Pkt; Hiperkes: 2 Pkt	Rp. 143.650.000	14 Buah Induk; BLKPP: 4 Pkt; Hiperkes: 4 Pkt, 4 bh	Rp. 187.650.000	Rp. 44.000.000	Pengadaan AC Hiperkes 4 buah: 24.000.000, dan tambahan PC Komputer Hiperkes 2 Pkt: Rp. 20.000.000
01.14.01.01.14.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	Rp. 287.874.000	12 bulan	Rp. 305.295.000	Rp. 17.421.000	Perbaikan Mushola Dinas Induk
01.14.01.01.14.02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	44 Unit Induk; BLKPP: 9 Unit; Hiperkes 10 Unit	Rp. 463.775.000	44 Unit Induk; BLKPP: 9 Unit; Hiperkes 10 Unit	Rp. 405.465.850	- Rp. 58.309.150	Efisiensi BBM: Rp. 55.454.150 (Induk), Efisiensi DPA Rp.2.855.000 (Hiperkes)
01.14.01.01.14.02.026	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	Rp. 54.900.000	12 bulan	Rp. 281.350.000	Rp. 226.450.000	Rusunawa: Penggantian meter listrik dan instalasi listrik

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.349.541.340			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.14.01.01.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 242.355.000		Rp. 242.255.000	Rp. -100.000	
01.14.01.01.14.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	13 laporan	Rp. 242.355.000	13 laporan	Rp. 242.255.000	- Rp. 100.000	Efisiensi DPA
01.14.01.01.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Rp. 627.786.000		Rp. 354.781.000	Rp. -273.005.000	
01.14.01.01.14.15.052	Rekrutmen/ Seleksi Calon Peserta Pemagangan ke Jepang	150 Orang	Rp. 627.786.000	75 Orang	Rp. 354.781.000	- Rp. 273.005.000	Efisiensi
01.14.01.01.14.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Rp. 5.132.535.500		Rp. 6.759.465.000	Rp. 1.626.929.500	
01.14.01.01.14.16.022	Pengurangan Pengangguran melalui Padat Karya Infrastruktur	15 lokasi/ 1.800 orang	Rp. 2.550.000.000	18 lokasi/ 2.160 orang	Rp. 3.068.622.000	Rp. 518.622.000	Untuk memperbesar target penanganan pengangguran
01.14.01.01.14.16.024	Pembentukan Kelompok usaha melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) dan Pendampingan	20 lokasi/ 400 orang	Rp. 1.350.000.000	25 lokasi/ 500 orang	Rp. 1.661.142.500	Rp. 311.142.500	Untuk memperbesar target penanganan pengangguran
01.14.01.01.14.16.025	Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	50 kelompok/ 250 orang	Rp. 720.000.000	70 kelompok/ 350 orang	Rp. 1.017.265.000	Rp. 297.265.000	Untuk memperbesar target penanganan pengangguran
01.14.01.01.14.16.027	Pemberdayaan Tenaga Kerja Akibat PHK	35 kelompok/ 175 orang	Rp. 300.000.000	70 kelompok/ 350 orang	Rp. 600.000.000	Rp. 300.000.000	Untuk memperbesar target penanganan pengangguran
01.14.01.01.14.16.030	Pemantauan Lembaga Penempatan	40 lembaga	Rp. 12.535.500	40 lembaga	Rp. 12.435.500	- Rp. 100.000	Efisiensi DPA
01.14.01.01.14.16.061	Pengurangan Pengangguran melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4 angk/ 100 orang	Rp. 200.000.000	8 angk/ 200 orang	Rp. 400.000.000	Rp. 200.000.000	Untuk memperbesar target penanganan pengangguran
01.14.01.01.14.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja		Rp. 265.265.400		Rp. 482.655.400	Rp. 217.390.000	
01.14.01.01.14.17.078	Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial bagi Mediator	90 Orang	Rp. 22.516.000	90 Orang	Rp. 22.486.000	- Rp. 30.000	Efisiensi Hasil Pembahasan Revisi
01.14.01.01.14.17.079	Sosialisasi Syarat-Syarat Kerja dalam Hubungan Industrial bagi Pengusaha dan Pekerja	150 Orang	Rp. 37.280.000	150 Orang	Rp. 36.930.000	- Rp. 350.000	Efisiensi Hasil Pembahasan Revisi
01.14.01.01.14.17.080	Sosialisasi Peningkatan Manajemen Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh	120 Orang	Rp. 29.178.000	120 Orang	Rp. 29.038.000	- Rp. 140.000	Efisiensi Hasil Pembahasan Revisi
01.14.01.01.14.17.081	Sosialisasi Hubungan Industrial bagi Guru BK SMK	206 Orang	Rp. 50.130.400	206 Orang	Rp. 50.060.400	- Rp. 70.000	Efisiensi hasil pembahasan revisi

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.349.541.340			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.14.01.01.14.17.084	Pembinaan Penghuni Rusunawa	170 Orang	Rp. 126.161.000	173 Orang	Rp. 155.681.000	Rp. 29.520.000	Pergub No. 48 Tentang Pengelolaan Rusunawa Ledok Code SK Gubernur DIY No. 72/TIM/2012 Tentang Pembentukan Tim Pembina Rusunawa. Penertiban Perjanjian Sewa Rusunawa dan Sosialisasi Pemasangan Meteran Listrik Pulsa
01.14.01.01.14.17.101	Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Tuberkulosis serta penyalahgunaan NAPZA di tempat kerja	-0 -	Rp. 0	6 angkatan	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	(KEG. BARU) HIV menjadi Isu Nasional dan Epidem HIV AIDS di DIY tren meningkat
01.14.01.01.14.17.105	Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja	-0 -	Rp. 0	75 Orang	Rp. 38.460.000	Rp. 38.460.000	(KEG. BARU) Surat Direktur Pengupahan dan Jamsos Tenaga Kerja No. B.02/PHIJSK-PJS/I/2013 Tgl. 14 Januari 2013 tentang Persiapan Pelaksanaan Pemberian Stimulan Iuran Program Jamsostek bagi TKLHK. Alokasi TKLHK DIY 650 orang tahun 2013
02	Pilihan						
02.08	Ketransmigrasian						
02.08.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
02.08.01.01.14.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		Rp. 673.125.000		Rp. 790.155.000	Rp. 117.030.000	
02.08.01.01.14.15.013	Perbekalan bagi Calon Transmigran	150 Kepala Keluarga	Rp. 673.125.000	150 Kepala Keluarga	Rp. 790.155.000	Rp. 117.030.000	Tambahan perbekalan catrans yang sangat dibutuhkan saat di lokasi

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 996.469.090			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
01.15.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
01.15.01.02.07.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif		Rp. 171.210.000		Rp. 658.875.000	Rp. 487.665.000	
01.15.01.02.07.15.033	Fasilitasi Pengembangan Koperasi	0 %	Rp. 50.000.000	0 %	Rp. 545.830.000	Rp. 495.830.000	Efisiensi 4.170.000 Penambahan bantuan hibah koperasi 500.000.000
01.15.01.02.07.15.039	Pendampingan Koperasi Penerima Dana Bergulir di DIY	0 %	Rp. 121.210.000	0 %	Rp. 113.045.000	- Rp. 8.165.000	Efisiensi
01.15.01.02.07.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Rp. 271.796.000		Rp. 198.736.000	Rp. -73.060.000	
01.15.01.02.07.18.029	Pengembangan Kopsis dan Kopma	2 %	Rp. 94.203.000	2 %	Rp. 93.983.000	- Rp. 220.000	Efisiensi
01.15.01.02.07.18.031	Penilaian dan Pemingkatan Kualitas Koperasi	2 %	Rp. 59.721.000	2 %	Rp. 30.446.000	- Rp. 29.275.000	Efisien
01.15.01.02.07.18.035	Diklat Pengembangan Perkoperasian	2 %	Rp. 40.126.000	2 %	Rp. 23.251.000	- Rp. 16.875.000	Efisiensi
01.15.01.02.07.18.038	Temu usaha kemitraan bagi koperasi	2 %	Rp. 22.015.000	2 %	Rp. 21.880.000	- Rp. 135.000	Efisiensi
01.15.01.02.07.18.040	Pembenahan dan Pembubaran Koperasi Yang Kinerjanya Kurang Baik	2 %	Rp. 55.731.000	2 %	Rp. 29.176.000	- Rp. 26.555.000	Efisiensi
02	Pilihan						
02.06	Perdagangan						
02.06.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
02.06.01.02.07.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Rp. 49.951.560		Rp. 49.151.560	Rp. -800.000	
02.06.01.02.07.15.005	Koordinasi Peningkatan Kinerja Distributor (Pengadaan, Penyaluran, Pemantauan Stok Dan Harga) Komoditi Pokok Penting Dan Strategis	0 %	Rp. 17.378.900	0 %	Rp. 17.028.900	- Rp. 350.000	Efisiensi
02.06.01.02.07.15.023	Penyusunan Draft Raperda Pengendalian Pengawasan Peredaran Minol Di Provinsi DIY	0 %	Rp. 32.572.660	0 %	Rp. 32.122.660	- Rp. 450.000	Efisiensi
02.06.01.02.07.16	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional		Rp. 1.106.247.000		Rp. 1.106.247.000	Rp. 0	

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 996.469.090			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.06.01.02.07.16.015	Promosi Perdagangan Luar Negeri dan Temu Bisnis	1.42 %	Rp. 1.106.247.000	1.42 %	Rp. 1.106.247.000	Rp. 0	Sub Kegiatan Bisnis Meeting ke Hainan China diganti menjadi Jogja Night di Nanning, China
02.06.01.02.07.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		Rp. 770.635.000		Rp. 770.540.000	Rp. -95.000	
02.06.01.02.07.17.027	Pameran Dalam Negeri Bersekala Ekspor	1 %	Rp. 749.625.000	1 %	Rp. 749.580.000	- Rp. 45.000	Efisiensi
02.06.01.02.07.17.031	Penyusunan Profil Komoditas Ekspor	1 %	Rp. 21.010.000	1 %	Rp. 20.960.000	- Rp. 50.000	Efisiensi
02.06.01.02.07.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		Rp. 238.837.300		Rp. 394.184.029	Rp. 155.346.729	
02.06.01.02.07.18.021	Pengelolaan JBSC	2.96 %	Rp. 49.837.400	2.96 %	Rp. 54.098.388	Rp. 4.260.988	Penyesuaian UMK
02.06.01.02.07.18.023	Pengembangan Promosi Perdagangan	2.96 %	Rp. 61.815.100	2.96 %	Rp. 65.010.841	Rp. 3.195.741	Penyesuaian UMK
02.06.01.02.07.18.039	Fasilitasi Pembangunan Pasar Tradisional	2 %	Rp. 27.200.000	2 %	Rp. 183.650.000	Rp. 156.450.000	Efisiensi 3.550.000 Rehab pasar tradisional Argorejo 160.000.000
02.06.01.02.07.18.043	Kajian Peta Distribusi Bahan Pokok	2 %	Rp. 99.984.800	2 %	Rp. 91.424.800	- Rp. 8.560.000	Efisiensi
02.06.01.02.07.20	Program Persaingan Usaha		Rp. 141.287.000		Rp. 236.777.500	Rp. 95.490.500	
02.06.01.02.07.20.006	Pelayanan HKI	0.19 %	Rp. 141.287.000	0.19 %	Rp. 236.777.500	Rp. 95.490.500	-Penambahan Sub Kegiatan Promosi HKI -Ada efisiensi Rp 3.850.000,-
02.07	Industri						
02.07.02	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
02.07.02.02.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 741.192.000		Rp. 745.736.633	Rp. 4.544.633	
02.07.02.02.07.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100 %	Rp. 694.992.000	100 %	Rp. 696.992.000	Rp. 2.000.000	Penambahan Belanja air
02.07.02.02.07.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	100 %	Rp. 46.200.000	100 %	Rp. 48.744.633	Rp. 2.544.633	Penyesuaian UMK
02.07.02.02.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 5.900.511.940		Rp. 6.207.439.740	Rp. 306.927.800	
02.07.02.02.07.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	100 %	Rp. 5.233.000.000	100 %	Rp. 5.274.000.000	Rp. 41.000.000	Desain Interior Gedung Kantor (induk)
02.07.02.02.07.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 -	Rp. 0	1 kendaraan	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Box) sebanyak 1 Unit (B. Metrologi)
02.07.02.02.07.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	Rp. 278.511.940	100 %	Rp. 325.661.940	Rp. 47.150.000	Perlengkapan Balai Metro: 1. Pengadaan AC 1 PK, 1 Unit 2. Blower Udara, 1 Unit 3. Chamber (Peralatan Pengujian Suhu) 4. Thermometer Standar - ada Efisiensi Rp 1.350.000,-
02.07.02.02.07.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	Rp. 122.000.000	100 %	Rp. 121.077.800	- Rp. 922.200	Efisiensi
02.07.02.02.07.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100 %	Rp. 267.000.000	100 %	Rp. 286.700.000	Rp. 19.700.000	Pengadaan Sekat Laboratorium suhu dan Ruang adm Pelayanan (Balai Metrologi) - Efisiensi pemeliharaan rutin/perl. gedung kantor balai metro Rp 300.000,-

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 996.469.090			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.07.02.02.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 161.464.300		Rp. 154.666.300	Rp. -6.798.000	
02.07.02.02.07.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100 %	Rp. 5.937.800	100 %	Rp. 5.641.800	- Rp. 296.000	Efisiensi
02.07.02.02.07.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	100 %	Rp. 128.000.000	100 %	Rp. 124.150.000	- Rp. 3.850.000	Efisiensi
02.07.02.02.07.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	100 %	Rp. 27.526.500	100 %	Rp. 24.874.500	- Rp. 2.652.000	Efisiensi
02.07.02.02.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		Rp. 681.047.390		Rp. 716.018.818	Rp. 34.971.428	
02.07.02.02.07.17.013	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna	0.15 %	Rp. 342.922.740	0.15 %	Rp. 347.183.728	Rp. 4.260.988	penyesuaian umk
02.07.02.02.07.17.079	Pengelolaan Bengkel Rekayasa dan Produksi	0.15 %	Rp. 91.623.000	0.15 %	Rp. 101.623.000	Rp. 10.000.000	Penambahan belanja listrik
02.07.02.02.07.17.086	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Kemasan	0.15 %	Rp. 246.501.650	0.15 %	Rp. 267.212.090	Rp. 20.710.440	Penyesuaian UMK
02.07.02.02.07.18	Program Penataan Struktur Industri		Rp. 199.997.450		Rp. 199.317.450	Rp. -680.000	
02.07.02.02.07.18.011	Promosi Teknologi Tepat Guna	0 %	Rp. 199.997.450	0 %	Rp. 199.317.450	- Rp. 680.000	Efisiensi
02.07.02.02.07.19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial		Rp. 39.028.300		Rp. 31.984.300	Rp. -7.044.000	
02.07.02.02.07.19.022	Kemitraan IKM Jamu	0 %	Rp. 39.028.300	0 %	Rp. 31.984.300	- Rp. 7.044.000	Efisiensi

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 800.126.680			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.16	Penanaman modal						
01.16.01	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal						
01.16.01.01.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 1.271.460.000		Rp. 1.370.455.000	Rp. 98.995.000	
01.16.01.01.16.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100 %	Rp. 418.000.000	100 %	Rp. 421.880.000	Rp. 3.880.000	1. Pergeseran antar rekening dan penambahan biaya listrik yang ada di Gerai P2T karena ada penambahan daya dari 1 phase menjadi 3 phase 2. Revisi keluaran saluran telpon Kaperda (dari 12 bulan menjadi 12 bulan, 7 Saluran)
01.16.01.01.16.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	Rp. 10.550.000	100 %	Rp. 17.675.000	Rp. 7.125.000	1. Penambahan anggaran pajak kendaraan di BKPM induk dan biaya mutasi kendaraan roda 4 (B 2626 MQ) di Gerai P2T yang merupakan hibah dari BKPM pusat 2. Penambahan anggaran belanja STNK kendaraan roda 4 untuk kendaraan AB1264UH, AB1265UH (kaperda)
01.16.01.01.16.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100 %	Rp. 55.200.000	100 %	Rp. 52.740.000	- Rp. 2.460.000	1. penghapusan anggaran pengelola keuangan untuk honor bendahara pengeluaran pembantu di gerai P2T 2. penyesuaian satuan untuk honor bendahara penerimaan menyesuaikan SHBJ
01.16.01.01.16.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	Rp. 56.500.000	100 %	Rp. 56.500.000	Rp. 0	pergeseran antar rekening dan pengurangan jenis barang cetakan yaitu cetak booklet
01.16.01.01.16.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	100 %	Rp. 56.500.000	100 %	Rp. 56.480.000	- Rp. 20.000	efisiensi
01.16.01.01.16.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	100 %	Rp. 124.990.000	100 %	Rp. 124.990.000	Rp. 0	Penyesuaian kebutuhan hidangan rapat serta jumlah tamu
01.16.01.01.16.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100 %	Rp. 549.720.000	100 %	Rp. 640.190.000	Rp. 90.470.000	- Perjadin ke Slovenia dalam rangka pendampingan Wagub dan Ketua DPRD
01.16.01.01.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 524.065.000		Rp. 558.820.000	Rp. 34.755.000	
01.16.01.01.16.02.010	Pengadaan Mebeleur	100 %	Rp. 125.000.000	100 %	Rp. 125.000.000	Rp. 0	Perubahan pada penulisan rincian dan satuan pengadaan sekat ruang/workstation
01.16.01.01.16.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional	100 %	Rp. 399.065.000	100 %	Rp. 433.820.000	Rp. 34.755.000	1. penambahan anggaran digunakan untuk biaya servis, suku cadang dan BBM untuk kendaraan hibah dari BKPM pusat yang semula belum dianggarkan 2. penambahan anggaran karena adanya penyesuaian dari harga solar 5000 menjadi solardex 11000
01.16.01.01.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		Rp. 87.951.900		Rp. 65.851.900	Rp. -22.100.000	

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 800.126.680			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	Capaian Kinerja dan Keuangan						
01.16.01.01.16.06.018	Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan Data informasi	100 %	Rp. 87.951.900	100 %	Rp. 65.851.900	- Rp. 22.100.000	Efisiensi
01.16.01.01.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Rp. 1.139.462.000		Rp. 1.100.462.000	Rp. -39.000.000	
01.16.01.01.16.15.010	Penyelenggaraan pameran investasi	20 %	Rp. 389.412.000	20 %	Rp. 378.912.000	- Rp. 10.500.000	Efisiensi
01.16.01.01.16.15.013	Penyelenggaraan pameran potensi daerah	20 %	Rp. 750.050.000	20 %	Rp. 721.550.000	- Rp. 28.500.000	1. Tambahan untuk kekurangan anggaran pada biaya pemasangan dan biaya arus listrik pada pameran sekaten 2014 dan pameran pembangaunan karena adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 6.500.000 2. Pengurangan anggaran belanja sewa lahan sekaten sebesar 35.000.000
01.16.01.01.16.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Rp. 1.907.244.880		Rp. 1.324.347.700	Rp. -582.897.180	
01.16.01.01.16.16.009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20 %	Rp. 62.725.900	20 %	Rp. 62.045.900	- Rp. 680.000	Efisiensi
01.16.01.01.16.16.017	Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	20 %	Rp. 671.689.980	20 %	Rp. 487.359.000	- Rp. 184.330.980	Efisiensi
01.16.01.01.16.16.019	Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	20 %	Rp. 57.120.000	20 %	Rp. 56.610.000	- Rp. 510.000	Efisiensi
01.16.01.01.16.16.024	Koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal	20 %	Rp. 69.976.000	20 %	Rp. 69.290.000	- Rp. 686.000	Efisiensi
01.16.01.01.16.16.025	Penyusunan Kajian Investasi Strategis di Provinsi DIY dalam Rangka Peningkatan Iklim Investasi	20 %	Rp. 1.045.733.000	20 %	Rp. 649.042.800	- Rp. 396.690.200	Revisi AMDAL belum perlu dilakukan mengingat lahan yang disiapkan untuk kawasan industri sentolo belum mengalami perubahan yang signifikan (Zona awal masih sama) sehingga AMDAL tahun 2008 masih berlaku
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.13	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal						
01.20.13.01.16.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		Rp. 1.148.834.000		Rp. 858.954.500	Rp. -289.879.500	
01.20.13.01.16.25.006	Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama luar negeri	20 %	Rp. 1.148.834.000	20 %	Rp. 858.954.500	- Rp. 289.879.500	1. Efisiensi sebesar 361.159.500 2. Kegiatan baru ke Amerika Serikat dalam rangka International Seminar and Festival of Indonesian Music sebesar 71.280.000

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 11.925.239.900			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.17	Kebudayaan						
01.17.01	Dinas Kebudayaan						
01.17.01.01.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 444.600.000		Rp. 568.360.000	Rp. 123.760.000	
01.17.01.01.17.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	54 jenis	Rp. 45.000.000	54 jenis	Rp. 40.000.000	- Rp. 5.000.000	Efisiensi karena penyesuaian ASB
01.17.01.01.17.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis, 100.031 lembar, 50 bendel	Rp. 38.500.000	12 jenis, 100.031 lembar, 850 bendel	Rp. 41.065.000	Rp. 2.565.000	Kekurangan pengadaan cetak dan Pengadaan cetak karcis masuk museum dan pergelaran wayang durasi singkat Rp. 10.625.000 sehingga perlu penambahan target kinerja, tetapi ada efisiensi 8.060.000 karena penyesuaian ASB pada belanja barang cetak yang lain.
01.17.01.01.17.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 jenis	Rp. 11.100.000	6 jenis	Rp. 6.840.000	- Rp. 4.260.000	Efisiensi
01.17.01.01.17.01.022	Penyediaan Jasa keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	26 Orang	Rp. 350.000.000	35 Orang	Rp. 480.455.000	Rp. 130.455.000	1) Menyesuaikan dengan Upah Minimum Regional DIY 2) Ada penambahan penjaga keamanan Museum Sonobudoyo dan TBY 9 orang selama 3 Bulan @Rp. 1.065.000 sebesar Rp. 28.755.000
01.17.01.01.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 1.617.000.000		Rp. 2.307.000.000	Rp. 690.000.000	
01.17.01.01.17.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 unit kendaraan roda empat	Rp. 0	2 unit kendaraan roda empat	Rp. 390.000.000	Rp. 390.000.000	Pengadaan 2 unit kendaraan roda empat untuk operasional @ Rp 195,000,000
01.17.01.01.17.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7200 liter	Rp. 217.000.000	17200 liter	Rp. 317.000.000	Rp. 100.000.000	Fasilitasi Penggunaan Gedung untuk BBM Genzet TBY
01.17.01.01.17.02.042	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	1 Paket	Rp. 1.400.000.000	2 Paket	Rp. 1.600.000.000	Rp. 200.000.000	Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja: - Ruang Storage Koleksi (Studi Koleksi Wayang) - Ruang Mushola - Ruang Perpustakaan - Ruang Kantor/ Pengelola - Ruang Entrance/ pendopo dan pendopo timur
01.17.01.01.17.06	Program Peningkatan		Rp. 102.721.000		Rp. 159.221.000	Rp. 56.500.000	

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 11.925.239.900			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
01.17.01.01.17.06.017	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD (Prognosis, Realisasi Anggaran, Keuangan, Semesteran, dan Akhir Tahun)	2 dokumen	Rp. 17.610.000	2 dokumen	Rp. 25.110.000	Rp. 7.500.000	Kekurangan Fotocopy Laporan Keuangan SKPD
01.17.01.01.17.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data Informasi	3 dokumen	Rp. 85.111.000	3 dokumen	Rp. 134.111.000	Rp. 49.000.000	Honorarium untuk Tenaga Ahli Pendamping Kebudayaan dari ISI selama 6 bulan; FGD
01.17.01.01.17.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		Rp. 1.149.136.000		Rp. 1.179.396.000	Rp. 30.260.000	
01.17.01.01.17.15.006	Fasilitasi Pusat Pengembangan Budaya di Desa Budaya	2 balai budaya	Rp. 400.000.000	2 balai budaya	Rp. 397.110.000	- Rp. 2.890.000	Efisiensi karena adanya penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.15.029	Fasilitasi Dewan Kebudayaan	1 tahun	Rp. 125.000.000	1 tahun, 1 tim penjangkaran pengurus baru	Rp. 170.800.000	Rp. 45.800.000	Masa Bakti Dewan Kebudayaan Berakhir di Bulan Juni, perlu dibentuk Tim Penjangkaran Pengurus baru Rp. 50 Juta dan efisiensi 4.200.000 karena penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.15.032	Pelatihan seni dan budaya DIY	100 Orang	Rp. 174.681.000	100 Orang	Rp. 164.081.000	- Rp. 10.600.000	Efisiensi karena penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.15.033	Kongres Bahasa Jawa	250 Orang	Rp. 84.620.000	250 Orang	Rp. 83.120.000	- Rp. 1.500.000	Efisiensi karena penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.15.036	Festival Upacara-upacara Adat se-Prov DIY	10 upacara adat	Rp. 264.835.000	10 upacara adat	Rp. 264.485.000	- Rp. 350.000	Efisiensi karena penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.15.037	Festival Budaya Kotagede	1 Paket	Rp. 100.000.000	1 Paket	Rp. 99.800.000	- Rp. 200.000	Efisiensi karena ada penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Rp. 8.435.727.000		Rp. 11.122.079.400	Rp. 2.686.352.400	
01.17.01.01.17.16.003	Penyusunan Kebijakan pengelolaan kekayaan budaya	4 kebijakan	Rp. 101.395.000	7 kebijakan	Rp. 236.395.000	Rp. 135.000.000	Tambahan untuk penyelesaian tiga pergub amanat dari Perda 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya di DIY dan Perda Kebudayaan

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 11.925.239.900			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	lokal daerah						
01.17.01.01.17.16.014	Fasilitasi Dewan pertimbangan pelestarian warisan budaya	10 rekomendasi dan 1 sarasehan pelestarian BCB	Rp. 457.875.000	10 rekomendasi dan 1 sarasehan pelestarian BCB	Rp. 500.775.000	Rp. 42.900.000	Tambahan Kekurangan Honor untuk Tim DP2WB selama 3 bulan Rp. 45.000.000; Efisiensi karena ada penyesuaian SHBJ Rp. 2.100.000
01.17.01.01.17.16.026	Pameran Nasional, Regional, Lokal dan temporer Benda Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta	6 Kali	Rp. 368.450.000	6 Kali	Rp. 378.450.000	Rp. 10.000.000	Seleksi Pemandu Museum Sonobudoyo
01.17.01.01.17.16.027	Pelestarian dan Pengelolaan BCB di Provinsi DIY	7 BCB	Rp. 5.564.702.000	9 BCB	Rp. 7.885.352.000	Rp. 2.320.650.000	1. Untuk Kekurangan Rehabilitasi BCB Puro pakualaman Tahap II Rp. 210.000.000, 2. Kajian Analisa Biaya Pemugaran Cagar Budaya 1 dokumen 55 juta 3. Perlindungan dan Pengamanan cagar budaya (kasus SMA 17) Rp. 105.000.000,- 4. Efisiensi 6.850.000 karena penyesuaian SHBJ 5. CCTV untuk cagar budaya Rp. 257.500.000 6. Penyelesaian Tanah Tugu Pal Putih Rp 1,700,000,000;
01.17.01.01.17.16.054	Pengembangan Museum Internasional	2 museum	Rp. 700.000.000	2 museum, 1 dokumen	Rp. 737.250.000	Rp. 37.250.000	1. Kajian Arsitektural Museum Sonobudoyo 2. Efisiensi Rp 17.750.000 karena penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.16.070	Festival Museum	1 kegiatan	Rp. 400.000.000	1 kegiatan	Rp. 399.100.000	- Rp. 900.000	Efisiensi karena ada penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.16.081	Pengembangan Kapasitas Museum	1 Paket	Rp. 400.000.000	1 Paket	Rp. 387.400.000	- Rp. 12.600.000	Ada efisiensi Rp. 12.600.000 karena penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.16.087	Pengelolaan Data Seni Budaya di DIY	1 tahun	Rp. 60.000.000	1 tahun	Rp. 46.800.000	- Rp. 13.200.000	Efisiensi Rp. 13.200.000
01.17.01.01.17.16.088	Pengembangan Perpustakaan Seni Budaya	1 Paket	Rp. 200.000	1 Paket	Rp. 0	- Rp. 200.000	Efisiensi
01.17.01.01.17.16.090	Pembinaan Lembaga pelestarian Warisan Budaya	7 lembaga	Rp. 10.000.000	8 lembaga	Rp. 185.000.000	Rp. 175.000.000	Hibah untuk masjid As Salam Puro Pakualaman seluas 357 m2
01.17.01.01.17.16.093	Pagelaran Ketoprak Lintas Generasi	1 kegiatan	Rp. 80.355.000	1 Paket	Rp. 77.555.000	- Rp. 2.800.000	Efisiensi Rp 2.800.000 karena ada penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.16.094	Penyusunan Bahan Promosi Museum Negeri Sonobudoyo	5000 eksemplar	Rp. 100.000.000	5000 eksemplar	Rp. 98.672.400	- Rp. 1.327.600	Efisiensi Rp 1.327.600 karena ada penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.16.096	Reaktualisasi Sastra Koleksi naskah Museum Sonobudoyo	2 naskah	Rp. 80.000.000	1 kegiatan	Rp. 77.480.000	- Rp. 2.520.000	Efisiensi Rp 2.520.000 karena ada penyesuaian SHBJ
01.17.01.01.17.16.099	Lawatan Sejarah Lokal	1 Kali	Rp. 112.750.000	1 Kali	Rp. 111.850.000	- Rp. 900.000	Efisiensi Rp. 900.000

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 11.925.239.900			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.17.01.01.17.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Rp. 3.349.193.625		Rp. 9.581.436.125	Rp. 6.232.242.500	
01.17.01.01.17.17.003	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	8 IKPMD	Rp. 157.299.000	8 IKPMD	Rp. 154.899.000	- Rp. 2.400.000	Efisiensi Rp. 2.400.000
01.17.01.01.17.17.008	Fasilitasi Pengiriman Misi Kesenian	6 misi	Rp. 1.280.000.000	8 misi	Rp. 3.049.710.000	Rp. 1.769.710.000	Berubah dari 6 misi kesenian menjadi 8 misi kesenian karena ada undangan Pengiriman misi kebudayaan ke Washington DC Amerika untuk mengikuti Festival Seni di sana Rp. 1.489.710.000 Ada tambahan untuk mengikuti Pawai Budaya Nusantara Rp 280 juta
01.17.01.01.17.17.030	Pelestarian dan Aktualisasi Kesenian Tradisi	15 Organisasi	Rp. 1.115.000.000	119 Organisasi	Rp. 5.558.932.500	Rp. 4.443.932.500	Mengingat semakin banyaknya kebutuhan untuk ruang dan waktu ekspresi kelompok-kelompok seni dan budaya 1. HAMKRI Jogjakarta Rp. 30.000.000 2. Fasilitas Fiber Fase 4 Rp. 50.000.000 3. Hibah Untuk Penerbitan buku 25 tahun Yayasan Cemeti Rp. 100.000.000 4. Hibah Untuk Kirab mubeng benteng Yayasan Songsong Buwono Rp. 15.000.000 5. Hibah Untuk Kelompok Sastra Perubahan Rp. 35.000.000 6. Hibah untuk SMEDIMETRAM Rp. 100.000.000 7. Hibah untuk Teater Tantra Rp. 8.500.000 8. Hibah untuk Paguyuban seni Tari Bantul Rp. 25.000.000 9. Hibah Untuk Komunitas greget Mataram Rp. 25.000.000 10. Hibah Untuk paguyuban seni Budaya Jogjakarta Rp. 25.000.000 11. Hibah Untuk Paguyuban Seni Budaya Tradisi "Rewe-Rewe" Yogyakarta Rp. 25.000.000 12. Hibah Untuk Paksi Katon Rp. 45.000.000 13. I70Hibah untuk Sanggar Retno Aji Mataram Rp. 75.000.000 14. Hibah untuk Gelar Budaya Tradisi Sedayu Rp. 50.000.000,- 15. Pondok Pesantren "Ngabean" Rp. 20.000.000 16. Pondok Pesantren "Kaliabu" Rp. 20.000.000 17. Paguyuban Seni Jaranan "Iaras mudo Budoyo" Rp. 40.000.000 18. Desa Dengok Rp. 20.000.000 19. Paguyuban Dalang dan Pengrawit Abdining Budaya Kraton Ngayogyakarta 20. Panitia Festival Jatilan Daratan III Rp. 20.000.000 21. Forum Komunitas Desa Budaya DIY Rp.40.000.000 22. Yayasan Hondodento Rp. 35.000.000 23. Kesenian Badui dan Rodatan "baabusalam" Rp. 30.000.000 24. Panitia Merti Dusun, Pancuran, Terong, dlingo bantul Rp. 20.000.000 25. Paguyuban ketoprak "mataram Tri Mudo Budoyo" Rp. 40.000.000 26. Kelompok sholawat " Darunnajah" Rp. 15.000.000 27. Gemawang art Performance Rp. 20.000.000 28. Kelompok karawitan "sri Mudotomo" Rp. 40.000.000 29. Paguyuban seni Budaya karawitan "ngudi Iaras" Rp. 40.000.000 30. Dewan Pimpinan DAerah HAMKRI Kab Sleman Ep. 20.000.000 31. LPMP Pedukuhan Ngerboh I Rp. 20.000.000 32. Grup Seni Tari reog "kridho Mudo Budoyo"40.000.000 33. Kelompok " Harta Budaya saradan"15.000.000 34. Paguyuban Seni " Sholawat Nabi Setyo Mudo Irama" Rp. 15.000.000 35. Paguyuban "Laras Madya Gawe Tentrem" Rp. 15.000.000 36. Paguyuban Ngeksigondo Mataram Kotagede Rp. 35.000.000 37. Sanggar Seni "Sasana Krida Budaya" Rp. 20.000.000 38. Panitia Memetri Budaya Dlingo Giriloji Rp. 20.000.000 39. Grup Kesenian Panjidur "Langen Krido Tomo" Rp. 40.000.000 40. Paguyuban "Tresno Budoyo"Rp. 20.000.000 41. Paguyuban Kesenian Karawitan "Kawula Budaya" Rp. 35.000.000 42.Group Seni Tari Jathil Turonggo Putri "Sekar Arum"Rp. 35.000.000 43. Paguyuban "Ngudi Kawruh" Rp. 20.000.000 44. Paguyuban Kethoprak "Lestari Mudha Budhaya" Rp. 25.000.000 45. Panitia festival Apeman Malioboro 2013 Rp. 15.000.000 46. Paguyuban Group Kesenian "Laras Muda Budaya" Rp. 35.000.000 47. Panitia Bersih Desa, Kalibuko II, kalirejo, Kokap KP Rp. 40.000.000 48. Paguyuban Karawitan "Laras Agung Budaya" Rp. 20.000.000 49. Kelompok Sholawatan/Hadrah "Putra Winasis" Rp. 15.000.000 50. Jama'ah Hadrah Masjid Kajen "Asbabul Kahfi" Rp. 15.000.000 51. Jama'ah Hadrah Nganyang "Al-Hasanah" Rp. 15.000.000 52.Paguyuban Kesenian Jathilan "Kudha Bayu Manunggal" Rp. 20.000.000 53. Kelompok Jathilan "Wahyu Cahyo Turonggo" 20.000.000 54. Kelompok Kesenian Angguk Putri "Laras Sekar Puiyani" Rp. 35.000.000 55.Jathilan Haswo Bhirowo Rp. 20.000.000 56. Singlon Sanggar Budaya Rp. 75.000.000 57. Paguyuban Seni Jathilan "Pakuwojo"Rp. 20.000.000 58. Paguyuban Kesenian Jawa Kethoprak "Arum Budoyo" Rp. 40.000.000 59.Kesenian Orkes Keroncong

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 11.925.239.900			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
							“Tunas Muda” Rp. 20,000,000 60. Kelompok Kerawitan “Ngudi Laras” Rp. 35,000,000 61.Paguyuban Mocopat “Mekar Asih” Rp. 15,000,000 62. Jama’ah Debak Rebana Tuksono Rp. 15,000,000 63. Forum Musyawarah Bersama Sahabat Pusaka Kotagede Rp. 20,000,000 64. RW 06 Kel.Purbayan,Kotagede,YK Rp. 20,000,000 65. SD Negeri Jambon Rp. 20,000,000 66. Paguyuban Seni Mocopat “Sekar Wimbuh” 15,000,000 67. Paguyuban Kethoprak “Krido Budoyo” Rp. 40,000,000 68. Paguyuban Seni Karawitan “Langen Suko” Rp. 20,000,000 69. Paguyuban Kethoprak “Mataram Rumpun Muda (Sendang Budaya) Rp. 35,000,000 70. Majelis Luhur Taman Siswa YK Rp. 20,000,000 71. Paguyuban Seni Karawitan “Ngudi Laras” Rp. 35,000,000 72. Kelompok Seni Jathilan “Srimulyo”Rp. 20,000,000 73. Yayasan “Ki Juru Mertani” Rp. 20,000,000 74. Paguyuban Bregodo Kaprajuritan “JOGOSURO” Rp. 35,000,000 75. Pemerintah Desa Wiladeg Rp. 35,000,000 76. Panitia Pembangunan Rumah Adat Rp. 40,000,000 77. Kesenian Orkes Keroncong “Tunas Muda” Rp. 15,000,000 78. Kesenian Orkes Keroncong “Tunas Muda” Rp. 15,000,000 79. Kesenian Tradisional Jathilan Kreasi Baru “Turonggo Arum Kusumo” Rp. 20,000,000 80. Paguyuban Jathilan Kreasi Baru “Kudho Prakoso” Rp. 15,000,000 81. Paguyuban “Semar” Desa Tamantirto Rp. 20,000,000 82. Paguyuban Seni Jatilan Putro Bujang Ganong Rp. 15,000,000 83. Paguyuban Seni Campursari “Aljazera”Rp. 20,000,000 84. Paguyuban Seni Jatilan Sadewa Budaya Rp. 20.000.000 85. Pengurus Kelompok Seni Parra Nada Plus Rp. 20.000.000 86. Paguyuban “Mekar Sari” Rp.20.000.000 87. Paguyuban Seni Jathilan “Macan Sirapan” Rp. 20,000,000 88. Retno Aji Mataram Yogyakarta Rp. 75,000,000 89. Paguyuban Seni Karawitan “Pramu Krida Murti” Rp. 25,000,000 90.Upacara Adat “Nguras Enceh” Rp. 40,000,000 91. Upacara Adat “Baritan” Rp. 35,000,000 92. Forum HPK Yogyakarta Rp. 20,000,000 93. Paguyuban Kerawitan “Mahanani” Rp. 20,000,000 94.Panitia Merti Dusun dengok tanjungharjo Rp. 20,000,000 95. Panitia Hari Jadi Ke 67 Desa Triwidadi Rp. 30,000,000 96. Pemangku Adat Rassulan Rp. 40,000,000 97. Organisasi Reog Mega Budaya Karangnangka Rp. 30,000,000 98. Seni Terbang Ulama Budaya Rp. 15,000,000 99. Lestari Mudho Budoyo Rp. 15,000,000 100. Paguyuban Hadroh Kreasi Baru “Fajrul Huda” Rp. 15,000,000 101. Forum Kethoprak Karang Taruna Desa Budaya Mulyo Dadi Rp. 40,000,000 102. LA GALIGO UGM Rp. 40,000,000 103. Kirab Budaya Sinduadi Rp. 30,000,000 104. Panitia Majemukan / Bersih Dusun Kuroboyo Rp. 29,800,000 105. Forum Kemitraan Polisi & Masyarakat PAKSI KATON Rp. 82,100.000. 106.Yayasan Biennale Yogyakarta Rp. 295.510.000 107. Orkes Madun #1 alias Madekur & Tarkeni Rp. 240.372.500 108. Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK) Rp. 100.000.000 109. Festival Gerobak Sapi 2013 Rp. 107.250.000 110. Panitia Peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman Rp. 293.650.000 111. Kelompok Safari Selapanan Seni Spiritual “Joged Sholawat Mataram” Rp. 82.250.000 112. Gelar BUdaya Tradisi desa budaya jeruk wudel Rp. 40.000.000 113. Kelompok Kesenian Kethek Ogleng/Ogleng wanaro seto " Arum Budoyo" Rp. 4.500.000 114. Panitia Ruwah budaya sadranan Rp.5.000.000 115. Pagelaran wayang kulit Kelompok kerja Pembedayaan Agrotani Rp. 5.000.000. 116. Jogja Dance Company Rp. 75.000.000 117. Karang Taruna Wredi Dadi Wiladeg Gunung Kidul Rp. 40.000.000 118. Karawitan "santi Laras" Sido Mulyo Bambanglipuro Bantul Rp. 20.000.000 119. Keroncong "Palma Kencana" Suryodiningratan, Minggiran Kota Yogyakarta Rp.30.000.000
01.17.01.01.17.17.032	Pekan Film Jogja	1	Rp. 796.894.625	1	Rp. 817.894.625	Rp. 21.000.000	Kekurangan uang saku peserta rapat Rp 21.000.000 untuk 600 peserta @35.000
01.17.01.01.17.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya		Rp. 386.000.000		Rp. 374.625.000	Rp. -11.375.000	
01.17.01.01.17.18.005	Pertemuan Sastrawan	1 Kali	Rp. 386.000.000	1 Kali	Rp. 374.625.000	- Rp. 11.375.000	Efisiensi RP 11.375.000 karena penyesuaian SHBJ

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 11.925.239.900			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	Nusantara						
01.17.01.01.17.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan		Rp. 2.750.000.000		Rp. 4.867.500.000	Rp. 2.117.500.000	
01.17.01.01.17.19.001	Fasilitasi Barang Bercorak Tradisi untuk Masyarakat	40	Rp. 2.750.000.000	42	Rp. 4.867.500.000	Rp. 2.117.500.000	Karena kebutuhan akan penumbuhan, pengembangan, pemberdayaan organisasi-organisasi budaya yang meningkat, berikut daftar kelompok dan paket bantuan yang akan disalurkan 1. Pengadaan 5 buah gamelan besi pencon kuningan untuk Paguyuban Sinar Budaya Kokap Kulonprogo , Paguyuban Mudho Budaya Patuk Gunung Kidul, Paguyuban Wiromo Budaya Gunung Kidul, Paguyuban Sumber Agung Moyudan Sleman, SMA Pangudi Luhur Kaliduren Sleman sebesar Rp. 312.500.000 2. Pengadaaan Layar Tonil Tradisional sebesar R. 100.000.000,- 3. Pakian Begada "bergodo Punggading" organisasi Muda-mudi punggading Rp. 35.000.000 4. Pakaian bergodo Jroyudo, jroyudan, Guwosari, Pajangan Rp. 35.000.000 5. Kelompok seni Karawitan Himamike, Dusun Kembang pilihan desa guwosari, pajangan Rp. 65.000.000 6. kekurangan biaya pengiriman Joglo ke slovenia Rp. 100.000.000 7. Pengadaan 1 set Wayang Kulit Ikatan Silaturahmi Keluarga Yogyakarta di Batam = Rp. 65.000.000,- 8. Pengadaan Gamelan Paguyuban Seni Karawitan "Ngudi Budoyo" Tekik, Nlindur, Girisubo, Gunungkidul = Rp. 62.500.000 9. Pengadaan Gamelan Grup Karawitan Ngesti Wiromo Retno, Wiyoro, Baturetno Banguntapan Bantul Rp.62.500.000,- 10. Pengadaan gamelan Kelompok Ngudi Laras, Nglebeng, Banjarsari, Kalibawang Kulonprogo Rp. 62.500.000,- 11. Pengadaan Gamelan Paguyuban Karawitan "mulyo laras" Bolu, Margokaton, Sayegan, Sleman= Rp. 62.500.000 12. Pengadaan Gamelan Paguyuban Seni Karawitan "Larasa Budoyo" Dusun Sengir, Desa Kalirejo, KEc Kokap , KAb. KP= Rp. 62.500.000 13. Pengadaan Gamelan Paguyuban Seni Karawitan "Langen Wiromo" Padukuhan Grogol IV, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul = Rp. 62.500.000 14. Pengadaan Gamelan Kelompok Karawitan, nlegi, Patuk, Gunung Kidul = Rp. 62.500.000 15. perkumpulan seni karawitan " Ngesti Wiromo" Sudimoro, Banjarharjo, Kalibawang KP = Rp. 62.500.000 16. pengadaan wayang kuli Paguyuban "semar" Desa Tamantirto Kasihan Bantul Rp. 65.000.000. 17. Sanggar Seni Budaya "Iestari Budaya" Jl. AGus Salim, No. 125 Desa Kepek, Wonosari, Gunungkidul Rp. 65.000.000 17. Ikatan Silaturahmi Keluarga Yogyakarta Batang Rp. 65.000.000

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 878.957.717			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
01.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat						
01.19.01.01.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 366.393.000		Rp. 461.559.717	Rp. 95.166.717	
01.19.01.01.19.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3 bulan	Rp. 71.788.000	3 bulan	Rp. 94.925.000	Rp. 23.137.000	Untuk membiayai kekurangan 8 bulan
01.19.01.01.19.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	96 jenis	Rp. 27.612.000	99 jenis	Rp. 33.229.500	Rp. 5.617.500	Untuk pengadaan: Kertas HVS 70 gr (25 pak); Kertas gaji (2 roll); Tinta Epson L200 (2 botol); Toner HP Laser (2 bh); Isi ulang toner (12 kali)
01.19.01.01.19.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	431 ol, 2000 os, 410 ol	Rp. 28.995.000	431 ol, 2000 os, 410 ol	Rp. 24.465.000	- Rp. 4.530.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	476 op	Rp. 189.998.000	512 op	Rp. 261.222.500	Rp. 71.224.500	Koordinasi/konsultasi dalam daerah (400 op); Koordinasi/konsultasi luar daerah (112 op); Tiket pesawat (30 pp); Tiket KA (26 pp)
01.19.01.01.19.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	3 org x 12 bln	Rp. 48.000.000	3 org x 12 bln	Rp. 47.717.717	- Rp. 282.283	EFISIENSI
01.19.01.01.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 0		Rp. 66.000.000	Rp. 66.000.000	
01.19.01.01.19.02.013	Pengadaan Kendaraan Dinas	0 roda 2	Rp. 0	4 roda 2	Rp. 66.000.000	Rp. 66.000.000	Kendaraan Roda 2 (4 unit)
01.19.01.01.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 45.000.000		Rp. 44.925.000	Rp. -75.000	
01.19.01.01.19.05.012	Publikasi Media Cetak Dan Elektronik	22 kl peliputan, 1 dialog, 2150 buku, 5 buah	Rp. 45.000.000	22 kl peliputan, 1 dialog, 2150 buku, 5 buah	Rp. 44.925.000	- Rp. 75.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 49.470.000		Rp. 37.251.000	Rp. -12.219.000	
01.19.01.01.19.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1 laporan	Rp. 10.879.000	1 laporan	Rp. 9.780.000	- Rp. 1.099.000	EFISIENSI

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 878.957.717			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.19.01.01.19.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	9 Program	Rp. 38.591.000	9 Program	Rp. 27.471.000	- Rp. 11.120.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Rp. 2.742.075.500		Rp. 2.894.810.500	Rp. 152.735.000	
01.19.01.01.19.15.013	Pelatihan SAR Linmas Provinsi DIY	1 angkatan	Rp. 55.660.000	3 angkatan	Rp. 160.220.000	Rp. 104.560.000	Digunakan untuk pelatihan anggota sebanyak 2 angkatan
01.19.01.01.19.15.029	Fasilitasi Pembinaan Pembekalan Anggota Satuan Linmas	40 orang 4 angkatan	Rp. 47.704.000	40 orang 40 angkatan	Rp. 46.504.000	- Rp. 1.200.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.15.031	Pemberdayaan Potensi SAR Linmas	280 Orang	Rp. 2.342.128.500	315 Orang	Rp. 2.373.478.500	Rp. 31.350.000	Honor SAR 315 Orang selama 12 bulan; Honor petugas Piket pada hari libur 315 Orang dengan perincian Honor Petugas Piket 35 Orang x Rp.30.000 X 26 Hr = Rp. 27.300.000. Tambahan Biaya Operasional SAR 9 X 3 Bln X Rp. 150.000 = Rp. 4.050.000
01.19.01.01.19.15.034	Pengadaan Sarpras Operasional SAR Linmas Provinsi DIY	2 set	Rp. 200.000.000	2 set	Rp. 226.300.000	Rp. 26.300.000	2 Set Alat Selam 12Velber, 2 bh SRT, 4 Unit Sound System, 1 Buah Genset dengan rincian 1 Unit Sound System Rp.16.300.000 ; 1 Buah Ginset Rp. 10.000.000
01.19.01.01.19.15.036	Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM	40 orang x 3 angkatan	Rp. 34.908.000	40 orang x 30 angkatan	Rp. 32.133.000	- Rp. 2.775.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.15.040	Fasilitasi dan Koordinasi Satlinmas	50 orang x 5 angkatan	Rp. 61.675.000	50 orang x 5 angkatan	Rp. 56.175.000	- Rp. 5.500.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.17	Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Rp. 46.195.000		Rp. 44.995.000	Rp. -1.200.000	
01.19.01.01.19.17.015	Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara	50 orang x 4 kali	Rp. 46.195.000	50 orang x 4 kali	Rp. 44.995.000	- Rp. 1.200.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Rp. 135.803.930		Rp. 132.328.930	Rp. -3.475.000	
01.19.01.01.19.18.004	Fasilitasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)	30 orang x 6 kali	Rp. 59.977.450	30 orang x 6 kali	Rp. 58.777.450	- Rp. 1.200.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.18.010	Koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	30 orang x 6 kali	Rp. 59.976.980	30 orang x 6 kali	Rp. 58.776.980	- Rp. 1.200.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.18.012	Forum Komunikasi Antar Partai Politik	50 orang x 1 kali	Rp. 15.849.500	50 orang x 1 kali	Rp. 14.774.500	- Rp. 1.075.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat		Rp. 423.200.300		Rp. 417.710.300	Rp. -5.490.000	
01.19.01.01.19.21.008	Pembinaan Dan Optimalisasi Fungsi Dan Peran Ormas Dan LSM	50 orang x 2 kali	Rp. 28.955.700	50 orang x 2 kali	Rp. 28.305.700	- Rp. 650.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.21.010	Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol Dan Pemerintah Di Daerah	40 orang x 2 kali	Rp. 19.931.900	40 orang x 2 kali	Rp. 18.631.900	- Rp. 1.300.000	EFISIENSI

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 878.957.717			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.19.01.01.19.21.011	Fasilitasi Rekomendasi Perijinan	1000 rekomendasi	Rp. 20.000.000	2000 rekomendasi	Rp. 21.500.000	Rp. 1.500.000	ATK yang diajukan Tahun 2013 sudah tidak mencukupi karena Rekomendasi Perizinan yg ditargetkan Th. 2013 adalah 2000 Rekomendasi Perizinan tetapi s/d tgl 7 Juni 2013 sdh mencapai 1239
01.19.01.01.19.21.017	Forum Diskusi Politik Dalam Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula	50 orang x 4 kali	Rp. 49.836.600	50 orang x 4 kali	Rp. 46.636.600	- Rp. 3.200.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.21.018	Bimtek Penyusunan LPJ (Laporan Pertanggung-Jawaban) bagi Pengurus Parpol	30 orang x 2 hari	Rp. 8.987.300	30 orang x 2 hari	Rp. 8.907.300	- Rp. 80.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.21.019	Pelatihan Pengarusutaman Gender bagi Generasi Muda	35 orang x 2 kali	Rp. 10.488.800	35 orang x 2 kali	Rp. 10.408.800	- Rp. 80.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.21.020	Forum Komunikasi / Diskusi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	100 orang x 3 angkatan	Rp. 60.000.000	100 orang x 3 angkatan	Rp. 58.350.000	- Rp. 1.650.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.21.021	Fasilitasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2014	30 or x 2 kl, 50 or x 5 kl, 50 or x 4 kl, 1 kl, 1000	Rp. 225.000.000	30 or x 2 kl, 50 or x 5 kl, 50 or x 4 kl, 1 kl, 1000	Rp. 224.970.000	- Rp. 30.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.23	Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat		Rp. 373.674.280		Rp. 961.189.280	Rp. 587.515.000	
01.19.01.01.19.23.001	Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	30 or x 6 kl	Rp. 59.976.980	30 or x 6 kl	Rp. 58.776.980	- Rp. 1.200.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.23.002	Fasilitasi Kegiatan KOMINDA	40 Orang	Rp. 202.399.800	40 Orang	Rp. 306.399.800	Rp. 104.000.000	Peningkatan wawasan KOMINDA DIY dan pengadaan pakaian seragam berupa Studi Banding ke Kepulauan Riau (12 x 4 hr); Pengadaan Pakaian Seragam Batik (25 Stel); Uniform (25 stel)
01.19.01.01.19.23.008	Peningkatan Bela Negara Bagi Ormas/L S M /Orpol	50 orang x 3 angkatan	Rp. 29.994.000	50 orang x 3 angkatan	Rp. 29.094.000	- Rp. 900.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.23.009	Dialog Antar Umat Beragama/ Forum Umat Beriman	50 orang x 2 angkatan	Rp. 29.476.000	50 orang x 2 angkatan	Rp. 27.376.000	- Rp. 2.100.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.23.010	Koordinasi Pengawasan Dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing	1 tahun	Rp. 25.667.500	1 tahun	Rp. 31.512.500	Rp. 5.845.000	Penambahan frekuensi pemantauan dan pengawasan orang asing di daerah
01.19.01.01.19.23.011	Forum Dialog Generasi Muda Lintas Agama	35 or x 5 kl	Rp. 26.160.000	35 or x 5 kl	Rp. 25.910.000	- Rp. 250.000	EFISIENSI
01.19.01.01.19.23.020	Fasilitasi Pelaksanaan Inpres NO. 2 ttg Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN)	0 Raker	Rp. 0	2 Raker	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Raker 2 x 50 orang untuk menindaklanjuti Inpres 2 / 2013
01.19.01.01.19.23.022	Monitoring dan Pemantauan Lapangan Ormas / LSM	0 bulan	Rp. 0	3 bulan	Rp. 5.845.000	Rp. 5.845.000	Monev 3 bulan untuk mengetahui kondisi faktual LSM / Ormas
01.19.01.01.19.23.030	Penelitian Dinamika Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY	0 dokumen	Rp. 0	1 dokumen	Rp. 426.275.000	Rp. 426.275.000	Kegiatan baru

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 60.791.368			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
01.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja						
01.19.02.01.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 170.982.110		Rp. 200.548.038	Rp. 29.565.928	
01.19.02.01.19.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	12 bulan	Rp. 2.250.000	12 bulan	Rp. 3.500.000	Rp. 1.250.000	Peralihan Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 6 berupa Bus Penegakan Perundang-undangan, belum teranggarkan adanya KIR dan Penelitian Ulang STNK.
01.19.02.01.19.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja.	12 bulan	Rp. 168.732.110	13 bulan	Rp. 197.048.038	Rp. 28.315.928	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pembayaran honorarium selama 12 Bulan (akibat penyesuaian terhadap UMP). Usulan penambahan anggaran untuk Honorarium Anggota Banpol PP sebanyak 1 bulan, Honor Penjaga Repeater 2 bulan dan Uang Makan Anggota Banpol PP 1 bulan, plus gaji ke 13 untuk Banpol PP 10 orang
01.19.02.01.19.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp. 0		Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	
01.19.02.01.19.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0 Paket	Rp. 0	1 Paket	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	Untuk melengkapi atribut pakaian dinas harian (PDH) Pol PP DIY disesuaikan dengan Permendagri No. 19 Tahun 2013 terbaru.
01.19.02.01.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 0		Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	
01.19.02.01.19.05.047	Diklat PPNS	4 Orang	Rp. 0	4 Orang	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	Belum teranggarkan Uang Saku Harian Peserta Diklat (Megamendung. Jawa Barat) sejumlah 4 Orang x 30 hari x @ Rp. 200.000,-
01.19.02.01.19.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Rp. 0		Rp. 725.440	Rp. 725.440	
01.19.02.01.19.15.044	Pemantauan dan Pengamanan Asset Milik Pemerintah DIY	0 %	Rp. 0	100 %	Rp. 725.440	Rp. 725.440	Pengamanan Gedung Eks Bioskop Indra

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 918.515.390			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
01.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
01.19.03.01.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 35.000.000		Rp. 45.000.000	Rp. 10.000.000	
01.19.03.01.19.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Rp. 35.000.000	12 bulan	Rp. 45.000.000	Rp. 10.000.000	target kinerja terbayarnya jasa kebersihan gedung kantor 12 bulan, 1 gedung 2 lantai, 1 unit PUSDALOPS-PB DIY (untuk membayar kekurangan biaya jasa kebersihan lantai 2)
01.19.03.01.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 2.657.000.000		Rp. 2.728.500.000	Rp. 71.500.000	
01.19.03.01.19.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1 unit damkar	Rp. 2.500.000.000	3 unit roda 2	Rp. 2.516.500.000	Rp. 16.500.000	Penambahan 3 unit roda 2
01.19.03.01.19.02.007	Pengadaan Perlengkapann Gedung Kantor	4 jenis	Rp. 38.707.000	5 jenis	Rp. 63.707.000	Rp. 25.000.000	Tersedianya perlengkapan kantor 5 jenis meliputi : Brankas, TV LCD, Tabung Pemadam Api Ringan, Sound System Ruang Rapat) ditambah pembelian Vertikal Blind
01.19.03.01.19.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	Rp. 118.293.000	6 jenis	Rp. 148.293.000	Rp. 30.000.000	peralatan gedung kantor 6 jenis (mesin ketik, AC, PC, Printer, PABX, instalasi e-office)
01.19.03.01.19.22	Program Pencegahan Dini Bencana		Rp. 98.905.790		Rp. 117.305.680	Rp. 18.399.890	
01.19.03.01.19.22.009	Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	35 org x 2 hr	Rp. 39.982.990	35 org x 2 hr	Rp. 39.982.880	- Rp. 110	efisiensi
01.19.03.01.19.22.022	Fasilitasi Koordinasi Komponen Penanggulangan Bencana	100 Orang	Rp. 58.922.800	35 Orang	Rp. 58.922.800	Rp. 0	Perubahan target kinerja (35 or x 3 hr x 2 keg)
01.19.03.01.19.22.056	Sosialisasi dan Pendistribusian Pergub Nomor 11 Tahun 2013 ttg Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana	0 kali kegiatan sosialisasi	Rp. 0	1 kali kegiatan sosialisasi	Rp. 18.400.000	Rp. 18.400.000	1 kali sosialisasi (35 org 1 hari)
01.19.03.01.19.24	Program Penanggulangan Korban Bencana		Rp. 1.565.990.800		Rp. 2.384.606.300	Rp. 818.615.500	
01.19.03.01.19.24.001	Pengelolaan Penataan Gudang Logistik	12 bulan	Rp. 284.999.300	12 bulan	Rp. 896.499.300	Rp. 611.500.000	Tambahan Pengadaan untuk 10 paket peralatan untuk desa tangguh bencana, 4 paket peralatan untuk sekolah siaga bencana, Pembelian palet kayu untuk gudang 300 lembar, Pembelian Forklift
01.19.03.01.19.24.012	Fasilitasi Tim Reaksi Cepat	365 Hari	Rp. 798.500.000	365 Hari	Rp. 956.595.500	Rp. 158.095.500	Pengadaan First Aid Kit : 5 set Pengadaan HT : 15 unit Pengadaan Google Night Vision : 5 unit Seragam TRC ; 51 set

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 918.515.390			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.19.03.01.19.24.020	Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum Untuk penanggulangan bencana Bagi Masyarakat Provinsi DIY	30 Orang	Rp. 49.820.000	30 Orang	Rp. 99.640.000	Rp. 49.820.000	tambah 3 angkatan (30 orang 2 hari) menjadi 6 angkatan
01.19.03.01.19.24.023	Penyusunan Pergub Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana	1	Rp. 25.000.000	1	Rp. 24.600.000	- Rp. 400.000	EFISIENSI
01.19.03.01.19.24.024	Penyusunan Pergub Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana	1	Rp. 25.000.000	1	Rp. 24.600.000	- Rp. 400.000	EFISIENSI
01.19.03.01.19.24.035	Gladi Posko Dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	1 Kali	Rp. 382.671.500	4 Kali	Rp. 382.671.500	Rp. 0	Perubahan target kinerja : 3 kl Gladi Posko, 1 kl Gladi Lapang

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 679.359.970			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.09	Pertanahan						
01.09.01	Biro Tata Pemerintahan						
01.09.01.01.20.15	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah		Rp. 274.995.000		Rp. 381.025.200	Rp. 106.030.200	
01.09.01.01.20.15.005	Sertifikasi Tanah Tanah Kas Desa	120 Sertifikat	Rp. 100.000.000	1 kali sosialisasi	Rp. 6.305.200	- Rp. 93.694.800	dirubah menjadi Sosialisasi Pensertifikatan TKD (1 kali)
01.09.01.01.20.15.006	Inventarisasi tanah SG & PAG	4	Rp. 149.995.000	4	Rp. 139.720.000	- Rp. 10.275.000	EFISIENSI
01.09.01.01.20.15.008	Koordinasi Penataan Pemanfaatan Tanah	10 rekomendasi	Rp. 25.000.000	30 rekomendasi	Rp. 235.000.000	Rp. 210.000.000	Terdatanya 4550 keputusan Gubernur tentang Pemberian Hak Atas Tanah
01.09.01.01.20.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		Rp. 180.000.000		Rp. 263.694.800	Rp. 83.694.800	
01.09.01.01.20.16.007	Fasilitasi Sertifikasi Tanah Warga Miskin	200 Sertifikat	Rp. 150.000.000	200 Sertifikat	Rp. 243.694.800	Rp. 93.694.800	Termasuk terdatanya 120 bidang tanah warga miskin di Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul
01.09.01.01.20.16.012	Fasilitasi Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pertanahan	1	Rp. 30.000.000	1	Rp. 20.000.000	- Rp. 10.000.000	EFISIENSI
01.09.01.01.20.17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan		Rp. 66.960.000		Rp. 59.860.000	Rp. -7.100.000	
01.09.01.01.20.17.001	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik (masalah) Pertanahan	40	Rp. 66.960.000	40	Rp. 59.860.000	- Rp. 7.100.000	EFISIENSI
01.09.01.01.20.18	Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan		Rp. 115.357.390		Rp. 86.532.390	Rp. -28.825.000	
01.09.01.01.20.18.003	Pembaharuan Data Tanah Kas Desa	5	Rp. 45.648.750	5	Rp. 36.423.750	- Rp. 9.225.000	EFISIENSI
01.09.01.01.20.18.005	Pengolahan Data Base Pertanahan	20 orang 5 kecamatan	Rp. 69.708.640	20 orang 5 kecamatan	Rp. 50.108.640	- Rp. 19.600.000	EFISIENSI
01.10	Kependudukan dan Catatan Sipil						
01.10.01	Biro Tata Pemerintahan						
01.10.01.01.20.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Rp. 435.000.000		Rp. 355.220.000	Rp. -79.780.000	
01.10.01.01.20.15.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	30 Orang	Rp. 83.000.000	30 Orang	Rp. 100.990.000	Rp. 17.990.000	termasuk pemeliharaan jaringan komunikasi database kependudukan sebanyak 1 sistem dan pemanfaatan aplikasi SIAK di 25 desa / kelurahan

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 679.359.970			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.10.01.01.20.15.009	Pengembangan Database Kependudukan	78 kecamatan	Rp. 100.000.000	78 kecamatan	Rp. 117.655.000	Rp. 17.655.000	disesuaikan dengan ASB , Pengadaan software aplikasi profil kependudukan berbasis database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (1 sistem) Terselenggaranya bimtek bagi ADB Kependudukan di Pemda DIY dan Pemerintaha Kabupaten/Kota (18 ADB)
01.10.01.01.20.15.036	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Kelahiran	500 akta kelahiran	Rp. 252.000.000	1875 akta kelahiran	Rp. 136.575.000	- Rp. 115.425.000	efisiensi
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.01	Biro Tata Pemerintahan						
01.20.01.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 59.234.000		Rp. 53.840.800	Rp. -5.393.200	
01.20.01.01.20.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	15 kendaraan	Rp. 2.300.000	15 kendaraan	Rp. 4.586.800	Rp. 2.286.800	Penyesuaian biaya pajak terbaru
01.20.01.01.20.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 jenis	Rp. 6.936.000	19 buah	Rp. 6.936.000	Rp. 0	Penyesuaian target keluaran dengan rincian objek belanja
01.20.01.01.20.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	513 ol lembur, 4702 os rapat	Rp. 49.998.000	4702 ol	Rp. 42.318.000	- Rp. 7.680.000	pengurangan target kinerja (tidak ada lembur)
01.20.01.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 306.637.000		Rp. 423.143.000	Rp. 116.506.000	
01.20.01.01.20.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	26 unit	Rp. 96.723.000	85 unit	Rp. 192.423.000	Rp. 95.700.000	Pengadaan kelengkapan ruang rapat (meja, kursi dan rak buku) dan led tv internet , diuraikan yg mebeleair dan alat elektronik
01.20.01.01.20.02.022	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	100 m	Rp. 10.000.000	150 m	Rp. 15.000.000	Rp. 5.000.000	Pembelian goryden 50 m
01.20.01.01.20.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	5 kend roda 4, 10 kend roda 2, bbm pelumas 1 th	Rp. 199.914.000	5 kend roda 4, 10 kend roda 2, bbm pelumas 1 th	Rp. 168.120.000	- Rp. 31.794.000	Penyesuaian hasil pencermatan
01.20.01.01.20.02.042	Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor	0 m	Rp. 0	56 m	Rp. 47.600.000	Rp. 47.600.000	Rehab ruang rapat agar lebih representatif
01.20.01.01.20.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		Rp. 89.717.500		Rp. 161.517.500	Rp. 71.800.000	
01.20.01.01.20.25.015	Pemeliharaan, Penambahan dan Penggantian Pilar Batas DIY - Jateng	20 pilar	Rp. 60.000.000	20 pilar	Rp. 132.000.000	Rp. 72.000.000	Penambahan pilar batas antara Kab dan Kota
01.20.01.01.20.25.020	Penyusunan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	80 Orang	Rp. 29.717.500	80 Orang	Rp. 29.517.500	- Rp. 200.000	EFISIENSI

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 679.359.970			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.01.01.20.28	Program Fasilitas dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp. 167.797.300		Rp. 139.127.100	Rp. -28.670.200	
01.20.01.01.20.28.013	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY	1 laporan	Rp. 167.797.300	1 laporan	Rp. 139.127.100	- Rp. 28.670.200	Hasil pencermatan ASB
01.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
01.22.02	Biro Tata Pemerintahan						
01.22.02.01.20.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Rp. 363.713.690		Rp. 814.811.060	Rp. 451.097.370	
01.22.02.01.20.18.012	Perlombaan Desa	6 Desa/Kelurahan	Rp. 117.151.320	6 Desa/Kelurahan	Rp. 424.851.320	Rp. 307.700.000	tambahan fasilitas untuk juara lomba desa
01.22.02.01.20.18.013	Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	150 Orang	Rp. 44.970.000	150 Orang	Rp. 44.920.000	- Rp. 50.000	EFISIENSI
01.22.02.01.20.18.015	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	1 kegiatan	Rp. 40.000.000	1 kegiatan	Rp. 39.950.000	- Rp. 50.000	EFISIENSI
01.22.02.01.20.18.019	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	80 Orang	Rp. 161.592.370	80 Orang	Rp. 305.089.740	Rp. 143.497.370	

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Hukum				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.275.916.950			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.02	Biro Hukum						
01.20.02.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 30.230.850		Rp. 41.180.850	Rp. 10.950.000	
01.20.02.01.20.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	6 unit	Rp. 2.850.000	6 unit	Rp. 2.500.000	- Rp. 350.000	EFISIENSI
01.20.02.01.20.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20 jenis	Rp. 27.380.850	20 jenis	Rp. 38.680.850	Rp. 11.300.000	Tambahan Kertas Barcode 90 rim @ Rp. 165, Tambahan Kertas Kop Garuda Emas 10 rim @ Rp. 775,-
01.20.02.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 140.072.150		Rp. 224.057.500	Rp. 83.985.350	
01.20.02.01.20.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3 unit	Rp. 18.706.000	21 unit	Rp. 103.806.000	Rp. 85.100.000	Pengajuan karena ada penghapusan, PC Branded : @ Rp. 7.000.000,-LCD : @ Rp. 8.000.000,-Printer : @ Rp. 1.500.000,-Mesin Ketik : @ Rp. 2.650.000,- Laptop : @ Rp. 8.000.000,-
01.20.02.01.20.02.010	Pengadaan Mebelur	1 unit	Rp. 2.536.000	50 unit	Rp. 28.298.500	Rp. 25.762.500	Pengajuan karena kebutuhan kursi untuk kegiatan rapat
01.20.02.01.20.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	6 unit	Rp. 118.830.150	6 unit	Rp. 91.953.000	- Rp. 26.877.150	EFISIENSI
01.20.02.01.20.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Rp. 782.555.550		Rp. 1.083.977.750	Rp. 301.422.200	
01.20.02.01.20.26.003	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	12 Raperda	Rp. 499.642.000	13 Raperda	Rp. 731.045.000	Rp. 231.403.000	Tambahan 1 Perda
01.20.02.01.20.26.006	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan	5 peraturan	Rp. 56.258.750	5 peraturan	Rp. 49.058.750	- Rp. 7.200.000	EFISIENSI
01.20.02.01.20.26.013	Koordinasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (J D I) Hukum	1 kali 50 orang	Rp. 29.313.400	1 kali 50 orang	Rp. 28.298.400	- Rp. 1.015.000	EFISIENSI
01.20.02.01.20.26.019	Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (J D I) Hukum	1 kali 30 orang	Rp. 32.432.200	1 kali 30 orang	Rp. 30.592.200	- Rp. 1.840.000	EFISIENSI

Nama SKPD : Biro Hukum				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.275.916.950			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.02.01.20.26.020	Legislasi Rapergub Dan Produk Hukum Lainnya	40 Rapergub	Rp. 164.909.200	80 Rapergub	Rp. 244.983.400	Rp. 80.074.200	Tambahan penyusunan rapergub 40 buah
01.20.02.01.20.34	PROGRAM FASILITASI BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM		Rp. 767.422.050		Rp. 1.648.971.450	Rp. 881.549.400	
01.20.02.01.20.34.004	Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota	40 rekomendasi	Rp. 207.703.350	50 rekomendasi	Rp. 265.129.350	Rp. 57.426.000	tambah 10 Perda yang diklarifikasi
01.20.02.01.20.34.005	Koordinasi Peningkatan Supremasi Hukum	3 rekomendasi	Rp. 47.990.600	3 rekomendasi	Rp. 45.385.000	- Rp. 2.605.600	EFISIENSI
01.20.02.01.20.34.007	Penyelesaian Permasalahan Hukum	2 dokumen	Rp. 181.458.100	5 dokumen	Rp. 870.958.100	Rp. 689.500.000	Tambahan anggaran digunakan untuk biaya honorarium advokatbiaya penyelesaian perkara yang belum dianggarkan dan rapat koordinasi berkaitan dengan penyelesaian sengketa Tanah Tunas Taman Wiguna, Bioskop INDRA, Gugatan Penetapan Wagub DIY, Perpustakaan (BPAD DIY), yayasan Hatta Perpustakaan, Yayasan Hatta
01.20.02.01.20.34.008	Koordinasi Raperda Pajak dan Retribusi di Depkeu	6 rekomendasi	Rp. 74.218.000	10 rekomendasi	Rp. 123.100.000	Rp. 48.882.000	PP 97 Tahun 2012 yang mengamankan retribusi perpanjangan IMTA dipungut di Daerah
01.20.02.01.20.34.010	Evaluasi dan Konsultasi Rancangan Produk Hukum Kab/Kota	46 rekomendasi	Rp. 191.343.000	50 rekomendasi	Rp. 203.453.000	Rp. 12.110.000	Tambahan Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi sebanyak 4 Raperda
01.20.02.01.20.34.013	Fasilitasi Penegakan H A K I	2 rekomendasi	Rp. 40.375.500	2 rekomendasi	Rp. 38.365.000	- Rp. 2.010.500	EFISIENSI
01.20.02.01.20.34.021	Fasilitasi Peta Permasalahan Hukum	1 dokumen	Rp. 24.333.500	1 dokumen	Rp. 24.108.500	- Rp. 225.000	EFISIENSI
01.20.02.01.20.34.022	Penyusunan Rapergub LOD DIY	0 draft pergub	Rp. 0	1 draft pergub	Rp. 39.236.250	Rp. 39.236.250	perubahan karna banyak yang harus disesuaikan
01.20.02.01.20.34.023	Penyusunan Rapergub LOS DIY	0 draft pergub	Rp. 0	1 draft pergub	Rp. 39.236.250	Rp. 39.236.250	perubahan karna banyak yang harus disesuaikan
01.20.02.01.20.35	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM		Rp. 37.106.700		Rp. 35.116.700	Rp. -1.990.000	
01.20.02.01.20.35.005	Koordinasi Teknis Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	2 rekomendasi	Rp. 37.106.700	2 rekomendasi	Rp. 35.116.700	- Rp. 1.990.000	EFISIENSI

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 71.170.350			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.03	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan						
01.20.03.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 63.371.200		Rp. 45.352.200	Rp. -18.019.000	
01.20.03.01.20.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	Rp. 3.693.000	100 %	Rp. 1.386.000	- Rp. 2.307.000	Penyesuaian tarif pajak baru
01.20.03.01.20.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	100 %	Rp. 6.842.200	100 %	Rp. 6.841.200	- Rp. 1.000	penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	Rp. 3.300.000	100 %	Rp. 3.420.000	Rp. 120.000	Penyesuaian dengan harga bahan bacaan
01.20.03.01.20.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	100 %	Rp. 49.536.000	100 %	Rp. 33.705.000	- Rp. 15.831.000	penghapusan rek. efisiensi dan penyesuaian kebutuhan semester II
01.20.03.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 110.385.000		Rp. 93.576.600	Rp. -16.808.400	
01.20.03.01.20.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	Rp. 45.300.000	100 %	Rp. 37.846.600	- Rp. 7.453.400	Sisa belanja modal
01.20.03.01.20.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	Rp. 65.085.000	100 %	Rp. 55.730.000	- Rp. 9.355.000	Penyesuaian kebutuhan semester II
01.20.03.01.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 18.840.000		Rp. 15.400.000	Rp. -3.440.000	
01.20.03.01.20.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100 %	Rp. 7.126.000	100 %	Rp. 5.986.000	- Rp. 1.140.000	Penyesuaian kebutuhan lembur semester II
01.20.03.01.20.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	100 %	Rp. 6.644.000	100 %	Rp. 4.644.000	- Rp. 2.000.000	Penyesuaian kebutuhan rapat dan lembur semester II
01.20.03.01.20.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	100 %	Rp. 5.070.000	100 %	Rp. 4.770.000	- Rp. 300.000	Penyesuaian kebutuhan lembur semester II
01.20.03.01.20.30	Program Analisis Kebijakan Pembangunan		Rp. 647.685.730		Rp. 678.392.130	Rp. 30.706.400	
01.20.03.01.20.30.042	Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Bahan Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100 %	Rp. 70.006.500	100 %	Rp. 65.731.500	- Rp. 4.275.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.056	Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Bahan Kebijakan Bidang Agama	100 %	Rp. 26.297.000	100 %	Rp. 25.295.900	- Rp. 1.001.100	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.057	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kehidupan Agama	100 %	Rp. 19.636.500	100 %	Rp. 19.052.700	- Rp. 583.800	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.059	Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah	100 %	Rp. 53.250.000	100 %	Rp. 52.050.000	- Rp. 1.200.000	Penghapusan rek. efisiensi

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 71.170.350			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.03.01.20.30.066	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan	100 %	Rp. 56.556.400	100 %	Rp. 49.356.400	- Rp. 7.200.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.093	Koordinasi Jejaring Pelayanan Kesehatan	100 %	Rp. 31.307.130	100 %	Rp. 30.482.130	- Rp. 825.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.094	Koordinasi Penanganan HIV dan AIDS	100 %	Rp. 27.062.200	100 %	Rp. 25.337.200	- Rp. 1.725.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.095	Koordinasi Penanganan Narkoba	100 %	Rp. 26.712.200	100 %	Rp. 26.112.200	- Rp. 600.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.096	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB dan KS	100 %	Rp. 82.698.400	100 %	Rp. 75.498.400	- Rp. 7.200.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.100	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100 %	Rp. 33.227.400	100 %	Rp. 26.027.400	- Rp. 7.200.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.124	Koordinasi Kebijakan Reproduksi Remaja	100 %	Rp. 34.532.500	100 %	Rp. 33.172.500	- Rp. 1.360.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.138	Koordinasi Upaya Kesehatan Kerja	100 %	Rp. 26.800.000	100 %	Rp. 26.600.000	- Rp. 200.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.140	Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan dan Perkotaan	100 %	Rp. 59.772.100	100 %	Rp. 58.447.100	- Rp. 1.325.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.141	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan dan Perkotaan	100 %	Rp. 34.827.400	100 %	Rp. 27.627.400	- Rp. 7.200.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.143	Analisis Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja	100 %	Rp. 65.000.000	100 %	Rp. 62.760.000	- Rp. 2.240.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.30.145	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan dan Rekayasa Sosial	0 -	Rp. 0	100 %	Rp. 74.841.300	Rp. 74.841.300	Kajian Profil Perilaku Budaya Yogyakarta
01.20.03.01.20.37	Program Pengembangan Kehidupan Beragama		Rp. 2.434.755.640		Rp. 2.371.146.290	Rp. -63.609.350	
01.20.03.01.20.37.003	Fasilitasi Penyelenggaraan STQ Tk Provinsi dan Pengiriman Kafilah STQ Tk. Nasional Provinsi DIY	100 %	Rp. 442.020.000	100 %	Rp. 440.920.000	- Rp. 1.100.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.37.004	Fasilitasi Penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita DIY	100 %	Rp. 162.740.000	100 %	Rp. 131.555.100	- Rp. 31.184.900	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.37.016	Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani Agama	100 %	Rp. 1.741.720.640	100 %	Rp. 1.732.170.640	- Rp. 9.550.000	Penghapusan rek. efisiensi
01.20.03.01.20.37.032	Fasilitasi Pembinaan Bagi Pemuka Agama	100 %	Rp. 88.275.000	100 %	Rp. 66.500.550	- Rp. 21.774.450	Penghapusan rek. efisiensi

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 170.751.000			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.04	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam						
01.20.04.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 39.218.000		Rp. 45.733.000	Rp. 6.515.000	
01.20.04.01.20.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	4 unit kendaraan roda empat	Rp. 4.175.000	4 unit kendaraan roda empat	Rp. 1.950.000	- Rp. 2.225.000	Sesuai dengan ketentuan pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan dinas/operasional
01.20.04.01.20.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18 jenis	Rp. 19.550.000	18 jenis	Rp. 24.550.000	Rp. 5.000.000	Penambahan berdasarkan atas kebutuhan riil kantor
01.20.04.01.20.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78000 lembar	Rp. 15.493.000	100000 lembar	Rp. 19.233.000	Rp. 3.740.000	Berdasarkan atas kebutuhan riil kantor
01.20.04.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 54.273.160		Rp. 85.973.160	Rp. 31.700.000	
01.20.04.01.20.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6 unit	Rp. 27.900.800	9 unit	Rp. 54.900.800	Rp. 27.000.000	Penghapusan dan pengadaan 3 unit AC Split
01.20.04.01.20.02.010	Pengadaan Mebeleur	16 unit	Rp. 26.372.360	17 unit	Rp. 31.072.360	Rp. 4.700.000	Pengadaan 1 unit Almari Pakaian Kepala Biro
01.20.04.01.20.30	Program Analisis Kebijakan Pembangunan		Rp. 761.394.940		Rp. 893.930.940	Rp. 132.536.000	
01.20.04.01.20.30.125	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang BUD	1 dokumen	Rp. 30.094.000	1 dokumen	Rp. 24.549.000	- Rp. 5.545.000	Hasil penyesuaian dengan Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.129	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Koperasi dan UKM	1 dokumen	Rp. 25.188.890	1 dokumen	Rp. 21.548.590	- Rp. 3.640.300	Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.132	Analisis Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Koperasi dan UKM	1 dokumen	Rp. 60.000.000	2 dokumen	Rp. 130.000.000	Rp. 70.000.000	Penambahan target kinerja dengan output : Analisis pembentukan BLUD untuk pengelolaan dana bergulir
01.20.04.01.20.30.136	Pemantauan pelaksanaan program /kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sektor Industri dan Perdagangan di Provinsi DIY	1 dokumen	Rp. 43.267.475	1 dokumen	Rp. 36.767.475	- Rp. 6.500.000	Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.137	Fasilitasi Peningkatan Standart & Kualitas guna menunjang daya saing industri daerah	1 dokumen	Rp. 31.422.075	1 dokumen	Rp. 30.172.075	- Rp. 1.250.000	Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.139	Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di sektor Indag	1 dokumen	Rp. 94.529.800	1 dokumen	Rp. 91.389.800	- Rp. 3.140.000	Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.142	Pemantauan dan Evaluasi kebijakan bidang lingkungan hidup	1 dokumen	Rp. 22.090.000	1 dokumen	Rp. 18.000.000	- Rp. 4.090.000	Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 170.751.000			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.04.01.20.30.144	Analisis Kebijakan Bidang Pertanian	1 dokumen	Rp. 60.547.700	1 dokumen	Rp. 60.362.700	- Rp. 185.000	Penyesuaian dengan Standar Harga Barang dan Jasa
01.20.04.01.20.30.148	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pertanian	1 dokumen	Rp. 31.947.700	1 dokumen	Rp. 27.947.700	- Rp. 4.000.000	Penyesuaian dengan Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.149	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	1 dokumen	Rp. 27.067.700	1 dokumen	Rp. 23.027.700	- Rp. 4.040.000	Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.150	Fasilitasi Pusat Perbenihan	6 dokumen	Rp. 233.850.100	6 dokumen	Rp. 257.107.100	Rp. 23.257.000	Tambahan Kegiatan Promosi Nasional perbenihan di DIY dan Musyawarah Kerja Evaluasi Jogja Benih
01.20.04.01.20.30.153	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan	1 dokumen	Rp. 22.100.100	1 dokumen	Rp. 18.010.100	- Rp. 4.090.000	Penyesuaian dengan Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.154	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	1 dokumen	Rp. 22.210.100	1 dokumen	Rp. 18.010.100	- Rp. 4.200.000	Penyesuaian dengan Standar Belanja Umum
01.20.04.01.20.30.157	Analisis Potensi BUMD	1 dokumen	Rp. 57.079.300	2 dokumen	Rp. 137.038.600	Rp. 79.959.300	Penambahan target kinerja : Naskah Akademis Pembentukan BPR yang berasal dari BUKP

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 53.913.360			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.05	Biro Administrasi Pembangunan						
01.20.05.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 18.000.000		Rp. 0	Rp. -18.000.000	
01.20.05.01.20.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 bulan	Rp. 18.000.000	12 bulan	Rp. 0	- Rp. 18.000.000	Pembayaran Listrik Di Pool di Biro Umum
01.20.05.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 160.987.600		Rp. 159.300.600	Rp. -1.687.000	
01.20.05.01.20.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	Rp. 94.487.600	100 %	Rp. 94.482.100	- Rp. 5.500	Efisiensi pada waktu penyusunan DPA
01.20.05.01.20.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket kegiatan	Rp. 60.000.000	1 paket kegiatan	Rp. 59.918.500	- Rp. 81.500	Efisiensi Anggaran DPA
01.20.05.01.20.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	1 Paket	Rp. 6.500.000	1 Paket	Rp. 4.900.000	- Rp. 1.600.000	Efisiensi saat penyusunan DPA
01.20.05.01.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 36.000.000		Rp. 30.430.000	Rp. -5.570.000	
01.20.05.01.20.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	3 dokumen	Rp. 36.000.000	3 dokumen	Rp. 30.430.000	- Rp. 5.570.000	Efisiensi saat penyusunan DPA
01.20.05.01.20.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Rp. 39.733.000		Rp. 68.875.000	Rp. 29.142.000	
01.20.05.01.20.23.006	Pengelolaan SIM Layanan Ijin Penelitian Online	1 Aplikasi	Rp. 39.733.000	1 Aplikasi	Rp. 68.875.000	Rp. 29.142.000	Penyempurnaan aplikasi ijin penelitian on line Rp 30.000.000,- Efisiensi pada saat penyusunan DPA Rp 858.000,-
01.20.05.01.20.30	Program Analisis Kebijakan Pembangunan		Rp. 483.378.575		Rp. 541.928.575	Rp. 58.550.000	
01.20.05.01.20.30.007	Analisis Kebijakan Bidang Perhubungan	1 dokumen	Rp. 90.000.000	1 dokumen	Rp. 89.900.000	- Rp. 100.000	Efisiensi saat penyusunan DPA
01.20.05.01.20.30.008	Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Bidang PU-ESDM	2 draft pergub	Rp. 120.000.000	2 draft pergub	Rp. 119.800.000	- Rp. 200.000	Efisiensi saat penyusunan DPA
01.20.05.01.20.30.013	Koordinasi Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	1 dokumen	Rp. 35.000.000	2 dokumen	Rp. 111.000.000	Rp. 76.000.000	Tambahan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Geoheritage
01.20.05.01.20.30.016	Koordinasi Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	100 %	Rp. 127.499.475	100 %	Rp. 111.199.475	- Rp. 16.300.000	Efisiensi Anggaran DPA
01.20.05.01.20.30.017	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaporan Kebijakan Bidang PU Dan ESDM	1 dokumen	Rp. 20.005.000	1 dokumen	Rp. 19.905.000	- Rp. 100.000	Efisiensi Anggaran DPA

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 53.913.360			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.05.01.20.30.120	Kajian terhadap Implementasi Program Strategis Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	1 dokumen kajian	Rp. 45.000.000	1 dokumen kajian	Rp. 44.950.000	- Rp. 50.000	Efisiensi Anggaran DPA
01.20.05.01.20.30.122	Analisis Program Dekonsentrasi	1 dokumen	Rp. 45.874.100	1 dokumen	Rp. 45.174.100	- Rp. 700.000	Efisiensi Anggaran DPA
01.20.05.01.20.31	Program Penelitian Dan Pengembangan		Rp. 416.746.760		Rp. 408.225.120	Rp. -8.521.640	
01.20.05.01.20.31.005	Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	Rp. 20.000.000	1 dokumen	Rp. 19.900.000	- Rp. 100.000	Efisiensi Anggaran DPA
01.20.05.01.20.31.006	Pelaksanaan Penelitian	1 Kajian	Rp. 137.829.120	1 Kajian	Rp. 133.979.120	- Rp. 3.850.000	Efisiensi Anggaran DPA
01.20.05.01.20.31.018	Sosialisasi Kebijakan Nasional Bidang Penelitian dan Pengembangan	1 kali kegiatan sosialisasi	Rp. 33.964.700	1 kali kegiatan sosialisasi	Rp. 29.555.400	- Rp. 4.409.300	Efisiensi Anggaran DPA
01.20.05.01.20.31.019	Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional	1 kali 1 paket	Rp. 224.952.940	1 kali 1 paket	Rp. 224.790.600	- Rp. 162.340	Efisiensi Anggaran DPA

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Organisasi				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 234.868.000			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.06	Biro Organisasi						
01.20.06.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 43.975.000		Rp. 34.410.000	Rp. -9.565.000	
01.20.06.01.20.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	42 jenis	Rp. 19.175.000	42 jenis	Rp. 15.027.000	- Rp. 4.148.000	EFISIENSI
01.20.06.01.20.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11 jenis	Rp. 15.200.000	11 jenis	Rp. 12.004.000	- Rp. 3.196.000	EFISIENSI
01.20.06.01.20.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	Rp. 5.100.000	1 tahun	Rp. 4.043.000	- Rp. 1.057.000	EFISIENSI
01.20.06.01.20.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 eks 12 bulan	Rp. 4.500.000	3 eks 12 bulan	Rp. 3.336.000	- Rp. 1.164.000	EFISIENSI
01.20.06.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 103.296.000		Rp. 100.639.000	Rp. -2.657.000	
01.20.06.01.20.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6 unit	Rp. 103.296.000	6 unit	Rp. 100.639.000	- Rp. 2.657.000	EFISIENSI
01.20.06.01.20.29	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah		Rp. 242.291.500		Rp. 489.381.500	Rp. 247.090.000	
01.20.06.01.20.29.049	Rapat Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah	1 dokumen	Rp. 27.035.000	1 dokumen	Rp. 47.035.000	Rp. 20.000.000	Penambahan anggaran untuk iuran Forsesdasi sesuai Keputusan Rapat Kerja Nasional I Forsesdasi No. 04/KMN/FORSESDASI/2012
01.20.06.01.20.29.089	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Setda Setwan	122 Jabatan	Rp. 90.256.500	122 Jabatan	Rp. 86.331.500	- Rp. 3.925.000	EFISIENSI
01.20.06.01.20.29.090	Bimtek Penyusunan SOP	40 peserta	Rp. 125.000.000	40 peserta	Rp. 123.010.000	- Rp. 1.990.000	EFISIENSI
01.20.06.01.20.29.101	Pembangunan Zona Integritas	0 SKPD	Rp. 0	34 SKPD	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Kegiatan baru sebagai tindak lanjut dari PermenPAN & RB No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan K/L dan Pemerintah Daerah.
01.20.06.01.20.29.102	Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Penyusunan Standar	0 Rapergub	Rp. 0	1 Rapergub	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Kegiatan baru sebagai tindak lanjut dari PermenPAN & RB No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan

Nama SKPD : Biro Organisasi				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 234.868.000			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	Pelayanan						penerapan standar pelayanan dimana semua unit pelayanan masyarakat harus menetapkan standar pelayanan. Rapergub ini disusun sebagai acuan unit pelayanan dalam menyusun standar pelayanan.
01.20.06.01.20.29.103	Penyusunan Rapergub tentang Kebutuhan Kendaraan Operasional SKPD	0 Rapergub	Rp. 0	1 Rapergub	Rp. 44.076.000	Rp. 44.076.000	Kegiatan baru berdasarkan arahan dari Sekda DIY bahwa kebutuhan kendaraan dinas SKPD perlu diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi SKPD bukan pada jumlah pejabat eselon III
01.20.06.01.20.29.104	Review Peraturan Gubernur tentang Administrasi Perjalanan Dinas	0 Rapergub	Rp. 0	1 Rapergub	Rp. 38.929.000	Rp. 38.929.000	Kegiatan baru berdasarkan arahan dari Sekda DIY. Pergub Administrasi perjalanan dinas Nomor 13 Tahun 2013 perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendagri Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyusunan APBD TA 2013.

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 4.209.468.542			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.07	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol						
01.20.07.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 6.485.598.280		Rp. 7.812.051.172	Rp. 1.326.452.892	
01.20.07.01.20.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	2550 buah	Rp. 10.000.000	2550 buah	Rp. 7.800.000	- Rp. 2.200.000	EFISIENSI
01.20.07.01.20.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	131 layanan	Rp. 2.300.000.000	131 layanan	Rp. 2.302.450.000	Rp. 2.450.000	mengokomodasi kebutuhan pengetesan parameter air bersih kimia lingkungan dan mikrobiologi di 7 sumur
01.20.07.01.20.01.003	Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor	60 unit	Rp. 30.000.000	166 unit	Rp. 221.120.000	Rp. 191.120.000	mengakomodasi kebutuhan sewa peralatan dan perlengkapan kantor dikarenakan jumlah tamu dan acara ceremonial diperkirakan akan meningkat. Agenda tamu yang sudah masuk :- tamu gubernur dari BPPM sebanyak 500 org - tamu gubernur dari Dinas PU ESDM sebanyak 1.000 org termasuk sewa tenda dan perlengkapannya untuk acara tanggal 22 Oktober 2013
01.20.07.01.20.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	43 Orang	Rp. 276.768.280	43 Orang	Rp. 315.117.172	Rp. 38.348.892	- Mengakomodasi kekurangan honorarium pramu kantor non PNS selama 3 bulan dan honorarium pelayanan non PNS selama 2 bulan.
01.20.07.01.20.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2 unit	Rp. 800.000.000	2 unit	Rp. 897.500.000	Rp. 97.500.000	- Perlu adanya peremajaan tanaman dan penataan ulang taman
01.20.07.01.20.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60 unit	Rp. 498.830.000	60 unit	Rp. 502.830.000	Rp. 4.000.000	- mengokomodasi kebutuhan frekuensi radio komunikasi/HT untuk Pemda DIY
01.20.07.01.20.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45 jenis	Rp. 300.000.000	45 jenis	Rp. 298.250.000	- Rp. 1.750.000	EFISIENSI
01.20.07.01.20.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	320 buah	Rp. 885.000.000	490 buah	Rp. 1.242.250.000	Rp. 357.250.000	- Kerajinan Batik Sutera 135 bh - Kerajinan Perak 25 bh - Kerajinan Lainnya 31 bh - Plaket Lambang Pemerintah DIY 450 biji - Trophy 289 biji - Piagam penghargaan Gubernur 200 set - Cetak booklet lambang Pemda DIY 350 plus utk RAKER TEPPA-WAPRES (26 Agustus 2013) kerajinan batik sutera 40 buah, dengan harga batik sutera @Rp.5.000.000,-
01.20.07.01.20.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33 jenis	Rp. 85.000.000	35 jenis	Rp. 104.000.000	Rp. 19.000.000	- kebutuhan water meter untuk memantau penggunaan air bersih dan umbul-umbul untuk mengganti umbul-umbul yang sudah rusak

Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 4.209.468.542			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.07.01.20.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	30959 Orang	Rp. 1.300.000.000	43192 Orang	Rp. 1.920.734.000	Rp. 620.734.000	Mengakomodasi kebutuhan makmin dikarenakan jumlah tamu diperkirakan akan meningkat Agenda tamu yang sudah masuk : - tamu gubernur dari BPPM sebanyak 500 org - tamu gubernur dari Dinas PU ESDM sebanyak 1.000 org - jamuan tamu hotel sebanyak 40 org selama 3 hari dari beberapa kementerian dan lembaga pusat - jamuan tamu untuk Malam Penghargaan PMI 360 orang - jamuan tamu PBSI 425 orang plus RAKER TEPPA_WAPRES (26 Agustus 2013) jamuan makanminum tamu = 9100 oj (jamuan box 9000 oj, jamuan tamu negara 100 oj) plus jamuan makan minum untuk tanggal 22 Oktober 2013
01.20.07.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 3.164.989.750		Rp. 5.342.984.800	Rp. 2.177.995.050	
01.20.07.01.20.02.004	Pengadaan Mobil Jabatan	0 kendaraan	Rp. 0	1 kendaraan	Rp. 1.514.139.600	Rp. 1.514.139.600	Mengakomodasi kebutuhan kendaraan jabatan Gubernur
01.20.07.01.20.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5 jenis	Rp. 184.573.500	12 jenis	Rp. 337.943.500	Rp. 153.370.000	Penggantian perlengkapan yang sudah rusak/usang dan penambahan perlengkapan di ruang pimpinan
01.20.07.01.20.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	14 jenis	Rp. 785.126.250	15 jenis	Rp. 928.087.700	Rp. 142.961.450	Pengadaan: - 5 monitor 32" untuk mendukung aplikasi kearsipan berbasis TI - pengadaan power CPU PABX untuk mengganti CPU PABX yang sudah lama. - penyesuaian harga mesin hitung dimana harga pasaran lebih tinggi.
01.20.07.01.20.02.011	D E D Pembangunan gedung kantor	0 DED	Rp. 0	2 DED	Rp. 138.350.000	Rp. 138.350.000	- sesuai usulan 2014 untuk kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
01.20.07.01.20.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	12 unit	Rp. 400.000.000	14 unit	Rp. 531.746.000	Rp. 131.746.000	partisi (dari kaca) Bale Kenyo untuk kenyamanan saat jamuan tamu Gubernur, penggantian tiang bendera dan tiang umbul-umbul
01.20.07.01.20.02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	60 kendaraan	Rp. 1.285.290.000	60 kendaraan	Rp. 1.335.290.000	Rp. 50.000.000	FASILITASI RAKER TEPPA-WAPRES (26 Agustus 2013) sewa kendaraan untuk tamu 1 kegiatan
01.20.07.01.20.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4 unit	Rp. 60.000.000	4 unit	Rp. 107.500.000	Rp. 47.500.000	Reinstal dan penggantian lampu dalam rangka penghematan energi
01.20.07.01.20.02.067	Penataan Kawasan Kompleks Kepatihan	2 sosialisasi, 6 konsultasi, 3 laporan	Rp. 450.000.000	2 sosialisasi, 6 konsultasi, 3 laporan	Rp. 449.928.000	- Rp. 72.000	EFISIENSI
01.20.07.01.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp. 109.250.000		Rp. 154.250.000	Rp. 45.000.000	
01.20.07.01.20.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	9 jenis	Rp. 109.250.000	9 jenis	Rp. 154.250.000	Rp. 45.000.000	- Penyesuaian harga pakaian Batik KDH dan WKDH - Mengakomodasi kebutuhan pakaian petugas Santel sebanyak 10 stel
01.20.07.01.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 1.424.188.650		Rp. 1.424.188.650	Rp. 0	
01.20.07.01.20.05.013	Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya	72 upacara/ kegiatan	Rp. 1.424.188.650	72 upacara/ kegiatan	Rp. 1.424.188.650	Rp. 0	- Perubahan kode rekening dari transportasi dan akomodasi menjadi belanja honorarium - penyesuaian harga barang cetakan sesuai harga pasar.
01.20.07.01.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		Rp. 5.555.200		Rp. 4.471.600	Rp. -1.083.600	

Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 4.209.468.542			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	dan Keuangan						
01.20.07.01.20.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun)	5 dokumen	Rp. 5.555.200	5 dokumen	Rp. 4.471.600	- Rp. 1.083.600	EFISIENSI
01.20.07.01.20.16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		Rp. 1.150.000.000		Rp. 1.436.000.000	Rp. 286.000.000	
01.20.07.01.20.16.002	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	7 jenis	Rp. 1.150.000.000	7 jenis	Rp. 1.436.000.000	Rp. 286.000.000	- Kenaikan VIP room bandara dari Rp. 75 rb/org menjadi 85 rb/org - Volume tamu yang difasilitasi guide dan penerjemah meningkat - Perubahan pada volume dan satuan pada kegiatan pengamanan tertutup, pengawasan dan entertaint. pLUS RAKER TEPPA-WAPRES (26 Agustus 2013) -VIP Room Bandara 650 org, ruangan VIP 1/2/3 = 90 jam, pengamanan tertutup = 45 unit, pengawasan = 45 keg
01.24	Kearsipan						
01.24.07	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol						
01.24.07.01.20.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		Rp. 292.224.390		Rp. 387.224.390	Rp. 95.000.000	
01.24.07.01.20.15.027	Peningkatan Jaringan Pelaksanaan Tata Kearsipan Berbasis TI	2 jenis	Rp. 292.224.390	3 jenis	Rp. 342.224.390	Rp. 50.000.000	Mengakomodasi kebutuhan website instansi sebagai sarana informasi
01.24.07.01.20.15.028	Sosialisasi Kearsipan Berbasis TI	0 kegiatan	Rp. 0	3 kegiatan	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000	Target 180 peserta dengan tujuan Mensosialisasikan penerapan aplikasi kearsipan berbasis TI yang sudah dikembangkan oleh Biro UHP dan sudah terinstal di semua SKPD dan UPTD se-Pemda DIY
01.25	Komunikasi dan Informatika						
01.25.07	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol						
01.25.07.01.20.18	Kerjasama Informasi dengan Mass Media		Rp. 977.410.000		Rp. 1.257.514.200	Rp. 280.104.200	
01.25.07.01.20.18.002	Penyebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3 jenis	Rp. 332.750.000	3 jenis	Rp. 452.750.000	Rp. 120.000.000	mengakomodasi kebutuhan kerjasam publikasi dengan media cetak
01.25.07.01.20.18.004	Dokumentasi Kegiatan dan Kebijakan Pemda	7 jenis	Rp. 100.100.000	7 jenis	Rp. 104.387.200	Rp. 4.287.200	Mengakomodasi kebutuhan album foto dan VCD dan DVD
01.25.07.01.20.18.005	Penerbitan Kebijakan dan Kinerja Pembangunan	8810 eksemplar	Rp. 192.500.000	9160 eksemplar	Rp. 255.450.000	Rp. 62.950.000	Mengakomodasi kebutuhan penambahan cetak buku kerja dan biaya distribusi
01.25.07.01.20.18.007	Penyelenggaraan Kemitraan dengan Pers	12 Kali	Rp. 80.000.000	15 Kali	Rp. 92.071.000	Rp. 12.071.000	mengakomodasi kebutuhan jumpa pers dan gathering pers
01.25.07.01.20.18.008	Penyiaran Dialog Isu Aktual Melalui Media Massa	154 kegiatan	Rp. 225.500.000	154 kegiatan	Rp. 284.250.000	Rp. 58.750.000	mengakomodasi kebutuhan dialog interaktif di TV, sarasehan di radio dan ILM di media massa

Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 4.209.468.542			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.25.07.01.20.18.009	Penyusunan Sambutan Gubernur	749 buku	Rp. 46.560.000	1200 buku	Rp. 68.606.000	Rp. 22.046.000	Mengakomodasi kebutuhan naskah sambutan dan buku himpunan

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Sekretariat DPRD				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 621.376.260			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.08	Sekretariat DPRD						
01.20.08.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 299.159.500		Rp. 323.570.000	Rp. 24.410.500	
01.20.08.01.20.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1 tahun	Rp. 5.500.000	1 tahun	Rp. 5.500.000	Rp. 0	pergeseran belanja dan target kinerja dari (710 perangko, 240 materai dan 1 tahun paket pengiriman) menjadi (180 perangko, 930 materai dan 1 paket pengiriman)
01.20.08.01.20.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	1 tahun	Rp. 35.188.000	1 tahun	Rp. 35.188.000	Rp. 0	penyesuaian target kinerja (sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/02829/AB tgl 5 April 2013) dari (1 STNK KBM Roda 4, 38 STNK KBM Roda 4, 4 Kali Kir KBM Roda 4 dan 8 STNK Motor) menjadi (1 STNK KBM Roda 6, 37 STNK KBM Roda 4, 4 Kali Kir KBM Roda 4 dan 8 STNK Motor)
01.20.08.01.20.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	46 macam	Rp. 150.231.000	46 macam	Rp. 174.401.500	Rp. 24.170.500	Tambahan 21 Toner Printer, 2 toner Faximile dan 4 toner Mesin Foto Copy
01.20.08.01.20.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31 macam	Rp. 107.040.500	31 macam	Rp. 107.040.500	Rp. 0	Pergeseran Rincian Obyek Belanja dari Bend 23 kartu persediaan barang menjadi Bend 26 (1/2 Folio 5x50 NCR) --> penyesuaian target kinerja(sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/02829/AB tgl 5 April 2013)
01.20.08.01.20.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	12 bulan	Rp. 1.200.000	12 bulan	Rp. 1.440.000	Rp. 240.000	1) Penyesuaian tarif sesuai perda retribusi kota yogyakarta 2) penyesuaian target kinerja (sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/02829/AB tgl 5 April 2013)
01.20.08.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 2.072.584.500		Rp. 3.560.265.260	Rp. 1.487.680.760	
01.20.08.01.20.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 set	Rp. 200.000.000	1 set	Rp. 1.468.906.000	Rp. 1.268.906.000	1 set Genset beserta perlengkapannya (500 kVA) beserta pemasangannya dan rumah genset
01.20.08.01.20.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	13 unit	Rp. 305.033.550	13 unit	Rp. 305.033.550	Rp. 0	penyesuaian target kinerja dari (13 Unit PC/Destop, 4 unit Laptop, 7 unit Printer, 37 unit software Microsoft office) menjadi (13 Unit PC/Destop, 4 unit Laptop, 7 unit Printer, 1 paket software Microsoft office)
01.20.08.01.20.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	Rp. 1.567.550.950	1 Paket	Rp. 1.786.325.710	Rp. 218.774.760	Penyesuaian target kinerja dan Tambahan Rehab Ruang Rapur dan Lobby (Pengecatan gedung dan pagar, Pemeliharaan Masjid, Rehab

Nama SKPD : Sekretariat DPRD				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 621.376.260			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
							Ruang Rapur dan Lobby)
01.20.08.01.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 100.000.000		Rp. 128.400.000	Rp. 28.400.000	
01.20.08.01.20.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan	14 Orang	Rp. 100.000.000	18 Orang	Rp. 128.400.000	Rp. 28.400.000	penambahan volume
01.20.08.01.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 45.644.735		Rp. 55.744.735	Rp. 10.100.000	
01.20.08.01.20.06.017	Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	1 tahun	Rp. 29.764.735	1 tahun	Rp. 39.864.735	Rp. 10.100.000	penambahan volume Penggandaan Laporan keuangan
01.20.08.01.20.06.019	Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan	0	Rp. 15.880.000	0	Rp. 15.880.000	Rp. 0	penyesuaian target kinerja (Lap evaluasi kegiatan tahunan dan Tindak Lanjut LHP)
01.20.08.01.20.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Rp. 30.125.287.210		Rp. 29.196.072.210	Rp. -929.215.000	
01.20.08.01.20.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	3 Perda APBD, 4 nota Kesepakatan , 1 lap komisi, 13	Rp. 9.130.671.000	3 Perda APBD, 4 nota Kesepakatan , 1 lap komisi, 13	Rp. 7.838.593.000	- Rp. 1.292.078.000	EFISIENSI pengurangan jumlah anggota pansus dari 28 mjd 19 org, rapur setiap pansus dari 4 kali menjadi 2 kali, sesuai hasil risalah rapat Banmus DPRD DIY tgl 8 Januari 2013 (Pembahasan RKT)
01.20.08.01.20.15.003	Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi-Fraksi	12 bulan	Rp. 943.577.100	12 bulan	Rp. 943.577.100	Rp. 0	1) pergeseran antar jenis belanja untuk tenaga administrasi staf fraksi dari Belanja Pegawai ke Belanja Barang dan Jasa (sesuai pergub nomor 25 Tahun 2013 ttg perubahan penjabaran APBD 2013) 2) penambahan volume rapat komisi dari 288 menjadi 384 kali
01.20.08.01.20.15.006	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	36 Kali	Rp. 410.040.000	150 laporan	Rp. 410.040.000	Rp. 0	penyesuaian target kinerja
01.20.08.01.20.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	4 Kali	Rp. 2.875.540.000	7 Kali	Rp. 4.584.202.000	Rp. 1.708.662.000	tambahan 3 kali bimtek
01.20.08.01.20.15.011	Koordinasi dan komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD Provinsi DIY	8 kali forkom	Rp. 1.327.159.200	7 kali forkom	Rp. 1.327.159.200	Rp. 0	EFISIENSI sesuai hasil risalah rapat Banmus DPRD DIY tgl 8 Januari 2013 (Pembahasan RKT); pengurangan target kinerja dari 8 kali menjadi 7 kali forkom
01.20.08.01.20.15.012	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Propinsi DIY ke Luar Daerah	46 kali kunker	Rp. 11.530.488.900	47 kali kunker	Rp. 10.291.849.900	- Rp. 1.238.639.000	EFISIENSI pengurangan kunker banggar, banmusy, BK dan Balegda, penambahan kosultasi Balegda sesuai hasil risalah rapat Banmus DPRD DIY tgl 8 Januari 2013 (Pembahasan RKT). *)Untuk komponen perjalanan dinas pimpinan DPRD ke Amerika (Washington DC) terdapat tambahan Rp. 550.475.000,- sehingga total kebutuhan perjalanan dinas ke Amerika sebesar Rp 850.475.000,- dengan demikian mengurangi jumlah efisiensi dari Rp 1.563.359.000,- menjadi Rp 1.238.639.000,-
01.20.08.01.20.15.013	Layanan informasi pendukung kegiatan DPRD melalui website	1 tahun	Rp. 603.401.500	1 tahun	Rp. 603.401.500	Rp. 0	penyesuaian target kinerja (Paket aplikasi e-library dihilangkan)

Nama SKPD : Sekretariat DPRD				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 621.376.260			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.08.01.20.15.015	Pembahasan LKPJ Gubernur DIY	1	Rp. 503.283.400	1	Rp. 363.623.400	- Rp. 139.660.000	EFISIENSI jumlah anggota pansus dari 28 ke 19 sesuai hasil risalah rapat Banmus DPRD DIY tgl 8 Januari 2013 (Pembahasan RKT)
01.20.08.01.20.15.017	Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD	52 Kali	Rp. 949.320.000	52 Kali	Rp. 949.320.000	Rp. 0	Perubahan uraian belanja pada Rincian Obyek Belanja(sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/02829/AB tgl 5 April 2013)
01.20.08.01.20.15.027	Fasilitasi pembahasan Raperda inisiatif, rancangan nota kesepakatan, RAKEPWAN	4 draft	Rp. 845.833.900	4 draft	Rp. 845.833.900	Rp. 0	Pergeseran Rincian Obyek Belanja dari belanja Makan minum Rapat ke Belanja Makan minum Harian Umum (sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/1509 tgl 5 April 2013)
01.20.08.01.20.15.031	Fasilitasi Penyusunan RKT DPRD Provinsi DIY	1 Keputusan	Rp. 393.607.000	1 Keputusan	Rp. 396.107.000	Rp. 2.500.000	Tambahan penggandaan RKT DPRD
01.20.08.01.20.15.033	Penyusunan Prolegda Provinsi DIY	3 dokumen	Rp. 141.800.960	3 dokumen	Rp. 141.800.960	Rp. 0	Pergeseran Rincian Obyek Belanja dari belanja Makan minum Rapat ke Belanja Makan minum Harian Umum
01.20.08.01.20.15.034	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum DPRD	153 produk hukum	Rp. 226.330.100	153 produk hukum	Rp. 251.330.100	Rp. 25.000.000	1) Penambahan 1 paket konsultan NA Peraturan DPRD 2) Pergeseran Belanja dalam Rincian Obyek Belanja (sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/02829/AB tgl 5 April 2013)
01.20.08.01.20.15.035	Fasilitasi Kegiatan Kaukus Parlemen Perempuan DPRD Provinsi DIY	1 rekomendasi	Rp. 244.234.150	1 rekomendasi	Rp. 249.234.150	Rp. 5.000.000	1) penyesuaian tiket pendamping dan tambahan belanja dekorasi dokumentasi 2) Pergeseran Rincian Obyek Belanja dari belanja Makan minum Rapat ke Belanja Makan minum Harian Umum (sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/1509 tgl 5 April 2013)

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.09	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset						
01.20.09.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 2.716.598.428		Rp. 2.833.177.666	Rp. 116.579.238	
01.20.09.01.20.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	Rp. 1.459.188.500	1 tahun	Rp. 1.514.888.500	Rp. 55.700.000	Tambahan untuk KPPD Kota 25.000.000,-, KPPD Kulon Progo 3.500.000,-, KPPD Sleman 27.200.000,-
01.20.09.01.20.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	64 kendaraan	Rp. 23.295.350	64 kendaraan	Rp. 25.595.150	Rp. 2.299.800	Pajak kendaraan KPPD Kota Yogyakarta 480.900,-, Pajak Kendaraan KPPD Sleman Rp. 868.900,-, Pajak kendaraan KPPD Kulonprogo Rp. 1.000.000,-, Efisiensi Rp. 50.000,-
01.20.09.01.20.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	87 Orang	Rp. 198.240.000	87 Orang	Rp. 198.840.000	Rp. 600.000	KPPD G.Kidul, Kekurangan Honor pengelola barang
01.20.09.01.20.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65 jenis	Rp. 320.160.350	65 jenis	Rp. 358.712.750	Rp. 38.552.400	KPPD KI Progo Fotocopy optimalisasi PKB Rp. 3.556.400, Induk untuk penggandaan (PPKD) Rp 35.000.000, Efisiensi Rp. 4000,-
01.20.09.01.20.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76 jenis	Rp. 79.989.100	77 jenis	Rp. 87.989.100	Rp. 8.000.000	KPPD Sleman ; UPS Rp. 8.000.000,00
01.20.09.01.20.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23 tabung	Rp. 20.099.900	23 tabung	Rp. 20.047.900	- Rp. 52.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	Rp. 524.635.000	1 tahun	Rp. 529.615.000	Rp. 4.980.000	KPPD Gunungkidul untuk Penagihan Rp. 5.000.000,-, Efisiensi Rp.20.000,-
01.20.09.01.20.01.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	6 Orang	Rp. 90.990.228	6 Orang	Rp. 97.489.266	Rp. 6.499.038	Induk, kekurangan Honor penjaga keamanan kantor (UMP)
01.20.09.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 27.228.538.560		Rp. 40.313.708.872	Rp. 13.085.170.312	
01.20.09.01.20.02.001	Pengadaan tanah	2 bidang tanah	Rp. 0	2 bidang tanah	Rp. 11.000.000.000	Rp. 11.000.000.000	KPPD Bantul Rp. 6.000.000.000,00 , KPPD Sleman Rp. 5.000.000.000,00
01.20.09.01.20.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	2 gedung	Rp. 20.369.000.000	2 gedung, 1 DED	Rp. 20.417.000.000	Rp. 48.000.000	Penyusunan DED Pembangunan Gedung KPPD Kulonprogo

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.09.01.20.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	3 bus	Rp. 1.650.000.000	3 unit bus satling, 2 unit roda dua, 4 unit roda emp	Rp. 2.464.000.000	Rp. 814.000.000	3 unit bus samsat keliling Rp. 1.650.000,00; 2 unit sepeda motor untuk KPPD sleman Rp. 34.000.000,00; dan 4 mobil operasional (Avanza) Rp. 780.000.000,00
01.20.09.01.20.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 unit	Rp. 377.137.000	33 unit	Rp. 554.944.500	Rp. 177.807.500	KPPD Sleman Rp. 76.600.000,- , untuk 7 AC, generator sewage dump, KPPD Gunungkidul 8 AC Rp. 20.970.000, KPPD Bantul 1 paket set CCTV Rp. 50.000.000,-, Induk : Rp. 30.237.500 untuk 3 AC 2,5 PK Rp. 25.087.500,-, 1 unit CCTV + DVR Non Komputer Rp. 5.150.000,-
01.20.09.01.20.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 unit	Rp. 560.744.300	7 unit	Rp. 796.849.300	Rp. 236.105.000	KPPD Kota printer dan software Rp. 12.500.000,- Faximile Rp. 2000.000,-, Telepon 9 unit Rp. 11.709.000,-, KPPD Bantul AC Rp. 10.000.000,- , KPPD KI.Progo Telepon dan Faximile untuk BPD Nanggulan Rp. 3.000.000,- Induk Rp. 197.146.000 untuk 6 laptop, 4 PC, 4 LCD, tambah harga 5 buah switch hub, 2 box kabel LAN, 50 M pipa instalasi, 2 kotak RJ-45 conector AMP, 8 buah office, 2 printer dot-matrix LQ.300.
01.20.09.01.20.02.010	Pengadaan Mebeleur	59 unit	Rp. 216.583.000	63 unit	Rp. 321.818.000	Rp. 105.235.000	KPPD Bantul :Rp. 7.500.000,- , untuk 1 set kursi tamu, Induk : Rp. 97.735.000,- untuk 5 set Meja kerja staf model U Rp. 37.500.000,-, 1 set meja kerja biro Rp. 7.683.000, 1 almari arsip Rp. 3.392.000,-, 4 buah almari buku Rp. 11.000.000,- 20 buah kursi kerja Rp. 38.160.000,-
01.20.09.01.20.02.011	Penyusunan D.E.D. Gedung Arsip KPPD Sleman	1 set	Rp. 150.000.000	0 set	Rp. 0	- Rp. 150.000.000	KPPD Sleman DED tidak jadi dilaksanakan
01.20.09.01.20.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	9 unit	Rp. 530.850.000	11 unit	Rp. 1.046.800.000	Rp. 515.950.000	KPPD Kota Ruang pelayanan dan rumah lift Rp. 38.000.000,- dan Ruang Plat No Rp. 247.500.000,- , KPPD Sleman Rp. 95.000.000,- untuk renovasi lantai r.rapat, r.arsip digital, pembuatan pondasi penampungan air hujan SAMSAT Maguwaharjo, KPPD Bantul pengecatan pagar dan bangunan dan jaringan non computer,canopy tempat wudhu mushola,Rp. 15.000.000,- , Induk Rp. 137.500.000,- untuk gedung unit III Rp. 40.000.000 dan pemeliharaan Unit IV Rp.97.500.000, KPPD Kulonprogo, bongkar lantai dan conblock Rp. 50.450.000
01.20.09.01.20.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	Rp. 652.118.000	1 tahun	Rp. 685.133.000	Rp. 33.015.000	KPPD Sleman Rp. 18.015.000,- , KPPD Bantul Rp. 15.000.000,-
01.20.09.01.20.02.026	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	6 Jaringan	Rp. 849.850.500	6 Jaringan	Rp. 884.350.500	Rp. 34.500.000	KPPD Kota relokasi server Rp. 16.000.000,00 dan semua SKPD aplikasi SMS jatuh tempo Rp. 3.500.000,00 , jaringan non komputer Rp. 15.000.000,00
01.20.09.01.20.02.028	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	19 jenis	Rp. 167.250.000	19 jenis	Rp. 245.250.000	Rp. 78.000.000	KPPD Bantul Accu genzet Rp. 3.000.000,- , otomatis genzet Rp. 72.000.000,- , handel tegangan listrik Rp. 3.000.000,-
01.20.09.01.20.02.030	Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor	578.924 Berkas	Rp. 1.407.797.760	578.924 Berkas	Rp. 1.501.630.172	Rp. 93.832.412	KPPD Kota Honor penataan arsip Rp. 3.999.408,- (UMP) ; KPPD KI.Progo Rp. 27.720.700,- untuk honor PTT Rp. 2.270.700,- , untuk pengembangan dan customisasi scanner software aplikasi kesamsatan BPD Nanggulan dan BPD Piyungan 2 x Rp. 25.450.000,- ; KPPD G.Kidul Rp.21.571.044,- untuk box arsip Rp. 19.500.000,- Honor PTT Rp. 2.071.044,-
01.20.09.01.20.02.032	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi	1 1 unit	Rp. 73.908.000	1 1 unit	Rp. 81.258.000	Rp. 7.350.000	Tambahan untuk pembelian Komputer PC Branded Rp. 5.350.000,- Microsoft Office 2007 Rp. 2000.000,-
01.20.09.01.20.02.040	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan	2 rumah	Rp. 90.000.000	2 rumah	Rp. 196.240.000	Rp. 106.240.000	Rehab 3 rumah jabatan di Pilahan, Podang dan pagar di Tamansiswa

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.09.01.20.02.049	Perubahan Status Hukum Barang Daerah	5 bangunan gedung, 100 unit kendaraan R.4, 25 unit k	Rp. 133.300.000	5 bangunan gedung, 100 unit kendaraan R.4, 25 unit k	Rp. 118.435.400	- Rp. 14.864.600	Efisiensi
01.20.09.01.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 255.389.000		Rp. 252.299.000	Rp. -3.090.000	
01.20.09.01.20.05.042	Pembinaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan	186 4 akt	Rp. 255.389.000	186 4 akt	Rp. 252.299.000	- Rp. 3.090.000	Saving alat tulis peserta
01.20.09.01.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 124.135.250		Rp. 109.813.250	Rp. -14.322.000	
01.20.09.01.20.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4 dokumen	Rp. 7.494.000	4 dokumen	Rp. 5.684.000	- Rp. 1.810.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 laporan	Rp. 24.396.250	2 laporan	Rp. 21.066.250	- Rp. 3.330.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data & Informasi	3 40 orang, 3 kali, 1 orang	Rp. 92.245.000	3 40 orang, 3 kali, 1 orang	Rp. 83.063.000	- Rp. 9.182.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Rp. 11.983.292.910		Rp. 12.271.425.056	Rp. 288.132.146	
01.20.09.01.20.17.004	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	2 , 1 kali, 90 orang	Rp. 90.000.000	2 , 1 kali, 90 orang	Rp. 81.500.000	- Rp. 8.500.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.006	Penyusunan Raperda tentang APBD	1 500 buku, 1 Perda 250 buku, 1 Perda 100 buku	Rp. 699.048.700	1 500 buku, 1 Perda 350 buku	Rp. 688.208.700	- Rp. 10.840.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.008	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 500 buku, 1 Perda 250 buku	Rp. 620.557.700	1 500 buku, 1 Perda 250 buku	Rp. 617.100.200	- Rp. 3.457.500	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.009	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 500 set, 1 Pergub 250 set	Rp. 684.307.000	1 500 set, 1 Pergub,250 set	Rp. 683.054.000	- Rp. 1.253.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.010	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD	1 , 505 buku, 35 SKPD	Rp. 412.272.900	1 , 505 buku, 34 SKPD	Rp. 412.272.825	- Rp. 75	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.011	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	1 , 660 buku, 34 SKPD	Rp. 120.996.800	1 , 660 buku, 34 SKPD	Rp. 120.996.300	- Rp. 500	Efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	Pelaksanaan APBD						
01.20.09.01.20.17.015	Bintek Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	60 , 3 akt, 2 hr, 2 kali	Rp. 199.352.200	60 ,3 akt, 2 hr, 2 kali	Rp. 195.924.280	- Rp. 3.427.920	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	300 , 19 kali radio, 4 kali TV, 15 spanduk, 5 baliho,	Rp. 537.715.000	300 , 19 kali radio, 4 kali TV, 15 spanduk, 5 baliho,	Rp. 429.468.600	- Rp. 108.246.400	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.020	Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah	34 , 1 laporan, 50 buku, 120 orang, 1 hari, 100 orang	Rp. 476.741.725	34 , 1 laporan, 50 buku, 120 orang, 1 hari, 100 orang	Rp. 413.419.900	- Rp. 63.321.825	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.021	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul	20 unit	Rp. 1.007.672.180	20 unit	Rp. 1.026.311.480	Rp. 18.639.300	KPPD Bantul Honor PTT Rp 1.093.300,-, Honor keamanan Rp 5.046.000,-, Kertas Continuous form 12.500.000
01.20.09.01.20.17.022	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Gunung Kidul	2 unit	Rp. 547.131.490	2 unit	Rp. 550.131.046	Rp. 2.999.556	Penyesuaian UMP
01.20.09.01.20.17.023	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta	4 unit	Rp. 1.071.050.000	4 unit	Rp. 1.130.059.173	Rp. 59.009.173	Tambahan: Belanja modal pengadaan software aplikasi pelayanan loket khusus Rp. 85.106.000,-dan tambahan, UMP Rp.1.083.173,-, ATK Rp.2.344.000, Efisiensi : UM lembur Rp.4.860.000,-, lembur Rp.24.664.000,-,
01.20.09.01.20.17.024	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Kulon Progo	1 unit	Rp. 628.055.200	1 unit	Rp. 629.569.000	Rp. 1.513.800	Honor PTT Rp 1.513.800,- (kekurangan UMP)
01.20.09.01.20.17.025	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Sleman	4 unit	Rp. 1.658.419.740	4 unit	Rp. 1.664.412.852	Rp. 5.993.112	Tambahan Honor PTT (UMP) Rp. 5.999.112,- ,Efisiensi Rp. 6.000,-
01.20.09.01.20.17.026	Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3 , 100 orang	Rp. 75.000.000	3 , 100 orang	Rp. 69.850.000	- Rp. 5.150.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.029	Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB	3 , 35 orang, 1 server dan router, 1 aplikasi, 1 ser	Rp. 400.355.100	3 , 35 orang, 1 server dan router, 1 aplikasi, 1 ser	Rp. 399.676.000	- Rp. 679.100	EFisiensi
01.20.09.01.20.17.031	Pelayanan Kesamsatan	3 unit	Rp. 717.475.900	3 unit	Rp. 728.282.200	Rp. 10.806.300	Pemeliharaan Scanner Rp. 11.000.000, Efisiensi Rp. 193.700,-
01.20.09.01.20.17.038	Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	1 , 1 tabel NJKB, 12 kali radio, 1 kali TV, 1 kali,	Rp. 168.870.000	1 1 tabel NJKB, 12 kali radio, 1 kali TV, 1 kali, 10	Rp. 168.675.000	- Rp. 195.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.046	Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah	1 asli, 10 eksemplar fotocopy, 6 kali	Rp. 173.490.300	1 asli, 10 eksemplar fotocopi, 6 kali	Rp. 173.130.800	- Rp. 359.500	Efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.09.01.20.17.049	Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah	40 , 25 keputusan, 100 orang, 1 kali	Rp. 142.705.000	40 , 25 keputusan, 100 orang, 1 kali	Rp. 140.805.000	- Rp. 1.900.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.050	Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah dan Lain - lain	36 Kali	Rp. 163.281.200	36 2 kali Bimtek, 75 orang, 1 sistem, 1 server, 3 mes	Rp. 440.087.000	Rp. 276.805.800	Penyempurnaan sistem manajemen retribusi daerah Rp 50.000.000,- dan pemeliharaan server Rp 75.000.000,- serta mesin perforasi Rp 181.100.000,-, Efisiensi Rp. 29.294.200,-
01.20.09.01.20.17.051	Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)	3 , 314 org, 3 akt	Rp. 192.374.000	3 314 org, 3 akt	Rp. 203.924.000	Rp. 11.550.000	Honor Tenaga Ahli dan programmer Aplikasi SIMA untuk penyajian laporan BMD Aset tetap Rp. 37.810.000,- Efisiensi Rp. 26.260.000,-
01.20.09.01.20.17.061	Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	390 , 1 triwulan	Rp. 302.333.700	390 , 1 triwulan	Rp. 299.175.900	- Rp. 3.157.800	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.064	Penggalian Sumber-sumber Potensi Pendapatan Daerah	1 asli, 10 eksemplar fotocopy, 2 kali	Rp. 119.504.150	1 asli, 10 eksemplar fotocopy, 2 kali	Rp. 108.474.150	- Rp. 11.030.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.065	Implementasi Kebijakan Akuntansi	34 , 4 akt	Rp. 150.000.000	34 , 4 akt	Rp. 149.999.000	- Rp. 1.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.068	Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji pegawai Daerah	1	Rp. 150.000.000	1	Rp. 139.356.000	- Rp. 10.644.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.070	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SKPKD)	1 , 34 SKPD	Rp. 280.623.125	1 , 34 SKPD	Rp. 280.623.050	- Rp. 75	Efisiensi
01.20.09.01.20.17.071	Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 buku	Rp. 135.000.000	6 buku	Rp. 211.720.000	Rp. 76.720.000	Orientasi kerja bagi pengelola barang
01.20.09.01.20.17.077	Penyusunan Aplikasi Dana Hibah dan Bansos	1 Program	Rp. 58.959.800	1 Program	Rp. 115.218.600	Rp. 56.258.800	Penyempurnaan aplikasi dan entri data
01.20.09.01.20.18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota		Rp. 599.683.000		Rp. 501.195.200	Rp. -98.487.800	
01.20.09.01.20.18.001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota	5 Gubernur	Rp. 396.000.000	5 Gubernur	Rp. 354.212.800	- Rp. 41.787.200	Efisiensi
01.20.09.01.20.18.002	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	5 2, kali	Rp. 148.824.600	5 , 2 kali	Rp. 102.566.200	- Rp. 46.258.400	EFisiensi
01.20.09.01.20.18.006	Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	2 75 orang	Rp. 54.858.400	2 75 orang	Rp. 44.416.200	- Rp. 10.442.200	Efisiensi
01.20.09.01.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan		Rp. 258.762.000		Rp. 211.742.000	Rp. -47.020.000	

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						
01.20.09.01.20.20.003	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	34 1 laporan, 10 buku, 34 SKPD (PA/KPA), Berita Acara	Rp. 118.009.000	34 SKPD	Rp. 81.434.000	- Rp. 36.575.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.20.006	Tindak lanjut temuan pengawasan	1 70 buku	Rp. 65.753.000	1 70 buku	Rp. 63.841.000	- Rp. 1.912.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.20.013	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	35 Orang	Rp. 75.000.000	35 Orang	Rp. 66.467.000	- Rp. 8.533.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Rp. 41.950.940		Rp. 41.926.800	Rp. -24.140	
01.20.09.01.20.26.026	Penyusunan Rapergub Tata kelola Pendapatan dari Jasa Layanan	1 Rapergub	Rp. 41.950.940	1 Rapergub	Rp. 41.926.800	- Rp. 24.140	Efisiensi
01.20.09.01.20.36	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah		Rp. 600.000.000		Rp. 599.680.000	Rp. -320.000	
01.20.09.01.20.36.011	Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	34 (63 PA/KPA)	Rp. 600.000.000	34 (63 PA/KPA)	Rp. 599.680.000	- Rp. 320.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.39	Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah		Rp. 382.920.000		Rp. 464.731.600	Rp. 81.811.600	
01.20.09.01.20.39.001	Peningkatan Status Atas Hak Tanah	20 , 125 warkah	Rp. 115.000.000	20 bidang, 125 warkah	Rp. 211.221.600	Rp. 96.221.600	Biaya proses pensertifikatan tanah Eks Bioskop Indra Rp. 97.995.000,- Efisiensi Rp. 1.773.400,-
01.20.09.01.20.39.002	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	14 sewa, 16 unit pinjam pakai	Rp. 267.920.000	14 sewa, 16 unit pinjam pakai	Rp. 253.510.000	- Rp. 14.410.000	Efisiensi
01.20.09.01.20.40	Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro		Rp. 321.500.000		Rp. 310.750.000	Rp. -10.750.000	
01.20.09.01.20.40.001	Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD dan BUKP	5 6 BUKP, 18 orang, 2 akt, 2 hr	Rp. 321.500.000	5 6 BUKP, 18 orang, 2 akt, 2 hr	Rp. 310.750.000	- Rp. 10.750.000	Efisiensi

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 975.216.300			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.10	Badan Pendidikan dan Latihan						
01.20.10.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 108.000.000		Rp. 104.030.000	Rp. -3.970.000	
01.20.10.01.20.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 tahun	Rp. 108.000.000	1 tahun	Rp. 104.030.000	- Rp. 3.970.000	EFISIENSI
01.20.10.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 11.437.930.000		Rp. 11.480.974.000	Rp. 43.044.000	
01.20.10.01.20.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	2 unit	Rp. 11.000.000.000	2 unit	Rp. 10.992.500.000	- Rp. 7.500.000	EFISIENSI
01.20.10.01.20.02.006	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	0 buah	Rp. 318.930.000	20 buah	Rp. 323.930.000	Rp. 5.000.000	Penambahan taplak meja untuk meja makan di gedung menza 20 buah
01.20.10.01.20.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0 buah	Rp. 14.000.000	1 buah	Rp. 29.000.000	Rp. 15.000.000	Pengadaan Portal Stop untuk keamanan lingkungan Badan Diklat DIY 1 buah
01.20.10.01.20.02.011	DED Pembangunan Gedung Kantor	0 DED	Rp. 0	1 DED	Rp. 51.144.000	Rp. 51.144.000	Untuk meningkatkan pelayanan peserta diklat dan mewujudkan Badan Diklat DIY terakreditasi "A"
01.20.10.01.20.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 jenis 1 tahun	Rp. 105.000.000	12 jenis 1 tahun	Rp. 84.400.000	- Rp. 20.600.000	EFISIENSI
01.20.10.01.20.32	Program Pendidikan Kedinasan		Rp. 3.997.064.400		Rp. 4.933.606.700	Rp. 936.542.300	
01.20.10.01.20.32.011	Diklat Prajabatan Golongan II	120 Orang	Rp. 410.470.200	240 Orang	Rp. 801.485.400	Rp. 391.015.200	Diklat Prajabatan golongan II untuk CPNS Pemda DIY sebanyak 101 orang dan dari luar Pemda DIY sebanyak 19 orang
01.20.10.01.20.32.013	Diklat Struktural (diklat kepemimpinan Tingkat III)	280 Orang	Rp. 3.064.075.000	320 Orang	Rp. 3.623.382.200	Rp. 559.307.200	Diklat PIM III untuk PNS dari Pemda DIY sebanyak 2 orang dan dari luar Pemda DIY sebanyak 38 orang
01.20.10.01.20.32.027	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Penyusunan Kontrak dan Eproc)	30 orang 6 hari	Rp. 49.540.000	30 orang 6 hari	Rp. 46.300.000	- Rp. 3.240.000	EFISIENSI
01.20.10.01.20.32.028	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Keprotokolan)	30 orang 7 hari 1 angkatan	Rp. 46.550.000	30 orang 7 hari 1 angkatan	Rp. 46.474.000	- Rp. 76.000	EFISIENSI
01.20.10.01.20.32.029	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat TOC)	30 orang 15 hari	Rp. 134.073.500	30 orang 15 hari	Rp. 130.673.500	- Rp. 3.400.000	EFISIENSI
01.20.10.01.20.32.030	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (TOEFL preparation)	25 orang 12 hari	Rp. 68.145.000	25 orang 12 hari	Rp. 64.970.000	- Rp. 3.175.000	EFISIENSI

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 975.216.300			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.10.01.20.32.031	Pendidikan dan pelatihan Teknis(Diklat Analisis Jabatan)	35 orang 6 hari	Rp. 114.977.800	35 orang 6 hari	Rp. 111.162.500	- Rp. 3.815.300	EFISIENSI
01.20.10.01.20.32.032	Pendidikan dan pelatihan Teknis (Diklat Public Speaking)	30 orang 7 hari	Rp. 48.299.000	30 orang 7 hari	Rp. 48.297.100	- Rp. 1.900	EFISIENSI
01.20.10.01.20.32.034	Pendidikan dan pelatihan Teknis (Diklat SPIP)	40 orang 6 hari	Rp. 60.933.900	40 orang 6 hari	Rp. 60.862.000	- Rp. 71.900	EFISIENSI
01.20.10.01.20.41	Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah		Rp. 52.079.000		Rp. 51.679.000	Rp. -400.000	
01.20.10.01.20.41.001	Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan	4 laporan 1 rekomendasi	Rp. 52.079.000	4 laporan 1 rekomendasi	Rp. 51.679.000	- Rp. 400.000	EFISIENSI

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Inspektorat				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 654.012.100			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.11	Inspektorat						
01.20.11.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 171.439.000		Rp. 180.667.500	Rp. 9.228.500	
01.20.11.01.20.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	21 unit roda 4, 6 unit roda 2	Rp. 15.730.000	21 unit roda 4, 6 unit roda 2	Rp. 15.045.000	- Rp. 685.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30 jenis	Rp. 30.353.000	30 jenis	Rp. 29.986.500	- Rp. 366.500	EFISIENSI
01.20.11.01.20.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125400 lembar	Rp. 25.536.000	135400 lembar	Rp. 30.636.000	Rp. 5.100.000	Usulan Tambahan Anggaran Penggandaan 10.000 lembar
01.20.11.01.20.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	1680 os	Rp. 15.120.000	2280 os	Rp. 20.520.000	Rp. 5.400.000	penambahan volume sidang
01.20.11.01.20.01.022	Pengadaan jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	1 org 13 bln, 5 org 12 bln	Rp. 84.700.000	1 org 13 bln, 5 org 12 bln	Rp. 84.480.000	- Rp. 220.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 1.080.665.940		Rp. 1.496.521.940	Rp. 415.856.000	
01.20.11.01.20.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	152 m2	Rp. 555.240.000	152 m2	Rp. 529.776.000	- Rp. 25.464.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 roda 4, 2 roda 2	Rp. 0	2 roda 4, 2 roda 2	Rp. 433.000.000	Rp. 433.000.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional 2 unit APV Station Wagon ; 2 unit kendaraan roda 2
01.20.11.01.20.02.009	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	13 unit	Rp. 61.960.940	15 unit	Rp. 71.960.940	Rp. 10.000.000	Penambahan anggaran untuk pembelian barang inventaris 1 unit PC, 1 unit printer perlengkapan pengaman kantor untuk kelancaran tugas kantor
01.20.11.01.20.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	600 m2	Rp. 9.990.000	600 m2	Rp. 9.780.000	- Rp. 210.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.02.024	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas Operasional	21	Rp. 453.475.000	21 unit roda 4, 6 unit roda 2	Rp. 452.005.000	- Rp. 1.470.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 124.856.400		Rp. 121.256.400	Rp. -3.600.000	
01.20.11.01.20.05.002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	260 peserta 4 angkatan	Rp. 64.135.800	260 peserta 4 angkatan	Rp. 61.735.800	- Rp. 2.400.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	210 PNS 3 angkatan	Rp. 60.720.600	210 PNS 3 angkatan	Rp. 59.520.600	- Rp. 1.200.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan		Rp. 3.025.301.400		Rp. 3.310.939.000	Rp. 285.637.600	

Nama SKPD : Inspektorat				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 654.012.100			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	Kebijakan KDH						
01.20.11.01.20.20.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1 LHP, 136 LHE, 71 laporan	Rp. 2.064.240.000	1 LHP, 136 LHE, 71 laporan	Rp. 2.056.740.000	- Rp. 7.500.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.20.007	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	1 SK Gubernur	Rp. 68.188.100	1 SK Gubernur	Rp. 66.688.100	- Rp. 1.500.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.20.010	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	4 Kali	Rp. 128.557.400	4 Kali	Rp. 127.357.400	- Rp. 1.200.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.20.011	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	323 LHP	Rp. 86.025.900	323 LHP	Rp. 74.545.900	- Rp. 11.480.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.20.014	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	60 LHP	Rp. 678.290.000	94 LHP	Rp. 985.607.600	Rp. 307.317.600	Penambahan anggaran untuk pemeriksaan khusus dalam rangka pendampingan laporan keuangan sebanyak 34 Pemeriksaan khusus
01.20.11.01.20.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Rp. 194.669.000		Rp. 141.559.000	Rp. -53.110.000	
01.20.11.01.20.21.001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	2 angkatan @ 70 org	Rp. 81.876.800	2 angkatan @ 70 org	Rp. 43.616.800	- Rp. 38.260.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.21.003	Penilaian Angka Kredit JFA dan Penilaian Karya Tulis JFA	50 Orang	Rp. 33.736.200	50 Orang	Rp. 33.376.200	- Rp. 360.000	EFISIENSI
01.20.11.01.20.21.004	Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	100 peserta	Rp. 79.056.000	100 peserta	Rp. 64.566.000	- Rp. 14.490.000	EFISIENSI

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 523.185.580			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia						
01.20.12	Badan Kepegawaian Daerah						
01.20.12.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 375.196.000		Rp. 476.300.000	Rp. 101.104.000	
01.20.12.01.20.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp. 234.600.000	12 bulan	Rp. 290.600.000	Rp. 56.000.000	Menambah untuk belanja listrik dan air
01.20.12.01.20.01.004	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	29 PNS	Rp. 70.000.000	289 PNS	Rp. 98.000.000	Rp. 28.000.000	Menambah untuk sosialisasi askes 3 angkatan sebanyak 260 orang
01.20.12.01.20.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	14 Orang	Rp. 40.500.000	15 Orang	Rp. 41.700.000	Rp. 1.200.000	Honorarium Bendahara penerima BKD
01.20.12.01.20.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.06 Kali	Rp. 30.096.000	73.176 Kali	Rp. 46.000.000	Rp. 15.904.000	Menambah untuk belanja cetak dan penggandaan
01.20.12.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 4.570.000.000		Rp. 4.875.790.000	Rp. 305.790.000	
01.20.12.01.20.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket	Rp. 4.000.000.000	1 Paket	Rp. 4.000.000.000	Rp. 0	Pergeseran rekening belanja Tim Pengadaan Jasa Perencanaan
01.20.12.01.20.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	0 roda 2	Rp. 0	4 roda 2	Rp. 66.000.000	Rp. 66.000.000	pengadaan 4 unit motor (sampai tahun ini telah dihapus 2 unit mobil dan 4 unit motor)
01.20.12.01.20.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	11 buah	Rp. 500.000.000	27 buah	Rp. 650.200.000	Rp. 150.200.000	bertambah 5 unit AC serta pembelian 1 buah kipas angin, 10 tabung CO2, 2 Filling Cabinet, 2 Compact Rolling Shelving
01.20.12.01.20.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10 unit	Rp. 50.000.000	21 unit	Rp. 133.590.000	Rp. 83.590.000	pengadaan 8 unit PC komputer, 1 unit printer dan 1 penyimpan kamera&CD;
01.20.12.01.20.02.010	Pengadaan Mebeler	9 buah	Rp. 20.000.000	11 buah	Rp. 26.000.000	Rp. 6.000.000	Menambah untuk pengadaan 2 unit almari besi
01.20.12.01.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp. 102.590.000		Rp. 118.390.000	Rp. 15.800.000	
01.20.12.01.20.03.006	Pengembangan Sistem Aplikasi Presensi On Line Pemerintah Provinsi DIY	1 Software	Rp. 80.000.000	3 jenis	Rp. 92.000.000	Rp. 12.000.000	pengadaan 1 NAS server; 1 harddisk untuk backup data Simpeg dan presensi
01.20.12.01.20.03.010	Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik	500 kartu	Rp. 22.590.000	1 unit	Rp. 26.390.000	Rp. 3.800.000	pengadaan 1 buah scanner barcode
01.20.12.01.20.33	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		Rp. 1.233.945.660		Rp. 1.334.437.240	Rp. 100.491.580	
01.20.12.01.20.33.007	Pengembangan jaringan komunikasi data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	6 unit	Rp. 74.415.000	6 unit	Rp. 74.415.000	Rp. 0	pergeseran rekening belanja honor tim pengadaan

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 523.185.580			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.20.12.01.20.33.008	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian	47 buku	Rp. 74.415.000	1 jenis	Rp. 92.490.000	Rp. 18.075.000	Pengadaan 1 buah printer laserjet dan toner
01.20.12.01.20.33.009	Pembekalan PNS Calon pensiun	436 Orang	Rp. 194.754.000	436 Orang	Rp. 194.484.000	- Rp. 270.000	EFISIENSI
01.20.12.01.20.33.010	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	17 Orang	Rp. 274.900.320	32 Orang	Rp. 317.900.320	Rp. 43.000.000	Bantuan tugas belajar 15 orang IPDN dan pembayaran semester 2 tugas belajar S3 TM 2012
01.20.12.01.20.33.016	Test Psikologi bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY	280 Orang	Rp. 89.546.800	280 Orang	Rp. 84.016.800	- Rp. 5.530.000	EFISIENSI
01.20.12.01.20.33.021	Pengukuran Kompetensi bagi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DIY	42 Orang	Rp. 168.697.540	90 Orang	Rp. 339.697.120	Rp. 170.999.580	menambah target peserta dari luar DIY sebanyak 48 orang
01.20.12.01.20.33.025	Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan	56 Orang	Rp. 357.217.000	54 Orang	Rp. 231.434.000	- Rp. 125.783.000	pengurangan target pengiriman diklatpim I dan II

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 790.313.505			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.21	Ketahanan Pangan						
01.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan						
01.21.01.01.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 271.787.325		Rp. 319.226.750	Rp. 47.439.425	
01.21.01.01.21.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1 tahun	Rp. 154.200.000	1 tahun	Rp. 205.000.000	Rp. 50.800.000	menyesuaikan dengan kenaikan TDL
01.21.01.01.21.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	15 unit	Rp. 5.103.500	15 unit	Rp. 4.913.000	- Rp. 190.500	efisiensi
01.21.01.01.21.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10 jenis	Rp. 52.940.825	10 jenis	Rp. 51.111.750	- Rp. 1.829.075	efisiensi
01.21.01.01.21.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50 jenis	Rp. 37.583.000	50 jenis	Rp. 37.106.000	- Rp. 477.000	efisiensi
01.21.01.01.21.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	2344 os	Rp. 21.960.000	2344 os	Rp. 21.096.000	- Rp. 864.000	efisiensi
01.21.01.01.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 600.895.000		Rp. 786.745.000	Rp. 185.850.000	
01.21.01.01.21.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 .	Rp. 0	8 unit	Rp. 144.000.000	Rp. 144.000.000	Pengadaan kendaraan roda 2 sebanyak 8 unit
01.21.01.01.21.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8 jenis	Rp. 473.195.000	8 jenis	Rp. 471.395.000	- Rp. 1.800.000	efisiensi
01.21.01.01.21.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7 jenis	Rp. 107.700.000	7 jenis	Rp. 105.900.000	- Rp. 1.800.000	efisiensi
01.21.01.01.21.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Paket	Rp. 20.000.000	1 Paket	Rp. 65.450.000	Rp. 45.450.000	efisiensi Rp. 50.000,- serta kenaikan harga dan volume yang akan dikerjakan
01.21.01.01.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 19.905.000		Rp. 16.765.000	Rp. -3.140.000	
01.21.01.01.21.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	2 kegiatan	Rp. 19.905.000	2 kegiatan	Rp. 16.765.000	- Rp. 3.140.000	efisiensi
01.21.01.01.21.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 162.879.000		Rp. 160.616.000	Rp. -2.263.000	
01.21.01.01.21.06.018	Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi	2 dokumen	Rp. 142.129.000	2 dokumen	Rp. 141.877.000	- Rp. 252.000	efisiensi
01.21.01.01.21.06.019	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan (triwulanan dan akhir tahun)	2 kegiatan	Rp. 20.750.000	2 kegiatan	Rp. 18.739.000	- Rp. 2.011.000	efisiensi

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 790.313.505			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.21.01.01.21.15	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian		Rp. 332.570.400		Rp. 728.075.400	Rp. 395.505.000	
01.21.01.01.21.15.006	Peningkatan Kompetensi dan Keprofesian Tenaga Penyuluh	1 Paket	Rp. 173.379.400	1 Paket	Rp. 570.979.400	Rp. 397.600.000	efisiensi Rp. 2.400.000,- dan penambahan anggaran dalam rangka pematapan sistem LAKU THL (penambahan honor THL-TBPP)
01.21.01.01.21.15.010	Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta	3 kegiatan	Rp. 27.825.000	3 kegiatan	Rp. 26.890.000	- Rp. 935.000	efisiensi
01.21.01.01.21.15.011	Penyusunan Program Penyuluhan	2 kegiatan	Rp. 32.419.000	2 kegiatan	Rp. 31.259.000	- Rp. 1.160.000	efisiensi
01.21.01.01.21.15.014	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan	1 Paket	Rp. 98.947.000	1 Paket	Rp. 98.947.000	Rp. 0	Perubahan kode rekening belanja makan minum
01.21.01.01.21.16	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan		Rp. 1.481.772.950		Rp. 1.648.695.030	Rp. 166.922.080	
01.21.01.01.21.16.001	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	3 kegiatan	Rp. 58.545.000	3 kegiatan	Rp. 58.445.000	- Rp. 100.000	efisiensi
01.21.01.01.21.16.002	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	4 kegiatan	Rp. 48.749.500	4 kegiatan	Rp. 47.799.500	- Rp. 950.000	efisiensi
01.21.01.01.21.16.005	Penguatan Cadangan Pangan	3 kegiatan	Rp. 358.100.000	4 kegiatan	Rp. 372.992.080	Rp. 14.892.080	Efisiensi Rp. 107.920,- dan Penambahan kegiatan Evaluasi Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat
01.21.01.01.21.16.014	Penyusunan SKPG	4 kegiatan	Rp. 41.866.800	4 kegiatan	Rp. 34.666.800	- Rp. 7.200.000	efisiensi
01.21.01.01.21.16.042	Penanganan Keamanan Pangan	3 kegiatan	Rp. 105.357.800	3 kegiatan	Rp. 225.157.800	Rp. 119.800.000	1. Pengadaan Rapid Test Kit dalam rangka pengawasan peredaran BTP berbahaya 2. Promosi Keamanan Pangan 3. efisiensi Rp. 200.000,-
01.21.01.01.21.16.049	Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan	3 kegiatan	Rp. 278.480.750	3 kegiatan	Rp. 276.680.750	- Rp. 1.800.000	efisiensi
01.21.01.01.21.16.050	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	13 kegiatan	Rp. 485.506.500	13 kegiatan	Rp. 522.506.500	Rp. 37.000.000	Penambahan kegiatan Workshop evaluasi Demapan dan Temu Kemitraan Demapan
01.21.01.01.21.16.064	Pengembangan Kelembagaan OKKPD	3 kegiatan	Rp. 48.000.000	3 kegiatan	Rp. 42.030.000	- Rp. 5.970.000	efisiensi
01.21.01.01.21.16.067	Pemberdayaan Wanita melalui Pemanfaatan Pekarangan	3 kegiatan	Rp. 57.166.600	3 kegiatan	Rp. 68.416.600	Rp. 11.250.000	penambahan untuk bantuan hibah Kelompok Wanita Tani

**RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 18.796.345.992			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Wajib						
01.24	Kearsipan						
01.24.01	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah						
01.24.01.01.26.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		Rp. 90.000.000		Rp. 89.900.000	Rp. -100.000	
01.24.01.01.26.15.012	Pengkajian dan Pengembangan Bidang Kearsipan	160 orang, 1 rekomendasi hasil kajian	Rp. 90.000.000	160 orang, 1 rekomendasi hasil kajian	Rp. 89.900.000	- Rp. 100.000	Efisiensi
01.24.01.01.26.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Rp. 150.000.000		Rp. 158.000.000	Rp. 8.000.000	
01.24.01.01.26.16.005	Akuisisi dan Penyelamatan Arsip	2 Paket	Rp. 150.000.000	3 Paket	Rp. 158.000.000	Rp. 8.000.000	Sesuai dengan hasil koordinasi dan survei di Provinsi dan Kabupaten Kota arsip-arsip bencana gempa bumi 2006 mendesak untuk dilakukan penyelamatan dengan memindahkan fisik arsip tersebut dari instansi-instansi ke lembaga kearsipan, Rp. 46.500.000; Efisiensi Rp. 38.500.000
01.24.01.01.26.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		Rp. 496.705.950		Rp. 555.331.450	Rp. 58.625.500	
01.24.01.01.26.18.001	Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	2 judul, 2 kali@50 orang, 3 kali@100 orang	Rp. 131.391.100	2 judul, 2 kali@50 orang, 3 kali@100 orang	Rp. 130.974.100	- Rp. 417.000	Efisiensi
01.24.01.01.26.18.007	Pembinaan Kearsipan Statis dan SDM Kearsipan	1 dokumen	Rp. 40.315.300	1 dokumen	Rp. 40.240.300	- Rp. 75.000	Efisiensi
01.24.01.01.26.18.013	Promosi dan Sosialisasi Kearsipan	2 kali, 3 paket, 8 paket, 2 paket,	Rp. 225.000.000	2 kali, 3 paket, 8 paket, 2 paket	Rp. 291.250.000	Rp. 66.250.000	Pameran arsip di Kraton dalam rangka Sekaten jatuh di bulan Januari 2014 sehingga persiapan pengadaan perlengkapan dll harus dilakukan di bulan Desember 2013 (tambahan untuk pengadaan seragam pameran)
01.24.01.01.26.18.014	Alih Tulisan beraksara jawa dan alih bahasa arsip berbahasa jawa/asing	535 lembar, 650 lembar, 250 lembar	Rp. 99.999.550	535 lembar, 650 lembar, 250 lembar	Rp. 92.867.050	- Rp. 7.132.500	Efisiensi
01.26	Perpustakaan						
01.26.01	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah						
01.26.01.01.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 1.299.973.870		Rp. 1.559.574.292	Rp. 259.600.422	

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 18.796.345.992			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.26.01.01.26.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1 tahun	Rp. 600.000.000	1 tahun	Rp. 740.000.000	Rp. 140.000.000	Pembyaran rekening listrik hingga bulan Mei Rp.149 676 601 di tambah pembayaran rekening yang belum ter s p j kan sebesar Rp.3.577.555. Tagihan rata rata perbulan hingga Mei 2013 adalah sebesar 30.650.832 tagihan paling besar di bulan Mei yaitu sebesar 54.964.480 karena tagihan listrik gedung perpustakaan baru sebesar 11.641.000 X 2 = 23.282.000.(dengan denda) tagihan normal 10.971.000,hingga Mei 2013 total tagihan keseluruhan adalah sebesar 153.254.156, sisa anggaran untuk listrik pada akhir bulan Mei adalah sebesar Rp.146.824.244.Jika di bagi untuk 7 bulan kedepan 146.824.244 : 7 =20.974.892.Anggaran untuk tambahan pembayaran tagihan listrik adalah sebesar Rp.36.000.000-Rp.20.974.892 =15.025.108 X 7= 105.175.756 dan untukantisipasi penambahan jumlah barang elektronik komputer dan laptop pada bulan Agustus 2013 maka jumlah keseluruhan adalah Rp.140.000.000
01.26.01.01.26.01.008	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	6 lokasi	Rp. 299.991.870	6 lokasi	Rp. 220.805.870	- Rp. 79.186.000	Efisiensi belanja jasa kebersihan kantor
01.26.01.01.26.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	1 tahun	Rp. 199.982.000	1 tahun	Rp. 397.982.000	Rp. 198.000.000	1. Permasalahan gedung belum selesai perlu klarifikasi ke LKPP; 2.Pejabat baru perlu audensi ke pusat; 3.Untuk menambah pengetahuan tentang kearsipan, perpustakaan dan kesekretariatan dari daerah yang lebih maju; 4.Menghadiri rakor rakor yang dilaksanakan pusat; 5.Mengirim Diklat diklat yang diadakan arsip dan perpustakaan;6.Menghadiri proses persidangan gugatan jaminan pelaksanaan ke Sukoharjo 30 kali persidangan @ 3 orang /2 hari
01.26.01.01.26.01.022	Penyediaan jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	1 tahun	Rp. 200.000.000	1 tahun	Rp. 200.786.422	Rp. 786.422	Penyesuaian UMP DIY utk 2 org x 1 bln = 2 x Rp 1,065,247 = Rp 2,130,494, Efisiensi Rp. 1.344.072
01.26.01.01.26.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 498.599.830		Rp. 544.277.330	Rp. 45.677.500	
01.26.01.01.26.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6 lokasi	Rp. 299.999.840	6 lokasi	Rp. 309.999.840	Rp. 10.000.000	Tambahan pemeliharaan untuk gedung unit TRM 4 yang mengalami rusak parah di sisi sebelah barat tepatnya di area mushola,garasi dan kantin serta toilet khusus pengunjung
01.26.01.01.26.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	21 unit	Rp. 48.600.000	6 buah kendaraan roda 4 operasional khusus solar	Rp. 84.577.500	Rp. 35.977.500	Bahan Bakar solar untuk 1 tahun adalah sebanyak 10.800 liter. Bahan bakar solar yang sudah di gunakan hingga Mei 2013 adalah sebesar 4650 X 4500 = Rp. 20.925.000.Sisa di akhir Mei 2013 adalah sebesar 6150 l X 13000 =79.950.000 ,dikurangi sisa dana Rp. 27.675.000 maka masih terdapat kekurangan anggaran untuk pembelian solar sebesar 35.977.500 = 52.275.000 (SHBJ 2012) bahan bakar solar untuk kendaraan operasional adalah sebesar 1200 L /tahun = 100 L/bulan
01.26.01.01.26.02.065	Kajian Sarana dan Fasilitas Kearsipan	1 dokumen	Rp. 149.999.990	1 dokumen	Rp. 149.699.990	- Rp. 300.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 373.675.150		Rp. 349.365.090	Rp. -24.310.060	

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 18.796.345.992			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.26.01.01.26.05.004	Inventarisasi,Integrasi dan Pengelolaan Barang	1 tahun	Rp. 25.000.000	1 tahun	Rp. 24.950.000	- Rp. 50.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.05.007	Pembinaan,pengembangan,kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu	15 arsiparis, 15 pustakawan	Rp. 40.875.150	15 arsiparis, 15 pustakawan	Rp. 39.975.150	- Rp. 900.000	efisiensi
01.26.01.01.26.05.024	Pengembangan Teknologi informasi	1 Paket	Rp. 107.800.000	1 Paket	Rp. 85.300.000	- Rp. 22.500.000	Pembangunan gedung perpustakaan belum selesai dilaksanakan
01.26.01.01.26.05.055	Analisis SDM	1 dokumen	Rp. 200.000.000	1 dokumen	Rp. 199.139.940	- Rp. 860.060	Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa
01.26.01.01.26.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 164.712.800		Rp. 179.412.800	Rp. 14.700.000	
01.26.01.01.26.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	6 dokumen, 1 paket kegiatan	Rp. 137.940.000	6 dokumen, 1 paket kegiatan	Rp. 153.240.000	Rp. 15.300.000	Honor tenaga ahli pendamping SKPD Rp. 18.000.000 Efisiensi Rp. 2.700.000
01.26.01.01.26.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program klegiatan SKPD	1 tahun, 1 kali	Rp. 26.772.800	1 tahun, 1 kali	Rp. 26.172.800	- Rp. 600.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.15	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan		Rp. 20.000.000.000		Rp. 1.410.976.496	Rp. -18.589.023.504	
01.26.01.01.26.15.001	Pembangunan Gedung Perpustakaan	1 Paket	Rp. 5.000.000.000	1 Paket	Rp. 1.410.976.496	- Rp. 3.589.023.504	Penataan kawasan didrop untuk dapat diusulkan pada DIM 2014. anggaran sebesar Rp. 1.410.976.496 sebagai kekurangan pembayaran ke PT.Ampuh untuk progress pekerjaan dari 80,2 %ke 84,246 %
01.26.01.01.26.15.002	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung perpustakaan	1 Paket	Rp. 15.000.000.000	1 Paket	Rp. 0	- Rp. 15.000.000.000	Interior, Karena belum terselesaikannya pembangunan gedung perpustakaan maka kegiatan ini mohon dapat didrop untuk diusulkan pada DIM 2014
01.26.01.01.26.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Rp. 3.485.490.700		Rp. 2.915.974.850	Rp. -569.515.850	
01.26.01.01.26.21.002	Pengembangan Minat & Budaya Baca	75 peserta x 10 kali penyelenggaraan, 50 orang pesert	Rp. 162.477.650	75 peserta x 10 kali penyelenggaraan, 50 orang pesert	Rp. 150.432.650	- Rp. 12.045.000	efisiensi
01.26.01.01.26.21.003	Supervisi,Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum,Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	30 orang/angkatan, 30 orang, 40 lembaga	Rp. 198.915.100	30 orang/angkatan, 30 orang, 40 lembaga	Rp. 198.815.100	- Rp. 100.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.21.015	Pengembangan Manajemen Mutu sesuai ISO	1	Rp. 74.990.900	1	Rp. 74.980.900	- Rp. 10.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.21.020	Pengadaan Bahan Pustaka	1 Paket	Rp. 700.000.000	1 Paket	Rp. 744.800.000	Rp. 44.800.000	Tindak Lanjut pertemuan Rakor Monev tanggal 18 Juli 2013, akan dilaksanakan survey bahan pustaka sebagai dasar pengadaan ditahun 2014 sehingga pengadaan bahan pustaka bisa dilaksanakan lebih awal

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 18.796.345.992			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
01.26.01.01.26.21.024	Pengembangan Koleksi Jogjasiana	200 judul, 100 judul, 1 paket	Rp. 128.075.000	200 judul, 100 judul, 1 paket	Rp. 110.075.000	- Rp. 18.000.000	Kebutuhan untuk hunting koleksi Sudah tercukupi dengan koordinasi dengan penerbit melalui pertemuan rutin
01.26.01.01.26.21.035	Penerbitan Bibliografi daerah, katalog Induk Daerah, Acession List	1 Paket	Rp. 59.710.000	1 Paket	Rp. 85.980.000	Rp. 26.270.000	Pengadaan aplikasi Bibliografi Daerah serta Katalog Induk Daerah
01.26.01.01.26.21.036	Fasilitasi Mitra Kerja Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	5 event	Rp. 213.924.800	5 event	Rp. 213.674.800	- Rp. 250.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.21.039	Konsolidasi Pengembangan Perpustakaan	4 Kali	Rp. 82.545.000	4 Kali	Rp. 82.445.000	- Rp. 100.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.21.045	Layanan Rumah Belajar Modern	2 lokasi RBM, 2 lokasi RBM, 300 orang selama 1 tahun	Rp. 215.077.200	2 lokasi RBM, 2 lokasi RBM, 300 orang selama 1 tahun	Rp. 212.077.200	- Rp. 3.000.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.21.046	Pengembangan Center of Exellent Budaya jawa	600 orang, 100 orang, 180 orang, 1 paket, 1 paket	Rp. 200.000.000	600 orang, 100 orang, 180 orang, 1 paket, 1 paket	Rp. 197.465.000	- Rp. 2.535.000	Efisiensi
01.26.01.01.26.21.047	Peresmian Layanan Perpustakaan Terpadu	4 event	Rp. 500.000.000	4 event	Rp. 0	- Rp. 500.000.000	Pembangunan gedung perpustakaan belum selesai dilaksanakan
01.26.01.01.26.21.048	Relokasi Layanan Perpustakaan	1 Paket	Rp. 100.000.000	1 Paket	Rp. 0	- Rp. 100.000.000	Pembangunan gedung perpustakaan belum selesai dilaksanakan
01.26.01.01.26.21.052	Pengembangan dan Fasilitas Perpustakaan	31 orang, 18.600 eksemplar, 62 buah	Rp. 849.775.050	31 orang, 18.600 eksemplar, 62 buah	Rp. 845.229.200	- Rp. 4.545.850	Efisiensi belanja barang dan jasa

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pertanian				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 345.766			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Pilihan						
02.01	Pertanian						
02.01.01	Dinas Pertanian						
02.01.01.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 251.993.480		Rp. 277.347.844	Rp. 25.354.364	
02.01.01.02.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Rp. 114.996.000	12 bulan	Rp. 126.900.000	Rp. 11.904.000	penambahan biaya berlangganan listrik di UPTD BPBPTDK dan untuk penyambungan listrik di lingkungan UPTD BPSBP. efisiensi Rp. 96.000,-
02.01.01.02.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 tahun	Rp. 52.970.000	1 tahun	Rp. 52.965.000	- Rp. 5.000	efisiensi
02.01.01.02.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 bulan	Rp. 84.027.480	12 bulan	Rp. 97.482.844	Rp. 13.455.364	Efisiensi Rp. 1.909.160,- dan Rp.3.808.440,- 1) kekurangan pembayaran honor PTT 3 orang dan penjaga malam 1 orang untuk 3 bulan di UPTD BPPTPH 2) kekurangan pembayaran honor PTT 2 orang di UPTD BPBPTDK
02.01.01.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 4.327.137.850		Rp. 4.544.088.700	Rp. 216.950.850	
02.01.01.02.01.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	10 Paket	Rp. 2.000.000.000	11 Paket	Rp. 2.020.598.600	Rp. 20.598.600	Penambahan pembuatan pintu pagar UPTD BPBPTDK
02.01.01.02.01.02.009	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	19 jenis	Rp. 234.532.000	25 jenis	Rp. 432.782.000	Rp. 198.250.000	Tambah daya listrik, genset, perlengkapan untuk BPSDMP (almari buku, almari arsip, almari dinding asrama, komputer PC, meja kelas, kursi kelas)
02.01.01.02.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 tahun	Rp. 200.360.750	1 tahun	Rp. 198.552.000	- Rp. 1.808.750	efisiensi
02.01.01.02.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	Rp. 744.000.000	1 tahun	Rp. 743.913.000	- Rp. 87.000	efisiensi
02.01.01.02.01.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Perkantoran	1 Paket	Rp. 1.148.245.100	1 Paket	Rp. 1.148.243.100	- Rp. 2.000	efisiensi
02.01.01.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 155.079.300		Rp. 172.119.300	Rp. 17.040.000	
02.01.01.02.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3 dokumen	Rp. 7.231.000	3 dokumen	Rp. 6.271.000	- Rp. 960.000	efisiensi
02.01.01.02.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4 kegiatan	Rp. 147.848.300	4 kegiatan	Rp. 165.848.300	Rp. 18.000.000	memenuhi kekurangan pembayaran honor THL
02.01.01.02.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Rp. 419.816.075		Rp. 309.197.375	Rp. -110.618.700	

Nama SKPD : Dinas Pertanian				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 345.766			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.01.01.02.01.15.051	Penguatan Kelembagaan Tingkat Usaha	90 Orang	Rp. 135.846.675	90 Orang	Rp. 135.406.575	- Rp. 440.100	efisiensi
02.01.01.02.01.15.052	Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Tanaman Pangan	48 kelompok	Rp. 80.114.800	48 kelompok	Rp. 23.853.800	- Rp. 56.261.000	efisiensi
02.01.01.02.01.15.053	Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Tanaman Hortikultura	17 kelompok	Rp. 84.365.000	17 kelompok	Rp. 43.375.000	- Rp. 40.990.000	efisiensi
02.01.01.02.01.15.054	Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Peternakan	200 kelompok	Rp. 49.150.000	200 kelompok	Rp. 46.130.000	- Rp. 3.020.000	efisiensi
02.01.01.02.01.15.055	Peningkatan Pendapatan Petani melalui Pengolahan Hasil Pertanian	120 Orang	Rp. 70.339.600	120 Orang	Rp. 60.432.000	- Rp. 9.907.600	efisiensi
02.01.01.02.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		Rp. 608.413.200		Rp. 591.569.900	Rp. -16.843.300	
02.01.01.02.01.16.012	Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian	120 Orang	Rp. 276.559.600	120 Orang	Rp. 276.172.000	- Rp. 387.600	efisiensi
02.01.01.02.01.16.041	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan	30 pelaku usaha	Rp. 116.982.900	30 pelaku usaha	Rp. 114.301.700	- Rp. 2.681.200	efisiensi
02.01.01.02.01.16.050	Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan	3 kegiatan	Rp. 183.971.800	3 kegiatan	Rp. 174.791.800	- Rp. 9.180.000	efisiensi
02.01.01.02.01.16.061	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	3 kegiatan	Rp. 30.898.900	3 kegiatan	Rp. 26.304.400	- Rp. 4.594.500	efisiensi
02.01.01.02.01.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		Rp. 312.247.650		Rp. 310.364.830	Rp. -1.882.820	
02.01.01.02.01.18.020	penerapan teknologi budidaya Kacang Hijau	2 kegiatan	Rp. 28.000.000	2 kegiatan	Rp. 27.980.000	- Rp. 20.000	efisiensi
02.01.01.02.01.18.024	Pengembangan varietas baru	2 kegiatan	Rp. 23.980.150	2 kegiatan	Rp. 23.512.650	- Rp. 467.500	efisiensi
02.01.01.02.01.18.026	Aplikasi teknologi budidaya padi skala luas	2 kegiatan	Rp. 112.000.000	2 kegiatan	Rp. 111.844.680	- Rp. 155.320	efisiensi
02.01.01.02.01.18.027	Revitalisasi alsin tepat guna pada tanaman hortikultura	2 kegiatan	Rp. 148.267.500	2 kegiatan	Rp. 147.027.500	- Rp. 1.240.000	efisiensi
02.01.01.02.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		Rp. 4.432.784.430		Rp. 4.348.382.520	Rp. -84.401.910	
02.01.01.02.01.19.015	Pemberdayaan P3A dan peningkatan jaringan irigasi	6 unit	Rp. 475.360.000	6 unit	Rp. 460.360.000	- Rp. 15.000.000	efisiensi
02.01.01.02.01.19.019	Pengamatan, Analisis Kehilangan hasil karena OPT dan Bencana Alam	1 dokumen	Rp. 16.966.000	1 dokumen	Rp. 16.961.500	- Rp. 4.500	efisiensi
02.01.01.02.01.19.027	Bimbingan dan Fasilitas sarana pengendalian OPT dan Brigade Proteksi	4 kegiatan	Rp. 157.532.600	4 kegiatan	Rp. 157.434.900	- Rp. 97.700	efisiensi
02.01.01.02.01.19.037	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (S L P H T) Berkelanjutan	75 Orang	Rp. 99.992.200	75 Orang	Rp. 99.992.160	- Rp. 40	efisiensi
02.01.01.02.01.19.038	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Pangan dan	125 Orang	Rp. 150.000.000	125 Orang	Rp. 149.999.840	- Rp. 160	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pertanian				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 345.766			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
	Hortikultura						
02.01.01.02.01.19.048	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	6 kegiatan	Rp. 749.873.440	6 kegiatan	Rp. 789.873.440	Rp. 40.000.000	pengadaan pompa air dan peralatannya
02.01.01.02.01.19.051	Pengembangan tanaman pangan terpadu	4 kegiatan	Rp. 517.498.200	4 kegiatan	Rp. 483.498.200	- Rp. 34.000.000	bantuan peralatan untuk kelompok ditiadakan karena tidak ada rincian barang serta calon kelompok penerima
02.01.01.02.01.19.052	Pengembangan hortikultura terpadu	30 Orang	Rp. 147.120.000	30 Orang	Rp. 146.770.000	- Rp. 350.000	efisiensi
02.01.01.02.01.19.054	Pengembangan Benih Padi di Tingkat Petani	4000 kg	Rp. 40.753.260	4000 kg	Rp. 38.971.710	- Rp. 1.781.550	efisiensi
02.01.01.02.01.19.055	Penyediaan Benih dan Pengembangan Jabal Kedelai	3 kegiatan	Rp. 111.410.430	3 kegiatan	Rp. 117.210.430	Rp. 5.800.000	Kenaikan harga benih kedelai
02.01.01.02.01.19.056	Peningkatan budidaya hortikultura di lahan pekarangan	3 kegiatan	Rp. 99.903.700	3 kegiatan	Rp. 99.638.500	- Rp. 265.200	efisiensi
02.01.01.02.01.19.058	Observasi dan Identifikasi Varietas	2 unit	Rp. 25.250.000	2 unit	Rp. 21.600.000	- Rp. 3.650.000	efisiensi
02.01.01.02.01.19.061	Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan	4 kegiatan	Rp. 54.685.000	4 kegiatan	Rp. 46.205.000	- Rp. 8.480.000	efisiensi
02.01.01.02.01.19.063	Pengembangan Tanaman Hias	25 Orang	Rp. 93.339.000	25 Orang	Rp. 87.699.000	- Rp. 5.640.000	efisiensi
02.01.01.02.01.19.068	Fasilitasi Pemberdayaan Penangkar Benih Tanaman Pangan	2 kegiatan	Rp. 15.999.350	2 kegiatan	Rp. 8.499.350	- Rp. 7.500.000	Kegiatan CPCL di Tahun 2012 tidak jadi dilaksanakan
02.01.01.02.01.19.072	Fasilitasi sarana dan prasaran pengembangan buah, sayur dan tan obat	20 kelompok	Rp. 299.689.650	20 kelompok	Rp. 299.606.650	- Rp. 83.000	efisiensi
02.01.01.02.01.19.074	Fasilitasi Sarana Teknologi Budidaya Jagung Hibrida	100 Ha	Rp. 250.000.000	100 Ha	Rp. 249.791.000	- Rp. 209.000	efisiensi
02.01.01.02.01.19.075	Pemberdayaan Petani Pemandu SLPHT	4 kelompok	Rp. 126.781.200	4 kelompok	Rp. 126.781.040	- Rp. 160	efisiensi
02.01.01.02.01.19.076	Fasilitasi Subsidi Pemupukan Berimbang	400 Ha	Rp. 623.530.400	400 Ha	Rp. 596.894.800	- Rp. 26.635.600	bantuan hibah barang berupa pompa air dibatalkan karena tidak ada calon penerima. Perjalanan pelatihan PPNS sudah dialokasikan melalui APBN. efisiensi Rp. 185.600,-
02.01.01.02.01.19.078	Peingkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Hibah Loan)	2 kegiatan	Rp. 127.100.000	2 kegiatan	Rp. 102.940.000	- Rp. 24.160.000	efisiensi
02.01.01.02.01.19.079	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendampingan Loan)	4 kegiatan	Rp. 250.000.000	4 kegiatan	Rp. 247.655.000	- Rp. 2.345.000	efisiensi
02.01.01.02.01.21	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Strategis		Rp. 560.795.300		Rp. 553.995.300	Rp. -6.800.000	
02.01.01.02.01.21.002	Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Temak	1 Paket	Rp. 345.795.300	1 Paket	Rp. 338.995.300	- Rp. 6.800.000	efisiensi
02.01.01.02.01.21.006	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	3 kegiatan	Rp. 215.000.000	3 kegiatan	Rp. 215.000.000	Rp. 0	Perubahan calon penerima bantuan barang

Nama SKPD : Dinas Pertanian				Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 345.766			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.01.01.02.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		Rp. 3.018.269.000		Rp. 2.980.930.400	Rp. -37.338.600	
02.01.01.02.01.22.012	Pengembangan Ternak Kambing	10 kelompok	Rp. 41.630.000	10 kelompok	Rp. 33.550.000	- Rp. 8.080.000	efisiensi
02.01.01.02.01.22.013	Pengembangan Ternak Sapi Perah	8 kelompok	Rp. 72.535.000	8 kelompok	Rp. 71.575.000	- Rp. 960.000	efisiensi
02.01.01.02.01.22.014	Pengembangan Ternak Sapi Potong	89 kelompok	Rp. 58.806.000	89 kelompok	Rp. 51.246.000	- Rp. 7.560.000	efisiensi
02.01.01.02.01.22.016	Pengembangan Ternak Unggas	134 kelompok	Rp. 29.110.000	134 kelompok	Rp. 27.830.000	- Rp. 1.280.000	efisiensi
02.01.01.02.01.22.019	Pengembangan Produksi Semen Beku Sapi	3 kegiatan	Rp. 2.731.886.900	3 kegiatan	Rp. 2.715.406.900	- Rp. 16.480.000	efisiensi
02.01.01.02.01.22.024	Pelayanan Sertifikasi Bibit Ternak Kambing PE	30 Orang	Rp. 9.401.100	30 Orang	Rp. 6.901.100	- Rp. 2.500.000	efisiensi
02.01.01.02.01.22.025	Penumbuhan HMT di Lahan Marginal	3 kelompok	Rp. 74.900.000	3 kelompok	Rp. 74.421.400	- Rp. 478.600	efisiensi
02.01.01.02.01.24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		Rp. 492.287.400		Rp. 491.973.750	Rp. -313.650	
02.01.01.02.01.24.009	Kaji Terap Teknologi Pengolahan Pakan	4 kegiatan	Rp. 492.287.400	4 kegiatan	Rp. 491.973.750	- Rp. 313.650	efisiensi
02.01.01.02.01.25	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani		Rp. 173.670.650		Rp. 172.178.650	Rp. -1.492.000	
02.01.01.02.01.25.015	Pengkajian Diklat	3 judul	Rp. 20.881.700	3 judul	Rp. 20.036.700	- Rp. 845.000	efisiensi
02.01.01.02.01.25.037	Diklat Budaya dan Pengelolaan HMT	30 Orang	Rp. 33.389.600	30 Orang	Rp. 33.254.600	- Rp. 135.000	efisiensi
02.01.01.02.01.25.038	Diklat Inseminasi Buatan Kambing	2 kegiatan	Rp. 119.399.350	2 kegiatan	Rp. 118.887.350	- Rp. 512.000	efisiensi

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.267.460.910			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Pilihan						
02.01	Pertanian						
02.01.02	Dinas Kehutanan dan Perkebunan						
02.01.02.02.02.26	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan		Rp. 992.640.600		Rp. 1.087.205.600	Rp. 94.565.000	
02.01.02.02.02.26.002	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Perkebunan	3 kegiatan	Rp. 67.237.300	3 kegiatan	Rp. 65.077.300	- Rp. 2.160.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.006	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	1 Paket	Rp. 106.066.000	1 Paket	Rp. 153.566.000	Rp. 47.500.000	1. Pembuatan tiang dudukan paranet : 1 unit 2. Pembuatan tiang dudukan cungkup bibit : 25 unit 3. Pengadaan kendaraan motor roda 3 : 1 unit"
02.01.02.02.02.26.008	Pemeliharaan Kebun Dinas	1 Paket	Rp. 40.744.500	1 Paket	Rp. 111.639.500	Rp. 70.895.000	1) merehabilitasi kebun Potrobayan yang terbakar 2) pembuatan rumah pengering kakao ukuran 4x6 m2
02.01.02.02.02.26.010	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air (Cukai)	2 kegiatan	Rp. 36.485.350	2 kegiatan	Rp. 33.875.350	- Rp. 2.610.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.011	Perlindungan Perbenihan Varietas Unggul/ Lokal (cukai)	3 angkatan	Rp. 29.801.950	3 angkatan	Rp. 28.901.950	- Rp. 900.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.012	SL PPHP Tembakau (cukai)	3 angkatan	Rp. 75.251.550	3 angkatan	Rp. 69.696.550	- Rp. 5.555.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.013	Pelatihan Teknis Budidaya Perkebunan Sesuai GAP (cukai)	2 angkatan	Rp. 129.528.000	2 angkatan	Rp. 128.848.000	- Rp. 680.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.014	Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Perkebunan	2 kegiatan	Rp. 54.950.000	2 kegiatan	Rp. 53.350.000	- Rp. 1.600.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.018	Intensifikasi Tanaman Perkebunan pada Lahan Marginal	100 Ha	Rp. 20.163.000	100 Ha	Rp. 18.663.000	- Rp. 1.500.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.019	Pengawasan dan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	2 kegiatan	Rp. 24.297.700	2 kegiatan	Rp. 22.797.700	- Rp. 1.500.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.020	Peramalan, Pengamatan, Analisa dan Rekomendasi Pengendalian OPT Perkebunan	32 lokasi	Rp. 40.000.000	32 lokasi	Rp. 36.825.000	- Rp. 3.175.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.022	Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	3 kegiatan	Rp. 197.372.750	3 kegiatan	Rp. 194.122.750	- Rp. 3.250.000	efisiensi
02.01.02.02.02.26.027	Pengembangan kelembagaan petani tembakau(cukai)	3 angkatan	Rp. 170.742.500	3 kegiatan	Rp. 169.842.500	- Rp. 900.000	efisiensi
02.02	Kehutanan						

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.267.460.910			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan						
02.02.01.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 638.703.800		Rp. 708.401.210	Rp. 69.697.410	
02.02.01.02.02.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1 tahun	Rp. 311.000.000	1 tahun	Rp. 332.500.000	Rp. 21.500.000	1) Biaya Langganan Listrik Kantor BP3KP 2) Biaya Langganan Air Kantor BKPH Yogyakarta 3) Biaya Langganan Listrik untuk kebutuhan Pabrik Sendangmole dan Pabrik Gelaran 4) Biaya Langganan Listrik Tahura Bunder
02.02.01.02.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	Rp. 93.565.850	1 Paket	Rp. 99.065.850	Rp. 5.500.000	Pembelian ATK untuk sarana kearsipan
02.02.01.02.02.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Rp. 92.892.150	1 Paket	Rp. 103.392.150	Rp. 10.500.000	Barang cetakan untuk kelengkapan kearsipan
02.02.01.02.02.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	1 tahun	Rp. 140.045.800	1 tahun	Rp. 172.003.210	Rp. 31.957.410	pembayaran honorarium PTT baru tersedia 11 bulan seharusnya 13 bulan
02.02.01.02.02.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	1 tahun	Rp. 1.200.000	1 tahun	Rp. 1.440.000	Rp. 240.000	Kenaikan biaya retribusi sampah bulanan
02.02.01.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 1.668.239.400		Rp. 2.307.905.800	Rp. 639.666.400	
02.02.01.02.02.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4 jenis	Rp. 94.933.600	7 jenis	Rp. 217.933.600	Rp. 123.000.000	1) Pemasangan penangkal petir 3 titik/unit 2) Pemasangan listrik dan PAM untuk kantor RPH Menggoro 3) Pemasangan listrik dan PAM untuk kantor RPH Kenet
02.02.01.02.02.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 kegiatan	Rp. 214.999.500	7 kegiatan	Rp. 399.999.500	Rp. 185.000.000	1) Penataan ruangan kerja sub bagian tata usaha Balai KPH Yogyakarta 2) Perbaikan kantor BDH Paliyan bagian atap, dinding, dan lantai 3) Perbaikan naungan air hujan Pabrik Dlingo
02.02.01.02.02.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8 kegiatan	Rp. 499.797.000	8 kegiatan	Rp. 497.091.500	- Rp. 2.705.500	efisiensi
02.02.01.02.02.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	Rp. 50.000.000	6 jenis	Rp. 70.000.000	Rp. 20.000.000	Pengadaan LCD Proyektor dan UPS untuk Dinas Induk
02.02.01.02.02.02.034	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Pengolahan Minyak Kayu Putih	1 Paket	Rp. 265.000.000	1 Paket	Rp. 297.000.000	Rp. 32.000.000	1) Pemeliharaan bagian cerobong, boiler/ketel uang, ketel masak pada Pabrik Gelaran 2) Pemeliharaan bagian pipa pendingin pada Pabrik kediwung
02.02.01.02.02.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	3 kegiatan	Rp. 543.509.300	5 kegiatan	Rp. 825.881.200	Rp. 282.371.900	Rehab gudang briket dan atap persemaian Bunder
02.02.01.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp. 15.000.000		Rp. 14.449.000	Rp. -551.000	
02.02.01.02.02.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	2 kegiatan	Rp. 15.000.000	2 kegiatan	Rp. 14.449.000	- Rp. 551.000	efisiensi
02.02.01.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 211.754.000		Rp. 203.559.500	Rp. -8.194.500	

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.267.460.910			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.02.01.02.02.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 dokumen	Rp. 16.754.000	2 dokumen	Rp. 14.159.500	- Rp. 2.594.500	efisiensi
02.02.01.02.02.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	10 dokumen	Rp. 195.000.000	10 dokumen	Rp. 189.400.000	- Rp. 5.600.000	efisiensi
02.02.01.02.02.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		Rp. 4.011.316.700		Rp. 4.076.440.300	Rp. 65.123.600	
02.02.01.02.02.15.002	Pengembangan Hutan Tanaman	2 kegiatan	Rp. 171.721.800	5 kegiatan	Rp. 196.171.800	Rp. 24.450.000	Pengadaan GPS, Clinometer, dan Phiband Sebagai alat perlengkapan dalam pembangunan kawasan hutan khususnya kegiatan pengembangan hutan tanaman
02.02.01.02.02.15.004	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	2 kegiatan	Rp. 45.000.000	2 kegiatan	Rp. 44.160.000	- Rp. 840.000	efisiensi
02.02.01.02.02.15.006	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	2 kegiatan	Rp. 17.857.300	2 kegiatan	Rp. 17.602.300	- Rp. 255.000	efisiensi
02.02.01.02.02.15.007	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	2 kegiatan	Rp. 77.806.500	2 kegiatan	Rp. 75.766.500	- Rp. 2.040.000	efisiensi
02.02.01.02.02.15.011	Inventarisasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Hutan AB	160 Ha	Rp. 24.260.400	160 Ha	Rp. 20.390.400	- Rp. 3.870.000	efisiensi
02.02.01.02.02.15.012	Optimalisasi Tanaman Kayu Putih	300 Ha	Rp. 1.473.864.800	300 Ha	Rp. 1.469.654.800	- Rp. 4.210.000	efisiensi
02.02.01.02.02.15.013	Orientasi dan Tata Batas Kawasan Hutan	34 km	Rp. 38.823.000	34 km	Rp. 36.171.000	- Rp. 2.652.000	efisiensi
02.02.01.02.02.15.016	Pengelolaan Sumber Benih Tanaman Kehutanan	2 kegiatan	Rp. 32.439.300	2 kegiatan	Rp. 30.216.900	- Rp. 2.222.400	efisiensi
02.02.01.02.02.15.019	Pengolahan/Penyulingan Minyak Kayu Putih	2 kegiatan	Rp. 2.049.880.500	2 kegiatan	Rp. 2.112.955.500	Rp. 63.075.000	1) Penyesuaian biaya angkut daun kayu putih dari lapangan/hutan ke pabrik 2) Penyesuaian harga BBM 3) Efisiensi Rp. 14.925.000,-
02.02.01.02.02.15.022	Pengelolaan Hutan Terpadu	100 pohon	Rp. 23.822.600	100 pohon	Rp. 23.042.600	- Rp. 780.000	efisiensi
02.02.01.02.02.15.028	Inventarisasi Tanaman Kehutanan	526 Ha	Rp. 55.840.500	526 Ha	Rp. 50.308.500	- Rp. 5.532.000	efisiensi
02.02.01.02.02.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Rp. 2.200.940.850		Rp. 3.638.075.850	Rp. 1.437.135.000	
02.02.01.02.02.16.002	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	612500 batang	Rp. 390.189.650	612500 batang	Rp. 387.729.650	- Rp. 2.460.000	efisiensi Rp. 4.960.000,- dan Penyesuaian harga BBM untuk mesin generator pompa air
02.02.01.02.02.16.005	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3 kegiatan	Rp. 73.972.200	3 kegiatan	Rp. 1.055.302.200	Rp. 981.330.000	1. Bantuan Hibah untuk Fasilitasi Saprodi Tanaman Tumpangsari di Bawah Tegakan : a. 9 KTH pada 3 BDH b. 50 KTH luar kawasan (hutan rakyat) masing-masing kelompok Rp 15.000.000,- 2. Bantuan Hibah Fasilitasi Tanaman Perindang 1 KT @ Rp 32.500.000,- 3. Dana Pendukung untuk pembinaan dan koordinasi dengan kelompok tani Rp 65.280.000,- 4. Efisiensi Rp. 1.450.000,-
02.02.01.02.02.16.006	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	6 angkatan	Rp. 37.195.100	6 angkatan	Rp. 36.355.100	- Rp. 840.000	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.267.460.910			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.02.01.02.02.16.008	Pemeliharaan Kebun Pangkas	1300 batang	Rp. 18.150.000	1300 batang	Rp. 17.950.000	- Rp. 200.000	efisiensi
02.02.01.02.02.16.010	Rehabilitasi Hutan Konservasi (DAK)	1 Paket	Rp. 1.248.982.350	1 Paket	Rp. 1.332.692.350	Rp. 83.710.000	Efisiensi Rp. 4.290.000,- dan Pemanfaatan anggaran sisa DAK Tahun Anggaran 2012 & 2011
02.02.01.02.02.16.011	Optimalisasi Peran Pesanggem dalam Pengelolaan Hutan	2 kegiatan	Rp. 97.936.400	2 kegiatan	Rp. 476.631.400	Rp. 378.695.000	1) Bantuan hibah fasilitasi saprodi tanaman tumpangsari 20 kelompok 2) Dana pendukung untuk koordinasi dan pembinaan kelompok 3) Efisiensi Rp. 1.540.000,-
02.02.01.02.02.16.017	Konservasi sumber mata air	11480 batang	Rp. 100.090.100	11480 batang	Rp. 98.990.100	- Rp. 1.100.000	efisiensi
02.02.01.02.02.16.018	pengembangan konservasi alam wana lestari	4 kegiatan	Rp. 234.425.050	4 kegiatan	Rp. 232.425.050	- Rp. 2.000.000	efisiensi
02.02.01.02.02.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		Rp. 884.662.700		Rp. 887.006.700	Rp. 2.344.000	
02.02.01.02.02.17.001	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	2 kegiatan	Rp. 25.000.000	2 kegiatan	Rp. 24.554.000	- Rp. 446.000	efisiensi
02.02.01.02.02.17.005	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan	10 angkatan	Rp. 26.897.900	10 angkatan	Rp. 26.197.900	- Rp. 700.000	efisiensi
02.02.01.02.02.17.007	Perlindungan Hutan	5 kegiatan	Rp. 642.092.300	6 kegiatan	Rp. 650.532.300	Rp. 8.440.000	Efisiensi Rp. 6.860.000,- dan Fasilitasi Perlengkapan Petugas Lapangan berupa sepatu : 75 orang
02.02.01.02.02.17.008	Pengamanan Hutan	3 kegiatan	Rp. 190.672.500	3 kegiatan	Rp. 185.722.500	- Rp. 4.950.000	efisiensi
02.02.01.02.02.19	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan		Rp. 101.921.400		Rp. 94.566.400	Rp. -7.355.000	
02.02.01.02.02.19.006	Penatausahaan dan Penertiban peredaran hasil hutan	3 kegiatan	Rp. 82.506.400	3 kegiatan	Rp. 78.631.400	- Rp. 3.875.000	efisiensi
02.02.01.02.02.19.007	Audit Peredaran Hasil Hutan dan Industri Primer	2 kegiatan	Rp. 19.415.000	2 kegiatan	Rp. 15.935.000	- Rp. 3.480.000	efisiensi
02.02.01.02.02.20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan		Rp. 163.041.600		Rp. 138.071.600	Rp. -24.970.000	
02.02.01.02.02.20.003	Penyusunan Rencana Teknik Tahunan	3 kegiatan	Rp. 79.963.600	3 kegiatan	Rp. 65.493.600	- Rp. 14.470.000	efisiensi
02.02.01.02.02.20.005	Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Hutan	3 kegiatan	Rp. 83.078.000	3 kegiatan	Rp. 72.578.000	- Rp. 10.500.000	efisiensi

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pariwisata				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 358.871.139			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Pilihan						
02.04	Pariwisata						
02.04.01	Dinas Pariwisata						
02.04.01.02.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 73.000.000		Rp. 80.631.856	Rp. 7.631.856	
02.04.01.02.04.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	100 %	Rp. 25.000.000	100 %	Rp. 29.500.000	Rp. 4.500.000	Penambahan cetak buku RIPPADA sebanyak 100 buku @ Rp.45.000 karena banyak permintaan
02.04.01.02.04.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/ Tempat Kerja	100 %	Rp. 48.000.000	100 %	Rp. 51.131.856	Rp. 3.131.856	Penyesuaian UMP
02.04.01.02.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 375.000.000		Rp. 468.805.000	Rp. 93.805.000	
02.04.01.02.04.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	Rp. 125.000.000	100 %	Rp. 173.455.000	Rp. 48.455.000	- Penambahan pengadaan AC Split sebanyak 5 buah, untuk aula 4 buah dan 1 buah untuk subbag umum. - Penambahan bendera karena pada tanggal 17 Agustus 2013 akan ada peresmian videotron di halaman depan Dinas Pariwisata DIY oleh Gubernur
02.04.01.02.04.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	Rp. 50.000.000	100 %	Rp. 78.000.000	Rp. 28.000.000	Pengadaan: - Mesin Ketik Manual (2) : Kebutuhan SPJ - Laptop (1) untuk presentasi penerimaan kunjungan tamu dinas - Printer Epson LQ2190 (1) : untuk membuat daftar gaji pada subbag keuangan - Printer (1) untuk operasional kantor pada Subbag Keuangan - TV LED 39"" (1) : untuk kegiatan pameran
02.04.01.02.04.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100 %	Rp. 200.000.000	100 %	Rp. 217.350.000	Rp. 17.350.000	- Beberapa daun pintu ruangan sudah rusak, yaitu di ruang Kepala Dinas, dan ruang kapasitas. - Perlu pembuatan gorong2 karena kurangnya saluran pembuangan air hujan, sehingga kantor sering banjir bila hujan deras. - Perbaikan tangga Billboard
02.04.01.02.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 91.476.900		Rp. 64.771.150	Rp. -26.705.750	
02.04.01.02.04.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	100 %	Rp. 56.626.900	100 %	Rp. 49.409.150	- Rp. 7.217.750	Efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pariwisata				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 358.871.139			
Kode	Urusan/Program /kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.04.01.02.04.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	100 %	Rp. 34.850.000	100 %	Rp. 15.362.000	- Rp. 19.488.000	Efisiensi
02.04.01.02.04.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Rp. 1.563.356.640		Rp. 1.826.126.273	Rp. 262.769.633	
02.04.01.02.04.15.002	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	35 %	Rp. 25.966.900	35 %	Rp. 24.966.900	- Rp. 1.000.000	Satu E-kios di TIS (Tourist Information Service) Bandara sudah rusak/tidak berfungsi, ditarik ke Dinas dan akan diusulkan penghapusan
02.04.01.02.04.15.005	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	35 %	Rp. 1.362.102.300	35 %	Rp. 1.608.327.300	Rp. 246.225.000	1. Pada thn 2013, ada peraturan baru dari manajemen perusahaan Air Asia bahwa pemuatan iklan promosi full page dengan harga Rp 75.000.000. (dahulu diperbolehkan 1/2 page dengan harga Rp 35.000.000), sehingga perlu penambahan biaya Rp 45.000.000 menjadi Rp 150.000.000 untuk 2 full page. 2. Pameran pada event TITEX Jogja dibatalkan, dan digantikan dengan keikutsertaan pada event Jogja TTI Expo 2013 karena berpeluang menarik lebih banyak pengunjung (TITEX Jogja pelaksanaannya di Gedung Wanita sedang Jogja TTI Expo 2013 pelaksanaannya di Ambarukmo Plaza) 3. Promosi melalui Jakarta Post
02.04.01.02.04.15.010	Penyusunan dan Penerbitan Tabloid Pariwisata	35 %	Rp. 35.827.590	35 %	Rp. 35.827.590	Rp. 0	Penambahan cetak tabloid dari 500 eksemplar/edisi menjadi 1.000 eksemplar/edisi
02.04.01.02.04.15.011	Pengelolaan Pelayanan Informasi Pariwisata	35 %	Rp. 139.459.850	35 %	Rp. 157.004.483	Rp. 17.544.633	Penyesuaian UMP DIY : 2.544,633 dan biaya pengiriman gebyok (1 buah Gebyok Tengah 3,2 M X 3,10 M, Gebyok partisi 2 buah samping kanan kiri : 2,2 M X 130 M; 2,2 M X 160 M; 2,2 M X 120 M
02.04.01.02.04.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Rp. 1.199.354.300		Rp. 1.199.354.300	Rp. 0	
02.04.01.02.04.16.002	Peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana Pariwisata	35 %	Rp. 1.199.354.300	35 %	Rp. 1.199.354.300	Rp. 0	Pembangunan kios kuliner dibatalkan karena akan ada relokasi, maka dialihkan menjadi pembangunan gazebo
02.04.01.02.04.17	Program Pengembangan Kemitraan		Rp. 3.205.581.400		Rp. 3.226.951.800	Rp. 21.370.400	
02.04.01.02.04.17.008	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	30 %	Rp. 34.945.100	30 %	Rp. 34.345.100	- Rp. 600.000	Efisiensi
02.04.01.02.04.17.013	Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kepariwisataaan	30 %	Rp. 1.072.186.500	30 %	Rp. 1.094.161.400	Rp. 21.974.900	Anggaran penyelenggaraan Jogja Java Carnival (JJC) 2013 Kota Yogyakarta tidak jadi dilaksanakan maka Fasilitasi dari Dinas Pariwisata DIY sebesar Rp 31.505.000,- digunakan untuk pelaksanaan Nglanggeran Culture Festival sebesar Rp 55.129.000, sehingga perlu penambahan anggaran sebesar Rp 23.624.000,- dan adanya Efisiensi Rp 1.649.100,-
02.04.01.02.04.17.015	Penyelenggaraan Event Keperiwisataaan	30 %	Rp. 2.098.449.800	30 %	Rp. 2.098.445.300	- Rp. 4.500	Efisiensi

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.849.367.840			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Pilihan						
02.05	Kelautan dan Perikanan						
02.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan						
02.05.01.02.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 603.896.640		Rp. 689.546.640	Rp. 85.650.000	
02.05.01.02.05.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	Rp. 298.952.000	1 tahun	Rp. 351.352.000	Rp. 52.400.000	Kenaikan TDL dan Peningkatan daya listrik di BAT Cangkringan dan Lab PHPI untuk menunjang kegiatan produksi/operasional
02.05.01.02.05.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	Rp. 80.942.000	12 bulan	Rp. 80.542.000	- Rp. 400.000	efisiensi
02.05.01.02.05.01.011	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Rp. 11.550.000	1 Paket	Rp. 17.900.000	Rp. 6.350.000	Penambahan untuk penggandaan Laporan bulanan keuangan dan Laporan bulanan kepegawaian
02.05.01.02.05.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2 jenis	Rp. 1.116.000	2 jenis	Rp. 1.296.000	Rp. 180.000	Pembayaran kekurangan berlangganan koran
02.05.01.02.05.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1 tahun	Rp. 40.500.000	1 tahun	Rp. 49.500.000	Rp. 9.000.000	untuk memenuhi 6 kegiatan rapat yang belum teranggarkan, yaitu: Forum HSNI, Forum Pakan Alternatif, Forum Sidat, Koordinasi Hibah, Rapat Perjanjian Kerjasama PP Tanjung Adikarto
02.05.01.02.05.01.022	Penyediaan jasa keamanan kantor/ gedung/ tempat kerja	1 tahun	Rp. 169.636.640	1 tahun	Rp. 187.636.640	Rp. 18.000.000	Pembayaran Kekurangan Honor PTT SK Gubernur (penyesuaian dengan UMP) sejumlah Rp. 18.000.000,- di UPTD BPTKP. Terjadi kesalahan kode rekening uang makan 5.2.1.02.02 yang seharusnya 5.2.2.11.01 di UPTD PPP
02.05.01.02.05.01.026	Penyediaan retribusi sampah	1 tahun	Rp. 1.200.000	1 tahun	Rp. 1.320.000	Rp. 120.000	Kenaikan biaya retribusi sampah
02.05.01.02.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 1.562.015.692		Rp. 2.360.355.692	Rp. 798.340.000	
02.05.01.02.05.02.003	Pembangunan gedung kantor	1 Paket	Rp. 806.446.000	2 Paket	Rp. 931.446.000	Rp. 125.000.000	Pembangunan Mushola di UPTD BPTKP
02.05.01.02.05.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 -	Rp. 0	9 unit	Rp. 516.000.000	Rp. 516.000.000	Pengadaan kendaraan dinas untuk: Dinas Induk (2 unit kend roda 2), BPTKP (5 unit kend roda 2 dan 1 unit kend roda 4), PPP (1 unit kend dinas roda 4)
02.05.01.02.05.02.010	Pengadaan mebeleur	1 jenis	Rp. 5.595.000	3 jenis	Rp. 23.385.000	Rp. 17.790.000	penggantian meja dan kursi eselon 3
02.05.01.02.05.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 Paket	Rp. 50.000.000	2 Paket	Rp. 59.550.000	Rp. 9.550.000	Efisiensi Rp. 450.000,- dan Perbaikan kerusakan atap rumah andon yang tertiup angin puting beliung
02.05.01.02.05.02.042	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	7 Paket	Rp. 699.974.692	9 Paket	Rp. 829.974.692	Rp. 130.000.000	1. Penambahan pagar batako di BAL Sundak sesuai rekomendasi Inspektorat untuk pengamanan aset Rp 100 jt 2. Perbaikan/penggantian Pipa Air Minum yang bocor Rp 30 jt

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.849.367.840			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.05.01.02.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 188.491.400		Rp. 325.591.400	Rp. 137.100.000	
02.05.01.02.05.06.018	Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi	13 kegiatan	Rp. 169.565.000	13 kegiatan	Rp. 156.665.000	- Rp. 12.900.000	efisiensi
02.05.01.02.05.06.019	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	5 laporan	Rp. 18.926.400	6 laporan	Rp. 168.926.400	Rp. 150.000.000	evaluasi hibah tahun 2012 dan 2013
02.05.01.02.05.19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat		Rp. 104.999.100		Rp. 110.751.100	Rp. 5.752.000	
02.05.01.02.05.19.004	Penyelenggaraan hari nusantara	3 kegiatan	Rp. 104.999.100	3 kegiatan	Rp. 110.751.100	Rp. 5.752.000	penyesuaian perjalanan dinas luar dengan SHBJ karena saat pembahasan RKA dan draft DPA, lokasi hari nusantara tk nasional th 2013 belum ditetapkan
02.05.01.02.05.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		Rp. 7.515.762.454		Rp. 8.025.651.294	Rp. 509.888.840	
02.05.01.02.05.20.003	Pembinaan dan pengembangan perikanan	7 kegiatan	Rp. 2.839.209.600	7 kegiatan	Rp. 3.307.925.100	Rp. 468.715.500	perubahan kelompok penerima hibah serta tambahan hibah Rp. 25.820.000,- untuk budidaya lele, Rp. 318.435.500,- untuk budidaya cacing sutra, serta Rp. 125.000.000,- untuk pelatihan budidaya sidat
02.05.01.02.05.20.004	Pengendalian hama dan penyakit ikan	3 kegiatan	Rp. 124.829.440	5 kegiatan	Rp. 145.799.440	Rp. 20.970.000	Efisiensi Rp. 3.030.000,- Penambahan berupa : 1.Cetak Buku Catatan Budidaya 500 eksp 2.Cetak Buku SPO Budidaya 500 eksp 3.Cetak Stopmap Snel Plastik untuk Fasilitasi Kelompok CBIB dan CPIB 1000 eksp 4.Perjalanan Sertifikasi CBIB
02.05.01.02.05.20.009	Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Laut	2 kegiatan	Rp. 259.624.880	2 kegiatan	Rp. 269.174.880	Rp. 9.550.000	Efisiensi Rp. 450.000,-. Pembelian kabel listik 3 phase 200 m untuk menghubungkan pompa pinggir laut ke trafo
02.05.01.02.05.20.010	Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Payau	3 kegiatan	Rp. 2.944.963.700	3 kegiatan	Rp. 2.950.723.700	Rp. 5.760.000	Pembelian selang spiral 4" untuk melengkapi pengadaan pompa air
02.05.01.02.05.20.015	Pembinaan Mutu Benih Dan Induk Perikanan	2 kegiatan	Rp. 249.241.800	2 kegiatan	Rp. 247.881.800	- Rp. 1.360.000	efisiensi
02.05.01.02.05.20.018	Pelayanan & Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	84 Sampel	Rp. 90.000.000	84 Sampel	Rp. 89.986.000	- Rp. 14.000	efisiensi
02.05.01.02.05.20.019	Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Tawar	2 kegiatan	Rp. 1.007.893.034	2 kegiatan	Rp. 1.014.160.374	Rp. 6.267.340	Efisiensi Rp. 232.660,-. Pembayaran Kekurangan Honor PTT SK Gubernur
02.05.01.02.05.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		Rp. 3.397.858.390		Rp. 3.698.790.390	Rp. 300.932.000	
02.05.01.02.05.21.012	Peningkatan pelayanan pelabuhan Sadeng	30 Orang	Rp. 21.508.740	30 Orang	Rp. 20.228.740	- Rp. 1.280.000	efisiensi
02.05.01.02.05.21.014	Uji coba pengembangan teknologi alat penangkapan ikan	100 %	Rp. 62.000.000	100 %	Rp. 61.916.000	- Rp. 84.000	efisiensi

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan				Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.849.367.840			
Kode	Urusan/Program/kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
02.05.01.02.05.21.015	Pengadaan Kapal 30 GT Bagi Nelayan (DAK)	1 Paket	Rp. 2.514.007.650	2 Paket	Rp. 2.819.817.650	Rp. 305.810.000	Penambahan Belanja Hibah berupa Alat Tangkap Ikan Gillnet Multifilamen (menangkap pelagis kecil) untuk melengkapi kapal
02.05.01.02.05.21.017	Pembinaan dan Pengembangan perikanan tangkap	75 Orang	Rp. 730.342.000	75 Orang	Rp. 726.912.000	- Rp. 3.430.000	efisiensi
02.05.01.02.05.21.019	Uji coba optimalisasi sistem rantai dingin	100 %	Rp. 70.000.000	100 %	Rp. 69.916.000	- Rp. 84.000	efisiensi
02.05.01.02.05.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		Rp. 799.665.150		Rp. 686.370.150	Rp. -113.295.000	
02.05.01.02.05.23.005	Pelatihan Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan	3 kegiatan	Rp. 98.718.100	3 kegiatan	Rp. 80.768.100	- Rp. 17.950.000	efisiensi
02.05.01.02.05.23.007	Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	3 kegiatan	Rp. 185.000.000	3 kegiatan	Rp. 167.900.000	- Rp. 17.100.000	efisiensi
02.05.01.02.05.23.008	Pengembangan Pola Kemitraan antar pelaku usaha kelautan dan perikanan	40 Orang	Rp. 41.986.000	40 Orang	Rp. 38.336.000	- Rp. 3.650.000	efisiensi
02.05.01.02.05.23.010	Promosi Perikanan dan Kelautan (Pameran)	4 Kali	Rp. 156.465.000	4 Kali	Rp. 146.065.000	- Rp. 10.400.000	efisiensi
02.05.01.02.05.23.016	Optimalisasi Pemasaran Produk Perikanan	11 kegiatan	Rp. 167.496.050	11 kegiatan	Rp. 125.316.050	- Rp. 42.180.000	efisiensi
02.05.01.02.05.23.017	Pengembangan Jaringan Pemasaran Hasil Perikanan	3 kegiatan	Rp. 150.000.000	3 kegiatan	Rp. 127.985.000	- Rp. 22.015.000	efisiensi
02.05.01.02.05.24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		Rp. 435.830.000		Rp. 560.830.000	Rp. 125.000.000	
02.05.01.02.05.24.005	Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Tawar	4 kegiatan	Rp. 435.830.000	5 kegiatan	Rp. 560.830.000	Rp. 125.000.000	Penambahan untuk penyiapan Rilis Strain Ikan Mas Merah Cangkringan

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2013 beserta perubahannya agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X